



**BAGIAN ANGGARAN 010**

# **LAPORAN KEUANGAN KEMENDAGRI SEMESTER I TAHUN 2025**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
30 JUNI 2025**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7  
JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 3450038  
WEBSITE : [WWW.KEMENDAGRI.GO.ID](http://WWW.KEMENDAGRI.GO.ID)**

# **BAGIAN ANGGARAN 010**



**LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
SEMESTER I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT**



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 31 Juli 2025

**MENTERI DALAM NEGERI,**



**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	xiv
Pernyataan Telah Direviu	xv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	60
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	99
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	128
F. Pengungkapan Penting Lainnya	134
G. Penutup	138
VI. Lampiran dan Daftar	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Pagu dan Realisasi Belanja untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 30 Juni 2025	8
Tabel 2 : Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I	12
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	19
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 5 : Kriteria Kualitas Piutang	23
Tabel 6 : Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2024	24
Tabel 7 : Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	24
Tabel 8 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2025 per Kode MAP	25
Tabel 9 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2025 per Eselon I	26
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi PNBPN Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 per Eselon I	26
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	27
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program s.d. 30 Juni 2025	28
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 per Unit Eselon I	29
Tabel 14 : Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	29
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Neto s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	30
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	30
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	31

Tabel 18	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	32
Tabel 19	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	32
Tabel 20	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	33
Tabel 21	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	33
Tabel 22	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	33
Tabel 23	:	Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	34
Tabel 24	:	Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	35
Tabel 25	:	Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan per Eselon I s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	35
Tabel 26	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2025	56
Tabel 27	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional I	57
Tabel 28	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional II	57
Tabel 29	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional III	57
Tabel 30	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional IV	58
Tabel 31	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional V	58
Tabel 32	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VI	58
Tabel 33	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VII	59
Tabel 34	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VIII	59

Tabel 35	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	60
Tabel 36	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	61
Tabel 37	: Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan	61
Tabel 38	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	62
Tabel 39	: Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	67
Tabel 40	: Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	67
Tabel 41	: Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap per 30 Juni 2025	68
Tabel 42	: Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I	69
Tabel 43	: Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima	69
Tabel 44	: Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I	70
Tabel 45	: Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi	71
Tabel 46	: Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak	72
Tabel 47	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	73
Tabel 48	: Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	74
Tabel 49	: Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2025	74
Tabel 50	: Rincian Persediaan	75
Tabel 51	: Rincian Persediaan per Unit Eselon I	75
Tabel 52	: Mutasi Persediaan	76
Tabel 53	: Rincian Tanah per Unit Eselon I	77
Tabel 54	: Rincian Mutasi Tanah	78
Tabel 55	: Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I	79
Tabel 56	: Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	79
Tabel 57	: Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I	81
Tabel 58	: Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	82

Tabel 59	: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I	83
Tabel 60	: Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	83
Tabel 61	: Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I	84
Tabel 62	: Mutasi Aset Tetap Lainnya	84
Tabel 63	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I	85
Tabel 64	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	86
Tabel 65	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	87
Tabel 66	: Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I	87
Tabel 67	: Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2025	88
Tabel 68	: Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I	89
Tabel 69	: Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025	90
Tabel 70	: Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	90
Tabel 71	: Mutasi Aset Tak Berwujud	91
Tabel 72	: Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 30 Juni 2025	92
Tabel 73	: Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I	93
Tabel 74	: Mutasi Aset Lain-Lain	93
Tabel 75	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	94
Tabel 76	: Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I	95
Tabel 77	: Utang Yang Belum Ditagihkan per Unit Eselon I	96
Tabel 78	: Hibah Yang Belum Disahkan	97
Tabel 79	: Pendapatan Diterima di Muka	97
Tabel 80	: Utang Jangka Pendek Lainnya	98
Tabel 81	: Perbandingan Rincian PNBPN Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	99
Tabel 82	: Selisih PNBPN antara Basis Kas dan Basis Akrua	100

Tabel 83	: Perbandingan Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	102
Tabel 84	: Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis AkruaI	103
Tabel 85	: Perbandingan Beban Persediaan Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	109
Tabel 86	: Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Semester I Tahun 2025	109
Tabel 87	: Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan Dengan Beban Persediaan	110
Tabel 88	: Perbandingan Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	111
Tabel 89	: Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis AkruaI	112
Tabel 90	: Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel	115
Tabel 91	: Perbandingan Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	116
Tabel 92	: Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis AkruaI	116
Tabel 93	: Penyajian Beban Pemeliharaan	117
Tabel 94	: Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan	118
Tabel 95	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dengan Tahun 2024	118
Tabel 96	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis AkruaI	119
Tabel 97	: Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	120
Tabel 98	: Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	121
Tabel 99	: Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	121
Tabel 100	: Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	122
Tabel 101	: Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	122

Tabel 102	: Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	123
Tabel 103	: Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	123
Tabel 104	: Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	123
Tabel 105	: Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	124
Tabel 106	: Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	124
Tabel 107	: Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024	125
Tabel 108	: Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrua	125
Tabel 109	: Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrua	127
Tabel 110	: Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 30 Juni 2025	129
Tabel 111	: Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 30 Juni 2025	131
Tabel 112	: Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya pada Tahun 2022	135
Tabel 113	: Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 30 Juni 2025	136
Tabel 114	: Rekapitulasi Total Aset Satker Inaktif Bersaldo per 30 Juni 2025	136

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto T.A. 2025 dan T.A 2024	Hal 28
----------	--	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. DAFTAR LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran Belanja
- Lampiran III : Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri sampai dengan 30 Juni 2025
- Lampiran IV : Laporan Capaian Output Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025
- Lampiran V : Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I
- Lampiran VI : Rincaian Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya, dan Setara Kas Per Satker
- Lampiran VII : Rekapitulasi Persediaan Per Satker Menurut Akun
- Lampiran VIII : Rincian Mutasi Persediaan Per Eselon I
- Lampiran IX : Rincian Mutasi Persediaan Per Akun
- Lampiran X : Daftar Persediaan Tidak dikuasai
- Lampiran XI : Rekapitulasi Aset Tetap Per Satker Per 30 Juni 2025
- Lampiran XII : Rincian Mutasi Tanah Per Unit Eselon I
- Lampiran XIII : Rincian Mutasi Peralatan Dan Mesin Per Unit Eselon I
- Lampiran XIV : Rincian Pembelian (101) Peralatan Dan Mesin Per Satker
- Lampiran XV : Rincian Mutasi Gedung Dan Bangunan Per Unit Eselon I

- Lampiran XVI : Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon I
- Lampiran XVII : Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
- Lampiran XVIII : Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker
- Lampiran XIX : Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Per Satuan Kerja Per 30 Juni 2025
- Lampiran XX : Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I
- Lampiran XXI : Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
- Lampiran XXII : Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga
- Lampiran XXIII : Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Per Satker
- Lampiran XXIV : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
- Lampiran XXV : Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk
- Lampiran XXVI : Rekapitulasi Satker Inaktif yang Saldonya Dialihkan ke Satker Pusat
- Lampiran XXVII : Rekapitulasi Ketidaksiuaian Kode Akun vs Kode BMN Kementerian Dalam Negeri Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025
- Lampiran XXVIII : Rincian Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51xxxx Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025
- Lampiran XXIX : Saldo Akun Utang yang belum Diterima Tagihannya Kementerian Dalam Negeri untuk Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025
- Lampiran XXX : Transaksi Resiprokal Kementerian Dalam Negeri untuk Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025
- Lampiran XXXI : Daftar Rekening Kementerian Dalam Negeri

## **B. DAFTAR LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN**

Lampiran Neraca Percobaan AkruaI Tingkat Kemendagri Per 1 Januari 2025

Lampiran Neraca Percobaan AkruaI Tingkat Kemendagri Per 30 Juni 2025

Lampiran Neraca Percobaan Kas Tingkat Kemendagri Per 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sepanjang sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan selaku Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Juli 2025

**MENTERI DALAM NEGERI,**



**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391  
Fax. (021) 384 9422 Website: [www.itjen.kemendagri.go.id](http://www.itjen.kemendagri.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KEUANGAN BA 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor: 700.1.2.8/1756/IJ

Kami telah mereviu Laporan Keuangan BA 010 Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat Entitas Pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 30 Juli 2025  
Inspektur Jenderal,



S. M. Mahendra Jaya

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp557.149.961.952,00 atau mencapai 105,77% dari estimasi pendapatan sebesar Rp526.735.310.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.242.654.345.362,00 atau mencapai 25,93% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.792.328.518.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.010.872.964.374,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp524.829.179.421,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.368.714.173.625,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp388.952.261,00 dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya) sebesar Rp116.940.659.067,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp188.681.946.620,00 dan Rp16.822.191.017.754,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp678.696.870.631,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.490.032.064.378,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp811.335.193.747,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp15.857.416.705,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp795.477.777.042,00).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp16.905.781.871.164,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp795.477.777.042,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp167.722.513,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp711.719.201.119,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp16.822.191.017.754,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode pelaporan 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
<b>Pendapatan Perpajakan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Pajak Dalam Negeri		0	0	0,00	0
Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0,00	0
<b>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>B.1</b>	<b>526.735.310.000</b>	<b>557.149.961.952</b>	<b>105,77</b>	<b>421.479.958.963</b>
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0,00	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0,00	0
Pendapatan BLU		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		526.735.310.000	557.149.961.952	105,77	421.479.958.963
<b>Pendapatan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
		<b>526.735.310.000</b>	<b>557.149.961.952</b>	<b>105,77</b>	<b>421.479.958.963</b>
<b>BELANJA NEGARA</b>					
	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>		<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>25,93</b>	<b>1.616.038.249.934</b>
Belanja Pegawai	B.3	846.332.477.000	458.044.456.160	54,12	480.233.849.173
Belanja Barang	B.4	3.122.582.777.000	772.630.263.823	24,74	1.078.940.838.706
Belanja Modal	B.5	823.413.264.000	11.979.625.379	1,45	56.863.562.055
Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0
Belanja Subsidi		0	0	0,00	0
Belanja Hibah		0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Dana Perimbangan		0	0	0,00	0
Dana Transfer Umum		0	0	0,00	0
Dana Bagi Hasil		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Umum		0	0	0,00	0
Dana Transfer Khusus		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0,00	0
Dana Insentif Daerah		0	0	0,00	0
Dana Keistimewaan DIY		0	0	0,00	0
Dana Otonomi Khusus		0	0	0,00	0
Dana Desa		0	0	0,00	0
Hibah Kepada Daerah		0	0	0,00	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>					
		<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>25,93</b>	<b>1.616.038.249.934</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>526.735.310.000</b>	<b>557.149.961.952</b>	<b>30.414.651.952</b>	<b>105,77</b>	<b>696.221.815.000</b>	<b>421.479.958.963</b>	<b>(274.741.856.037)</b>	<b>60,54</b>
	1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	3. Pendapatan BLU	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	526.735.310.000	557.149.961.952	30.414.651.952	105,77	696.221.815.000	421.479.958.963	(274.741.856.037)	60,54
	<b>III. Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I+A.II+A.III)</b>	<b>526.735.310.000</b>	<b>557.149.961.952</b>	<b>30.414.651.952</b>	<b>105,77</b>	<b>696.221.815.000</b>	<b>421.479.958.963</b>	<b>(274.741.856.037)</b>	<b>60,54</b>
	<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>(3.549.674.172.638)</b>	<b>25,93</b>	<b>5.036.237.473.000</b>	<b>1.616.038.249.934</b>	<b>(3.420.199.223.066)</b>	<b>32,09</b>
	1. Belanja Pegawai	846.332.477.000	458.044.456.160	(388.288.020.840)	54,12	954.255.697.000	480.233.849.173	(474.021.847.827)	50,33
	2. Belanja Barang	3.122.582.777.000	772.630.263.823	(2.349.952.513.177)	24,74	3.585.623.511.000	1.078.940.838.706	(2.506.682.672.294)	30,09
	3. Belanja Modal	823.413.264.000	11.979.625.379	(811.433.638.621)	1,45	496.358.265.000	56.863.562.055	(439.494.702.945)	11,46
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	5. Belanja Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	6. Belanja Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>II. Transfer ke Daerah</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	4. Dana Otonomi Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	6. Dana Desa	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	7. Insentif Fiskal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>Jumlah Belanja Negara (B.I+B.II)</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>(3.549.674.172.638)</b>	<b>25,93</b>	<b>5.036.237.473.000</b>	<b>1.616.038.249.934</b>	<b>(3.420.199.223.066)</b>	<b>32,09</b>
	<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini



Jakarta, 31 Juli 2025  
Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian



# NERACA

## II. NERACA

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	31 Desember 2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	13.592.123.484	112.599.303
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	19.635.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	67.231.484.326	64.956.638.835
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	-	299.007.100
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	91.951.450	94.651.450
Piutang Bukan Pajak	C.6	12.519.196.733	12.640.675.594
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(11.001.494.430)	(11.043.686.930)
Bagian Lancar TP/TGR	C.8	-	300.680.096
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	-	(1.503.401)
Persediaan	C.10	442.376.282.858	338.870.256.976
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>524.829.179.421</b>	<b>406.229.319.023</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.11	13.251.627.720.522	13.251.627.720.522
Peralatan dan Mesin	C.12	4.158.347.882.906	4.156.760.195.772
Gedung dan Bangunan	C.13	2.924.241.004.290	2.922.592.918.649
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.14	299.781.474.142	299.793.586.980
Aset Tetap Lainnya	C.15	95.296.257.772	95.015.581.772
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.16	25.366.869.749	25.366.869.749
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(4.385.947.035.756)	(4.211.432.344.941)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>16.368.714.173.625</b>	<b>16.539.724.528.503</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	18.240.996.030	17.950.315.934
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.19	(17.852.043.769)	(17.850.590.368)
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>388.952.261</b>	<b>99.725.566</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.20	800.418.289.126	830.510.381.843
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	-	384.325.357.961
Aset Lain-Lain	C.22	211.486.817.179	182.864.064.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(894.964.447.238)	(875.727.657.235)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>116.940.659.067</b>	<b>521.972.147.069</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>17.010.872.964.374</b>	<b>17.468.025.720.161</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	99.289.466.640	401.816.267.044
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	72.981.429.276	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.26	2.556.839.500	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	160.307.263.241
Uang Muka dari KPPN	C.28	13.592.123.484	112.599.303
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	262.087.720	7.719.409
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>188.681.946.620</b>	<b>562.243.848.997</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>188.681.946.620</b>	<b>562.243.848.997</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.30	16.822.191.017.754	16.905.781.871.164
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>16.822.191.017.754</b>	<b>16.905.781.871.164</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>17.010.872.964.374</b>	<b>17.468.025.720.161</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**PER 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	13.592.123.484	112.599.303	13.479.524.181	11,971,23
Kas di Bendahara Penerimaan	19.635.000	0	19.635.000	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	67.231.484.326	64.956.638.835	2.274.845.491	3,50
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0	299.007.100	(299.007.100)	(100,00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	91.951.450	94.651.450	(2.700.000)	(2,85)
Piutang Bukan Pajak	12.519.196.733	12.640.675.594	(121.478.861)	(0,96)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(11.001.494.430)	(11.043.686.930)	42.192.500	(0,38)
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>1.517.702.303</b>	<b>1.596.988.664</b>	<b>(79.286.361)</b>	<b>(4,96)</b>
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	300.680.096	(300.680.096)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(1.503.401)	1.503.401	(100,00)
<b>BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>0</b>	<b>299.176.695</b>	<b>(299.176.695)</b>	<b>(100,00)</b>
Persediaan	442.376.282.858	338.870.256.976	103.506.025.882	30,54
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>524.829.179.421</b>	<b>406.229.319.023</b>	<b>118.599.860.398</b>	<b>29,20</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	13.251.627.720.522	13.251.627.720.522	0	0,00
Peralatan dan Mesin	4.158.347.882.906	4.156.760.195.772	1.587.687.134	0,04
Gedung dan Bangunan	2.924.241.004.290	2.922.592.918.649	1.648.085.641	0,06
Jalan Irigasi dan Jaringan	299.781.474.142	299.793.586.980	(12.112.838)	(0,00)
Aset Tetap Lainnya	95.296.257.772	95.015.581.772	280.676.000	0,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.366.869.749	25.366.869.749	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.385.947.035.756)	(4.211.432.344.941)	(174.514.690.815)	4,14
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>16.368.714.173.625</b>	<b>16.539.724.528.503</b>	<b>(171.010.354.878)</b>	<b>(1,03)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	18.240.996.030	17.950.315.934	290.680.096	1,62
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	(17.852.043.769)	(17.850.590.368)	(1.453.401)	0,01
<b>TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>388.952.261</b>	<b>99.725.566</b>	<b>289.226.695</b>	<b>290,02</b>
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>388.952.261</b>	<b>99.725.566</b>	<b>289.226.695</b>	<b>290,02</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**PER 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	800.418.289.126	830.510.381.843	(30.092.092.717)	(3,62)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	384.325.357.961	(384.325.357.961)	(100,00)
Aset Lain-lain	211.486.817.179	182.864.064.500	28.622.752.679	15,65
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(894.964.447.238)	(875.727.657.235)	(19.236.790.003)	2,20
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>116.940.659.067</b>	<b>521.972.147.069</b>	<b>(405.031.488.002)</b>	<b>(77,60)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>17.010.872.964.374</b>	<b>17.468.025.720.161</b>	<b>(457.152.755.787)</b>	<b>(2,62)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	99.289.466.640	401.816.267.044	(302.526.800.404)	(75,29)
Utang Yang Belum Ditagihkan	72.981.429.276	0	72.981.429.276	0,00
Hibah Yang Belum Disahkan	2.556.839.500	0	2.556.839.500	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	160.307.263.241	(160.307.263.241)	(100,00)
Uang Muka dari KPPN	13.592.123.484	112.599.303	13.479.524.181	11.971,23
Utang Jangka Pendek Lainnya	262.087.720	7.719.409	254.368.311	3.295,18
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>188.681.946.620</b>	<b>562.243.848.997</b>	<b>(373.561.902.377)</b>	<b>(66,44)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>188.681.946.620</b>	<b>562.243.848.997</b>	<b>(373.561.902.377)</b>	<b>(66,44)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	16.822.191.017.754	16.905.781.871.164	(83.590.853.410)	(0,49)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.822.191.017.754</b>	<b>16.905.781.871.164</b>	<b>(83.590.853.410)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.822.191.017.754</b>	<b>16.905.781.871.164</b>	<b>(83.590.853.410)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN</b>	<b>17.010.872.964.374</b>	<b>17.468.025.720.161</b>	<b>(457.152.755.787)</b>	<b>(2,62)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 31 Juli 2025  
Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



# LAPORAN OPERASIONAL

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	678.696.870.631	535.891.031.702
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>678.696.870.631</b>	<b>535.891.031.702</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	463.419.406.708	481.770.615.781
Beban Persediaan	D.3	7.124.632.133	8.627.185.346
Beban Barang dan Jasa	D.4	573.923.335.838	659.461.216.068
Beban Pemeliharaan	D.5	48.915.462.060	68.238.348.345
Beban Perjalanan Dinas	D.6	78.180.967.852	232.709.531.538
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	114.275.035.576	164.733.455.899
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	204.235.466.711	155.069.435.357
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(42.242.500)	648.961.284
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.490.032.064.378</b>	<b>1.771.258.749.618</b>
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		<b>(811.335.193.747)</b>	<b>(1.235.367.717.916)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	873.416.726	1.469.734.811
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		284.706.728	2.386.590.400
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		15.273.125.456	9.001.324.398
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.418.749	110.546.221
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		<b>15.857.416.705</b>	<b>7.973.922.588</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(795.477.777.042)</b>	<b>(1.227.393.795.328)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	D.11	0	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LO</b>		<b>(795.477.777.042)</b>	<b>(1.227.393.795.328)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	0	0	0	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	0	0	0	
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	
<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	678.696.870.631	535.891.031.702	142.805.838.929	26,648
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	678.696.870.631	535.891.031.702	142.805.838.929	26,648
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	0	0	0	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	678.696.870.631	535.891.031.702	142.805.838.929	26,648
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	0	0	0	
Beban Pegawai	463.419.406.708	481.770.615.781	(18.351.209.073)	(3,809)
Beban Persediaan	7.124.632.133	8.627.185.346	(1.502.553.213)	(17,416)
Beban Barang dan Jasa	573.923.335.838	659.461.216.068	(85.537.880.230)	(12,971)
Beban Pemeliharaan	48.915.462.060	68.238.348.345	(19.322.886.285)	(28,317)
Beban Perjalanan Dinas	78.180.967.852	232.709.531.538	(154.528.563.686)	(66,404)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	114.275.035.576	164.733.455.899	(50.458.420.323)	(30,630)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	204.235.466.711	155.069.435.357	49.166.031.354	31,706
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(42.242.500)	648.961.284	(691.203.784)	(106,509)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	1.490.032.064.378	1.771.258.749.618	(281.226.685.240)	(15,877)
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	(811.335.193.747)	(1.235.367.717.916)	424.032.524.169	(34,324)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET</b>	<b>588.709.998</b>	<b>(916.855.589)</b>	<b>1.505.565.587</b>	<b>(164,210)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset	873.416.726	1.469.734.811	(596.318.085)	(40,573)
Beban Pelepasan Aset	284.706.728	2.386.590.400	(2.101.883.672)	(88,071)
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>15.268.706.707</b>	<b>8.890.778.177</b>	<b>6.377.928.530</b>	<b>71,736</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15.273.125.456	9.001.324.398	6.271.801.058	69,676
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.418.749	110.546.221	(106.127.472)	(96,003)
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>15.857.416.705</b>	<b>7.973.922.588</b>	<b>7.883.494.117</b>	<b>98,866</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(795.477.777.042)</b>	<b>(1.227.393.795.328)</b>	<b>431.916.018.286</b>	<b>(35,190)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	<b>(795.477.777.042)</b>	<b>(1.227.393.795.328)</b>	<b>431.916.018.286</b>	<b>(35,190)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 31 Juli 2025  
Menteri Dalam Negeri,  
  
Muhammad Tito Karnavian



# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	16.905.781.871.164	16.599.721.292.944
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(795.477.777.042)	(1.227.393.795.328)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	167.722.513	(808.712.918)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	167.722.513	(854.214.602)
Koreksi Lain-lain	E.3.2	-	45.501.684
JUMLAH		<b>167.722.513</b>	<b>(808.712.918)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	711.719.201.119	1.196.795.740.971
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>16.822.191.017.754</b>	<b>16.568.314.525.669</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>16.905.781.871.164</b>	<b>16.599.721.292.944</b>	<b>306.060.578.220</b>	<b>1,84</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(795.477.777.042)</b>	<b>(1.227.393.795.328)</b>	<b>431.916.018.286</b>	<b>(35,19)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>167.722.513</b>	<b>(808.712.918)</b>	<b>976.435.431</b>	<b>(120,74)</b>
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	167.722.513	(854.214.602)	1.021.937.115	(119,63)
Lain-lain	0	45.501.684	(45.501.684)	(100,00)
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>711.719.201.119</b>	<b>1.196.795.740.971</b>	<b>(485.076.539.852)</b>	<b>(40,53)</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>(83.590.853.410)</b>	<b>(31.406.767.275)</b>	<b>(52.184.086.135)</b>	<b>166,16</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>16.822.191.017.754</b>	<b>16.568.314.525.669</b>	<b>253.876.492.085</b>	<b>1,53</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 31 Juli 2025

Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Dalam Negeri

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri mengatur tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan

Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi objektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 sampai dengan saat ini masih dalam bentuk rancangan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menjadi acuan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional. Rincian alokasi anggaran dan realisasi belanja bruto sampai dengan 30 Juni 2025 dari delapan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri selama Semester I Tahun 2025 disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Pagu dan Realisasi Belanja Bruto untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 30 Juni 2025**

Kode PN	Uraian PN	Pagu Belanja Rupiah	Realisasi Belanja Bruto Rupiah	%
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	5.150.000.000	867.462.549	16,84
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7.000.000.000	846.974.848	12,10
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.700.000.000	204.906.373	12,05
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	13.300.000.000	766.104.299	5,76
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.500.000.000	153.820.368	10,25
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	54.946.946.000	2.295.639.051	4,18
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	528.850.721.000	158.199.915.265	29,91
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	12.500.000.000	1.501.279.255	12,01
<b>Jumlah</b>		<b>624.947.667.000</b>	<b>164.836.102.008</b>	<b>26,38</b>

Rincian pagu belanja dan realisasi belanja s.d 30 Juni 2025 untuk masing-masing Prioritas Nasional berdasarkan penanggung jawab Unit Eselon I disajikan pada Catatan Penting Lainnya bagian Laporan Realisasi Anggaran.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2025 disusun untuk tujuan umum dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan

dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan entitas Kementerian Dalam Negeri.

Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat ketentuan yang mengatur bahwa SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga untuk memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya. Pemrosesan transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan SAI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI diterbitkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi, yaitu Sistem SAKTI.

SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI diterapkan dalam sembilan modul, yaitu Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul

Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul GL dan Pelaporan (GLP). Data transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan SAKTI didukung oleh Aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk monitoring data dan transaksi SAKTI.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri yang meliputi eselon I, dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 11 Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pada Eselon I Setjen terdapat satuan kerja IPDN yang merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22.701 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, IPDN Kampus Jakarta tidak berdiri sendiri sebagai satuan kerja. IPDN Kampus Jakarta melebur menjadi bagian dari struktur organisasi satuan kerja IPDN Jatinangor yang berada dibawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Peleburan IPDN Kampus Jakarta tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Program studi diselenggarakan di IPDN Kampus Jatinangor dan Kampus Daerah. Terdapat enam IPDN Kampus di Daerah yang berdiri sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran sendiri, yaitu IPDN Kampus Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, IPDN Kampus Sumatera Barat di Kabupaten Agam, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah, IPDN Kampus Kalimantan Barat

di Kabupaten Mempawah, dan IPDN Kampus Papua di Kota Jayapura.

Pada Eselon I Setjen juga terdapat satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Semester I Tahun 2025, Eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki satker Dekonsentrasi dengan status aktif sebanyak 181 satker yang tersebar di 34 provinsi.
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eselon I Ditjen Bina Pemerintahan Desa membawahi tiga satker daerah, yaitu Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, dan Balai Pemerintahan Desa Lampung.
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Inspektorat Jenderal  
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri. Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi lima satker daerah, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Jumlah satuan kerja dengan status aktif di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2025 sebanyak 208 satker. Rincian jumlah satker dengan status aktif pada masing-masing Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I**

NO	KODE ES1	UNIT ESELON I	KP	KD	DK	TP	JUMLAH
1	01	SEKRETARIAT JENDERAL	3	6	-	-	9
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	1	-	-	-	1
3	03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	-	-	-	1
4	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	-	181	-	182
5	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	1	3	-	-	4
6	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	-	-	-	1
7	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	1	-	-	-	1
8	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	-	-	-	1
9	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	1	-	-	-	1
10	11	BADAN PELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	-	-	-	1
11	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	5	-	-	6
<b>JUMLAH</b>			<b>13</b>	<b>14</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>208</b>

Kemendagri memiliki satker inaktif bersaldo untuk periode pelaporan Semester I Tahun 2025. Satker yang masih menyajikan

saldo pada akun-akun Neraca per 30 Juni 2025 sebanyak lima satker, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Tanimbar, Sekretariat Daerah Kabupaten Morotai, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu pada Unit Eselon I Ditjen BAK, serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Unit Eselon I BPSDM.

*Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kementerian Dalam Negeri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

##### **Aset Lancar**

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Dalam hal terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka kas disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas yang dikelola Kementerian Dalam Negeri terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dan Setara Kas.
- Piutang Bukan Pajak dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang berdasarkan pungutan diakui dengan memperhatikan terpenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.
- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu membentuk penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah

nol. Dalam hal Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berdasarkan keputusan pertimbangan entitas bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus disajikan pada pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun Aset Tetap ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas ke pengelola barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### **Penyusutan Aset Tetap**

#### *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi *software*, hak paten dan hak cipta, *lisensi* dan waralaba (*franchise*), hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan ATB lainnya.
- ATB diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh entitas, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa di masa depan, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.
- Pengeluaran untuk memperoleh ATB melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas, harus dapat dibedakan antara tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap penelitian atau riset diakui sebagai beban pada saat terjadi. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap pengembangan, apabila telah memenuhi kriteria pengakuan, dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan. Dalam hal terdapat tahapan setelah implementasi/operasionalisasi, umumnya dalam pengembangan *software* komputer, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Terhadap kondisi tersebut maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun ATB ke akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar saldo di rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) atas pengeluaran belanja yang belum diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran atau terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap dan ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset lain-lain tersebut terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan

dalam Operasional Pemerintahan (166113).

- Aset Lain-lain diakui pada saat Aset Tetap dan ATB dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
- Aset Tetap dan ATB yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap/ATB menjadi objek penyusutan dan amortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud.

#### *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

### **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian

kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Kriteria Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan berdasarkan Aplikasi Monsakti. Kemendagri melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, salah satunya penerimaan Pinjaman dan Hibah Tahun 2025.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja tersaji pada tabel 6.

**Tabel 6**  
**Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan (Rp)
<b>Estimasi Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	527.235.310.007	526.735.310.000	(500.000.007)
<b>Total Estimasi Pendapatan</b>	<b>527.235.310.007</b>	<b>526.735.310.000</b>	<b>(500.000.007)</b>
<b>Pagu Belanja</b>			
Belanja Pegawai	845.964.837.000	846.332.477.000	367.640.000
Belanja Barang	3.006.468.336.000	3.122.582.777.000	116.114.441.000
Belanja Modal	939.895.345.000	823.413.264.000	(116.482.081.000)
<b>Jumlah Pagu Belanja</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>-</b>

Perubahan pagu belanja berdasarkan program Kemendagri tersaji pada tabel 7.

**Tabel 7**  
**Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program**

Kode	Program	Anggaran TA 2025	
		Awal	Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	2.037.205.856.000	2.037.987.126.000
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	471.039.306.000	493.703.462.000
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	2.120.117.603.000	2.096.672.177.000
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	163.965.753.000	163.965.753.000
	<b>Total Pagu Belanja</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>4.792.328.518.000</b>

Pada TA 2025 pagu Kemendagri sebesar Rp4.792.328.518.000,00, terdapat blokir pagu sebesar Rp2.134.570.332.000,00 sehingga pagu setelah blokir sebesar Rp2.657.758.186.000,00. Rincian pagu blokir Kemendagri TA 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan pagu blokir sebesar Rp1.656.261.214.000,00, yang terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp675.075.156.000,00, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp945.467.390.000,00, dan PNBPN sebesar Rp35.718.668.000,00.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdapat pagu blokir dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terkait kekurangan data dukung berupa clearance dari Komdigi, KemenpanRB, dan Bappenas untuk pengadaan belanja TIK sebesar Rp477.104.798.000,00, yang terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp10.395.800.000,00, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp466.708.998.000,00.
- b. Terkait kekurangan data dukung berupa interpolasi dari Dinas PUPR wilayah untuk kegiatan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp1.204.320.000,00 yang semuanya berasal dari Rupiah Murni.

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp557.149.961.952,  
00*

## B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp557.149.961.952,00 atau 105,77% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp526.735.310.000,00. Keseluruhan pendapatan Kemendagri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) tersaji pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2025 per Kode MAP**

Kode MAP	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
425121	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	888.600	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	250.750.000	650.322.034	259,35
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	222.206.092	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.049.796.000	2.314.610.125	220,48
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	117.025.000	51.802.470	44,27
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	19.000.000	24.475.000	128,82
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	200.000.000	135.250.000	67,63
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16.033.260.000	8.902.439.000	55,52
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	291.846.000	273.650.000	93,77
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	42.193.657.000	8.180.677.000	19,39
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.689.105.000	807.975.000	47,83
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	464.890.871.000	497.391.453.000	106,99
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	10.000.000	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	606.431.857	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	114.596.326	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	36.232.740.936	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.209.402.924	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	21.041.588	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>526.735.310.000</b>	<b>557.149.961.952</b>	<b>105,77</b>

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 9.

**Tabel 9**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2025 per Eselon I**

No	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1	Setjen	18.113.566.000	13.959.301.750	77,07
2	Itjen	-	41.916.309	0,00
3	Ditjen Polpum	-	272.239.102	0,00
4	Ditjen Bina Adwil	-	232.878.004	0,00
5	Ditjen Bina Pemdes	733.398.000	22.084.683.769	3011,28
6	Ditjen Bina Bangda	-	2.087.862.448	0,00
7	Ditjen Otda	-	33.541.454	0,00
8	Ditjen Dukcapil	464.890.871.000	508.653.970.697	109,41
9	Ditjen Bina Keuda	-	15.910.505	0,00
10	BSKDN	-	34.583.062	0,00
11	BPSDM	42.997.475.000	9.733.074.852	22,64
<b>Jumlah</b>		<b>526.735.310.000</b>	<b>557.149.961.952</b>	<b>105,77</b>

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per satker disajikan pada **Lampiran I** (Rekap Laporan PNBP).

Rincian realisasi pendapatan per tanggal pelaporan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 10.

**Tabel 10**  
**Perbandingan Realisasi PNBP**  
**untuk Tahun yang Berakhir s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 per Eselon I**

No	Eselon I	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik (Turun) %
1	Setjen	13.959.301.750	16.611.698.337	(15,97)
2	Itjen	41.916.309	262.690.555	(84,04)
3	Ditjen Polpum	272.239.102	133.841.751	103,40
4	Ditjen Bina Adwil	232.878.004	748.160.206	(68,87)
5	Ditjen Bina Pemdes	22.084.683.769	2.018.353.482	994,19
6	Ditjen Bina Bangda	2.087.862.448	1.459.474.116	43,06
7	Ditjen Otda	33.541.454	22.313.002	50,32
8	Ditjen Dukcapil	508.653.970.697	365.475.198.310	39,18
9	Ditjen Bina Keuda	15.910.505	86.320.255	(81,57)
10	BSKDN	34.583.062	22.744.852	52,05
11	BPSDM	9.733.074.852	34.639.164.097	(71,90)
<b>Jumlah</b>		<b>557.149.961.952</b>	<b>421.479.958.963</b>	<b>32,19</b>

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp557.149.961.952,00 mengalami kenaikan sebesar 32,19% dibandingkan realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30

Juni 2024 sebesar Rp421.479.958.963,00. Kenaikan pendapatan ini karena bertambahnya nilai PNBPF fungsional berupa Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang merupakan pendapatan dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) huruf f, yaitu pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp58.434.974,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Satker BPSDM sebesar Rp21.014.605,00 berasal dari pembayaran pemakaian listrik PT. MAC Periode 17 September 2024 sampai dengan 7 Maret 2025 sebesar Rp20.978.105,00 dan penerimaan atas adanya kelebihan setor ke rekening Bank Mandiri milik Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan calon peserta diklat sebesar Rp36.500,00.
2. Satker Ditjen Bina Bangda sebesar Rp999,00 berasal dari penyeteroran sisa uang direkening penampungan hibah langsung dalam bentuk kas. Hibah tersebut dari UNICEF yang diterima Tahun 2024
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp25.984,00 berasal dari penyeteroran sisa kas di rekening per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada aplikasi SPRINT.

*Realisasi Belanja  
Rp1.242.654.345.362,00*

## B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kemendagri sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.242.654.345.362,00 atau 25,93% dari anggaran belanja sebesar Rp4.792.328.518.000,00. Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 23,10% dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp1.616.038.249.934,00. Rincian anggaran belanja dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 menurut jenis belanja disajikan pada tabel 11.

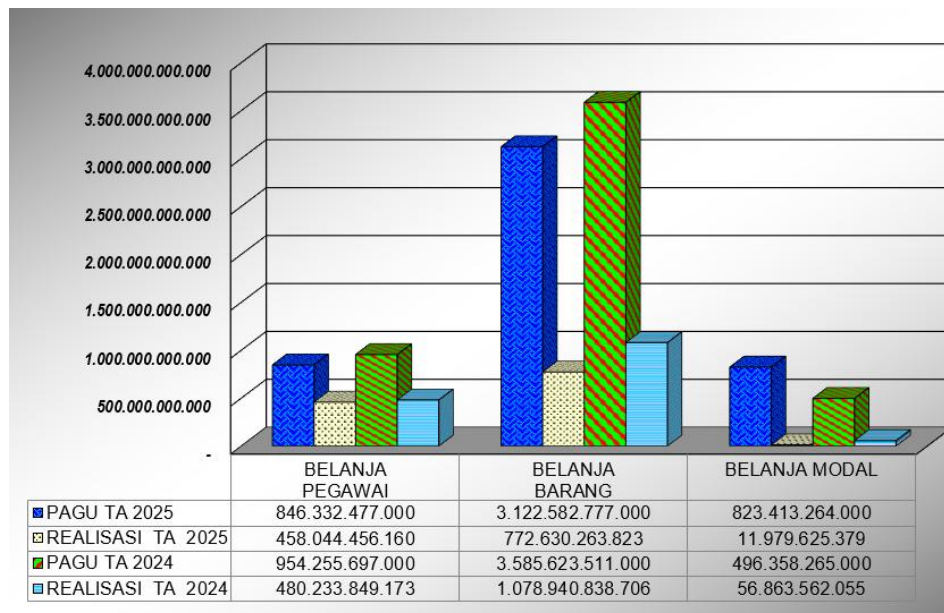
**Tabel 11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

Uraian	2025			2024			Selisih Realisasi Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rp	%
<b>Belanja Bruto</b>								
Belanja Pegawai	846.332.477.000	458.122.465.692	54,13	954.255.697.000	480.263.411.922	50,33	(22.140.946.230)	(4,61)
Belanja Barang	3.122.582.777.000	774.172.917.641	24,79	3.585.623.511.000	1.079.508.597.581	30,11	(305.335.679.940)	(28,28)
Belanja Modal	823.413.264.000	11.979.625.379	1,45	496.358.265.000	56.863.562.055	11,46	(44.883.936.676)	(78,93)
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.244.275.008.712</b>	<b>25,96</b>	<b>5.036.237.473.000</b>	<b>1.616.635.571.558</b>	<b>32,10</b>	<b>(372.360.562.846)</b>	<b>(23,03)</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>								
Belanja Pegawai	-	78.009.532	0,00	-	29.562.749	0,00	48.446.783	163,88
Belanja Barang	-	1.542.653.818	0,00	-	567.758.875	0,00	974.894.943	171,71
Belanja Modal	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
<b>Total Pengembalian Belanja</b>	<b>-</b>	<b>1.620.663.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>597.321.624</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.341.726</b>	<b>171,32</b>
<b>Belanja Neto</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>25,93</b>	<b>5.036.237.473.000</b>	<b>1.616.038.249.934</b>	<b>32,09</b>	<b>(373.383.904.572)</b>	<b>(23,10)</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satker disajikan pada **Lampiran II** (Rekap Laporan Belanja).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja disajikan pada Grafik 1.

**Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto  
T.A. 2025 dan T.A. 2024**



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel 12.

**Tabel 12  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program  
s.d. 30 Juni 2025**

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	2.037.987.126.000	861.123.203.271	42,25
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	493.703.462.000	43.209.404.534	8,75
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	2.096.672.177.000	197.832.767.863	9,44
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	163.965.753.000	140.488.969.694	85,68
<b>Jumlah</b>		<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>25,93</b>

Rincian anggaran dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 30 Juni 2025 dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel 13.

**Tabel 13**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 per Unit Eselon I**

No	Eselon I	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja Bruto 2025 (Rp)	%	Realisasi Belanja Bruto 2024 (Rp)
1	Setjen	1.160.673.621.000	464.903.865.019	40,05	591.134.809.123
2	Itjen	84.400.737.000	35.897.148.317	42,53	42.211.126.851
3	Ditjen Polpum	234.506.301.000	175.781.868.855	74,96	145.513.714.743
4	Ditjen Bina Adwil	227.158.679.000	40.676.944.215	17,91	78.723.296.775
5	Ditjen Bina Pemdes	173.851.341.000	58.441.600.794	33,62	76.960.094.069
6	Ditjen Bina Bangda	223.283.824.000	47.600.703.615	21,32	105.546.536.316
7	Ditjen Otda	99.139.263.000	34.463.307.530	34,76	45.782.363.384
8	Ditjen Dukcapil	2.199.614.511.000	234.553.984.868	10,66	360.021.767.607
9	Ditjen Bina Keuda	110.291.004.000	35.760.540.641	32,42	41.097.446.029
10	BSKDN	58.608.338.000	20.598.044.887	35,15	29.004.481.764
11	BPSDM	220.800.899.000	95.596.999.971	43,30	100.639.934.897
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.244.275.008.712</b>	<b>25,96</b>	<b>1.616.635.571.558</b>

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja transaksi kas yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Pengembalian belanja atas belanja yang terjadi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.620.663.350,00.

Rincian realisasi pengembalian belanja sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 per Eselon I disajikan pada tabel 14.

**Tabel 14**  
**Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

No	Eselon I	Pengembalian Belanja 30 Juni 2025 (Rp)	Pengembalian Belanja 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Setjen	94.529.216	412.923.634	(77,11)
2	Itjen	4.885.580	1.117.384	337,23
3	Ditjen Polpum	370.366	14.530.684	(97,45)
4	Ditjen Bina Adwil	38.026.473	27.165.057	39,98
5	Ditjen Bina Pemdes	9.504.265	18.307.593	(48,09)
6	Ditjen Bina Bangda	6.019.868	75.882.345	(92,07)
7	Ditjen Otda	33.967.562	1.900.684	1687,12
8	Ditjen Dukcapil	4.573.548	1.941.968	135,51
9	Ditjen Bina Keuda	5.640.752	4.647.132	21,38
10	BSKDN	3.155.665	465.729	577,58
11	BPSDM	1.419.990.055	38.439.414	3594,10
<b>Jumlah Pengembalian</b>		<b>1.620.663.350</b>	<b>597.321.624</b>	<b>171,32</b>

Realisasi pengembalian belanja sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.341.726,00 atau sebesar 171,32% dibandingkan dengan pengembalian realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Neto sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 tersaji pada tabel 15.

**Tabel 15**  
Perbandingan Realisasi Belanja Neto  
s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Neto 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi Belanja Neto 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	458.044.456.160	480.233.849.173	(4,62)
Belanja Barang	772.630.263.823	1.078.940.838.706	(28,39)
Belanja Modal	11.979.625.379	56.863.562.055	(78,93)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>1.616.038.249.934</b>	<b>(23,10)</b>

*Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp458.044.456.160,00*

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp458.044.456.160,00 atau 54,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp846.332.477.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 4,62% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp22.189.393.013,00. Penurunan belanja pegawai ini disebabkan CPNS berasal dari Purna Praja IPDN Angkatan XXXI pembayaran gajinya sudah bukan di Kemendagri lagi namun sesuai dengan penempatan masing-masing. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel 16.

**Tabel 16**  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Urian	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	216.093.152.980	244.987.908.505	(11,79)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.390.363.404	1.330.468.376	4,50
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.881.435.149	108.602.849	2.553,19
Belanja Lembur	3.688.779.000	5.370.669.000	(31,32)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	234.068.735.159	228.465.763.192	2,45
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>458.122.465.692</b>	<b>480.263.411.922</b>	<b>(4,61)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	78.009.532	29.562.749	163,88
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>458.044.456.160</b>	<b>480.233.849.173</b>	<b>(4,62)</b>

*Belanja Barang  
Rp772.630.263.823,00*

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp772.630.263.823,00 atau 24,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.122.582.777.000,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan 28,39% dibandingkan realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp1.078.940.838.706,00. Penurunan belanja ini karena adanya efisiensi serta pagu blokir sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 pada tabel 17.

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
<b>Belanja Bruto</b>			
Belanja Barang Operasional	123.723.822.996	145.202.156.444	(14,79)
Belanja Barang Non Operasional	169.504.140.382	151.711.116.646	11,73
Belanja Barang Persediaan	6.858.260.155	14.678.936.871	(53,28)
Belanja Jasa	193.624.552.488	260.317.277.524	(25,62)
Belanja Pemeliharaan	46.631.964.250	66.077.067.535	(29,43)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	75.949.163.420	212.826.092.797	(64,31)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.033.213.950	4.691.949.764	(77,98)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	0,00
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas	-	-	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	156.847.800.000	224.004.000.000	(29,98)
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>774.172.917.641</b>	<b>1.079.508.597.581</b>	<b>(28,28)</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>			
Belanja Barang Operasional	-	722.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	8.980.500	2.838.750	216,35
Belanja Barang Persediaan	-	-	0,00
Belanja Jasa	17.090.000	2.030.000	741,87
Belanja Pemeliharaan	53.200.636	19.389.054	174,38
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.463.382.682	214.595.621	581,93
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	328.183.450	(100,00)
<b>Jumlah Pengembalian Belanja</b>	<b>1.542.653.818</b>	<b>567.758.875</b>	<b>171,71</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>772.630.263.823</b>	<b>1.078.940.838.706</b>	<b>(28,39)</b>

*Belanja Modal*  
*Rp11.979.625.379,00*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp11.979.625.379,00 atau 1,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp823.413.264.000,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 78,93% dibandingkan realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp56.863.562.055,00. Penurunan belanja ini karena adanya efisiensi serta pagu blokir sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per akun sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 terdapat pada Tabel 18.

**Tabel 18**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

MAK	Uraian	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) (%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.904.225.729	36.991.678.714	(73,23)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.611.516.500	2.116.910.080	(23,87)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
5361	Belanja Modal Lainnya	463.883.150	17.754.973.261	(97,39)
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>11.979.625.379</b>	<b>56.863.562.055</b>	<b>(78,93)</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>11.979.625.379</b>	<b>56.863.562.055</b>	<b>(78,93)</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp9.904.225.729,00*

### **B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp9.904.225.729,00 dan Rp36.991.678.714,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 73,23% dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2024. Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 terdapat pada Tabel 19.

**Tabel 19**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.768.403.920	36.429.722.827	(73,19)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	135.821.809	561.955.887	(75,83)
<b>Pengembalian</b>			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>9.904.225.729</b>	<b>36.991.678.714</b>	<b>(73,23)</b>

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp1.611.516.500,00*

### **B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp1.611.516.500,00 dan Rp2.116.910.080,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 23,87% dibandingkan realisasi sampai dengan 30 Juni 2024. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 terdapat pada tabel 20.

**Tabel 20**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.611.516.500	2.116.910.080	(23,87)
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>1.611.516.500</b>	<b>2.116.910.080</b>	<b>(23,87)</b>
Pengembalian	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>1.611.516.500</b>	<b>2.116.910.080</b>	<b>(23,87)</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00*

### **B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 0,00% dibandingkan realisasi sampai dengan 30 Juni 2024. Perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 terdapat pada tabel 21.

**Tabel 21**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal Lainnya Rp463.883.150,00*

### **B.5.4 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp463.883.150,00 dan Rp17.754.973.261,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 97,39% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2024.

**Tabel 22**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	463.883.150	17.091.495.124	(97,29)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	663.478.137	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>463.883.150</b>	<b>17.754.973.261</b>	<b>(97,39)</b>
Pengembalian	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>463.883.150</b>	<b>17.754.973.261</b>	<b>(97,39)</b>

### B.6 Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Pada T.A. 2025 Kemendagri menerima alokasi anggaran sebesar Rp4.792.328.518.000,00 dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.242.654.345.362,00 atau 25,93% dari anggarannya dengan rincian menurut jenis satker pada tabel 23.

**Tabel 23**  
**Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

Uraian	30 Juni 2025		30 Juni 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Kerja Pusat dan Daerah	4.686.828.518.000	1.243.259.107.143	4.964.237.473.000	1.596.303.985.085
Realisasi Pengembalian Belanja	-	1.620.663.350	-	576.410.912
<b>Satker Pusat &amp; Daerah Setelah Pengembalian</b>	<b>4.686.828.518.000</b>	<b>1.241.638.443.793</b>	<b>4.964.237.473.000</b>	<b>1.595.727.574.173</b>
Dekonsentrasi	105.500.000.000	1.015.901.569	72.000.000.000	20.331.586.473
Realisasi Pengembalian Belanja	-	-	-	20.910.712
<b>Dekonsentrasi Setelah Pengembalian</b>	<b>105.500.000.000</b>	<b>1.015.901.569</b>	<b>72.000.000.000</b>	<b>20.310.675.761</b>
Tugas Pembantuan	-	-	-	-
Realisasi Pengembalian Belanja	-	-	-	-
<b>Tugas Pembantuan Setelah Pengembalian</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.242.654.345.362</b>	<b>5.036.237.473.000</b>	<b>1.616.038.249.934</b>

*Belanja Dana  
Dekonsentrasi  
Rp1.015.901.569,00*

#### 1) Dana Dekonsentrasi

Pada T.A. 2025 Kemendagri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan yang terdapat pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp105.500.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.015.901.569,00 atau 0,96% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp1.015.901.569,00. Penurunan belanja ini merupakan tindaklanjut Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terdapat efisiensi pada Ditjen Bina Adwil sehingga dana dekosentrasi yang awalnya dialokasikan kepada 181 satker dekosentrasi, s.d. 30 Juni 2025 terdapat penarikan pagu ke pusat sehingga tersisa 18 satker dekosentrasi yang memperoleh alokasi anggaran.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp,00 dan terealisasi sebesar Rp20.331.586.473,00 atau 28,24% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp72.000.000.000,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp20.310.675.761,00. Rincian realisasi Dana Dekonsentrasi disajikan pada tabel 24.

**Tabel 24**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I**  
**s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

No	Eselon I	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Bina Adwil	1.015.901.569	20.331.586.473	(95,00)
	Pengembalian	-	20.910.712	(100,00)
	<b>Belanja Neto</b>	<b>1.015.901.569</b>	<b>20.310.675.761</b>	<b>(95,00)</b>

*Belanja Dana Tugas  
Pembantuan Rp0,00*

**2) Dana Tugas Pembantuan**

Pada T.A. 2025 Kemendagri mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah kabupaten/kota melalui program kegiatan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Sebagai perbandingan, sampai dengan 30 Juni 2024 mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp0,00, dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Dana Tugas Pembantuan disajikan pada tabel 25.

**Tabel 25**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan**  
**per Eselon I s.d. 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

No	Eselon I	Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Realisasi 30 Juni 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Bina Adwil	-	-	0,00
	Pengembalian	-	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## *B.7 Pengungkapan Lainnya*

### **A. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG.**

Pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung berupa kas, barang dan jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja sebagai dokumen sumber pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Satker di Kementerian Negara/Lembaga membukukan dokumen sumber berupa Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) yang diterbitkan KPPN atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dan membukukan dokumen sumber berupa Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga atas belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa Barang/Jasa.

Dalam Bab II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan penatausahaan pendapatan hibah berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (EAS). Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Realisasi Anggaran Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LRA dan Laporan Operasional Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LO.

Atas pengeluaran yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, Kemendagri mencatat belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sebesar nilai yang disahkan oleh KPPN, dan mencatat beban pada Laporan Operasional pada saat resume tagihan sebesar nilai yang tercantum dalam resume tagihan. Kemendagri mencatat kas atas penerimaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Neraca.

Atas hibah dalam bentuk barang, Kemendagri mencatat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah pada saat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh Kemendagri sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Atas hibah dalam bentuk jasa, Kemendagri mencatat beban jasa dari hibah tersebut pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada tahun 2025 Kemendagri melakukan Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang/jasa sebesar Rp21.133.821.296,00 pada Sekretariat Jenderal dengan rincian sebagai berikut.

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa 5 (lima) kursi dan 5 (lima) tempat sampah sebesar Rp22.644.000,00 dengan Nomor Register 2MZR9ZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.27-/NS/03/2025 dan 900/111/KPA tanggal 5 Maret 2025 serta Berita Acar Serah Terima (BAST) Nomor B.28-/NS/03/2025 dan 900/112/KPA tanggal 5 Maret 2025.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa bangunan *flexible workspace* sebesar Rp127.356.000,00 dengan Nomor Register 2ZXYZ9DA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.26-/NS/03/2025 dan 100.4.7.1/1556/SJ tanggal 5 Maret 2025 serta Berita Acar Serah Terima (BAST) Nomor B.29-/NS/03/2025 dan 100.4.7.1/1557/SJ tanggal 5 Maret 2025.
3. Pemerintah Australia memberikan hibah langsung dalam bentuk Jasa berupa hibah jasa dalam rangka program *Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration* atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) sebesar Rp107.883.500,00 dengan Nomor Register 27BMXZ9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acar Serah Terima (BAST) Nomor 04/BAST-KEMENDAGRI/2/2025 tanggal 17 Februari 2025.
4. USAID memberikan hibah langsung dalam bentuk Jasa berupa Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) tersebut sebesar Rp20.875.937.796,00 dengan Nomor Register 2F5GEXNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acar Serah Terima (BAST) Nomor 246/USAID-INA/BAST-Services/DRG tanggal 6 Februari 2025.

Pada periode pelaporan Tahun 2025 terdapat hibah langsung belum disahkan pada Ditjen Bina Bangda. Hibah tersebut berasal dari UNICEF yang memberikan memberikan hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka berupa Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebesar Rp2.556.839.500,00 dengan Nomor Register 2C7EJQHA.

Pada periode pelaporan Tahun 2025, Kemendagri memiliki Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker Ditjen Bina Bangda. Hibah tersebut berasal dari Pemerintah Australia yang memberikan hibah langsung dalam bentuk Jasa berupa hibah jasa dalam rangka *Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration* atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) sebesar Rp4.441.217.250,00 dengan Nomor Register 27BMXZ9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acar Serah Terima (BAST) Nomor 02/BAST-KEMENDAGRI/05/2024 tanggal 29 Mei 2024.

### **Lanjutan Pengelolaan Hibah Langsung Tahun 2023**

Direktorat Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Uni Emirat Arab untuk *Financing the Regional Development Program* pada Tahun 2023. Pendapatan hibah tersebut sudah disahkan pada Tahun 2023 sebesar USD15.000.000,00 atau Rp235.500.000.000,00 dengan Nomor Register Hibah 27YDNA6A serta Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor GA.10.04.2023 tanggal 10 April 2023. Pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung Tahun 2023 sebesar Rp4.167.300.475,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp169.102.497.549,00. Dengan demikian total realisasi belanja yang bersumber dari hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp173.269.798.024,00 dan saldo dana hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.230.201.976,00.

Pada pelaporan Semester I Tahun 2025 belum ada pengesahan hibah langsung yang berasal dari Pemerintah Uni Emirat Arab untuk *Financing the Regional Development Program*.

### **B. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI.**

Kemendagri Tahun 2025 mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri untuk kegiatan pada satker dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp686.500.000,00 dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

***Proyek Improvement Village Service Delivery* atau Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).** Ditjen Bina Adwil salah satu tugas dan fungsinya melakukan penguatan pada pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini Kecamatan sebagai OPD, sesuai Kepmendagri 137 tahun 2022 tentang SOTK Kemendagri. Melalui *Frontline Service Delivery* untuk mendukung capaian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) khususnya pada Komponen 1, belanja desa berkualitas. Dalam rangka mengimplementasikan program P3PD PIU Sub Komponen 1D *Frontline Service Delivery* dibutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah di lokasi sasaran. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan program P3PD Sub Komponen 1D, Penguatan Kecamatan dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Frontline Service Delivery*.

- a. Tujuan Program.

Program *Frontline Service Delivery* (FSD) dalam rangka Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa, bertujuan untuk mensinergikan konsepsi perencanaan pembangunan berdasarkan prakarsa dari masyarakat (*bottom-up*) dengan program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah (*top-down*) sehingga menghasilkan keseimbangan antara demand dan *supply* pembangunan di masyarakat desa melalui kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Hal ini akan

mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan dalam layanan dasar dan meningkatkan pemanfaatan dana desa baik dalam sisi kualitas dan kuantitas, dengan meningkatkan koordinasi kelembagaan antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini memperkuat instrumen kerja pemerintahan yang ada dan melembagakan pendekatan untuk mekanisme akuntabilitas antara desa, penyedia layanan, dan pemerintah.

b. Deskripsi Proyek (Komponen).

Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa, melalui *Frontline Service Delivery* menegaskan posisi Kecamatan sebagai hub (penghubung) antara desa dengan pemerintah daerah. Adapun mekanisme kerja program ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dukungan Manajemen. Dukungan manajemen kepada PIU Sub Komponen 1D, berupa:

- a) Sekretariat Pengendalian. Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, PIU Sub Komponen 1D merekrut tenaga sekretariat pengendalian.
- b) *Kick Off Meeting*. Sosialisasi kepada Gubernur di 10 Provinsi dan Bupati di 60 Kabupaten lokasi pilot. Kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola.
- c) Rapat Koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk penyamaan persepsi dan dukungan lintas K/L. Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola.
- d) *Workshop* Penyusunan Modul (1 dan 2). *Workshop* dilaksanakan dalam rangka penyusunan Modul dan Finalisasi Modul. Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola.
- e) Monitoring dan Supervisi. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian program di 10 Provinsi lokasi pilot. Kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola.

2) Pelatihan.

Tahap pelatihan meliputi 3 agenda, yaitu:

- a) *Training for Master of Trainer (TMoT)*. Kegiatan ini untuk menyiapkan tenaga pelatih tingkat Pusat dan Provinsi, diselenggarakan di Jakarta melalui oleh Pihak ketiga. Training ini untuk membentuk Pelatih untuk Calon Pelatih di tingkat Provinsi. *Master of Trainer* terdiri atas unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Inspektorat Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi, Biro Pemerintahan Setda Provinsi di 10 Provinsi lokasi pilot.
- b) *Training for Trainer (ToT)*. Kegiatan ini untuk menyiapkan Tenaga Pelatih di tingkat Kabupaten terdiri atas unsur Bappeda Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Dinas Dukcapil Kabupaten, Dinas PMD Kabupaten, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten di 60 Kabupaten lokasi pilot yang akan melatih Aparatur Kecamatan di 1007 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan Pihak Ketiga.
- c) Pelatihan Aparatur Kecamatan. Kegiatan ini untuk

mempersiapkan Aparatur Kecamatan yang akan difungsikan sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sanitasi. Jumlah peserta dari Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Camat dan perangkatnya, UPT Kesehatan, UPT Pendidikan, UPT Sanitasi, Pendamping Desa dan Penyuluh. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Pihak Ketiga. Paket *Training for Trainer* dan Pelatihan Aparatur Kecamatan terdiri dari 10 (sepuluh) paket kegiatan untuk 10 Provinsi lokasi pilot.

- 3) Penjaminan Mutu Pelaksanaan Program. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan program, PIU Sub Komponen 1D dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, melalui jasa konsultan dengan tujuan:
  - a) Dukungan pendampingan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, implementasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b) Pengendalian program untuk menjamin kualitas mutu program;
  - c) Pengendalian kegiatan administrasi keprograman dalam pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Program P3PD;
  - d) Meningkatkan fungsi koordinasi antar pengelola program di pusat sehingga terjadi sinkronisasi pelaksanaan kegiatan PIU Sub Komponen 1D dengan komponen lainnya dalam program P3PD;
  - e) Membantu dalam penyusunan desain implementasi program PIU Sub Komponen 1D;
  - f) Melaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kegiatan; dan
  - g) Dukungan teknis dan kebijakan lainnya sesuai arahan Kepala PIU.
- 4) Instrumen Kerja Kecamatan/*Dashboard*. Instrumen Kerja Kecamatan berupa Aplikasi Sistem Informasi untuk Kecamatan berupa sistem Analisis untuk mendukung pengumpulan data perencanaan pembangunan dalam rangka menjawab kebutuhan layanan masyarakat desa. Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan ini dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui jasa konsultan. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh PIU Sub Komponen 1D dengan melibatkan Pihak Ketiga, melalui jasa lainnya.
- c. Pelaksana Proyek. Penyelenggara Program Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/*Frontline Service Delivery*, melibatkan, antara lain:
  - 1) Pelaksana.
    - a) CPMU Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Komponen 1;
    - b) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, selaku PIU Sub Komponen 1D;
    - c) Sekretariat P3PD PIU Sub Komponen 1D;
    - d) Jasa Konsultan.
  - 2) Koordinasi Pemerintah dengan Donor.

- a) Kemenko PMK.
  - b) BAPPENAS.
  - c) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  - d) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
  - e) *Task Team Leader World Bank.*
- d. Visibilitas Tingkat Proyek.
- 1) Bahan.
    - a) Panduan Teknis P3PD PIU Sub Komponen 1D;
    - b) Aplikasi Instrumen *Frontline Service Delivery*;
    - c) Modul Pelatihan Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa;
    - d) Instrumen Monitoring Pelaksanaan *Frontline Service Delivery*.
  - 2) Workshop Uji Coba Modul;
  - 3) Sosialisasi Program/*Kick Off Meeting*;
  - 4) *Master of Trainer*;
  - 5) *Training of Trainer*;
  - 6) Pelatihan Penguatan Aparatur Kecamatan; dan
  - 7) Monitoring dan Evaluasi;
- e. Rincian Pinjaman. Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:
- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| Nomor ID Pinjaman       | : | IBRD 8941-ID                   |
| Pemberi Pinjaman        | : | <i>World Bank</i>              |
| Tanggal Perjanjian      | : | 30 Januari 2020                |
| Nomor Register          | : | 1CZ6CF2A                       |
| <i>Effective Date</i>   | : | 30 Januari 2020                |
| Jumlah Pinjaman         | : | USD300.000.000,00              |
| Nomor Reksus            | : | 601306411980                   |
| <i>Closing date</i>     | : | 31 Desember 2024               |
| <i>Executing Agency</i> | : | Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri |
- f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program. Pelaksanaan Kegiatan dari Program Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/*Frontline Service Delivery* antara lain:
- 1) *Executing Agency*: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.
  - 2) *Central Project Management Unit (CPMU)*: Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.
  - 3) *Central Project Implementation Unit (CPIU)*: Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.
  - 4) *Project Implementation Unit (PIU)*: Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
- Realisasi belanja Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas

Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/*Frontline Service Delivery* sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp686.500.000,00.

2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp22.758.926.000,00 dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. ***Proyek Improvement Village Service Delivery* atau Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).**

- 1) Tujuan Program. Program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi proyek Program, melalui:
  - a) Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.
  - b) Perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif.
  - c) Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (*performance-based grant*, PBG) untuk menguji model dukungan melalui insentif untuk perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten.
  - d) Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Dengan adanya Proyek P3PD ini pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi terhadap perbaikan layanan dan dukungan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa.

- 2) Lokasi Sasaran. Sesuai tujuan P3PD, maka kriteria pertama pemilihan kabupaten adalah kabupaten/kota yang mendapatkan Dana Desa. Selanjutnya, kabupaten/kota dinilai berdasarkan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten yang diukur dari indikator sebagai berikut:
  - a) Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang mempengaruhi status pembangunan di desa dan kabupaten. Indikator status pembangunan desa dan kapasitas pemerintah desa diproksi dari variabel berikut ini:
    - Akses ke sarana prasarana dasar berdasarkan data PODES 2018.
    - Kapasitas pemerintah desa (latar belakang Pendidikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dan kelengkapan komposisi aparat inti desa) – data PODES 2018.
    - Kemampuan penganggaran pemerintah desa dalam

meningkatkan kapasitas desa (dari alokasi desa untuk peningkatan kapasitas) – data SIPEDE 2018.

- b) Kapasitas pemerintah desa dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemerintahan desa. Dalam hal ini proksi yang dapat dilakukan dengan mengacu pada alokasi ADD per desa – data Siskeudes.

### 3) Kelompok Sasaran.

Aparat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan maupun dukungan pembinaan teknis yang akan dilaksanakan antara lain melalui *platform* digital (*e-learning*), forum belajar desa di tingkat kecamatan, kegiatan pelatihan tatap-muka, serta fasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Masyarakat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain melalui pembukaan akses terhadap *platform* Akademi Desa 4.0, akses terhadap pendampingan dan Forum Belajar Desa. Masyarakat juga akan mendapatkan akses kepada sistem penanganan keluhan dan pengawasan pembangunan desa berbasis digital.

Selain aparat dan masyarakat desa, pemerintah pusat dan daerah juga akan mendapat dukungan melalui penguatan koordinasi pembangunan desa serta pembuatan sistem informasi desa terintegrasi yang akan menggabungkan data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta belanja desa dari kementerian/lembaga terkait. Sistem informasi terintegrasi ini akan menjadi sumber data untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan dan belanja desa serta kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data dan analisis dari sistem informasi ini juga diharapkan akan menjadi masukan dalam pembahasan kebijakan terkait pemerintahan dan pembangunan desa kedepannya.

### 4) Pendanaan.

Selain dari dana pinjaman IBRD, pencapaian target sasaran P3PD memerlukan Dana Rupiah Murni (RM) yang bersumberkan dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) dan APBDesa serta kontribusi masyarakat. Bentuk dana RM ini adalah salah satu wujud operasional atau pelaksanaan dari *platform* nasional pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa, yang mana dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pencapaian tujuan P3PD.

Selain dana RM, Kementerian dan Lembaga mengalokasikan dana paralel dari Pemerintah Pusat (APBN RM), untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dialokasikan dari porsi pinjaman luar negeri, seperti biaya operasional dan gaji/tunjangan bagi pegawai negeri dalam pengelolaan P3PD atau porsi pembiayaan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.

Dana Rupiah Murni lainnya dapat dicatat dalam bentuk program atau kegiatan (bukan dalam bentuk *in cash* yang langsung disalurkan melalui P3PD), namun memberikan kontribusi atau

dukungan terhadap pelaksanaan P3PD baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa.

Porsi Rupiah Murni yang dapat dihitung ke dalam kontribusi pendanaan P3PD adalah sebagai berikut:

- a) APBN/APBD yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam P3PD untuk operasional PMU/PIU dan Sekretariat terkait PNS, misalnya biaya pertemuan, honorarium narasumber, perdiem, biaya pemantauan dan supervisi.
  - b) APBN/APBD yang digunakan untuk membiayai sebagian kegiatan P3PD, seperti rapat koordinasi, lokakarya, pelatihan, bantuan teknis dan fasilitator, dan lainnya.
  - c) APBDesa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.
- 5) Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:

Nomor ID Pinjaman : IBRD 8941-ID  
Pemberi Pinjaman : *World Bank*  
Tanggal Perjanjian : 30 Januari 2020  
Nomor Register : 1CZ6CF2A  
*Effective Date* : 30 Januari 2020  
Jumlah Pinjaman : USD300.000.000,00  
Nomor Reksus : 601306411980  
*Closing date* : 31 Desember 2024  
*Executing Agency* : Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 untuk program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp7.449.581.000,00.

- b. ***Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP)*** dengan pagu sebesar Rp15.309.345.000,00.
3. Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp51.644.047.000,00 dan terealisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.512.050.368,00 atau 2,93% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
- a. ***Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)***.

- 1) Latar Belakang.

*Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung gerakan Citarum Harum. Terdapat empat komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan

dalam pengelolaan sampah, dukungan dalam perencanaan yang terpadu dan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan dukungan dalam pelaksanaan program dan bantuan teknis.

Pengelolaan sampah yang kurang memadai akan berdampak pada berbagai aspek, seperti lingkungan, estetika, kesehatan manusia, serta dapat memberikan dampak lanjutan yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Umumnya, sampah yang tidak tertangani akan berakhir dengan cara dibakar secara terbuka, dikubur, ataupun dibuang bebas ke lingkungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal tersebut menjadikan sampah yang tidak tertangani berpotensi menjadi sumber pencemaran yang signifikan, menurunkan produktivitas, dan mengganggu kesehatan serta memicu timbulnya penyakit, merusak estetika, hingga tingginya pengeluaran untuk biaya kesehatan. Sampah yang tidak tertangani yang masuk ke badan sungai pun akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Di sisi lain, pencegahan banjir dengan pengerukan sampah pada saluran air pun menelan biaya yang cukup tinggi terutama bagi kota-kota yang berada di pesisir dimana sampah akan bermuara sehingga berpotensi dan menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Tujuan Program.

Program Kegiatan *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)*, merupakan program yang didesain untuk dapat membantu pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang layak dengan peningkatan keseluruhan aspek terkait dalam sektor pengelolaan sampah untuk mendukung upaya pencapaian target akses universal persampahan, khususnya di wilayah perkotaan.

Tujuan utama dari pengembangan program ISWMP adalah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah bagi penduduk perkotaan pada 8 (delapan) kota terpilih di wilayah Indonesia diantaranya: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung barat, Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kab. Karawang.

3) Dalam rangka mencapai tujuan utama di atas, maka program ini akan dilaksanakan melalui 4 komponen sebagai berikut:

- a) Komponen 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sampah.
- b) Komponen 2. Perencanaan Terpadu dan Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- c) Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah.
- d) Komponen 4. Dukungan Pelaksanaan Program, Bantuan

Teknis, dan Monitoring dan Evaluasi.

4) Target Program.

Penerima manfaat Program Kegiatan *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project* (ISWMP) antara lain:

- a) Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab diberbagai aspek, baik teknis maupun administratif, dalam pengelolaan sampah.
- b) Pemerintah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah regional.
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota prioritas.

5) Rincian Pinjaman.

Nomor Perjanjian	:	IBRD 9021-ID
Nomor Register	:	1HFQ7GNA
Tanggal Penandatanganan	:	27 Desember 2019
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	:	3 April 2020
<i>Closing Date</i>	:	30 November 2025
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	:	USD100.000.000,00
<i>Executing Agency</i>	:	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

6) Pelaksanaan Kegiatan.

Lembaga pelaksana kegiatan pada Program ISWMP terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

- a) *Executing Agency*: Direktur Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b) *Steering Committee*: Bappenas, Kemenko Maritim, KemenPUPR, KemenKeu, Kemendagri.
- c) CPMU: Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.
- d) CPIU terdiri dari:
  - Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum
  - Direktorat SUPD I & II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
  - Ditjen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 – Kementerian LHK.

Peran CPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam ISWMP, adalah:

- a) Membina Pemda dalam pengarusutamaan/prioritisasi pembangunan sektor persampahan;
- b) Mendorong penyusunan kebijakan dan panduan tingkat daerah

dalam rangka pencapaian target pengelolaan persampahan;

- c) Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan;
- d) Memfasilitasi Pemda kab/kota pilot dalam menetapkan target Proyek SWM sesuai kinerja Kab/Kota masing-masing.

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp379.510.940,00 atau 1,25% dari anggarannya sebesar Rp30.473.276.000,00.

**b. *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).***

1) Tujuan NUFReP.

Tujuan NUFReP adalah mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih di Indonesia melalui peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan kota serta investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan terpadu. Ketercapaian tujuan dari NUFReP diukur dengan Indikator Utama dan Indikator Antara yang meliputi:

a) Indikator Utama (*Project Development Objective/PDO Indicators*)

- Jumlah penduduk yang mendapat manfaat dari upaya ketangguhan banjir perkotaan terpadu di bawah proyek;
- Program nasional ketangguhan banjir perkotaan terbentuk yang panduannya diadopsi untuk pembiayaan investasi, penguatan kelembagaan, dan pertukaran pengetahuan;
- Tim koordinasi antar lembaga tingkat kota terkait ketangguhan banjir perkotaan terbentuk dan berfungsi; dan
- Peraturan perundangan dan/atau kebijakan mengenai ketangguhan banjir perkotaan terpadu yang diadopsi oleh pemerintah kota.

b) Indikator Antara (*Intermediate Results Indicators*)

- Kota-kota dengan model dan pemetaan risiko banjir yang diperbarui untuk mengatasi dampak urbanisasi dan perubahan iklim;
- Kota-kota dengan rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan tahun jamak yang dikembangkan dengan langkah-langkah terpadu dan pertimbangan risiko iklim;
- Peningkatan atau perbaikan tepi sungai atau drainase;
- Kegiatan subproyek dengan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan desain perkotaan yang ramah air (*water sensitive urban design*);
- Kota-kota dengan sistem peringatan dini banjir yang ditingkatkan dan berfungsi;
- Subproyek yang selesai (*completed*) memiliki rencana operasional dan pemeliharaan yang biayanya telah dimasukkan

- ke dalam anggaran tahunan;
- Individu yang mendapat pelatihan tentang topik-topik pengelolaan risiko banjir yang relevan;
  - Keterwakilan perempuan dengan posisi pengambil keputusan dalam tim koordinasi ketangguhan banjir perkotaan di tingkat kota;
  - Penerima manfaat (perempuan) yang melaporkan bahwa mereka telah meningkatkan pengetahuannya untuk mengambil keputusan perihal banjir perkotaan setelah mengikuti pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan;
  - Jumlah kota yang mendapatkan dukungan teknis dari platform pengetahuan digital tingkat nasional;
  - Jumlah kota yang telah mengadopsi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program nasional; dan
  - Penerima manfaat yang melaporkan bahwa kegiatan proyek telah mencerminkan kebutuhan mereka (dipilah berdasarkan gender).
- 2) Hasil pencapaian indikator akan dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apabila relevan, dan sub-indikator akan dikuantifikasi jika memungkinkan untuk memastikan efektivitas pemantauan dan evaluasi proyek. Uraian deskripsi dari masing-masing Indikator Utama dan Indikator Antara yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi Proyek dapat dilihat pada POM Buku 2 Kerangka Kerja dan Monitoring Pencapaian Tujuan Proyek.
- 3) Ruang lingkup kegiatan NUFReP yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai Tahun 2028, antara lain:
- a) Analisis dan perencanaan risiko banjir perkotaan di 6 (enam) dan kajian teknis di IKN;
  - b) Penanganan banjir perkotaan melalui tindakan struktural dan non-struktural untuk jangka pendek dan menengah yang mencakup integrasi infrastruktur abu-abu (*grey*) dengan biru-hijau (*blue-green*), solusi berbasis alam (*nature-based solutions*), perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan ramah air (*water-sensitive urban design*);
  - c) Pembentukan program nasional untuk memperkuat ketangguhan kota-kota di Indonesia terhadap banjir melalui pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko banjir, investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi;
  - d) Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan risiko banjir termasuk meningkatkan kemitraan lokal dan partisipasi masyarakat yang keberlanjutan; dan

- e) Kegiatan pendukung proyek.
- 4) NUFReP terdiri dari 3 komponen, yakni:
- a) Komponen 1: Perencanaan Penanganan dan Analisis Risiko Banjir. Kegiatan pada komponen ini mencakup pemetaan yang terperinci guna menunjukkan kedalaman genangan serta periode ulang (probabilitas) dengan menggunakan model permukaan digital resolusi tinggi/DTM, model hidrologi, dan model hidrodinamika, termasuk pemetaan probabilitas risiko banjir yang mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim (termasuk kenaikan muka air laut dan perubahan intensitas curah hujan) sehingga dapat disusun rencana penanganan risiko banjir perkotaan jangka pendek dan menengah dengan mengintegrasikan kegiatan prioritas struktural maupun non-struktural.
  - b) Komponen 2: Peningkatan Ketangguhan Banjir Perkotaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup kegiatan fisik (konstruksi) tindakan struktural dan non-struktural termasuk subproyek prioritas yang menunjukkan dampak langsung pada pengurangan risiko banjir dan adaptasi iklim (*no-regret measures*). Komponen ini mengedepankan integrasi *grey infrastructure* (infrastruktur abu-abu) dengan *blue-green infrastructure* (infrastruktur biru-hijau) guna meningkatkan ketangguhan wilayah perkotaan secara keseluruhan.
  - c) Komponen 3: Manajemen Program dan Dukungan Pelaksanaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup dukungan pelaksanaan NUFReP yang meliputi pembentukan dan operasionalisasi Program Nasional, pengelolaan proyek, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan proyek dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga.
- 5) Spesifikasi Pinjaman Luar Negeri Program *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)* adalah sebagai berikut:

Nomor Perjanjian	: IBRD No.9459-ID
Nomor Register	: 1739NSEA
Tanggal Penandatanganan	: 11 Januari 2023
Tanggal Efektif	: 27 Maret 2023
<i>Closing Date</i>	: 31 Januari 2028
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD2.000.000,00
<i>Executing Agency</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6) Penerima Manfaat Proyek.

NUFReP akan memberikan manfaat kepada masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi sasaran sebagai berikut:

- a) Masyarakat yang berpotensi terdampak risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, dan Semarang.
- b) Pemerintah pusat dan pemerintah kota yang terlibat dalam pengurangan risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, dan Semarang.

Di bawah Komponen 1 dan Komponen 2, Pemerintah Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan mendapatkan manfaat langsung dari dukungan kegiatan perencanaan ketangguhan banjir yang komprehensif serta pembangunan infrastruktur banjir perkotaan yang terpadu

7) Lokasi Kegiatan Proyek.

Lokasi kegiatan NUFReP tersebar di 7 (tujuh) kota, di wilayah sungai kewenangan pusat, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, ketersediaan anggaran pembebasan lahan, dan dukungan pemerintah daerah. Adapun lokasi kegiatan NUFReP adalah sebagai berikut:

- a) Kota Bima meliputi DAS Rontu.
- b) Kota Manado meliputi DAS Tondano, DAS Sario, DAS Bailang, dan DAS Malalayang.
- c) Kota Medan meliputi DAS Belawan, DAS Deli, DAS Percut.
- d) Kota Banjarmasin meliputi DAS Martapura dan DAS Barito.
- e) Kota Semarang meliputi Sistem drainase Semarang Timur, Sistem drainase Semarang Tengah, Sistem drainase Semarang Barat dan Sistem drainase Mangkang.
- f) Kota Gorontalo meliputi DAS Limboto dan DAS Bolango-Bone.
- g) Ibu Kota Negara (IKN).

Rincian lokasi dan nama paket kegiatan ditetapkan dalam dokumen *Overall Work Plan* dan *Annual Work Plan*. Kegiatan di luar daftar DAS/sungai/kota yang telah disebutkan di atas, dapat diusulkan oleh Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* untuk disetujui oleh Bank Dunia.

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp125.570.578,00 atau 1,65% dari anggarannya sebesar Rp7.615.305.000,00.

c. ***Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP)***.

1) **Latar Belakang.**

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga tahun 2021, musibah banjir mengakibatkan 2.813 nyawa hilang, 109.958 orang terluka, 392.000 rumah rusak, dan 6,7 juta rumah terendam di seluruh Indonesia. Kerugian banjir rata-rata tahunan diperkirakan mencapai USD2,4 miliar.

Risiko banjir juga semakin memburuk. Jumlah orang yang tinggal di daerah rendah di pesisir diproyeksikan meningkat dari 39,3 juta (2000) menjadi 93,7 juta di tahun 2060, sedangkan jumlah orang yang hidup di dataran banjir dengan risiko kemungkinan banjir sekali per 100 tahun akan mencapai 14,5 juta orang di tahun 2060 karena naiknya muka air laut. Kerusakan tahunan akibat banjir pesisir diperkirakan akan meningkat 160 kali lipat di tahun 2080 jika tanpa upaya adaptasi. Jumlah kejadian banjir di Indonesia tiap tahunnya cenderung naik sejak tahun 2002 seperti ditunjukkan data BNPB.

Oleh karena itu, penanggulangan banjir melalui pembangunan fisik (*structural approach*), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (*non-structural approach*), dengan menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desentralisasi pendelegasian wewenang secara bertahap dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai dimaksudkan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat lokal mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

Atas pertimbangan tersebut, sebagai institusi yang ditugaskan melakukan pembinaan kepada daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya dalam bidang urusan pertanian dan pangan dengan terlibat sebagai *Central Project Implementation Unit (CPIU)* pada *Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP/FMNJP)* untuk fokus pada Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu (PRBT).

*Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP/FMNJP)* dibiayai dari *Loan ADB 4410-INO* dengan fokus lokasi di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk Cisanggarung dan WS Jratunseluna.

## **2) Program ini disusun menjadi 2 (dua) output:**

- a) Operasionalisasi pengelolaan risiko banjir. Output ini akan membangun kapasitas organisasi daerah aliran sungai, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk lebih beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang diantisipasi. Proyek ini akan memperkenalkan EOS untuk memprediksi dan memantau banjir dan penurunan tanah di pantai Jawa Utara. EOS akan

mendukung perencanaan FRM yang mengintegrasikan proyeksi perubahan iklim, dan penilaian kerusakan untuk menginformasikan dukungan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir Output ini akan memodernisasi sistem hidrometeorologi untuk meningkatkan akuisisi data real-time di kedua wilayah wilayah sungai (RBT). Proyek ini akan mengembangkan kerangka kerja nasional untuk menyelaraskan teknologi untuk *Flood Forecasting, Early Warning and Flood Evaluation System* (FFWFES) di seluruh daerah aliran sungai di Indonesia.

- b) Meningkatnya infrastruktur ketahanan iklim serta Operasi dan Pemeliharaan (O&P). Kegiatan di bawah output ini akan secara langsung mengurangi risiko iklim fisik melalui pembangunan dan peningkatan perlindungan banjir dan fasilitas penyimpanan air. Output ini akan memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dan pelaksana dalam manajemen proyek. Ini akan memperkenalkan lembaga pelaksana dan pelaksana praktik terbaik untuk mengarusutamakan adaptasi dan inovasi perubahan iklim dalam operasi mereka.

### **3) Penerima Manfaat.**

- a) Kementerian/Lembaga. Terlaksananya kebijakan program kegiatan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.
- b) Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Terasilitasi dan tersinkronisasinya pelaksanaan kebijakan program kegiatan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.
- c) Pemerintah Daerah. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.
- d) Masyarakat. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

### **4) Strategi Pencapaian Keluaran.**

- a) Metode pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I.
- b) Tahapan pelaksanaan. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - Rapat Koordinasi yang meliputi Rapat koordinasi Awal program Tahun Anggaran 2025 dan rapat-rapat koordinasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Tujuan dan output. Tujuan kegiatan ini agar terwujud

koordinasi antar pengelola program terkait dengan penyelenggaraan program pada masing-masing tingkatan, sedangkan outputnya adalah berupa laporan rapat koordinasi pelaksanaan program perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana.

- Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelaporan.
  - Kegiatan akan melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan Provinsi serta kabupaten yang terlibat program FMCPNJP/FMNJP.
- Dukungan Tenaga Sekretariat CPIU Ditjen Bina Bangda:  
Bertujuan untuk mendukung tugas kesekretariatan CPIU Ditjen Bina Bangda dalam mendukung terlaksananya program FMCPNJP/FMNJP.
- Supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tujuan dan output. Meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir dan outputnya Terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir.
  - Lokasi kegiatan dilaksanakan pada 16 Daerah.
  - Pelaksana: Pelaksana supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) yaitu beberapa Direktorat/Sub Direktorat dilingkungan CPIU Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
  - *Jasa Technical Assistant Project Management and Technical Support Consulting Services (CS – 04):*
  - Kegiatan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda dan menghasilkan output kegiatan berupa terfasilitasinya kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di Ditjen Bina Bangda.
- c) Instansi yang dilibatkan.

Instansi yang dilibatkan di tingkat Pemerintah Pusat antara lain Bappenas Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan sedangkan di tingkat daerah yaitu Bappeda dan instansi terkait lainnya di lokasi pelaksanaan program FMCPNJP/FMNJP.

Untuk mendukung Program *Flood Management in North Java Project* (FMNJP), *Asian Development Bank* (ADB) memberikan pinjaman sebesar JPY36.055.200.000 dengan nomor perjanjian Pinjaman 4410-INO dengan Nomor Register 1NPBHBMA yang mulai efektif pada 9 Februari 2024 dan berakhir pada 30 Juni 2029.

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.006.968.850,00 atau 7,43% dari anggarannya sebesar Rp13.555.466.000,00.

4. Ditjen Dukcapil mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp1.441.706.574.000,00 untuk program ***ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital)***.

Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD250.000.000,00 (sekitar Rp 3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan penggunaan identifikasi digital. Tujuannya, guna memperkuat pelayanan serta kepercayaan terhadap ekonomi digital di Indonesia. Pinjaman ini akan mendukung proyek *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital). Proyek tersebut akan mendukung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri meningkatkan sistem kependudukan dan catatan sipil di Indonesia saat ini terutama memperluas cakupannya di 12 Provinsi prioritas dan di kalangan penduduk rentan di seluruh Indonesia.

Proyek ini akan mendukung pengembangan infrastruktur publik digital prioritas. Termasuk *platform* verifikasi identitas dan *electronic-Know Your Customer (e-KYC)*, aplikasi identifikasi digital, serta *platform* pertukaran data untuk memfasilitasi proses berbagi informasi antar lembaga pemerintah yang mudah dan aman. Proyek ini akan memodernisasi infrastruktur data pada Ditjen Dukcapil. Selain juga meningkatkan kemampuannya dalam menjamin keamanan di dunia maya maupun perlindungan terhadap data pribadi serta kerangka privasi. Proyek ini dapat mendukung peningkatan taraf hidup penduduk Indonesia dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga mereka dapat menggunakan NIK dengan mudah untuk melakukan transaksi dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, baik secara fisik maupun dalam jaringan (*daring/online*).

Proyek ini dapat membantu Indonesia terus menjaga keselamatan dan keamanan data kependudukan. Sistem identifikasi diketahui sebagai faktor kunci dalam pembangunan, kemampuan untuk memverifikasi identitas legal dapat meningkatkan akses kepada layanan dari pemerintah maupun swasta, seperti perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, layanan keuangan serta niaga elektronik (*e-commerce*). Selain itu, juga meningkatkan berbagai peluang ekonomi, misalnya, akses terhadap

pekerjaan formal.

a. Tujuan dan Sasaran Program:

- 1) Memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan penggunaan identifikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyampaian layanan sektor publik dan swasta prioritas untuk seluruh Masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia di 11 provinsi prioritas yang telah memiliki NIK.
- 2) Proporsi anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran.
- 3) Jumlah penduduk Indonesia yang telah menginstal aplikasi ID digital dan melakukan autentikasi minimal satu kali.
- 4) Jumlah orang yang telah menggunakan *platform e-KYC* untuk mengaktifkan layanan terpilih termasuk layanan keuangan.
- 5) Selisih proporsi pria dan wanita Indonesia yang memiliki rekening bank.
- 6) Jumlah pengguna institusional yang menggunakan verifikasi identitas baru dan *platform e-KYC* untuk autentikasi.

b. Spesifikasi Proyek (Data Proyek) adalah:

Nomor Pinjaman	:	IBRD Loan No.9520-ID
Nomor Register	:	1F2V2KKA
Tanggal Penandatanganan	:	30 Mei 2023
Tanggal efektif	:	12 Mei 2023
Tanggal penutupan	:	31 Desember 2027
Rekening Khusus	:	601.354.411.980
Jumlah Pinjaman	:	USD250.000.000,00 (IBRD 100%)
Pelaksana ( <i>Executing Agency</i> )	Proyek	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp2.020.704.778,00 atau 0,14% dari anggarannya sebesar Rp1.441.706.574.000,00.

Rincian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri disajikan pada **Lampiran III** (Ikhtisar PHLN).

### C. CAPAIAN *OUTPUT* PER FUNGSI APBN.

Pelaksanaan APBN pada Kemendagri dapat diklasifikasikan dalam 1 fungsi, yaitu pelayanan umum. Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2025.

**Tabel 26**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2025**

FUNGSI SUB FUNGSI	ES I	PAGU	REALISASI	%
Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Masalah Keuangan Dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri	01	542.418.013.000	209.209.316.595	38,57
	03	163.965.753.000	140.488.969.694	85,68
	07	27.400.000.000	3.528.158.695	12,88
	09	45.200.000.000	3.508.166.241	7,76
<b>SUB TOTAL</b>		<b>778.983.766.000</b>	<b>356.734.611.225</b>	<b>45,79</b>
Pelayanan Umum_Pelayanan Umum	01	618.255.608.000	255.694.548.424	41,36
	02	84.400.737.000	35.897.148.317	42,53
	03	70.540.548.000	35.292.899.161	50,03
	04	71.135.892.000	33.797.586.828	47,51
	05	118.812.415.000	54.897.594.513	46,21
	06	86.389.777.000	40.456.815.597	46,83
	07	71.739.263.000	30.935.148.835	43,12
	08	2.199.614.511.000	234.553.984.868	10,66
	09	65.091.004.000	32.252.374.400	49,55
	11	47.768.338.000	19.722.005.633	41,29
	12	159.147.822.000	76.628.750.038	48,15
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.592.895.915.000</b>	<b>850.128.856.614</b>
Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah	04	139.986.500.000	5.192.827.261	3,71
	05	55.038.926.000	3.544.006.281	6,44
	06	136.894.047.000	7.143.888.018	5,22
	11	10.840.000.000	876.039.254	8,08
	12	61.653.077.000	18.968.249.933	30,77
<b>SUB TOTAL</b>		<b>404.412.550.000</b>	<b>35.725.010.747</b>	<b>8,83</b>
Pelayanan Umum.Pelayanan Umum Lainnya	04	16.036.287.000	1.686.530.126	10,52
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.036.287.000</b>	<b>1.686.530.126</b>	<b>10,52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.244.275.008.712</b>	<b>25,96</b>

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Fungsi dan Sub Fungsi disajikan pada **Lampiran IV** (Rincian Fungsi dan Sub Fungsi APBN).

### D. PRIORITAS NASIONAL (PN).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kemendagri terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada PN I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII dari delapan PN yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran Bruto dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN I Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp5.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp867.462.549,00.

**Tabel 27**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional I**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	5.150.000.000	867.462.549	16,84
<b>Total</b>	<b>5.150.000.000</b>	<b>867.462.549</b>	<b>16,84</b>

2. PN II Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Pelaksanaannya tersebar pada 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp7.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp846.974.848,00.

**Tabel 28**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional II**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	3.500.000.000	487.882.574	13,94
Ditjen Bina Bangda	3.500.000.000	359.092.274	10,26
<b>Total</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>846.974.848</b>	<b>12,10</b>

3. PN III Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp204.906.373,00.

**Tabel 29**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional III**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	1.700.000.000	204.906.373	12,05
<b>Total</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>204.906.373</b>	<b>12,05</b>

4. PN IV Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp13.300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp766.104.299,00.

**Tabel 30**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional IV**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	13.300.000.000	766.104.299	5,76
<b>Total</b>	<b>13.300.000.000</b>	<b>766.104.299</b>	<b>5,76</b>

5. PN V Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp153.820.368,00.

**Tabel 31**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional V**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	1.500.000.000	153.820.368	10,25
<b>Total</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>153.820.368</b>	<b>10,25</b>

6. PN VI Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pelaksanaannya tersebar pada pada 5 (lima) Eselon I dengan pagu mencapai Rp 54.946.946.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.295.639.051,00.

**Tabel 32**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional VI**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	4.700.000.000	379.083.089	8,07
Ditjen Bina Pemdes	36.559.345.000	961.750.269	2,63
Ditjen Bina Bangda	6.000.000.000	616.546.021	10,28
Ditjen Dukcapil	6.187.601.000	323.042.472	5,22
BSKDN	1.500.000.000	15.217.200	1,01
<b>Total</b>	<b>54.946.946.000</b>	<b>2.295.639.051</b>	<b>4,18</b>

7. PN VII Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Pelaksanaannya tersebar pada 3 (tiga) Eselon I dengan pagu mencapai Rp528.850.721.000,00 dan realisasi sebesar Rp158.199.915.265,00.

**Tabel 33**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional VII**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	140.189.125.000	135.858.623.083	96,91
Ditjen Bina Adwil	123.600.000.000	3.702.603.392	3,00
Ditjen Bina Bangda	49.850.000.000	2.985.358.963	5,99
Ditjen Otda	18.000.000.000	2.325.658.012	12,92
Ditjen Dukcapil	162.592.018.000	324.078.380	0,20
Ditjen Bina Keuda	21.700.000.000	1.297.203.865	5,98
BSKDN	1.690.000.000	71.031.000	4,20
BPSDM	11.229.578.000	11.635.358.570	103,61
<b>Total</b>	<b>528.850.721.000</b>	<b>158.199.915.265</b>	<b>29,91</b>

8. PN VIII Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Pelaksanaannya tersebar pada 3 (tiga) Eselon I dengan pagu mencapai Rp12.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.501.279.255,00.

**Tabel 34**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit**  
**Eselon I Prioritas Nasional VIII**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	1.000.000.000	210.218.356	21,02
Ditjen Bina Adwil	8.000.000.000	1.031.432.749	12,89
Ditjen Bina Bangda	3.500.000.000	259.628.150	7,42
<b>Total</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.501.279.255</b>	<b>12,01</b>

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Kegiatan yang Menjadi Prioritas Nasional disajikan pada **Lampiran V** (Rincian Prioritas Nasional).

#### **E. KESALAHAN PENGANGGARAN.**

Pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024 terdapat kesalahan penganggaran pada satker Setjen berupa Belanja Barang menjadi aset sebesar Rp 7.653.450,00.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara*

*Pengeluaran*

*Rp13.592.123.484,00*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.592.123.484,00 dan Rp112.599.303,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang rupiah. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 35.

**Tabel 35**

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I**

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	6.147.851.747	109.599.303	6.038.252.444
2	Itjen	300.000.000	-	300.000.000
3	Ditjen Polpum	2.612.012.952	-	2.612.012.952
4	Ditjen Bina Adwil	1.175.000.000	3.000.000	1.172.000.000
5	Ditjen Pemdes	379.500.000	-	379.500.000
6	Ditjen Bina Bangda	750.000.000	-	750.000.000
7	Ditjen Otda	420.000.000	-	420.000.000
8	Ditjen Dukcapil	300.000.000	-	300.000.000
9	Ditjen Keuda	300.000.000	-	300.000.000
10	BSKDN	210.000.000	-	210.000.000
11	BPSDM	997.758.785	-	997.758.785
<b>JUMLAH</b>		<b>13.592.123.484</b>	<b>112.599.303</b>	<b>13.479.524.181</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 sebesar Rp13.592.123.494,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9.449.258.785,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp4.142.864.699,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker disajikan pada **Lampiran VI**.

*Kas di Bendahara*

*Penerimaan*

*Rp19.635.000,00*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp19.635.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal Neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada Tabel 36.

**Tabel 36**  
**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I**

No	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	BPSDM	19.635.000	-	19.635.000
<b>Jumlah</b>		<b>19.635.000</b>	<b>-</b>	<b>19.635.000</b>

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker disajikan pada **Lampiran VI**.

**Tabel 37**  
**Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	-
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>6.540.218.500</b>
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan pada Satker PPSDM Makassar	3.809.038.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain pada Satker BPSDM	2.269.086.500
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada Satker PPSDM Yogyakarta	462.094.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(6.520.583.500)</b>
Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan tahun 2024	(6.520.583.500)
<b>Saldo Per 30 Juni 2025</b>	<b>19.635.000</b>

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

- a) Penambahan sebesar Rp3.809.038.000,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 satker PPSDM Makassar berupa Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan;
- b) Penambahan sebesar Rp2.269.086.500,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 satker BPSDM yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp1.727.250.000,00, Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp36.500,00 dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp541.800.000,00;
- c) Penambahan sebesar Rp462.094.000,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 satker PPSDM Yogyakarta yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp447.176.000,00 dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp14.918.000,00; dan
- d) Pengurangan sebesar Rp6.520.583.500,00 berasal dari Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan Tahun 2024 pada Satker PPSDM Makassar sebesar Rp3.803.778.000,00, BPSDM

sebesar Rp2.254.711.500,00, dan PPSDM Yogyakarta sebesar Rp462.094.000,00.

*Kas Lainnya dan Setara Kas*  
*Rp67.231.484.326,00*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp67.231.484.326,00 dan Rp64.956.638.835,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas Lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.444.442.850,00, Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp2.556.839.500,00 dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp62.230.201.976,00. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada Tabel 38.

**Tabel 38**  
**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I**

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	1.296.379.333	132.689.889	1.163.689.444
2	Ditjen Bina Adwil	201.002.450	2.350.542.231	(2.149.539.781)
3	Ditjen Bina Pemdes	36.521.675	7.192.991	29.328.684
4	Ditjen Bina Bangda	65.379.798.676	62.443.949.377	2.935.849.299
5	Ditjen Otda	95.406.540	19.478.954	75.927.586
6	Ditjen Dukcapil	71.393.000	-	71.393.000
7	Ditjen Bina Keuda	106.695.553	2.260.705	104.434.848
8	BPSDM	44.287.099	524.688	43.762.411
<b>JUMLAH</b>		<b>67.231.484.326</b>	<b>64.956.638.835</b>	<b>2.274.845.491</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker disajikan pada **Lampiran VI**.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp67.231.484.326,00 adalah sebagai berikut:

- a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.296.379.333,00 pada Eselon I Setjen terdiri dari:
  - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.243.976.002,00 berupa kas yang belum didistribusikan

oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas belanja dengan mekanisme LS Bendahara terdapat pada Setjen sebesar Rp231.167.000,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp47.075.002,00, DKPP sebesar Rp954.093.849,00, dan IPDN Kampus Sulut sebesar Rp11.640.151,00; dan

- ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp52.403.331,00 berupa pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 30 Juni 2025 pada Setjen sebesar Rp90.225,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp1.215.147,00, dan IPDN Kampus Sulsel.
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp201.002.450,00 pada Eselon I Ditjen Bina Adwil terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp200.959.690,00 merupakan pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 30 Juni 2025 pada Satker Ditjen Bina Adwil;
  - ii. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp32.760,00 yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua sebesar Rp60,00 dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp32.700,00; dan
  - iii. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran atas uji coba Cash Management System (CMS) pada Bappeda Provinsi Papua.
- c) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp36.521.675,00 pada Eselon I Ditjen Bina Pemdes merupakan kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas belanja dengan mekanisme LS Bendahara pada Satker Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp11.628.000,00 dan Balai Pemdes Lampung sebesar Rp24.893.675,00;
- d) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp65.379.798.676,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp592.727.200,00 yang merupakan kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas belanja dengan mekanisme LS Bendahara;
  - ii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp62.230.201.976,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United*

*Arab Emirates (UAE) atas Program Financing The Regional Development; dan*

- iii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang belum disahkan sebesar Rp2.556.839.500,00 merupakan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang belum disahkan yang diterima dari UNICEF berupa Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025. Pengesahan terhadap pemakaian kas lainnya dan setara kas tersebut akan dilakukan pada akhir Tahun 2025.
- e) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp95.406.540,00 pada Ditjen Otda merupakan kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas belanja dengan mekanisme LS Bendahara;
- f) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp71.393.000,00 pada Ditjen Dukcapil merupakan kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas belanja dengan mekanisme LS Bendahara;
- g) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp106.695.553,00 pada Ditjen Bina Keuangan Daerah merupakan kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas belanja dengan mekanisme LS Bendahara;
- h) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp44.287.009,00 pada BPSDM terdiri dari:
  - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp35.562.400,00 merupakan kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 terdapat pada BPSDM Pusat sebesar Rp35.150.000,00 dan Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar sebesar Rp412.000,00; dan
  - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.724.699,00 merupakan pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 30 Juni 2025 terdapat pada PPSDM Bukittinggi sebesar Rp1.505.474,00 dan Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar sebesar Rp7.219.225,00

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.956.638.835,00 adalah sebagai berikut:

- a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp132.689.889,00 pada Eselon I Setjen terdiri dari:
  - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp75.767.076,00 pada Setjen Pusat yang merupakan pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp34.490.000,00 dan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp41.277.076,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024. Sisa saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025;

- ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19.421.573,00 pada IPDN Jatinangor terdiri dari kelebihan pembayaran tunjangan istri dan beras Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp9.574.180,00 dan kelebihan pembayaran gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan fungsional dan tunjangan umum Tahun 2024 yang pengembaliannya dilakukan melalui mekanisme potongan SPM Tahun 2025 sebesar Rp9.847.393,00; dan
  - iii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp37.501.240,00 pada IPDN Kampus NTB terdiri dari kelebihan pembayaran uang makan PNS, uang lembur, tunjangan khusus/kegiatan/kinerja Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp30.788.740,00 dan pungutan pajak Tahun 2024 yang disetorkan pada Tahun 2025 sebesar Rp6.712.500,00;
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2.350.542.231,00 pada Eselon I Ditjen Bina Adwil terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.341.253.194,00 pada Satker Ditjen Bina Adwil yang merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp204.858.218,00. Selain itu, terdapat sisa kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang berhak sebesar Rp2.136.394.976,00 terdiri dari SPM LS sebesar Rp487.834.734,00 dan TUP sebesar Rp1.648.560.242,00. Saldo sebesar Rp2.136.394.976,00 tidak tercatat di saldo rekening Bendahara Pengeluaran karena telah dipindahbukukan ke rekening pribadi Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024. Namun, seluruh saldo telah didistribusikan kepada pihak yang berhak pada Tahun 2025;
  - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.213.384,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja Perjalanan Dinas yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak penerima hak sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pada Satker Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kas tersebut telah diserahkan kepada penerima hak pada Tahun 2025;

- iii. Sisa saldo kas pada Rekening satker Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada Aplikasi SPRINT sebesar Rp25.984,00. Sisa saldo kas tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025;
  - iv. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.006.909,00 merupakan pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp170.000,00 dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp836.909,00;
  - v. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp32.760,00 yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua sebesar Rp60,00 dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp32.700,00; dan
  - vi. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS);
- c) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp7.192.991,00 pada Eselon I Ditjen Bina Pemdes Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Bina Pemdes;
- d) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp62.443.949.377,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp213.746.402,00 yang merupakan saldo kas atas denda keterlambatan pekerjaan pemerintah Tahun 2024 pada program Hibah Langsung dari *United Arab Emirates* (UAE);
  - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp999,00 yang merupakan sisa saldo kas yang tersisa pada rekening atas Hibah Langsung dari UNICEF per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada aplikasi SPRINT yang telah disetorkan pada Tahun 2025; dan
  - iii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp62.230.201.976,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United Arab Emirates* (UAE) atas Program *Financing The Regional Development* pada Satker Ditjen Bina Bangda.

- e) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp19.478.954,00 pada Eselon I Ditjen Otda merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Otda;
- f) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2.260.705,00 pada Eselon I Ditjen Bina Keuda merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Bina Keuda; dan
- g) Kas Lainnya dan Setara kas sebesar Rp524.688,00 pada Eselon I BPSDM merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok PNS Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025.

*Belanja Dibayar Dimuka  
(Prepaid) Rp0,00*

#### **C.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp299.007.100,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I terdapat pada Tabel 39.

**Tabel 39**

**Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I**

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	49.007.100	(49.007.100)
2	Ditjen Bina Pemdes	-	250.000.000	(250.000.000)
<b>JUMLAH</b>		-	<b>299.007.100</b>	<b>(299.007.100)</b>

**Tabel 40**

**Mutasi Belanja Dibayar Dimuka**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024</b>	<b>299.007.100</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(299.007.100)</b>
Jurnal balik atas jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir Tahun 2024 pada Setjen Pusat	(49.007.100)
Jurnal balik atas jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2024 pada Ditjen Bina Pemdes	(250.000.000)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>-</b>

- a) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp49.007.100,00 merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2024 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 untuk *voucher* pembelian BBM yang masih tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- b) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp250.000.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2023 atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang bukti pertanggungjawabannya belum lengkap dengan rincian nomor SK sebagai berikut:
- i. SK PPK No. 140-257-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2019;
  - ii. SK PPK No. 140-619-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019;
  - iii. SK PPK No. 410-788-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019;
  - iv. SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2019; dan
  - v. SK PPK No.140-1108-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap V.

Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap terdapat pada Tabel 41.

**Tabel 41**

**Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap per 30 Juni 2025**

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai Bantuan (Rp)
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000
3	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000
4	Papua	Merauke	Naukenjerai	Kuler	50.000.000
5	Papua	Merauke	Naukenjerai	Tomer	50.000.000
Jumlah					250.000.000

*Pendapatan yang Masih  
Harus Diterima  
Rp91.951.450,00*

### C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp91.951.450,00 dan Rp94.651.450,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, namun belum diterima tagihannya.

**Tabel 42**

#### Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I

NO	ESELON I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	91.951.450	91.951.450	-
2	Ditjen Bina Adwil	-	-	-
3	Ditjen Bina Bangda	-	2.700.000	(2.700.000)
<b>JUMLAH</b>		<b>91.951.450</b>	<b>94.651.450</b>	<b>(2.700.000)</b>

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp91.951.450,00 terdiri dari sebesar Rp34.616.450,00 berupa kelebihan pembayaran belanja tunjangan kinerja pada IPDN Kampus Sulawesi Utara yang terjadi pada Tahun 2022 dan sampai dengan 30 Juni 2025 masih belum terdapat setoran pengembalian dan sebesar Rp57.335.000,00 berupa sewa ATM periode 2019 sampai dengan 2021 yang pembayarannya masih belum diterima sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 pada IPDN Jatinangor.

**Tabel 43**

#### Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>94.651.450</b>
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(2.700.000)</b>
Jurnal Balik atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Bina Bangda	(2.700.000)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>91.951.450</b>

Pengurangan sebesar Rp2.700.000,00 berasal dari jurnal balik penyesuaian akhir tahun pada Ditjen Bina Bangda atas pengakuan kekurangan pembayaran sewa atas penempatan mesin ATM.

*Piutang Bukan Pajak  
Rp12.519.196.733,00*

### C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.519.196.733,00 dan Rp12.640.675.594,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayaran. Piutang

Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 44.

**Tabel 44**  
**Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I**

No	Eselon I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	12.518.100.998	12.640.675.594	(122.574.596)
2	Ditjen Dukcapil	355.000	-	355.000
3	BPSDM	740.735	-	740.735
<b>Jumlah</b>		<b>12.519.196.733</b>	<b>12.640.675.594</b>	<b>(121.478.861)</b>

- a) Piutang Bukan Pajak pada Eselon I Setjen sebesar Rp12.518.100.998,00 terdiri dari:
- i. Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana sebesar Rp11.618.743.000,00 yang terdiri dari Piutang Mahasiswa Program Magister sebesar Rp7.383.075.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp4.235.668.000,00, Piutang Biaya Pendidikan Praja IPDN yang diberhentikan dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp897.832.594,00, dan
  - ii. Piutang Lainnya sebesar Rp1.525.404,00 atas pengembalian kelebihan belanja pegawai TAYL yang dibayarkan melalui potongan SPM yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal pelaporan pada IPDN Jatinangor.
- b) Piutang Bukan Pajak pada Eselon I Ditjen Dukcapil sebesar Rp355.000,00 merupakan pengembalian kelebihan belanja pegawai TAYL yang dibayarkan melalui potongan SPM yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal pelaporan; dan
- c) Piutang Bukan Pajak pada Eselon I BPSDM sebesar Rp740.735,00 merupakan pembayaran sewa rumah dinas melalui mekanisme potongan SPM yang SP2D-nya terbit pada Bulan Juli sehingga saldo piutang lainnya yang berbentuk saat penerbitan SPP belum tereliminasi pada tanggal pelaporan yang terdapat pada Satker PPSDM Bukittinggi.

**Tabel 45**  
**Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi**

No	Jenis Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
<b>PIUTANG PNBP</b>					
1	Pendapatan Pendidikan	12.640.675.594	-	(124.100.000)	12.516.575.594
<b>TOTAL PIUTANG PNBP</b>		<b>12.640.675.594</b>	<b>-</b>	<b>(124.100.000)</b>	<b>12.516.575.594</b>
1	Pengembalian kelebihan Belanja Pegawai TAYL melalui mekanisme potongan SPM	-	1.880.404	-	1.880.404
2	Pembayaran sewa melalui mekanisme potongan SPM	-	740.735	-	740.735
<b>TOTAL PIUTANG LAINNYA</b>		<b>-</b>	<b>2.621.139</b>	<b>-</b>	<b>2.621.139</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.640.675.594</b>	<b>2.621.139</b>	<b>(124.100.000)</b>	<b>12.519.196.733</b>

Penambahan sebesar Rp2.621.139,00 terdiri dari:

- a) Pengakuan Piutang Lainnya sebesar Rp1.525.404,00 atas pengembalian kelebihan belanja pegawai TAYL yang dibayarkan melalui potongan SPM yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal pelaporan pada IPDN Jatinangor;
- b) Pengakuan Piutang Lainnya sebesar Rp355.000,00 merupakan pengembalian kelebihan belanja pegawai TAYL yang dibayarkan melalui potongan SPM yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal pelaporan pada Ditjen Dukcapil; dan
- c) Pengakuan Piutang Lainnya sebesar Rp740.735,00 merupakan pembayaran sewa rumah dinas melalui mekanisme potongan SPM yang SP2D-nya terbit pada Bulan Juli sehingga saldo piutang lainnya yang berbentuk saat penerbitan SPP belum tereliminasi pada tanggal pelaporan pada Satker PPSDM Bukittinggi.

Pengurangan sebesar Rp124.100.000,00 berasal dari pelunasan Piutang PNBP pada IPDN Jatinangor terdiri dari pelunasan piutang Program Magister sebesar Rp44.850.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp79.250.000,00

**Tabel 46**  
**Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak**

No	ANGKATAN	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi +/- karena tagihan dan pembayaran tahun ini		Saldo per 30 Juni 2025 (Rp)
			Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
<b>1. IPDN JATINANGOR</b>					
1	XVII	242.650.000			242.650.000
2	XVIII	386.850.000			386.850.000
3	XIX	168.050.000			168.050.000
4	XX	276.950.000			276.950.000
5	XXI	860.375.000			860.375.000
6	XXII	448.275.000		(2.350.000)	445.925.000
7	XXIII	862.650.000			862.650.000
8	XXIV	261.625.000			261.625.000
9	XXV	436.250.000			436.250.000
10	XXVI	640.750.000			640.750.000
11	XXVII	273.750.000			273.750.000
12	XXVIII	407.000.000			407.000.000
13	XXIX	265.000.000			265.000.000
14	XXX	555.750.000		(22.250.000)	533.500.000
15	XXXI (I)	144.000.000			144.000.000
16	XXXI (II)	416.000.000			416.000.000
17	XXXII	203.750.000		(2.000.000)	201.750.000
18	XXXIII (I)	19.500.000			19.500.000
19	XXXIII (II)	29.500.000			29.500.000
20	XXXV	11.500.000			11.500.000
21	XXXV	294.250.000		-	294.250.000
22	XXXVI	52.750.000		(18.250.000)	34.500.000
23	XXXVII	128.500.000			128.500.000
24	XXXVIII	20.750.000			20.750.000
25	XXXIX	-			-
26	XL	21.500.000			21.500.000
<b>JUMLAH S2</b>		<b>7.427.925.000</b>	<b>-</b>	<b>(44.850.000)</b>	<b>7.383.075.000</b>
1	S3-I	571.000.000			571.000.000
2	S3-II	377.750.000			377.750.000
3	S3-III	210.750.000			210.750.000
4	S3-IV	638.800.000			638.800.000
5	S3-IV (II)	18.750.000			18.750.000
6	S3-V (I)	344.993.000			344.993.000
7	S3- V (II)	229.250.000		-	229.250.000
8	S3- VI	237.750.000		-	237.750.000
9	S3- VII (I)	111.250.000		-	111.250.000
10	S3- VII (II)	208.500.000		-	208.500.000
11	S3-VIII	503.000.000		(15.750.000)	487.250.000
12	S3-IX	647.250.000		(30.000.000)	617.250.000
13	S3-X	178.500.000		(33.500.000)	145.000.000
14	S3-XI	37.375.000		-	37.375.000
15	S3-XII	-		-	-
<b>JUMLAH S3</b>		<b>4.314.918.000</b>	<b>-</b>	<b>(79.250.000)</b>	<b>4.235.668.000</b>
<b>TOTAL PIUTANG PASCASARJANA</b>		<b>11.742.843.000</b>	<b>-</b>	<b>(124.100.000)</b>	<b>11.618.743.000</b>
Piutang Praja		897.832.594	-	-	897.832.594
Piutang Lainnya		-	1.525.404		1.525.404
<b>TOTAL PIUTANG IPDN JATINANGOR</b>		<b>12.640.675.594</b>	<b>1.525.404</b>	<b>(124.100.000)</b>	<b>12.518.100.998</b>
<b>2. DITJEN DUKCAPIL</b>		<b>-</b>	<b>355.000</b>	<b>-</b>	<b>355.000</b>
<b>3. PPSDM BUKITTINGGI</b>		<b>-</b>	<b>740.735</b>	<b>-</b>	<b>740.735</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.640.675.594</b>	<b>2.621.139</b>	<b>(124.100.000)</b>	<b>12.519.196.733</b>

Status penyelesaian Piutang PNPB Pascasarjana maupun praja yang diberhentikan saat ini masih diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp11.001.494.430,00 dan Rp11.043.686.930,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih PNBPN terdapat pada IPDN Jatinangor.

Tabel 47

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

No	Angkatan	Total Piutang 30 Juni 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Total Penyisihan 30 Juni 2025 (Rp)
			Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
<b>1. IPDN JATINANGOR</b>							
1	XVII	236.575.000	230.075.000	-	-	32.500	230.107.500
2	XVIII	386.850.000	386.850.000	-	-	-	386.850.000
3	XIX	168.050.000	168.050.000	-	-	-	168.050.000
4	XX	276.950.000	276.950.000	-	-	-	276.950.000
5	XXI	860.375.000	860.375.000	-	-	-	860.375.000
6	XXII	445.925.000	445.925.000	-	-	-	445.925.000
7	XXIII	862.650.000	862.650.000	-	-	-	862.650.000
8	XXIV	261.625.000	261.625.000	-	-	-	261.625.000
9	XXV	436.250.000	436.250.000	-	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	640.750.000	-	-	-	640.750.000
11	XXVII	273.750.000	273.750.000	-	-	-	273.750.000
12	XXVIII	407.000.000	407.000.000	-	-	-	407.000.000
13	XXIX	265.000.000	265.000.000	-	-	-	265.000.000
14	XXX	533.500.000	529.750.000	1.875.000	-	-	531.625.000
15	XXXI (I)	144.000.000	143.250.000	-	75.000	-	143.325.000
16	XXXI (II)	416.000.000	336.500.000	39.750.000	-	-	376.250.000
17	XXXII	201.750.000	153.750.000	6.500.000	1.950.000	77.500	162.277.500
18	XXXIII (I)	19.500.000	19.500.000	-	-	-	19.500.000
19	XXXIII (II)	29.500.000	12.000.000	-	-	87.500	12.087.500
20	XXXIV	11.500.000	-	5.750.000	-	-	5.750.000
21	XXXV	294.250.000	279.000.000	7.500.000	-	1.250	286.501.250
22	XXXVI	34.500.000	-	4.250.000	1.300.000	65.000	5.615.000
23	XXXVII	134.575.000	18.575.000	-	-	580.000	19.155.000
24	XXXVIII	20.750.000	-	7.125.000	-	32.500	7.157.500
25	XXXIX	-	-	-	-	-	-
26	XL	21.500.000	-	-	700.000	72.500	772.500
<b>Jumlah S2</b>		<b>7.383.075.000</b>	<b>7.007.575.000</b>	<b>72.750.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>948.750</b>	<b>7.085.298.750</b>
1	S3-I	571.000.000	571.000.000	-	-	-	571.000.000
2	S3-II	377.750.000	377.750.000	-	-	-	377.750.000
3	S3-III	210.750.000	182.750.000	14.000.000	-	-	196.750.000
4	S3-IV	638.800.000	565.800.000	27.625.000	1.775.000	-	595.200.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	18.750.000	-	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	344.993.000	342.243.000	-	275.000	-	342.518.000
7	S3-V (II)	229.250.000	-	34.375.000	12.575.000	173.750	47.123.750
8	S3-VI	237.750.000	171.000.000	15.375.000	3.600.000	-	189.975.000
9	S3-VII (I)	111.250.000	96.500.000	7.375.000	-	-	103.875.000
10	S3-VII (II)	208.500.000	193.750.000	7.375.000	-	-	201.125.000
11	S3-VIII	487.250.000	435.500.000	7.375.000	3.350.000	17.500	446.242.500
12	S3-IX	617.250.000	-	-	-	3.086.250	3.086.250
13	S3-X	145.000.000	-	-	-	725.000	725.000
14	S3-XI	37.375.000	-	-	950.000	139.375	1.089.375
15	S3-XII	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah S3</b>		<b>4.235.668.000</b>	<b>2.955.043.000</b>	<b>113.500.000</b>	<b>22.525.000</b>	<b>4.141.875</b>	<b>3.095.209.875</b>
<b>Jumlah Total Pascasarjana</b>		<b>11.618.743.000</b>	<b>9.962.618.000</b>	<b>186.250.000</b>	<b>26.550.000</b>	<b>5.090.625</b>	<b>10.180.508.625</b>
<b>Piutang Praja</b>		<b>897.832.594</b>	<b>777.320.272</b>	<b>41.042.231</b>	<b>2.559.119</b>	<b>64.183</b>	<b>820.985.805</b>
<b>Piutang Lainnya</b>		<b>1.525.404</b>					-
<b>Total IPDN Jatinangor</b>		<b>12.518.100.998</b>	<b>10.739.938.272</b>	<b>227.292.231</b>	<b>29.109.119</b>	<b>5.154.808</b>	<b>11.001.494.430</b>
<b>2. Ditjen Dukcapil</b>		<b>355.000</b>					-
<b>3. PPSDM Bukittinggi</b>		<b>740.735</b>					-
<b>Total Kemendagri</b>		<b>12.519.196.733</b>	<b>10.739.938.272</b>	<b>227.292.231</b>	<b>29.109.119</b>	<b>5.154.808</b>	<b>11.001.494.430</b>

Bagian Lancar Tagihan  
TP/TGR Rp0,00

### C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp300.680.096,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 48.

Tabel 48

#### Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Uraian	Eselon I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bagian Lancar TGR	Setjen	-	300.680.096
Jumlah			-	300.680.096

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 30 Juni 2025 tersaji pada Tabel 50.

Tabel 49

#### Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	300.680.096
Mutasi Kurang (Jurnal Balik Awal Tahun):	(300.680.096)
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulawesi Utara)	(300.680.096)
Saldo per 30 Juni 2025	-

Penjelasan mutasi Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut:

Transaksi pengurangan sebesar Rp300.680.096,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Bagian  
Lancar TP/TGR Rp0,00

### C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.503.401,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Persediaan

Rp442.376.282.858,00

## C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp442.376.282.858,00 dan Rp338.870.256.976,00.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 50.

**Tabel 50**  
**Rincian Persediaan**

Kode Perkiraan	Uraian	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
<b>I. Persediaan yang akan menjadi Beban Persediaan pada saat digunakan</b>			
117111	Barang Konsumsi	3.802.866.177	3.616.888.027
117199	Persediaan Lainnya	1.332.404.193	1.152.137.472
<b>Total</b>		<b>5.135.270.370</b>	<b>4.769.025.499</b>
<b>II. Persediaan yang akan menjadi Beban Pemeliharaan pada saat digunakan</b>			
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	675.086.996	625.989.968
117114	Suku Cadang	176.107.627	83.808.068
<b>Total</b>		<b>851.194.623</b>	<b>709.798.036</b>
<b>III. Persediaan yang akan menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>			
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.391.184.913	21.391.184.913
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	31.984.858.276	33.349.858.276
117125	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28.860.434.489	28.860.434.489
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71.066.062.000	71.066.062.000
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	134.138.572.767	139.951.231.767
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	112.697.128.320	2.521.084.896
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	36.251.577.100	36.251.577.100
<b>Total</b>		<b>436.389.817.865</b>	<b>333.391.433.441</b>
<b>TOTAL PERSEDIAAN</b>		<b>442.376.282.858</b>	<b>338.870.256.976</b>

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 51.

**Tabel 51**  
**Rincian Persediaan per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	4.367.088.384	4.003.439.661	363.648.723
2	Itjen	74.939.290	249.276.380	(174.337.090)
3	Ditjen Polpum	4.159.170	-	4.159.170
4	Ditjen Bina Adwil	24.322.266.076	25.671.175.183	(1.348.909.107)
5	Ditjen Pemdes	14.184.930.557	14.230.579.154	(45.648.597)
6	Ditjen Bina Bangsa	278.562.450.091	278.372.114.776	190.335.315
7	Ditjen Otda	1.796.632.817	1.678.218.300	118.414.517
8	Ditjen Dukcapil	118.503.987.112	14.228.224.513	104.275.762.599
9	Ditjen Keuda	44.281.665	35.357.450	8.924.215
10	BSKDN	112.526.883	124.821.163	(12.294.280)
11	BPSDM	403.020.813	277.050.396	125.970.417
<b>Jumlah</b>		<b>442.376.282.858</b>	<b>338.870.256.976</b>	<b>103.506.025.882</b>

Rincian Persediaan per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

**Tabel 52**  
**Mutasi Persediaan**

Akun Persediaan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 30 Juni 2025 (Rp)
Barang Konsumsi	3.616.888.027	6.276.827.305	6.090.849.155	3.802.866.177
Bahan untuk Pemeliharaan	625.989.968	1.324.220.826	1.275.123.798	675.086.996
Suku Cadang	83.808.068	235.882.549	143.582.990	176.107.627
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.391.184.913	-	-	21.391.184.913
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	33.349.858.276	45.000.000	1.410.000.000	31.984.858.276
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28.860.434.489	-	-	28.860.434.489
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71.066.062.000	-	-	71.066.062.000
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	139.951.231.767	-	5.812.659.000	134.138.572.767
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	2.521.084.896	216.978.420.000	106.802.376.576	112.697.128.320
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	36.251.577.100	-	-	36.251.577.100
Bahan Baku	-	66.961.700	66.961.700	-
Persediaan Lainnya	1.152.137.472	1.225.836.785	1.045.570.064	1.332.404.193
<b>TOTAL</b>	<b>338.870.256.976</b>	<b>226.153.149.165</b>	<b>122.647.123.283</b>	<b>442.376.282.858</b>

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Eselon I disajikan pada **Lampiran VIII**.

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Akun disajikan pada **Lampiran IX**.

Terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang tidak berada dalam penguasaan Kementerian Dalam Negeri berupa persediaan yang telah diserahterimakan kepada Pemda namun sampai dengan tanggal Neraca belum terbit SK Penghapusannya sebesar Rp5.315.426.309,00 yang terdiri dari sebesar Rp4.888.439.809,00 pada Ditjen Bina Adwil berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.395.007.844,00 dan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.493.431.965,00, sebesar Rp419.258.500,00 pada Ditjen Bina Pemdes berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat, serta sebesar Rp7.728.000,00 berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Otda dengan rincian terlampir pada **Lampiran X**.

Transaksi Koreksi Saldo Awal dan Keluar Lainnya sebesar Rp2.968.660,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan harga barang per unit dan kuantitas barang pada Satker IPDN Kampus Papua.

Transaksi Reklasifikasi dari Aset sebesar Rp45.000.000,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan kode barang pada saat perolehan persediaan yang semula tercatat sebagai Peralatan dan Mesin terdapat pada Satker Ditjen Bina

Pemdes.

Transaksi Barang Usang sebesar Rp4.418.749,00 merupakan transaksi dalam rangka mengeluarkan persediaan dengan kondisi usang dari Neraca yang terdapat pada IPDN Kampus Sumbar;

Terdapat persediaan berupa sepuluh unit tenda pleton Satpol PP pada Ditjen Bina Adwil yang telah dikeluarkan dari Neraca pada akhir Tahun 2024 karena telah diserahkan kepada sepuluh Pemda dan dilengkapi dengan BAST, namun sampai dengan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024 berakhir persediaan tersebut masih berada di Ditjen Bina Adwil.

Adapun rincian sepuluh Pemda penerima bantuan pemerintah berupa tenda pleton Satpol PP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Pemerintah Kota Subulussalam;
4. Pemerintah Kota Sungai Penuh;
5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
7. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
9. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
10. Pemerintah Kabupaten Nduga.

Sampai dengan 30 Juni 2025 telah terdapat tiga unit tenda pleton Satpol PP telah diserahkan kepada Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Pegunungan Bintang, dan Pemkab Nduga.

Tanah

Rp13.251.627.720.522,00

### C.11 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.13.251.627.720.522,00 dan Rp.13.251.627.720.522,00.

Rincian Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 53.

**Tabel 53**

**Rincian Tanah per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	10.335.290.899.077	10.335.290.899.077	-
2	Itjen	142.267.725.000	142.267.725.000	-
3	Ditjen Pemdes	613.234.134.493	613.234.134.493	-
4	Ditjen Bina Bangda	479.054.657.019	479.054.657.019	-
5	BSKDN	224.894.826.500	224.894.826.500	-
6	BPSDM	1.456.885.478.433	1.456.885.478.433	-
<b>Jumlah</b>		<b>13.251.627.720.522</b>	<b>13.251.627.720.522</b>	-

Rincian Tanah per Satker disajikan pada **Lampiran XI**.

Rincian Mutasi Tanah per Eselon I terdapat pada **Lampiran XII**.

**Tabel 54**  
**Rincian Mutasi Tanah**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>13.251.627.720.522</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>154.652.073.912</b>
Saldo Awal	35.098.225.956
Transfer Masuk	119.553.847.956
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(154.652.073.912)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(35.098.225.956)
Transfer Keluar	(119.553.847.956)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>13.251.627.720.522</b>

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Tanah sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp35.098.225.956,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke Ditjen DUKCAPIL;
- b) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp119.553.847.956,00 terdapat pada IPDN Kampus Papua yang diterima dari Setjen atas Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun 2024 dan Ditjen DUKCAPIL sebesar Rp84.455.622.000,00 yang diterima dari IPDN Jatinangor berupa tanah yang berlokasi di Jalan Ampera Raya Nomor 1 Kampus IPDN Jakarta;
- c) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp35.098.225.956,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke Ditjen DUKCAPIL; dan
- d) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp119.553.847.956,00 terdapat pada terdapat pada Setjen ke IPDN Kampus Papua atas Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun 2024 dan IPDN Jatinangor ke Ditjen DUKCAPIL sebesar Rp84.455.622.000,00 berupa tanah yang berlokasi di Jalan Ampera Raya Nomor 1 Kampus IPDN Jakarta

Peralatan dan Mesin  
Rp4.158.347.882.906,00

## C.12 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.158.347.882.906,00 dan Rp4.156.760.195.772,00.

Rincian Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 55.

**Tabel 55**  
**Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Setjen	944.948.545.017	945.568.072.283	(619.527.266)
2	Itjen	26.972.071.344	27.007.975.396	(35.904.052)
3	Ditjen Polpum	18.685.318.478	17.595.012.477	1.090.306.001
4	Ditjen Bina Adwil	134.767.781.173	134.217.143.473	550.637.700
5	Ditjen Bina Pemdes	103.548.584.667	103.099.088.506	449.496.161
6	Ditjen Bina Bangda	67.424.783.914	67.403.183.914	21.600.000
7	Ditjen Otda	23.278.106.047	23.268.106.047	10.000.000
8	Ditjen Dukcapil	2.643.491.330.396	2.643.463.301.276	28.029.120
9	Ditjen Keuda	20.762.917.557	20.384.999.557	377.918.000
10	Badan Litbang	25.825.828.789	25.825.828.789	-
11	Badan PSDM	148.642.615.524	148.927.484.054	(284.868.530)
	<b>Jumlah</b>	<b>4.158.347.882.906</b>	<b>4.156.760.195.772</b>	<b>1.587.687.134</b>

Rincian Peralatan dan Mesin per Satker disajikan pada **Lampiran XI**.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XIII**.

**Tabel 56**  
**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>4.156.760.195.772</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>10.879.001.839</b>
Saldo Awal	110.724.000
Pembelian	10.592.158.580
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	143.475.259
Transfer Masuk	10.000.000
Hibah Masuk	22.644.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(9.291.314.705)</b>
Koreksi Susulan	(539.429.370)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(10.312.578)
Transfer Keluar	(10.000.000)
Hibah Keluar	(70.067.500)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	(11.877.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8.649.628.257)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>4.158.347.882.906</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(3.590.209.290.660)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>568.138.592.246</b>

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp110.724.000,00 terdapat pada Setjen merupakan koreksi dalam rangka pencatatan Peralatan dan Mesin berupa 2 Unit Minibus perolehan TAYL yang baru dibukukan pada Tahun 2025. Nilai Koreksi Saldo Awal dicatat berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor LAP-0018/1/PRO-01/KNL.0704/01.01.00/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- b) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp10.592.158.580,00. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.768.403.920,00 berasal dari Belanja Modal. Terdapat pembelian sebesar Rp823.754.660,00 yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per satker terdapat pada **Lampiran XIV**;

- c) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp143.475.259,00 terdapat pada Setjen. Pengembangan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp135.821.809,00 berasal dari Belanja Modal dan sebesar Rp7.653.450,00 berasal dari Belanja Barang;
- d) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp10.000.000,00 merupakan Peralatan dan Mesin berupa 20 unit Kursi Besi/Metal yang diterima dari Ditjen Otda oleh Setjen Pusat;
- e) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp22.644.000,00 terdapat pada Setjen Pusat berupa 5 Unit Kursi Taman dan 5 Unit Tempat Sampah dalam rangka dukungan penyediaan peralatan pada bangunan flexible workspace dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
- f) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp539.429.370,00 terdapat pada Setjen Pusat merupakan koreksi atas penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang menjadi Peralatan dan Mesin;
- g) Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp10.312.578,00 terdiri dari sebesar Rp7.700.000,00 pada IPDN Jatinangor dan sebesar Rp2.612.578,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes yang merupakan koreksi atas penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang menjadi Peralatan dan Mesin;
- h) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp10.000.000,00 merupakan Peralatan dan Mesin berupa 20 unit Kursi Besi/Metal oleh Setjen Pusat ke Ditjen Otda;

- i) Transaksi pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp70.067.500,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes atas 7 unit P.C. Unit dalam rangka penyelesaian saldo satker inaktif;
- j) Transaksi pengurangan dari Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra sebesar Rp11.877.000,00 merupakan koreksi dalam rangka Pengembalian Belanja Modal TAYL yang semula dicatat sebagai Peralatan dan Mesin, namun setelah dilakukan Koreksi Nilai Berkurang, nilai Peralatan dan Mesin tersebut menjadi di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga tercatat sebagai ekstrakomptabel terdapat pada Ditjen Bina Pemdes;
- k) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp8.649.628.257,00 terdapat pada:
  - i. IPDN Jatinangor sebesar Rp7.247.756.962,00;
  - ii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp454.954.343,00;
  - iii. Itjen sebesar Rp165.848.422,00;
  - iv. PPSDM Regional Bandung sebesar Rp43.350.000,00; dan
  - v. PPSDM Regional Makassar sebesar Rp737.718.530,00

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 sebesar Rp4.158.347.882.906,00 tersebut diantaranya terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp31.412.042.896,00. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri mengungkap adanya peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu atas LHP LK Tahun 2022 pada tiga satker sebesar Rp2.525.519.691,00 dan Tahun 2023 pada 12 satker sebesar Rp28.886.523.205,00.

*Gedung dan Bangunan  
Rp2.924.241.004.290,00*

### C.13 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.922.592.918.649,00 dan Rp2.922.592.918.649,00. Rincian Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 57.

**Tabel 57**

#### Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	2.084.171.172.411	2.084.074.148.806	97.023.605
2	Itjen	45.925.502.780	45.925.502.780	-
3	Ditjen Bina Adwil	1.576.390.000	1.576.390.000	-
4	Ditjen Bina Pemdes	188.819.327.749	188.820.033.099	(705.350)
5	Ditjen Bina Bangda	105.369.424.652	103.940.869.452	1.428.555.200
6	Ditjen Dukcapil	36.482.740.783	36.357.571.783	125.169.000
7	BSKDN	32.772.037.871	32.772.037.871	-
8	BPSDM	429.124.408.044	429.126.364.858	(1.956.814)
<b>Jumlah</b>		<b>2.924.241.004.290</b>	<b>2.922.592.918.649</b>	<b>1.648.085.641</b>

Rincian Gedung dan Bangunan per Satker disajikan pada **Lampiran XI**.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XV**.

**Tabel 58**  
**Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>2.922.592.918.649</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>1.864.041.500</b>
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.611.516.500
Transfer Masuk	125.169.000
Hibah Masuk	127.356.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(215.955.859)</b>
Koreksi Susulan	(5.968.088)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(84.818.771)
Transfer Keluar	(125.169.000)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>2.924.241.004.290</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(605.543.272.533)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>2.318.697.731.757</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai sebesar Rp1.611.516.500,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp182.961.300,00 dan Ditjen Bina Bangda sebesar Rp1.428.555.200,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- b) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp125.169.000,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil atas Bangunan Gedung Pendidikan Permanen yang diterima dari IPDN Jatinangor;
- c) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp127.356.000,00 terdapat pada Setjen Pusat berupa *flexible workspace* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
- d) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp5.968.088,00 terdapat pada Setjen Pusat merupakan koreksi atas penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang menjadi Gedung dan Bangunan;
- e) Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp84.818.771,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp82.156.607,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp705.350,00 dan PPSDM Regional Bandung sebesar Rp1.956.814,00 merupakan koreksi atas penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang menjadi Gedung dan Bangunan; dan

- f) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp125.169.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor ke Ditjen Dukcapil atas Bangunan Gedung Pendidikan Permanen.

*Jalan, Irigasi dan*

*Jaringan*

*Rp299.781.474.142,00*

#### **C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp299.781.474.142,00 dan Rp299.793.586.980,00.

Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 59.

**Tabel 59**

**Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Setjen	247.223.993.994	247.236.106.832	(12.112.838)
2	Ditjen Bina Adwil	11.245.442.670	11.245.442.670	-
3	Ditjen Pemdes	3.058.859.874	3.058.859.874	-
4	Ditjen Bina Bangda	4.437.609.690	4.437.609.690	-
5	Ditjen Dukcapil	2.863.933.000	2.863.933.000	-
6	BSKDN	505.733.100	505.733.100	-
7	BPSDM	30.445.901.814	30.445.901.814	-
<b>Jumlah</b>		<b>299.781.474.142</b>	<b>299.793.586.980</b>	<b>(12.112.838)</b>

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker disajikan pada **Lampiran XI**.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVI**.

**Tabel 60**

**Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>299.793.586.980</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>546.531.335</b>
Transfer Masuk	546.531.335
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(558.644.173)</b>
Koreksi Susulan	(12.112.838)
Transfer Keluar	(546.531.335)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>299.781.474.142</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(167.316.201.609)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>132.465.272.533</b>

Penjelasan transaksi mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar

Rp546.531.335,00 terdapat pada Balai Satpol PP dan Damkar atas Jaringan yang diterima dari BPSDM;

- b) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp12.112.838,00 terdapat pada Setjen Pusat atas penerimaan kembali belanja modal TAYL yang menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- c) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp546.531.335,00 terdapat pada BPSDM ke Balai Satpol PP dan Damkar atas Jaringan berupa Instalasi Air Tanah dalam Kapasitas Kecil, Jaringan Distribusi Tegangan 1 s.d. 20 KVA dan Jaringan Distribusi Lainnya.

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp95.296.257.772,00

### C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp95.296.257.772,00 dan Rp95.015.581.772,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 61.

**Tabel 61**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I**

No	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	31.318.260.948	31.037.584.948	280.676.000
2	Ditjen Polpum	642.024.528	642.024.528	-
3	Ditjen Bina Adwil	17.686.224.808	17.686.224.808	-
4	Ditjen Pemdes	13.580.320.108	13.580.320.108	-
5	Ditjen Bina Bangda	4.951.568.889	4.951.568.889	-
6	Ditjen Otda	14.521.363.182	14.521.363.182	-
7	Ditjen Dukcapil	7.196.688.361	7.196.688.361	-
8	Ditjen Keuda	1.913.718.758	1.913.718.758	-
9	BSKDN	519.862.436	519.862.436	-
10	BPSDM	2.966.225.754	2.966.225.754	-
	<b>Jumlah</b>	<b>95.296.257.772</b>	<b>95.015.581.772</b>	<b>280.676.000</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVII**.

**Tabel 62**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>95.015.581.772</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>283.012.000</b>
Pembelian	283.012.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(2.336.000)</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.336.000)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>95.296.257.772</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(22.878.270.954)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>72.417.986.818</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp283.012.000,00 terdapat pada IPDN Jatiningor sebesar Rp193.102.000,00 dan IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp89.910.000,00 yang berasal dari Belanja Modal; dan
- b) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp2.336.000,00 terdapat pada IPDN Jatiningor atas Alat Musik Tradisional/Daerah.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp25.366.869.749,00*

### **C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp25.366.869.749,00 dan Rp29.571.282.509,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 63.

**Tabel 63**  
**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	24.948.370.899	24.948.370.899	-
2	Ditjen Bina Pemdes	24.997.200	24.997.200	-
3	Badan PSDM	393.501.650	393.501.650	-
<b>Jumlah</b>		<b>25.366.869.749</b>	<b>25.366.869.749</b>	<b>-</b>

Rincian KDP per Satker disajikan pada **Lampiran XVIII**.

**Tabel 64**

**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI (Rp)
Setjen	IPDN Kalbar (683070)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24.948.370.899
<b>Jumlah Setjen</b>			<b>24.948.370.899</b>
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24.997.200
<b>Jumlah Ditjen Bina Pemdes</b>			<b>24.997.200</b>
BPSDM	BPSDM (403231)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	318.987.650
	PPSDM Regional Bandung (403216)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	74.514.000
<b>Jumlah BPSDM</b>			<b>393.501.650</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>25.366.869.749</b>

KDP senilai Rp25.366.869.749,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp24.948.370.899,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp24.997.200,00, dan BPSDM sebesar Rp318.987.650,00 yang belum memperoleh alokasi anggaran untuk dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan dan dihentikan sementara waktu sehingga sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan seluruh saldo KDP tersebut dicatat sebagai KDP yang Dihentikan dari Operasi dan disajikan pada pos Aset Lain-lain. Reklasifikasi ke Aset Lainnya belum dapat diproses melalui Aplikasi SAKTI sehingga masih disajikan pada pos KDP.

*Akumulasi Penyusutan*

*Aset Tetap*

*Rp4.385.947.035.756,00*

**C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.385.947.035.756,00 dan Rp4.211.432.344.941,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker disajikan pada **Lampiran XI**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 tersaji pada Tabel 65.

**Tabel 65**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Peralatan dan Mesin	4.158.347.882.906	(3.590.209.290.660)	568.138.592.246
2	Gedung dan Bangunan	2.924.241.004.290	(605.543.272.533)	2.318.697.731.757
3	Jalan dan Jembatan	79.358.601.816	(60.883.054.657)	18.475.547.159
4	Irigasi	48.122.758.537	(32.117.814.241)	16.004.944.296
5	Jaringan	172.300.113.789	(74.315.332.711)	97.984.781.078
6	Aset Tetap Lainnya	95.296.257.772	(22.878.270.954)	72.417.986.818
<b>Jumlah</b>		<b>7.477.666.619.110</b>	<b>(4.385.947.035.756)</b>	<b>3.091.719.583.354</b>

*Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp18.240.996.030,00*

### **C.18 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp18.240.996.030,00 dan Rp17.950.315.934,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 66.

**Tabel 66**  
**Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I**

No	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	390.906.795	100.226.699	290.680.096
2	Ditjen Polpum	17.850.089.235	17.850.089.235	-
<b>Jumlah</b>		<b>18.240.996.030</b>	<b>17.950.315.934</b>	<b>290.680.096</b>

Mutasi tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 tersaji pada Tabel 67.

**Tabel 67**  
**Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 30 Juni 2025**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>17.950.315.934</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>300.680.096</b>
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut)	300.680.096
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(10.000.000)</b>
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut)	(10.000.000)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>18.240.996.030</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan pada Setjen sebesar Rp300.680.096,00 berasal dari reklasifikasi masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2025 pada IPDN Kampus Sulut; dan
- b) Transaksi pengurangan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp10.000.000,00 terdiri dari pembayaran Piutang TGR yang diakui pada Tahun Anggaran 2024 atas temuan pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024.

Terdapat Piutang berupa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan April 2017 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan dan Aset Nomor 956/181/SJ tanggal 10 Januari 2019 hal penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-01/PUPNC.10.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-71/PUPNC.10.03/2021 tanggal 11 November 2021 hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, maka kepengurusan piutang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Kemendagri telah mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi

Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI. Berdasarkan Surat Wakil Ketua BPK RI Nomor 46/S/II/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas Nama Sdri. EI, dinyatakan bahwa BPK RI telah menyetujui permohonan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. Menteri Keuangan telah menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/2023 tanggal 11 September 2023. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. dengan menghapuskan piutang negara tersebut dari pembukuan Inspektorat Jenderal.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Ditjen Polpum sebesar Rp17.850.089.235,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan Januari 2012 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 16 September 2020 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-21/PUPNC.10.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.

*Penyisihan Piutang  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp17.852.043.769,00*

### **C.19 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.852.043.769,00 dan Rp17.850.590.368,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

**Tabel 68**  
**Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I**

No	Komponen	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Setjen	Lancar	1	390.906.795	1.954.534
2	Ditjen Polpum	Macet	1	17.850.089.235	17.850.089.235
<b>Total</b>			<b>2</b>	<b>18.240.996.030</b>	<b>17.852.043.769</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp800.418.289.126,00

## C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp800.418.289.126,00 dan Rp830.510.381.843,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

**Tabel 69**  
**Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025**

No	Uraian	Nilai per 30 Juni 2025 (Rp)	Nilai per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Software	726.520.890.946	756.371.780.413	(29.850.889.467)
2	Lisensi	69.342.114.830	69.533.433.080	(191.318.250)
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	2.271.764.600	-
4	ATB Lainnya	2.283.518.750	2.333.403.750	(49.885.000)
<b>Total Nilai Perolehan</b>		<b>800.418.289.126</b>	<b>830.510.381.843</b>	<b>(30.092.092.717)</b>
Nilai Amortisasi ATB		(690.744.546.839)	(700.427.422.558)	9.682.875.719
<b>Total Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>		<b>109.673.742.287</b>	<b>130.082.959.285</b>	<b>(20.409.216.998)</b>

Rincian Aset Tak Berwujud menurut Eselon I per 30 Juni 2025 tersaji pada Tabel 70.

**Tabel 70**  
**Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I**

No	ESELON I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	74.894.931.373	73.437.842.168	1.457.089.205
2	Itjen	1.145.474.320	1.289.389.320	(143.915.000)
3	Ditjen Polpum	8.313.499.230	8.313.499.230	-
4	Ditjen Bina Adwil	3.758.937.210	1.034.120.800	2.724.816.410
5	Ditjen Bina Pemdes	17.583.975.880	17.583.975.880	-
6	Ditjen Bina Bangda	708.280.140	708.280.140	-
7	Ditjen Otda	2.487.407.950	2.487.407.950	-
8	Ditjen Dukcapil	684.831.981.546	684.831.981.546	-
9	Ditjen Bina Keuda	1.353.050.103	35.482.587.935	(34.129.537.832)
10	BSKDN	3.649.763.931	3.600.424.431	49.339.500
11	Badan PSDM	1.690.987.443	1.740.872.443	(49.885.000)
<b>Jumlah</b>		<b>800.418.289.126</b>	<b>830.510.381.843</b>	<b>(30.092.092.717)</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker disajikan pada **Lampiran XIX**.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XX**.

**Tabel 71**  
**Mutasi Aset Tak Berwujud**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>830.510.381.843</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>4.877.728.115</b>
Transfer Masuk	4.602.728.965
Pengembangan Nilai Aset	274.999.150
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(34.969.820.832)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(395.633.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(34.574.187.832)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>800.418.289.126</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	(690.744.546.839)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>109.673.742.287</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp4.602.728.965,00 terdapat pada DKPP sebesar Rp1.877.912.555,00 berupa *Software* Komputer Aplikasi SIETIK serta terdapat pada Ditjen BAK sebesar Rp2.724.816.410,00 berupa *Software* Komputer Aplikasi Satpol sebesar Rp1.362.408.205,00 dan *Software* Komputer Aplikasi Pemadam Kebakaran (Redkar dan Sipadam) sebesar Rp1.362.408.205,00 yang dialihstatuskan dari Kementerian Komdigi ke Kemendagri;
- b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp274.999.150,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp225.659.650,00 atas *Software* Komputer sebesar Rp194.127.900,00 serta perpanjangan Lisensi *Website* PPID Kemendagri sebesar Rp31.531.750,00 dan BSKDN sebesar Rp49.339.500,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- c) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp395.633.000,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp121.463.000,00 dan IPDN Jatinangor sebesar Rp274.170.000,00 dalam rangka pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu; dan
- d) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp34.574.187.832,00 terdapat pada:
  - i. Setjen Pusat sebesar Rp222.850.000,00 atas Lisensi dan Rp28.000.000,00 atas *Software* Komputer;
  - ii. Itjen Pusat sebesar Rp143.915.000,00 atas *Software* Komputer;

- iii. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp34.129.537.832,00 atas *Software* Komputer;
- iv. PPSDM Regional Bandung sebesar Rp49.885.000,00 atas ATB Lainnya.

*Dana Yang Dibatasi  
Penggunaannya Rp0,00*

### **C.21 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp384.325.357.961,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

*Aset Lain-Lain  
Rp211.486.817.179,00*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp211.486.817.179,00 dan Rp182.864.064.500,00. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemendagri serta dalam proses penghapusan dari BMN.

**Tabel 72**

**Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 30 Juni 2025**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	120.573.933.849
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	90.912.883.330
<b>Total</b>		<b>211.486.817.179</b>

Rincian Aset Lain-Lain menurut Eselon I per 30 Juni 2025 tersaji pada Tabel 73.

**Tabel 73**  
**Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I**

No	ESELON I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	21.538.308.489	23.278.604.600	(1.740.296.111)
2	Itjen	309.763.422	-	309.763.422
3	Ditjen Bina Adwil	2.832.484.380	2.832.484.380	-
4	Ditjen Pemdes	750.410.747	750.410.747	-
5	Ditjen Bina Bangda	48.785.882.881	48.785.882.881	-
6	Ditjen Otda	83.604.831.090	87.992.566.356	(4.387.735.266)
7	Ditjen Dukcapil	2.017.817.909	2.017.817.909	-
8	Ditjen Keuda	40.043.173.862	5.913.636.030	34.129.537.832
9	BSKDN	3.138.663.350	3.138.663.350	-
10	Badan PSDM	8.465.481.049	8.153.998.247	311.482.802
	<b>Jumlah</b>	<b>211.486.817.179</b>	<b>182.864.064.500</b>	<b>28.622.752.679</b>

Rincian Aset Lain-Lain per Satker disajikan pada **Lampiran XIX**.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXI**.

**Tabel 74**  
**Mutasi Aset Lain-Lain**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>182.864.064.500</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>43.226.152.089</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan	43.226.152.089
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(14.603.399.410)</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(14.603.399.410)
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	<b>211.486.817.179</b>
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi s.d 30 Juni 2025	(204.219.900.399)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	<b>7.266.916.780</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp43.226.152.089,00 terdapat pada:
  - i. Setjen Pusat sebesar Rp250.850.000,00;
  - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp7.250.092.962,00;
  - iii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp454.954.343,00;
  - iv. Itjen Pusat sebesar Rp309.763.422,00;
  - v. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp34.129.537.832,00;
  - vi. PPSDM Regional Bandung sebesar Rp93.235.000,00; dan
  - vii. PPSDM Regional Makassar sebesar Rp737.718.530,00.
- b) Transaksi pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau

Dihapuskan sebesar Rp14.603.399.410,00 terdapat pada:

- i. Setjen Pusat sebesar Rp1.179.224.500,00;
- ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp8.516.968.916,00;
- iii. Ditjen Otda sebesar Rp4.387.735.266,00; dan
- iv. PPSDM Regional Makassar sebesar Rp519.470.728,00.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*  
Rp894.964.447.238,00

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp894.964.447.238,00 dan Rp875.727.657.235,00.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya tersaji pada tabel 75.

**Tabel 75**

**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	726.520.890.946	(679.182.202.176)	Rp 47.338.688.770
2	Lisensi	69.342.114.830	(11.562.344.663)	Rp 57.779.770.167
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	-	Rp 2.271.764.600
4	ATB Lainnya	2.283.518.750	-	Rp 2.283.518.750
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 800.418.289.126</b>	<b>Rp (690.744.546.839)</b>	<b>Rp 109.673.742.287</b>
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	120.573.933.849	(116.830.667.919)	Rp 3.743.265.930
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	90.912.883.330	(87.389.232.480)	Rp 3.523.650.850
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 211.486.817.179</b>	<b>Rp (204.219.900.399)</b>	<b>Rp 7.266.916.780</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp 1.011.905.106.305</b>	<b>Rp (894.964.447.238)</b>	<b>Rp 116.940.659.067</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XIX**.

*Utang kepada Pihak Ketiga*  
Rp99.289.466.640,00

### C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp99.289.466.640,00 dan Rp401.816.267.044,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp99.289.466.640,00 terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp25.510.021.208,00 merupakan Belanja yang SPPnya telah

terbit di periode pelaporan Semester I Tahun 2025 namun belum terbit SP2D;

- b) Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp71.053.812.802,00 merupakan Belanja yang SPPnya telah terbit di periode pelaporan Semester I Tahun 2025 namun belum terbit SP2D;
- c) Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp543.277.500,00 merupakan Belanja yang SPPnya telah terbit di periode pelaporan Semester I Tahun 2025 namun belum terbit SP2D;
- d) Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp2.182.355.130,00 yang terdiri dari:
  - i. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp2.182.312.370,00 berasal dari Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas belanja dengan mekanisme LS Bendahara;
  - ii. Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp32.760,00;
  - iii. Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh bendahara pengeluaran atas uji coba *Cash Management System (CMS)*;

Perbandingan rincian Utang Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 76**

**Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I**

No	ESELON I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	25.810.232.253	108.920.181.383	(83.109.949.130)
2	ltjen	1.550.688.618	1.425.437.942	125.250.676
3	Ditjen Polpum	1.324.015.438	1.319.946.454	4.068.984
4	Ditjen Bina Adwil	2.010.479.953	2.416.223.984	(405.744.031)
5	Ditjen Pemdes	6.276.342.742	32.223.490.651	(25.947.147.909)
6	Ditjen Bangda	17.976.341.135	20.618.132.350	(2.641.791.215)
7	Ditjen Otda	1.676.129.068	1.027.236.045	648.893.023
8	Ditjen Dukcapil	35.105.990.181	229.453.569.230	(194.347.579.049)
9	Ditjen Keuda	2.052.467.575	990.015.346	1.062.452.229
10	BSKDN	1.296.817.160	157.167.582	1.139.649.578
11	BPSDM	4.209.962.517	3.264.866.077	945.096.440
<b>Jumlah</b>		<b>99.289.466.640</b>	<b>401.816.267.044</b>	<b>(302.526.800.404)</b>

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada **Lampiran XXII**.

*Utang Yang Belum Ditagihkan* **C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan**

*Rp72.981.429.276,00*

Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp72.981.429.276,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan Utang Yang Belum Diterima Tagihannya yang berasal dari penginputan BAST pada Modul Komitmen SAKTI.

**Tabel 77**  
**Utang Yang Belum Ditagihkan per Unit Eselon I**

No	ESELON I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	4 = (3-4)
1	Setjen	7.251.545.519	-	7.251.545.519
2	Itjen	24.297.985	-	24.297.985
3	Ditjen Polpum	69.757.926	-	69.757.926
4	Ditjen BAK	284.182.080	-	284.182.080
5	Ditjen Pemdes	4.003.976.316	-	4.003.976.316
6	Ditjen Bangda	660.522.335	-	660.522.335
7	Ditjen Otda	145.924.929	-	145.924.929
8	Ditjen Dukcapil	60.070.990.412	-	60.070.990.412
9	Ditjen Keuda	60.246.500	-	60.246.500
10	BSKDN	239.900	-	239.900
11	BPSDM	409.745.374	-	409.745.374
<b>Jumlah</b>		<b>72.981.429.276</b>	<b>-</b>	<b>72.981.429.276</b>

Terdapat Utang Yang Belum Ditagihkan pada satker Ditjen Bina Pemdes pada posisi debit disebabkan oleh pencatatan SPBy atas Belanja Persediaan dengan mekanisme UP yang tidak diawali dengan BAST dan telah terbit SP2D sebesar Rp2.497.800,00. Saldo tersebut akan dilakukan pengembalian Belanja pada periode selanjutnya atas transaksi tersebut karena Aplikasi SAKTI membentuk dua SPBy terhadap transaksi yang sama dan keduanya telah dicairkan dari kas negara. Salah satu dari transaksi tersebut tidak seharusnya terjadi sehingga perlu dikembalikan ke kas negara.

*Hibah Yang Belum Disahkan* **C.26 Hibah Yang Belum Disahkan**

*Rp2.556.839.500,00*

Hibah yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.556.839.500,00 dan Rp0,00. Terdapat pada Ditjen Bina Bangda merupakan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang belum disahkan yang diterima dari UNICEF berupa Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025.

**Tabel 78**  
**Hibah Yang Belum Disahkan**

No	Eselon I	Per 30 Juni 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Ditjen Bina Bangda	2.556.839.500	-	2.556.839.500
<b>Jumlah</b>		<b>2.556.839.500</b>	<b>-</b>	<b>2.556.839.500</b>

*Pendapatan Diterima Di  
Muka  
Rp0,00*

### **C.27 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp160.307.263.241,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Perbandingan rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I tersaji pada tabel 79.

**Tabel 79**  
**Pendapatan Diterima di Muka**

NO	ESELON I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	7.717.137.930	(7.717.137.930)
2	Itjen	-	2.652.944	(2.652.944)
3	Ditjen Bina Pemdes	-	28.817.528	(28.817.528)
4	Ditjen Bina Bangda	-	292.330.000	(292.330.000)
5	Ditjen Dukcapil	-	151.974.364.000	(151.974.364.000)
6	BPSDM	-	291.960.839	(291.960.839)
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>160.307.263.241</b>	<b>(160.307.263.241)</b>

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker terdapat pada **Lampiran XXIII**.

*Uang Muka dari KPPN  
Rp13.592.123.484,00*

### **C.28 Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.592.123.484,00 dan Rp112.599.303,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya  
Rp262.087.720,00*

### C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp262.087.720,00 dan Rp7.719.409,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pungutan pajak Tahun 2024 yang sampai dengan 30 Juni 2025 belum disetorkan ke kas negara.

**Tabel 80**

**Utang Jangka Pendek Lainnya**

NO	ESELON I	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	52.403.331	6.712.500	45.690.831
2	Ditjen Bina Adwil	200.959.690	1.006.909	199.952.781
3	BPSDM	8.724.699	-	8.724.699
<b>Jumlah</b>		<b>262.087.720</b>	<b>7.719.409</b>	<b>254.368.311</b>

*Ekuitas  
Rp16.822.191.017.754,00*

### C.30 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp16.822.191.017.754,00 dan Rp16.905.781.871.164,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP  
Rp678.696.870.631*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp678.696.870.631 dan Rp535.891.031.702,00. Pendapatan-LO terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari PNBP fungsional antara lain pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil, penyelenggaraan pendidikan pascasarjana IPDN dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta PNBP umum yang berasal dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 81**

#### Perbandingan Rincian PNBP Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024

KODE AKUN	URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/TURUN (%) (Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.885.559.494	4.876.588.116	0,18
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	52.543.205	89.291.600	(41,16)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24.475.000	18.020.500	35,82
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	134.500.000	88.500.000	51,98
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	14.543.338.872	12.583.525.484	15,57
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	268.650.000	250.619.900	7,19
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	8.200.312.000	32.447.307.000	(74,73)
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	807.975.000	1.038.235.000	(22,18)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	649.365.817.000	484.491.003.000	34,03
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	392.685.455	2.458.052	15.875,47
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	5.437.000	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	21.014.605	46.050	45.534,32
<b>JUMLAH</b>		<b>678.696.870.631</b>	<b>535.891.031.702</b>	<b>26,65</b>

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp678.696.870.631, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp557.149.961.952,00, diantaranya sebesar Rp518.709.805.040,00 berasal dari kegiatan operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis kas) sebesar Rp159.987.065.591,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 82**  
**Selisih PNPB antara Basis Kas dan Basis Akrua**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>LRA</b>	<b>LO</b>	<b>SELISIH</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e) = (d) - (c)</b>
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.314.610.125	4.885.559.494	2.570.949.369
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	51.802.470	52.543.205	740.735
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24.475.000	24.475.000	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	135.250.000	134.500.000	(750.000)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	8.902.439.000	14.543.338.872	5.640.899.872
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	273.650.000	268.650.000	(5.000.000)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	8.180.677.000	8.200.312.000	19.635.000
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	807.975.000	807.975.000	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	497.391.453.000	649.365.817.000	151.974.364.000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	606.431.857	392.685.455	(213.746.402)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	21.041.588	21.014.605	(26.983)
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>		<b>518.709.805.040</b>	<b>678.696.870.631</b>	<b>159.987.065.591</b>

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi PNPB menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berbeda sebesar Rp2.570.949.369,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2024 atas bagian Tahun 2025 sebesar Rp2.573.649.369,00.
  - b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2025 sebesar Rp2.700.000,00.
2. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Tahun 2024 Tahun 2025 sebesar Rp740.735,00.
3. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp750.000,00
4. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Biaya Pendidikan berbeda sebesar Rp5.640.899.872,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

- a. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka Tahun 2024 atas bagian tahun 2025 sebesar Rp5.759.249.872,00; dan
  - b. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Biaya Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp118.350.000,00.
5. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Pendidikan Lainnya yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000,00.
  6. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp19.635.000,00.
  7. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi atas Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka sebesar Rp151.974.364.000,00.
  8. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya atas penyelesaian pekerjaan pemerintah atas hibah langsung dari UAE tahun 2024 sebesar Rp213.746.402,00.
  9. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Anggaran Lain-lain berbeda sebesar Rp26.983,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
    - a. Jurnal Koreksi atas pencatatan sisa kas di rekening pada satker dekonsentrasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor VA 9890244841671000 atas nama BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR per 30 Juni 2025 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada aplikasi SPRINT sebesar Rp25.984,00; dan
    - b. Sisa Kas Lainnya di Rekening Bendahara Ditjen Bina Bangda Nomor 7187436437 RPL 133 PDH BAPPEDA ACEH UTK 2C7EJQHA yang berasal dari Pembulatan atas pencairan yang tidak dapat ditarik, telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 23 April 2025 sebesar Rp999,00.

*Beban Pegawai*  
*Rp463.419.406.708*

## **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp463.419.406.708,00 dan Rp481.770.615.781,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 83**  
**Perbandingan Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gaji Pokok PNS	170.119.072.220	201.959.219.407	(15,77)
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.289.363	2.901.069	(21,09)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	10.081.608.973	10.286.567.742	(1,99)
Beban Tunjangan Anak PNS	2.678.078.486	2.788.423.536	(3,96)
Beban Tunjangan Struktural PNS	5.814.298.950	6.016.170.000	(3,36)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	15.031.352.671	13.991.392.000	7,43
Beban Tunjangan PPh PNS	2.850.267.539	2.885.462.704	(1,22)
Beban Tunjangan Beras PNS	7.372.935.360	8.486.501.490	(13,12)
Beban Uang Makan PNS	14.016.505.150	12.123.488.800	15,61
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	38.650.000	31.775.000	21,64
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	141.405.000	116.025.000	21,87
Beban Tunjangan Umum PNS	4.241.789.654	6.925.160.740	(38,75)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	4.978.242.800	3.751.923.065	32,69
Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.419.975.800	1.209.242.200	17,43
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	46.400.000	40.400.000	14,85
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.568.453.404	1.508.558.376	3,97
Beban Gaji Pokok PPPK	2.299.330.700	146.157.100	1.473,19
Beban Pembulatan Gaji PPPK	40.275	2.570	1.467,12
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	118.367.066	6.841.900	1.630,03
Beban Tunjangan Anak PPPK	30.915.058	1.846.280	1.574,45
Beban Tunjangan Struktural PPPK	40.625.000	8.750.000	364,29
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	330.970.000	12.938.000	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	113.391.615	6.952.320	1.530,99
Beban Uang Makan PPPK	261.608.400	-	100,00
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	875.000	125.000	100,00
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	2.975.000	425.000	100,00
Beban Uang Lembur	3.632.249.000	5.466.293.000	(33,55)
Beban Uang Lembur PPPK	26.997.000	-	100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	213.442.455.680	203.906.619.282	4,68
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.717.281.544	90.454.200	2.904,04
<b>TOTAL</b>	<b>463.419.406.708</b>	<b>481.770.615.781</b>	<b>(3,81)</b>

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp463.419.406.708,00, sedangkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp458.044.456.160,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pegawai (basis akrual) dengan Belanja Pegawai (basis kas) sebesar Rp5.374.950.548,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 84**  
**Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akruai**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	151.654.644.500	170.119.072.220	18.464.427.720
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.049.979	2.289.363	239.384
511121	Beban TunjanganSuami/Istri PNS	8.984.037.267	10.081.608.973	1.097.571.706
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	2.388.633.047	2.678.078.486	289.445.439
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	5.198.278.950	5.814.298.950	616.020.000
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	13.402.024.671	15.031.352.671	1.629.328.000
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	2.789.022.325	2.850.267.539	61.245.214
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	6.567.878.430	7.372.935.360	805.056.930
511129	Beban Uang Makan PNS	15.609.057.000	14.016.505.150	(1.592.551.850)
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	32.575.000	38.650.000	6.075.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	119.615.000	141.405.000	21.790.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	3.782.877.154	4.241.789.654	458.912.500
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4.230.205.900	4.978.242.800	748.036.900
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.216.002.200	1.419.975.800	203.973.600
511194	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	40.200.000	46.400.000	6.200.000
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.390.363.404	1.568.453.404	178.090.000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2.040.424.500	2.299.330.700	258.906.200
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	35.668	40.275	4.607
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	105.226.846	118.367.066	13.140.220
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	27.319.280	30.915.058	3.595.778
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	39.500.000	40.625.000	1.125.000
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	293.762.000	330.970.000	37.208.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	100.500.855	113.391.615	12.890.760
511628	Beban Uang Makan PPPK	271.366.000	261.608.400	(9.757.600)
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	750.000	875.000	125.000
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	2.550.000	2.975.000	425.000
512211	Beban Uang Lembur	3.661.782.000	3.632.249.000	(29.533.000)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	26.997.000	26.997.000	-
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	231.139.321.160	213.442.455.680	(17.696.865.480)
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.927.456.024	2.717.281.544	(210.174.480)
	<b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>458.044.456.160</b>	<b>463.419.406.708</b>	<b>5.374.950.548</b>

Perbedaan pencatatan beban pegawai menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PNS berbeda sebesar Rp18.464.427.720,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp154.041.200,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Gaji Pokok PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp18.618.468.920,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PNS berbeda sebesar Rp239.384,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp2.852,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Pembulatan Gaji PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp242.236,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PNS berbeda sebesar Rp1.097.571.706,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.900.210,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Suami/Istri PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.099.471.916,00.
4. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PNS berbeda sebesar Rp289.445.439,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp356.030,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Anak PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp289.801.469,00.
5. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PNS berbeda sebesar Rp616.020.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp10.660.500,00.

- b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Struktural PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp626.680.500,00.
6. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PNS berbeda sebesar Rp1.629.328.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp29.925.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Fungsional PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.659.253.000,00.
7. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan PPh PNS berbeda sebesar Rp61.245.214,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.296.608,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan PPh PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBY belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp62.541.822,00.
8. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PNS berbeda sebesar Rp805.056.930,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.983.100,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Beras PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBY belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp809.040.030,00.
9. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PNS berbeda sebesar Rp1.592.551.850,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.
10. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS berbeda sebesar Rp6.075.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBY belum SPP

dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

11. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Khusus Papua PNS berbeda sebesar Rp21.790.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
12. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Umum PNS berbeda sebesar Rp458.912.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp8.325.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Umum PNS yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp467.237.500,00.
13. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Profesi Dosen berbeda sebesar Rp748.036.900,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
14. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Kehormatan Profesor berbeda sebesar Rp203.973.600,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
15. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri berbeda sebesar Rp6.200.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
16. Beban-LO untuk akun Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara berbeda sebesar Rp178.090.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
17. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PPPK berbeda sebesar Rp258.906.200,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.462.500,00.

- b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Gaji Pokok PPPK yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp263.368.700,00.
18. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PPPK berbeda sebesar Rp4.607,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp10,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Pembulatan Gaji PPPK yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp4.617,00.
19. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK berbeda sebesar Rp13.140.220,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp446.250,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp13.586.470,00.
20. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PPPK berbeda sebesar Rp3.595.778,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
21. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PPPK berbeda sebesar Rp1.125.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.375.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Struktural PPPK yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp5.500.000,00.
22. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PPPK berbeda sebesar Rp37.208.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

23. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PPPK berbeda sebesar Rp12.890.760,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp144.840,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Tunjangan Beras PPPK yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp13.035.600,00.
24. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PPPK berbeda sebesar Rp9.757.600,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.
25. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK berbeda sebesar Rp125.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
26. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK berbeda sebesar Rp425.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
27. Beban-LO untuk akun Beban Uang Lembur berbeda sebesar Rp29.533.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.
28. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) berbeda sebesar Rp17.696.865.480,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp18.073.134.630,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp376.269.150,00.

29. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK berbeda sebesar Rp210.174.480,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.

*Beban Persediaan*  
Rp7.124.632.133

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp7.124.632.133,00 dan Rp8.627.185.346,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pemakaian/konsumsi atas persediaan dinilai menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini beban persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing persediaan yang terpakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 85**

#### Perbandingan Beban Persediaan Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN ) (%)
Beban Persediaan Konsumsi	6.079.234.535	7.683.513.634	(20,88)
Beban Persediaan Lainnya	1.042.345.098	943.671.712	10,46
<b>TOTAL</b>	<b>7.124.632.133</b>	<b>8.627.185.346</b>	<b>(17,42)</b>

Penjelasan hubungan mutasi kurang persediaan dengan beban persediaan sebagai berikut:

**Tabel 86**

#### Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Semester I Tahun 2025

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PERSEDAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117111	Barang Konsumsi	3.616.888.027		3.802.866.177	(185.978.150)	6.079.234.535	(6.265.212.685)
117131	Bahan Baku	-		-	-	3.052.500	(3.052.500)
117199	Persediaan Lainnya	1.152.137.472		1.332.404.193	(180.266.721)	1.042.345.098	(1.222.611.819)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		6.461.541.271		6.461.541.271		6.461.541.271
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		396.718.884		396.718.884		396.718.884
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.769.025.499</b>	<b>6.858.260.155</b>	<b>5.135.270.370</b>	<b>6.492.015.284</b>	<b>7.124.632.133</b>	<b>(632.616.849)</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 (saldo awal) sebesar Rp4.769.025.499,00 dan saldo Persediaan per 30 Juni 2025 (saldo akhir) sebesar Rp5.135.270.370,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp6.858.260.155,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan sebesar Rp6.492.015.284,00. Perbedaan sebesar Rp632.616.849,00 antara pemakaian persediaan sebesar Rp6.492.015.284,00 dengan

Beban Persediaan sebesar Rp7.124.632.133,00 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 87**  
**Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN (523112) MENJADI PERSEDIAAN	(908.040.865)
2	BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN (523123) MENJADI PERSEDIAAN	(16.362.000)
3	BELANJA PERSEDIAAN MENJADI BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN (117113)	557.260.641
4	BELANJA PERSEDIAAN MENJADI SUKU CADANG (117114)	23.678.355
5	JURNAL ANTAR BEBAN	3.696.300
6	REKLASIFIKASI KELUAR	57.909.596
7	REKLASIFIKASI MASUK	(24.471.696)
8	USANG	4.418.749
9	BELANJA PERSEDIAAN BELUM TERBIT SP2D PER 30 JUNI 2025	(333.203.729)
10	KESALAHAN BELANJA PERSEDIAAN YANG PENCATATANNYA TIDAK DIAWALI DARI BAST SEHINGGA TIDAK TERDAPAT PERSEDIAAN YANG TERCATAT, PADA PERIODE SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN PENGEMBALIAN	2.497.800
<b>JUMLAH</b>		<b>(632.616.849)</b>

*Beban Barang Dan Jasa  
Rp573.923.335.838*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp573.923.335.838,00 dan Rp659.461.216.068,00. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp573.923.335.838,00 terdiri dari kegiatan operasional secara normal sebesar Rp573.923.335.838,00 dan kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp0,00. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 88**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Keperluan Perkantoran	93.861.667.486	88.322.579.176	6,27
Beban Pengadaan Bahan Makanan	18.381.017.068	23.101.054.696	(20,43)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	569.899.203	921.525.832	(38,16)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	125.761.195	148.499.300	(15,31)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.646.059.000	4.585.447.950	(20,49)
Beban Barang Operasional Lainnya	22.477.057.935	39.705.330.818	(43,39)
Beban Bahan	28.213.703.417	45.986.058.533	(38,65)
Beban Honor Output Kegiatan	3.002.850.000	5.927.414.250	(49,34)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	139.628.343.593	104.618.427.621	33,46
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	514.934.581	132.869.140	287,55
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	-	44.375.000	100,00
Beban Langganan Listrik	17.760.817.518	18.445.296.777	(3,71)
Beban Langganan Telepon	164.169.126	166.930.660	(1,65)
Beban Langganan Air	2.051.222.219	2.195.403.288	(6,57)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	539.742.995	491.876.370	9,73
Beban Jasa Pos dan Giro	-	2.000.000	100,00
Beban Jasa Konsultan	7.149.181.858	66.877.765.131	(89,31)
Beban Sewa	86.887.687.015	71.240.579.433	21,96
Beban Jasa Profesi	4.867.346.000	14.862.097.000	(67,25)
Beban Jasa Lainnya	144.081.875.629	171.650.652.093	(16,06)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	34.903.000	(100,00)
<b>Subtotal Akun Normal</b>	<b>573.923.335.838</b>	<b>659.461.086.068</b>	<b>(12,97)</b>
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	130.000	(100,00)
<b>Subtotal Akun Khusus COVID</b>	<b>-</b>	<b>130.000</b>	<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>573.923.335.838</b>	<b>659.461.216.068</b>	<b>(12,97)</b>

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp573.923.335.838,00, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp486.826.445.366,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas) untuk kegiatan operasional secara normal sebesar Rp87.096.890.472,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 89**  
**Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrua**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	79.873.406.111	93.861.667.486	13.988.261.375
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	18.180.797.068	18.381.017.068	200.220.000
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	549.918.203	569.899.203	19.981.000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	124.262.720	125.761.195	1.498.475
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.579.797.000	3.646.059.000	66.262.000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	21.415.641.894	22.477.057.935	1.061.416.041
521211	Beban Bahan	26.727.889.997	28.213.703.417	1.485.813.420
521213	Beban Honor Output Kegiatan	2.785.635.000	3.002.850.000	217.215.000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	139.529.428.104	139.628.343.593	98.915.489
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	452.206.781	514.934.581	62.727.800
522111	Beban Langganan Listrik	18.607.685.959	17.760.817.518	(846.868.441)
522112	Beban Langganan Telepon	163.834.809	164.169.126	334.317
522113	Beban Langganan Air	2.052.559.097	2.051.222.219	(1.336.878)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	527.340.915	539.742.995	12.402.080
522131	Beban Jasa Konsultan	5.959.190.258	7.149.181.858	1.189.991.600
522141	Beban Sewa	81.442.254.467	86.887.687.015	5.445.432.548
522151	Beban Jasa Profesi	4.658.846.000	4.867.346.000	208.500.000
522191	Beban Jasa Lainnya	80.195.750.983	144.081.875.629	63.886.124.646
<b>BEBAN BARANG DAN JASA</b>		<b>486.826.445.366</b>	<b>573.923.335.838</b>	<b>87.096.890.472</b>

Perbedaan pencatatan beban barang dan jasa dalam kegiatan operasional secara normal menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Keperluan Perkantoran berbeda sebesar Rp13.988.261.375,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp24.420.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Keperluan Perkantoran yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp14.012.681.375,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp200.220.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

3. Beban-LO untuk akun Beban Penambah Daya Tahan Tubuh berbeda sebesar Rp19.981.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
4. Beban-LO untuk akun Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berbeda sebesar Rp1.498.475,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
5. Beban-LO untuk akun Beban Honor Operasional Satuan Kerja berbeda sebesar Rp66.262.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
6. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp1.061.416.041,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
7. Beban-LO untuk akun Beban Bahan berbeda sebesar Rp1.485.813.420,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
8. Beban-LO untuk akun Beban Honor Output Kegiatan berbeda sebesar Rp217.215.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
9. Beban-LO untuk akun Beban Barang Non Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp98.915.489,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
10. Beban-LO untuk akun Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berbeda sebesar Rp62.727.800,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
11. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Listrik berbeda sebesar Rp846.868.441,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp889.612.947,00.

- b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Langganan Listrik yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp42.744.506,00.
12. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Telepon berbeda sebesar Rp334.317,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.332.073,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Langganan Telepon yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.666.390,00.
13. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Air berbeda sebesar Rp1.336.878,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.411.412,00;
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Langganan Air yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp74.534,00.
14. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp12.402.080,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp2.728.170,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Langganan Daya dan Jasa yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp15.130.250,00.
15. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Konsultan berbeda sebesar Rp1.189.991.600,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
16. Beban-LO untuk akun Beban Sewa berbeda sebesar Rp5.445.432.548,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

17. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Profesi berbeda sebesar Rp208.500.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

18. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp63.886.124.646,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

- a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.960.680,00.
- b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Jasa Lainnya yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp63.890.085.326,00.

Penjelasan hubungan mutasi aset ekstrakomtabel periode berjalan dengan beban aset ekstrakomtabel sebagai berikut:

**Tabel 90**  
**Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel**

AKUN BEBAN			MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN				PERBEDAAN ANTARA BEBAN DENGAN MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL (Rp)	
BEBAN PERALATAN DAN MESIN - EKSTRAKOMTABEL (521252) (Rp)	BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN (595112) (Rp)	BEBAN GEDUNG DAN BANGUNAN - EKSTRAKOMTABEL (521253) (Rp)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG			
			URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)	URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)		
514.934.581			Pembelian	514.934.581			514.934.581	-
514.934.581	-	-		514.934.581		-	514.934.581	-

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomtabel sampai dengan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp514.934.581,00 dan Rp0,00 sehingga perhitungan mutasi neto aset ekstrakomtabel sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp514.934.581,00. Beban aset ekstrakomtabel untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 terdiri dari Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel sebesar Rp514.934.581,00, Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 dan Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel sebesar Rp0,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara mutasi aset ekstrakomtabel dengan beban aset ekstrakomtabel.

*Beban Pemeliharaan  
Rp48.915.462.060*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp48.915.462.060,00 dan Rp68.238.348.345,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 91**  
**Perbandingan Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.259.763.114	38.944.795.169	(27,44)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.318.056.282	3.753.031.047	(38,24)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.181.841.680	19.976.425.569	(29,01)
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.039.605.896	3.638.158.726	(43,94)
Beban Pemeliharaan Lainnya	693.942.000	353.218.296	96,46
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.278.820.098	1.331.005.145	(3,92)
Beban Persediaan Suku Cadang	143.432.990	241.714.393	(40,66)
<b>TOTAL</b>	<b>48.915.462.060</b>	<b>68.238.348.345</b>	<b>(28,32)</b>

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp48.915.462.060,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp46.578.763.614,00 sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pemeliharaan (basis akrual) dengan Belanja Pemeliharaan (basis kas) sebesar Rp2.336.698.446,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 92**  
**Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.567.489.607	28.259.763.114	1.692.273.507
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.208.313.060	-	(1.208.313.060)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.318.056.282	2.318.056.282	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.128.441.175	14.181.841.680	1.053.400.505
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	626.078.094	-	(626.078.094)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2.036.443.396	2.039.605.896	3.162.500
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	693.942.000	693.942.000	-
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	1.278.820.098	1.278.820.098
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	-	143.432.990	143.432.990
	<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>46.578.763.614</b>	<b>48.915.462.060</b>	<b>2.336.698.446</b>

Perbedaan pencatatan Beban Pemeliharaan menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berbeda sebesar Rp1.692.273.507,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berbeda sebesar Rp1.053.400.505,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Pengakuan Beban-LO atas Belanja Barang yang Dibayar Di muka (*prepaid*) sebesar Rp49.007.100,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.004.393.405,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Jaringan berbeda sebesar Rp3.162.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

Penjelasan Perbedaan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.208.313.060,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp626.078.094,00, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.278.820.098,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp143.432.990,00 secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 93**

**Penyajian Beban Pemeliharaan**

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PEMELIHARAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	625.989.968	-	675.086.996	(49.097.028)	1.278.820.098	(1.327.917.126)
117114	Suku Cadang	83.808.068	-	176.107.627	(92.299.559)	143.432.990	(235.732.549)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.208.313.060		1.208.313.060		1.208.313.060
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		626.078.094		626.078.094		626.078.094
<b>JUMLAH</b>		<b>709.798.036</b>	<b>1.834.391.154</b>	<b>851.194.623</b>	<b>1.692.994.567</b>	<b>1.422.253.088</b>	<b>270.741.479</b>

Saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2024 (saldo awal) sebesar Rp709.798.036,00 dan saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 30 Juni 2025 (saldo akhir) sebesar Rp851.194.623,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi Belanja Barang Pemeliharaan sebesar Rp1.834.391.154,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp1.692.994.567,00. Perbedaan sebesar Rp270.741.479,00 antara pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp1.692.994.567,00 dengan Beban Pemeliharaan dari pemakaian persediaan sebesar Rp1.422.253.088,00 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 94****Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (521811) MENJADI PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	(580.938.996)
2	BELANJA PEMELIHARAAN MENJADI BAHAN BAKU (117131)	23.843.000
3	BELANJA PEMELIHARAAN MENJADI PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (117111)	885.479.865
4	BELANJA PEMELIHARAAN MENJADI PERSEDIAAN LAINNYA (117199)	14.480.000
5	BELANJA PERSEDIAAN PEMELIHARAAN BELUM TERBIT SP2D PER 30 JUNI 2025	(34.988.190)
6	JURNAL REKLASIFIKASI ANTAR BEBAN	(3.696.300)
7	REKLASIFIKASI KELUAR	150.000
8	REKLASIFIKASI MASUK	(33.587.900)
<b>JUMLAH</b>		<b>270.741.479</b>

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp78.180.967.852*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp78.180.967.852,00 dan Rp232.709.531.538,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 95****Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	67.578.152.813	148.808.121.190	(54,59)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	252.477.638	1.039.583.875	(75,71)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.232.900.000	3.790.218.700	(41,09)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.634.594.150	45.380.124.321	(94,19)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.449.629.301	29.010.712.773	(84,66)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	764.860.602	4.680.770.679	(83,66)
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	268.353.348	-	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>78.180.967.852</b>	<b>232.709.531.538</b>	<b>(66,40)</b>

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp78.180.967.852,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp75.518.994.688,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Perjalanan Dinas (basis akrual) dengan Belanja Perjalanan Dinas (basis kas) sebesar Rp2.661.973.164,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 96**

**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	65.599.283.560	67.578.152.813	1.978.869.253
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	239.036.599	252.477.638	13.441.039
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.031.710.000	2.232.900.000	201.190.000
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.320.324.150	2.634.594.150	314.270.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.295.426.429	4.449.629.301	154.202.872
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	764.860.602	764.860.602	-
524219	Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	268.353.348	268.353.348	-
<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>		<b>75.518.994.688</b>	<b>78.180.967.852</b>	<b>2.661.973.164</b>

Perbedaan pencatatan Beban Perjalanan Dinas menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa berbeda sebesar Rp1.978.869.253,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp90.249.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Beban Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp2.069.118.253,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Tetap berbeda sebesar Rp13.441.039,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
3. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota berbeda sebesar Rp201.190.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

4. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota berbeda sebesar Rp314.270.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.
5. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berbeda sebesar Rp154.202.872,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat transaksi gantung berupa BAST/SPBy belum SPP dan/atau SPP belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2025.

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp114.275.035.576*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp114.275.035.576,00 dan Rp164.733.455.899,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan Barang Milik Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 97**  
**Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
**Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	250.000.000	250.000.000	-
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	1.410.000.000	(19.881.819)	(7.191,91)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.812.659.000	7.767.058.175	(25,16)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	106.802.376.576	156.736.279.543	(31,86)
<b>TOTAL</b>	<b>114.275.035.576</b>	<b>164.733.455.899</b>	<b>(30,63)</b>

Penjelasan hubungan mutasi kurang Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dengan beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 98**  
**Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PENYERAHAN (Rp)	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN		SELISIH (Rp)
						AKUN	SALDO (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h)	(i) = (f) - (h)
117122	Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	21.391.184.913		21.391.184.913	-	593122	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	33.349.858.276		31.984.858.276	1.365.000.000	593124	1.410.000.000	(45.000.000)
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	28.860.434.489		28.860.434.489	-	593125	-	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	71.066.062.000		71.066.062.000	-			-
117127	Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	139.951.231.767		134.138.572.767	5.812.659.000	593127	5.812.659.000	-
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan Ke Masyarakat	2.521.084.896		112.697.128.320	(110.176.043.424)	593128	106.802.376.576	(216.978.420.000)
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	36.251.577.100		36.251.577.100	-			-
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			-				
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			-				
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			-				
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda Jalan bentuk uang			-				
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			-		526123	250.000.000	(250.000.000)
526311	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Pemda		156.847.800.000		156.847.800.000			156.847.800.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>333.391.433.441</b>	<b>156.847.800.000</b>	<b>436.389.817.865</b>	<b>53.849.415.576</b>		<b>114.275.035.576</b>	<b>(60.425.620.000)</b>

Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2024 (saldo awal) sebesar Rp333.391.433.441,00 dan saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 30 Juni 2025 (saldo akhir) sebesar Rp436.389.817.865,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp156.847.800.000,00 sehingga perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp53.849.415.576,00. Perbedaan sebesar Rp60.425.620.000,00 antara perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp53.849.415.576,00 dengan Beban Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp114.275.035.576,00 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 99**  
**Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	REKLASIFIKASI DARI ASET	(45.000.000)
2	JURNAL BALIK 526123 PADA 114112 (BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DI MUKA (PREPAID))	(250.000.000)
3	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT MENJADI PERALATAN DAN MESIN (132111)	45.000.000
4	BELANJA BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BELUM TERBIT SP2D PER 30 JUNI 2025	(60.175.620.000)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(60.425.620.000)</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp204.235.466.711

## D8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp204.235.466.711,00 dan Rp155.069.435.357,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 100**  
**Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	137.944.757.763	91.221.816.490	51,22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.706.004.158	39.200.913.434	1,29
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.343.624.898	3.390.712.515	(30,88)
Beban Penyusutan Irigasi	562.598.070	2.426.918.769	(76,82)
Beban Penyusutan Jaringan	2.401.977.269	2.207.039.700	8,83
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	28.540.304	28.540.304	-
Beban Amortisasi Software	17.458.572.639	14.767.947.365	18,22
Beban Amortisasi Lisensi	3.519.926.422	1.663.371.947	111,61
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	5.607.500	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	269.465.188	156.567.333	72,11
<b>TOTAL</b>	<b>204.235.466.711</b>	<b>155.069.435.357</b>	<b>31,71</b>

Penjelasan hubungan penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan sebagai berikut:

**Tabel 101**  
**Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan**  
**dengan Beban Penyusutan**

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 30 JUNI 2025 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.590.209.290.660	3.460.735.603.007	129.473.687.653	137.944.757.763	(8.471.070.110)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	605.543.272.533	565.839.009.912	39.704.262.621	39.706.004.158	(1.741.537)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	60.883.054.657	58.539.429.759	2.343.624.898	2.343.624.898	-
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	32.117.814.241	31.555.216.171	562.598.070	562.598.070	-
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	74.315.332.711	71.913.355.442	2.401.977.269	2.401.977.269	-
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.878.270.954	22.849.730.650	28.540.304	28.540.304	-
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	116.830.667.919	116.962.354.763	(131.686.844)	269.465.188	(401.152.032)
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.502.777.703.675</b>	<b>4.328.394.699.704</b>	<b>174.383.003.971</b>	<b>183.256.967.650</b>	<b>(8.873.963.679)</b>

Terdapat perbedaan sebesar Rp8.873.963.679,00 antara penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 102**

**Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI HIBAH KELUAR	(70.067.500)
2	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG	(5.256.417)
3	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENCATATAN BARANG YANG MAU DIHAPUSKAN	(8.901.454.916)
4	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI TRANSFER KELUAR	(209.348.057)
5	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI TRANSFER MASUK	209.348.057
6	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN TRANSAKSI SALDO AWAL	102.815.154
<b>JUMLAH</b>		<b>(8.873.963.679)</b>

Penjelasan hubungan amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi sebagai berikut:

**Tabel 103**

**Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi**

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI AMORTISASI PER 30 JUNI 2025 (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	AMORTISASI PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAN AMORTISASI TAHUN 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	679.182.202.176	692.217.866.817	(13.035.664.641)	17.458.572.639	(30.494.237.280)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	11.562.344.663	8.209.555.741	3.352.788.922	3.519.926.422	(167.137.500)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	87.389.232.480	58.337.879.914	29.051.352.566	-	29.051.352.566
<b>JUMLAH</b>		<b>778.133.779.319</b>	<b>758.765.302.472</b>	<b>19.368.476.847</b>	<b>20.978.499.061</b>	<b>(1.610.022.214)</b>

Terdapat perbedaan sebesar Rp1.610.022.214,00 antara amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 104**

**Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI KOREKSI PENCATATAN NILAI BERKURANG	(155.734.250)
2	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI PENCATATAN BARANG YANG MAU DIHAPUSKAN	(5.417.237.766)
3	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN TRANSAKSI TRANSFER MASUK	3.962.949.802
<b>JUMLAH</b>		<b>(1.610.022.214)</b>

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp42.242.500*

**D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp42.242.500,00 dan Rp648.961.284,00.

**Tabel 105**  
**Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
**Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyisihan Piutang PNBP	(42.192.500)	646.811.450	(106,52)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR	(50.000)	2.149.834	(102,33)
<b>TOTAL</b>	<b>(42.242.500)</b>	<b>648.961.284</b>	<b>(106,51)</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang timbul sebagai akibat pembentukan cadangan piutang agar piutang dapat disajikan sesuai dengan tingkat ketertagihannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 sebesar R28.853.538.199,00 dan per 30 Juni 2024 sebesar Rp28.895.780.699,00 atau terdapat perubahan sebesar Rp42.242.500,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp42.242.500,00 sehingga tidak terdapat perbedaan antara perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang.

**Tabel 106**  
**Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025**  
**dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH					BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH			
AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 30 JUNI 2025) (Rp)	SALDO AWAL (PER 30 JUNI 2024) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024 (Rp)	AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 30 JUNI 2025) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG DENGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) - (h)
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	11.001.494.430	11.043.686.930	(42.192.500)	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	(42.192.500)	-
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		1.503.401	(1.503.401)	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbaharasan/ Tuntutan		(1.503.401)
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbaharasan/ Tuntutan Ganti Rugi	17.852.043.769	17.850.590.368	1.453.401	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbaharasan/ Tuntutan Ganti Rugi	(50.000)	1.503.401
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.853.538.199</b>	<b>28.895.780.699</b>	<b>(42.242.500)</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>(42.242.500)</b>	<b>-</b>

*Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp15.857.416.705*

#### **D.10 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 107**  
**Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional**  
**Semester I Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

KODE AKUN	URAIAN	30 JUNI 2025 (Rp)	30 JUNI 2024 (Rp)	NAIK/TURUN (%) (Rp)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	888.600	0	100,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	650.322.034	1.397.963.811	(53,48)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	222.206.092	71.771.000	209,60
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	37.824.050	(100,00)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	429.966.795	(100,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	67.271.374	91.887.991	(26,79)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.055.425.803	8.276.434.651	81,91
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	150.428.279	165.210.911	(8,95)
<b>Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>16.146.542.182</b>	<b>10.471.059.209</b>	<b>54,20</b>
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	284.706.728	2.386.590.400	(88,07)
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	4.418.749	109.299.269	(95,96)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	1.246.952	(100,00)
<b>Total Beban dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>289.125.477</b>	<b>2.497.136.621</b>	<b>(88,42)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>15.857.416.705</b>	<b>7.973.922.588</b>	<b>98,87</b>

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp16.146.542.182,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp557.149.961.952,00, diantaranya sebesar Rp38.440.156.912,00 berasal dari kegiatan non operasional. Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional sebesar Rp16.146.542.182,00 yang diantaranya merupakan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL berupa pekerjaan pengawasan rehabilitasi sarana pendidikan atas pekerjaan Tahun 2015 sebesar Rp7.000.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sulawesi Utara. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan non operasional (basis kas) sebesar Rp22.293.614.730,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 108**  
**Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional**  
**antara Basis Kas dan Basis Akrual**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	888.600	888.600	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	650.322.034	650.322.034	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	222.206.092	222.206.092	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	10.000.000	-	(10.000.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yg Lalu	114.596.326	67.271.374	(47.324.952)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yg Lalu	36.232.740.936	15.055.425.803	(21.177.315.133)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yg Lalu	1.209.402.924	150.428.279	(1.058.974.645)
<b>PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>38.440.156.912</b>	<b>16.146.542.182</b>	<b>(22.293.614.730)</b>

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi pendapatan dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pelunasan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00.
2. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL berbeda sebesar Rp47.324.952,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pengakuan Pendapatan-LO dari penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp47.679.952,00.
  - b. Pengakuan Pendapatan-LO dari pengembalian uang muka belanja pegawai atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp355.000,00.
3. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berbeda sebesar Rp21.177.315133,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp21.097.757.679,00;
  - b. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya atas pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp79.557.426,00; dan
  - c. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2025 atas transaksi Tahun 2024 sebesar Rp28,00 yang disebabkan karena adanya perbedaan nilai SPM RPATA dengan nilai realisasi kontrak pada SPM pembayaran dan penihilan RPATA.
4. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp1.058.974.645,00.

Jumlah Beban dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp289.125.477,00, sedangkan LRA tidak menyajikan kegiatan non operasional, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban dari kegiatan non operasional antara basis kas dan basis akrual dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 109**  
**Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional**  
**antara Basis Kas dan Basis AkruaI**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	284.706.728	284.706.728
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	-	4.418.749	4.418.749
<b>TOTAL</b>		-	<b>289.125.477</b>	<b>289.125.477</b>

Penjelasan perbedaan pencatatan beban dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp284.706.728,00 berasal dari transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan terhadap aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp284.706.728,00; dan
2. Beban-LO untuk akun Kerugian Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp4.418.749,00 berasal dari nilai persediaan yang dikeluarkan dari Neraca karena usang berdasarkan hasil opname fisik sebesar Rp4.418.749,00.

Terhadap transaksi tersebut tidak terjadi arus kas keluar atau masuk sehingga realisasi belanja tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

*Pos-Pos Luar Biasa*  
*Rp0,00*

#### **D.12 POS-POS LUAR BIASA**

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 nihil.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp16.905.781.871.164*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp16.905.781.871.164,00 dan Rp16.599.721.292.944,00.

*Defisit LO*  
*Rp795.477.777.042*

### **E.2 Surplus (Defisit) - LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah defisit sebesar Rp795.477.777.042,00 dan Rp1.227.393.795.328,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi*  
*Rp167.722.513*

### **E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp167.722.513,00 dan (Rp808.712.918,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp133.451.263,00 dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp34.271.250,00. Penjelasan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut.

#### **E.3.1.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis barang milik negara, koreksi perhitungan akumulasi penyusutan, dan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan adanya pengembalian realisasi belanja modal.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp133.451.263,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200) sebesar Rp129.371.846, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) sebesar Rp2.171.956,00, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (027753) sebesar Rp1.577.285,00, dan PPSDM Regional Bandung (403216) sebesar Rp330.176,00.

Penjelasan terkait Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdapat pada tabel 110.

**Tabel 110**  
**Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan**  
**30 Juni 2025**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Pengembalian belanja modal TAYL pada Satker Setjen sebesar Rp678.973.296,00 sesuai Berita Acara Koreksi Nilai Aset dengan Nomor: 000.3/2001/03/Rumga25	678.973.296
2	Koreksi tambah Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan saldo awal atas kendaraan dinas sesuai Berita Acara Saldo Awal dengan Nomor 000.3/573/03/Rumga25 pada satker Setjen	110.724.000
3	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan saldo awal atas kendaraan dinas sesuai Berita Acara Saldo Awal dengan Nomor 000.3/573/03/Rumga25 pada satker Setjen	(102.815.154)
4	Koreksi kurang Jaringan yang berasal dari koreksi susulan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL akibat kekurangan volume pada satu paket pekerjaan belanja modal jaringan di Biro Umum dengan NTPN B0D052G502SHI59B pada satker Setjen	(12.112.838)
5	Koreksi kurang Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi susulan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL atas pekerjaan renovasi rumah transformator TA 2024 dengan NTPN FC5DB0NAODNMAM1A pada satker Setjen	(5.968.088)
6	Koreksi kurang Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi susulan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL karena keterlambatan pekerjaan pengadaan pusat data Kemendagri dan DRC Tahun 2024 dengan NPTN 87E053CIFTHJCGSH pada satker Setjen	(539.429.370)
7	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	770.000
8	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	1.401.956
9	Pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes karena adanya temuan kekurangan volume atas peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan sehingga yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	14.017.928
10	Koreksi kurang Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	(14.489.578)

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
11	Koreksi kurang Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	(705.350)
12	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	2.744.880
13	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	9.405
14	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker PPSDM Regional Bandung	330.176
<b>JUMLAH</b>		<b>133.451.263</b>

Rincian pada **Lampiran XXIV** (Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi).

### **E.3.1.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis aset tak berwujud yang mempengaruhi perhitungan akumulasi amortisasi.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp34.271.250,00 terdapat pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) yang merupakan koreksi kurang Akumulasi Amortisasi *Software* yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL.

*Koreksi Lain-Lain  
Rp0*

### **E.3.2 Koreksi Lain - Lain**

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi atas akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp45.501.684,00.

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp711.719.201.119,00 dan Rp1.196.795.740.971,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdapat pada tabel 111.

**Tabel 111**  
**Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 30 Juni 2025**

Akun	Uraian	2025 (Rp)
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.242.654.345.362
313121	Diterima dari Entitas Lain	(557.149.961.952)
313211	Transfer Keluar	(120.026.200.234)
313221	Transfer Masuk	120.665.979.397
391131	Pengesahan Hibah Langsung	21.133.821.296
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	4.441.217.250
<b>JUMLAH</b>		<b>711.719.201.119</b>

##### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar (557.149.961.952,00) sedangkan DKEL sebesar Rp1.242.654.345.362,00.

##### E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp120.665.979.397,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (403231).

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar (Rp120.026.200.234,00) terdapat satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005), IPDN Kampus Papua (683091), Ditjen Otonomi Daerah (621892), Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (027486), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (634082), dan Balai Damkar dan Satpol PP (506138).

Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp120.026.200.234,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp120.665.979.397,00 menyebabkan terdapat selisih secara neto sebesar Rp639.779.163,00. Selisih tersebut berasal dari:

1. Transfer masuk berupa *Software* sebesar Rp1.877.912.555,00 dan Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar (Rp1.578.735.442,00) pada satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
2. Transfer masuk berupa *Software* sebesar Rp2.724.816.410,00 dan Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar (Rp2.384.214.360,00) pada satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (027486) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.

Rincian transaksi transfer masuk dan transfer keluar pada **Lampiran XXV** (Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk).

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp21.133.821.296,00 yang terdapat pada satker Setjen (403200). Hibah langsung tersebut sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

#### **E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu**

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung yang diterima pada Tahun 2025

dan/tahun-tahun sebelumnya namun baru disahkan pada tahun anggaran berjalan. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp4.441.217.250 terdapat pada satker Ditjen Bina Pembangunan Daerah (039729).

Ditjen Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar Rp4.441.217.250,00 dari Pemerintah Australia dalam rangka *Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration* atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dalam BAST Hibah Jasa dari Pemerintah Australia kepada Ditjen Bina Bangda Nomor 02/BAST-KEMENDAGRI/05/2024 tanggal 29 Mei 2024. Nomor Register Hibah 27BMXZ9A.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp16.822.191.017.754*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp16.822.191.017.754,00 dan Rp16.568.314.525.669,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Kemendagri.

### **F.2 CATATAN PENTING LAINNYA**

1. Terdapat Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak yang sudah tidak berhak menghuni/pihak lain yaitu:
  - a. Tanah Balai PMD Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati Kab. Sleman Yogyakarta yang di atasnya berdiri satu unit rumah ditempati oleh masyarakat eks Timor-Timur tanpa didukung perjanjian pinjam pakai. Langkah awal penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pengamanan secara fisik berupa pemasangan papan kepemilikan Kemendagri di depan Asrama Eks Timor-Timur.
  - b. Tanah seluas 258 m<sup>2</sup> beserta bangunan seluas 45 m<sup>2</sup> senilai Rp66.273.500,00 yang terletak di lingkungan perkantoran Ditjen Bina Pemdes dan awalnya merupakan kantor Ditjen Bina Pemdes dikuasai oleh pensiunan pegawai Ditjen Bina Pemdes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/4853/SJ tanggal 22 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hal Pembatalan atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022, seluas 258 m<sup>2</sup>. Penyelesaian permasalahan tersebut masih menunggu keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. DKI Jakarta atas permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik dimaksud.
  - c. Terdapat hunian warga (semi permanen) yang dibangun tanpa izin di atas sebidang tanah eks-rumah dinas milik Setjen yang terletak di Jalan Danau Indah XVI Blok B-6 Nomor 27 s.d. 30 Sunter Jaya. Kepala Biro Umum memberikan izin kepada petugas penjaga untuk menempati tanah tersebut sekaligus untuk mengawasi aset tanah Kemendagri berdasarkan Surat Izin Penghunian Nomor 012.7/4356/BU tanggal 2 Agustus 2019. Namun demikian, izin yang diberikan kepada petugas penjaga tidak termasuk pemberian izin dan/atau kewenangan kepada petugas penjaga untuk mengelola tanah maupun pembangunan hunian semi permanen untuk warga lainnya.
2. Terdapat satu bidang tanah milik Kemendagri yang masih bersertifikat atas nama PT. SAC Nusantara. Tanah tersebut terletak di Komplek Perumahan SAC Nusantara Blok I Kav. Nomor 34 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kemendagri telah mendirikan pagar sebagai upaya pengamanan dan memproses balik nama sertipikat tanah menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri.
3. Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti kebijakan pencatatan Barang Milik Negara pada satker inaktif bersaldo yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun

2021 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB). Kebijakan tersebut berupa penyelesaian hingga tuntas proses likuidasi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) menjadi Satker Inaktif Tidak Bersaldo (SITB). Satker inaktif bersaldo dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021, dilikuidasi dengan cara mengalihkan aset satker inaktif bersaldo tersebut ke satker pusat pada Unit Eselon I yang menjadi penanggung jawab proses likuidasi.

Rincian jumlah satker dan saldo aset berupa barang milik negara yang dialihkan ke satker pusat per Unit Eselon I pada Tahun 2021 dan progres penyelesaian aset tersebut selama Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 112**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya pada Tahun 2022**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2021	Aset Tetap per 31 Desember 2021		Aset Lainnya per 31 Desember 2021	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	97	191.707.612.750	597.752.000	(597.752.000)	17.881.146.014	(17.881.146.014)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
<b>Jumlah</b>		<b>491</b>	<b>240.817.499.881</b>	<b>92.834.265.629</b>	<b>(92.834.265.629)</b>	<b>34.420.200.991</b>	<b>(34.420.200.991)</b>
No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2022	Aset Tetap per 31 Desember 2022		Aset Lainnya per 31 Desember 2022	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	78	160.453.206.096	-	-	16.608.103.564	(16.608.103.564)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
<b>Jumlah</b>		<b>472</b>	<b>209.563.093.227</b>	<b>92.236.513.629</b>	<b>(92.236.513.629)</b>	<b>33.147.158.541</b>	<b>(33.147.158.541)</b>
<b>Perubahan</b>		<b>(19)</b>	<b>(31.254.406.654)</b>	<b>(597.752.000)</b>	<b>597.752.000</b>	<b>(1.273.042.450)</b>	<b>1.273.042.450</b>

Penyelesaian aset tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya.

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 25 Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan, maka terhadap persediaan yang tidak dikuasai atau persediaan yang sudah diserahkan namun secara administrasi masih belum selesai, pencatatan persediaan tersebut dipindahkan dari Laporan Barang Persediaan ke Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai. Pencatatan tersebut diakui apabila dokumen serah terima atau dokumen sumber lainnya yang dapat dipersamakan menyatakan bahwa telah dilakukan penyerahan persediaan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk menyelesaikan aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama tersebut.

Progres penyelesaian aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama selama periode pelaporan Semester I Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 113**

**Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 30 Juni 2025**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2024	Aset Tetap per 31 Desember 2024		Aset Lainnya per 31 Desember 2024	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	20	18.561.387.331	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	341	14.141.386.945	2.753.489.365	(2.753.489.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	60	115.408.242.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Otda	13	1.368.549.163	33.088.546.155	(33.088.546.155)	13.193.486.977	(13.193.486.977)
<b>Jumlah</b>		<b>434</b>	<b>149.479.565.761</b>	<b>40.077.039.969</b>	<b>(40.077.039.969)</b>	<b>24.518.947.856</b>	<b>(24.518.947.856)</b>

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 30 Juni 2025	Aset Tetap per 30 Juni 2025		Aset Lainnya per 30 Juni 2025	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	20	18.561.387.331	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	332	13.453.811.541	2.683.421.865	(2.683.421.865)	-	-
3	Ditjen Bangda	60	115.408.242.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Otda	13	1.368.549.163	33.088.546.155	(33.088.546.155)	13.193.486.977	(13.193.486.977)
<b>Jumlah</b>		<b>425</b>	<b>148.791.990.357</b>	<b>40.006.972.469</b>	<b>(40.006.972.469)</b>	<b>24.518.947.856</b>	<b>(24.518.947.856)</b>
<b>Perubahan</b>		<b>(9)</b>	<b>(687.575.404)</b>	<b>(70.067.500)</b>	<b>70.067.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sampai dengan 30 Juni 2025, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan aset yang disajikan pada akun Persediaan sebesar Rp687.575.404 Aset Tetap sebesar Rp70.067.500 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp70.067.500) dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 dengan akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar (Rp0,00).

Rincian aset eks. Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran XXVI.

4. Kementerian Dalam Negeri memiliki sebanyak lima Satker Inaktif Bersaldo yang dikonsolidasi dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode pelaporan Semester I Tahun 2025 melalui Aplikasi SAKTI dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 114**

**Rekapitulasi Total Aset Satker Inaktif Bersaldo per 30 Juni 2025**

No	ES I	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	NAMA AKUN	SALDO PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
1	'01004	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	865.762.700	Belum menyusun Laporan Keuangan
2	'01004	356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.570.910.000	Belum menyusun Laporan Keuangan
3	'01004	417936	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.879.281.000	Belum menyusun Laporan Keuangan
4	'01004	690639	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANIMBAR	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	857.981.630	Belum menyusun Laporan Keuangan
5	'01012	352588	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	132111	Peralatan dan Mesin	6.129.686.896	Sudah menyusun Laporan Keuangan
				133111	Gedung dan Bangunan	98.366.965.000	
				134111	Jalan dan Jembatan	3.053.191.000	
				134112	Irigasi	2.714.597.000	
				134113	Jaringan	1.811.782.159	
				137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.050.900.496)	
				137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.091.738.746)	
				137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3.053.191.000)	
				137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(448.912.485)	
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(656.528.847)					
<b>TOTAL ASET</b>						<b>89.948.885.811</b>	

Total nilai aset sebesar Rp89.948.885.811 tersebut masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah.

5. Indikator kualitas data laporan keuangan yang perlu dijelaskan berdasarkan menu-menu pada Aplikasi MonSAKTI disajikan pada lampiran sebagai berikut:
  - a. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB (Lampiran XXVII)
  - b. Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51XXXX (Lampiran XXVIII)
  - c. Saldo Akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya (Lampiran XXIX)
  - d. Transaksi Resiprokal (Lampiran XXX).
6. Daftar Rekening Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 disusun berdasarkan data Aplikasi Sprint dan hasil konfirmasi dengan Unit Eselon I terkait. Daftar rekening tersebut disajikan pada Lampiran XXXI.

## G. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dan pengungkapan lainnya diperoleh berdasarkan dokumen sumber dan/atau laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) di lingkungan Kemendagri yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diberikan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, semoga tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan dapat tercapai.

Jakarta, 31 Juli 2025

**MENTERI DALAM NEGERI**

**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**





**LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI  
PENDUKUNG CALK:**



# LAMPIRAN I

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	1.448.052.000	828.216.130	-	828.216.130	57,20
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16.665.514.000	12.034.947.907	-	12.034.947.907	72,21
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KP	-	22.907.500	-	22.907.500	0,00
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	-	257.970.010	-	257.970.010	0,00
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	-	168.153.733	-	168.153.733	0,00
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	-	25.000.000	-	25.000.000	0,00
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	-	10.108.250	-	10.108.250	0,00
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	-	424.564.180	-	424.564.180	0,00
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	KD	-	187.434.040	-	187.434.040	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>18.113.566.000</b>	<b>12.886.071.537</b>	<b>-</b>	<b>12.886.071.537</b>	<b>71,14</b>
		<b>KD : .....</b>		<b>-</b>	<b>1.073.230.213</b>	<b>-</b>	<b>1.073.230.213</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Setjen : .....</b>		<b>18.113.566.000</b>	<b>13.959.301.750</b>	<b>-</b>	<b>13.959.301.750</b>	<b>77,07</b>
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	-	41.916.309	-	41.916.309	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>41.916.309</b>	<b>-</b>	<b>41.916.309</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Itjen : .....</b>		<b>-</b>	<b>41.916.309</b>	<b>-</b>	<b>41.916.309</b>	<b>0,00</b>
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	-	272.239.102	-	272.239.102	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>272.239.102</b>	<b>-</b>	<b>272.239.102</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Polpum : .....</b>		<b>-</b>	<b>272.239.102</b>	<b>-</b>	<b>272.239.102</b>	<b>0,00</b>
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	KP	-	232.852.020	-	232.852.020	0,00
04	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	-	25.984	-	25.984	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>232.852.020</b>	<b>-</b>	<b>232.852.020</b>	<b>0,00</b>
		<b>DK : .....</b>		<b>-</b>	<b>25.984</b>	<b>-</b>	<b>25.984</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Bina Adwil : .....</b>		<b>-</b>	<b>232.878.004</b>	<b>-</b>	<b>232.878.004</b>	<b>0,00</b>
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	198.786.000	21.927.434.469	-	21.927.434.469	11030,67
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	KD	172.630.000	29.117.000	-	29.117.000	16,87
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	190.352.000	64.948.000	-	64.948.000	34,12
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	KD	171.630.000	63.184.300	-	63.184.300	36,81
		<b>KP : .....</b>		<b>198.786.000</b>	<b>21.927.434.469</b>	<b>-</b>	<b>21.927.434.469</b>	<b>11030,67</b>
		<b>KD : .....</b>		<b>534.612.000</b>	<b>157.249.300</b>	<b>-</b>	<b>157.249.300</b>	<b>29,41</b>
		<b>Total Ditjen Bina Pemdes : .....</b>		<b>733.398.000</b>	<b>22.084.683.769</b>	<b>-</b>	<b>22.084.683.769</b>	<b>3011,28</b>
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	-	2.087.862.448	-	2.087.862.448	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>2.087.862.448</b>	<b>-</b>	<b>2.087.862.448</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Bina Bangda : .....</b>		<b>-</b>	<b>2.087.862.448</b>	<b>-</b>	<b>2.087.862.448</b>	<b>0,00</b>
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	-	33.541.454	-	33.541.454	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>33.541.454</b>	<b>-</b>	<b>33.541.454</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Otda : .....</b>		<b>-</b>	<b>33.541.454</b>	<b>-</b>	<b>33.541.454</b>	<b>0,00</b>
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	464.890.871.000	508.653.970.697	-	508.653.970.697	109,41
		<b>KP : .....</b>		<b>464.890.871.000</b>	<b>508.653.970.697</b>	<b>-</b>	<b>508.653.970.697</b>	<b>109,41</b>
		<b>Total Ditjen Dukcapil : .....</b>		<b>464.890.871.000</b>	<b>508.653.970.697</b>	<b>-</b>	<b>508.653.970.697</b>	<b>109,41</b>
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	-	15.910.505	-	15.910.505	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>15.910.505</b>	<b>-</b>	<b>15.910.505</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Bina Keuda : .....</b>		<b>-</b>	<b>15.910.505</b>	<b>-</b>	<b>15.910.505</b>	<b>0,00</b>
11	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	KP	-	34.583.062	-	34.583.062	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>34.583.062</b>	<b>-</b>	<b>34.583.062</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total BSKDN : .....</b>		<b>-</b>	<b>34.583.062</b>	<b>-</b>	<b>34.583.062</b>	<b>0,00</b>
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	21.476.520.000	2.882.344.661	-	2.882.344.661	13,42

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
12	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	5.169.260.000	486.888.438	-	486.888.438	9,42
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	4.522.050.000	3.817.777.672	-	3.817.777.672	84,43
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	KD	8.428.985.000	1.703.242.016	-	1.703.242.016	20,21
12	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	2.523.160.000	435.334.471	-	435.334.471	17,25
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	877.500.000	407.487.594	-	407.487.594	46,44
		<b>KP : .....</b>		<b>21.476.520.000</b>	<b>2.882.344.661</b>	-	<b>2.882.344.661</b>	<b>13,42</b>
		<b>KD : .....</b>		<b>21.520.955.000</b>	<b>6.850.730.191</b>	-	<b>6.850.730.191</b>	<b>31,83</b>
		<b>Total BPSDM : .....</b>		<b>42.997.475.000</b>	<b>9.733.074.852</b>	-	<b>9.733.074.852</b>	<b>22,64</b>
		<b>KP : .....</b>		<b>504.679.743.000</b>	<b>549.068.726.264</b>	-	<b>549.068.726.264</b>	<b>108,80</b>
		<b>KD : .....</b>		<b>22.055.567.000</b>	<b>8.081.209.704</b>	-	<b>8.081.209.704</b>	<b>36,64</b>
		<b>DK : .....</b>			<b>25.984</b>	-	<b>25.984</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Kementerian : .....</b>		<b>526.735.310.000</b>	<b>557.149.961.952</b>	-	<b>557.149.961.952</b>	<b>105,77</b>



## LAMPIRAN II

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	453.146.201.000	453.146.201.000	180.305.905.591	72.398.467	180.233.507.124	39,79	272.912.693.876
01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	438.497.020.000	438.497.020.000	194.593.229.264	15.738.704	194.577.490.560	44,38	243.919.529.440
01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	89.271.812.000	89.271.812.000	28.903.411.004	4.199.762	28.899.211.242	32,38	60.372.600.758
01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28.332.237.000	28.332.237.000	8.845.307.892	298	8.845.307.594	31,22	19.486.929.406
01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	31.950.262.000	31.950.262.000	11.457.920.268	1.080.095	11.456.840.173	35,86	20.493.421.827
01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	25.358.807.000	25.358.807.000	8.891.875.440	-	8.891.875.440	35,06	16.466.931.560
01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	29.999.184.000	29.999.184.000	10.115.349.560	-	10.115.349.560	33,72	19.883.834.440
01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	30.461.186.000	30.461.186.000	10.590.186.110	1.111.890	10.589.074.220	34,77	19.872.111.780
01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	33.656.912.000	33.656.912.000	11.200.679.890	-	11.200.679.890	33,28	22.456.232.110
		KP	.....	<b>980.915.033.000</b>	<b>980.915.033.000</b>	<b>403.802.545.859</b>	<b>92.336.933</b>	<b>403.710.208.926</b>	<b>41,17</b>	<b>577.204.824.074</b>
		KD	.....	<b>179.758.588.000</b>	<b>179.758.588.000</b>	<b>61.101.319.160</b>	<b>2.192.283</b>	<b>61.099.126.877</b>	<b>33,99</b>	<b>118.659.461.123</b>
			<b>Total Setjen : .....</b>	<b>1.160.673.621.000</b>	<b>1.160.673.621.000</b>	<b>464.903.865.019</b>	<b>94.529.216</b>	<b>464.809.335.803</b>	<b>40,05</b>	<b>695.864.285.197</b>
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	84.400.737.000	84.400.737.000	35.897.148.317	4.885.580	35.892.262.737	42,53	48.508.474.263
		KP	.....	<b>84.400.737.000</b>	<b>84.400.737.000</b>	<b>35.897.148.317</b>	<b>4.885.580</b>	<b>35.892.262.737</b>	<b>42,53</b>	<b>48.508.474.263</b>
			<b>Total Itjen : .....</b>	<b>84.400.737.000</b>	<b>84.400.737.000</b>	<b>35.897.148.317</b>	<b>4.885.580</b>	<b>35.892.262.737</b>	<b>42,53</b>	<b>48.508.474.263</b>
03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	234.506.301.000	234.506.301.000	175.781.868.855	370.366	175.781.498.489	74,96	58.724.802.511
		KP	.....	<b>234.506.301.000</b>	<b>234.506.301.000</b>	<b>175.781.868.855</b>	<b>370.366</b>	<b>175.781.498.489</b>	<b>74,96</b>	<b>58.724.802.511</b>
			<b>Total Ditjen Polpum : .....</b>	<b>234.506.301.000</b>	<b>234.506.301.000</b>	<b>175.781.868.855</b>	<b>370.366</b>	<b>175.781.498.489</b>	<b>74,96</b>	<b>58.724.802.511</b>
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	120.972.179.000	121.658.679.000	39.661.042.646	38.026.473	39.623.016.173	32,60	82.035.662.827
04	019080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	376.431.000	376.431.000	-	-	-	-	376.431.000
04	020103	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	818.750.000	818.750.000	-	-	-	-	818.750.000
04	029134	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	1.919.869.000	1.919.869.000	-	-	-	-	1.919.869.000
04	030031	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	470.000.000	470.000.000	-	-	-	-	470.000.000
04	039667	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2.012.403.000	2.012.403.000	32.000.000	-	32.000.000	1,59	1.980.403.000
04	039902	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH	392.845.000	392.845.000	-	-	-	-	392.845.000
04	045160	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DI YOGYAKARTA	588.325.000	588.325.000	-	-	-	-	588.325.000
04	049061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1.670.624.000	1.670.624.000	-	-	-	-	1.670.624.000
04	050037	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	884.129.000	884.129.000	-	-	-	-	884.129.000
04	059663	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1.031.295.000	1.031.295.000	-	-	-	-	1.031.295.000
04	059667	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	470.000.000	470.000.000	-	-	-	-	470.000.000
04	060016	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI ACEH	777.922.000	777.922.000	-	-	-	-	777.922.000
04	060017	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ACEH	379.584.000	379.584.000	194.890.000	-	194.890.000	51,34	184.694.000
04	069084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	1.970.899.000	1.970.899.000	-	-	-	-	1.970.899.000
04	079078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	2.096.271.000	2.096.271.000	49.105.000	-	49.105.000	2,34	2.047.166.000
04	079108	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA	750.597.000	750.597.000	-	-	-	-	750.597.000
04	089106	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1.916.636.000	1.916.636.000	-	-	-	-	1.916.636.000
04	090058	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RIAU	369.384.000	369.384.000	-	-	-	-	369.384.000
04	099403	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. RIAU	317.174.000	317.174.000	-	-	-	-	317.174.000
04	099438	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	2.118.909.000	2.118.909.000	88.318.940	-	88.318.940	4,17	2.030.590.060
04	100081	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. JAMBI	689.631.000	689.631.000	-	-	-	-	689.631.000
04	109074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1.832.800.000	1.832.800.000	78.023.000	-	78.023.000	4,26	1.754.777.000
04	110018	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	340.000.000	340.000.000	-	-	-	-	340.000.000
04	119082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.784.910.000	1.784.910.000	203.450.766	-	203.450.766	11,40	1.581.459.234
04	119113	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN	728.618.000	728.618.000	-	-	-	-	728.618.000
04	129074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.720.675.000	1.720.675.000	-	-	-	-	1.720.675.000
04	129097	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	369.040.000	369.040.000	-	-	-	-	369.040.000
04	129098	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	211.620.000	211.620.000	-	-	-	-	211.620.000
04	139078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.747.589.000	1.747.589.000	-	-	-	-	1.747.589.000
04	139103	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	350.000.000	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
04	139110	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN BARAT	362.400.000	362.400.000	-	-	-	-	362.400.000
04	149072	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.653.560.000	1.653.560.000	-	-	-	-	1.653.560.000
04	149099	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	736.356.000	736.356.000	-	-	-	-	736.356.000
04	149130	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	162.296.000	162.296.000	-	-	-	-	162.296.000
04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.711.070.000	1.711.070.000	-	-	-	-	1.711.070.000
04	159182	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	687.141.000	687.141.000	-	-	-	-	687.141.000
04	159260	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALIMANTAN SELATAN	350.000.000	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
04	160035	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN TIMUR	699.528.000	699.528.000	-	-	-	-	699.528.000

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	169185	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	838.924.000	838.924.000	-	-	-	-	838.924.000
04	170041	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SULAWESI UTARA	400.404.000	400.404.000	-	-	-	-	400.404.000
04	179088	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	161.088.000	161.088.000	-	-	-	-	161.088.000
04	179223	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.035.232.000	2.035.232.000	53.000.000	-	53.000.000	2,60	1.982.232.000
04	179317	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	569.747.000	569.747.000	-	-	-	-	569.747.000
04	189087	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.678.479.000	1.678.479.000	8.777.678	-	8.777.678	0,52	1.669.701.322
04	199080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.833.518.000	1.833.518.000	57.947.500	-	57.947.500	3,16	1.775.570.500
04	199109	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN	772.600.000	772.600.000	-	-	-	-	772.600.000
04	200100	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA	350.000.000	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
04	209071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.417.242.000	1.417.242.000	-	-	-	-	1.417.242.000
04	209093	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	368.190.000	368.190.000	-	-	-	-	368.190.000
04	209095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	176.331.000	176.331.000	-	-	-	-	176.331.000
04	219062	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1.694.913.000	1.694.913.000	-	-	-	-	1.694.913.000
04	219162	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU	777.590.000	777.590.000	-	-	-	-	777.590.000
04	220015	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALI	736.503.000	736.503.000	-	-	-	-	736.503.000
04	229068	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1.670.692.000	1.670.692.000	33.889.040	-	33.889.040	2,03	1.636.802.960
04	229082	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000
04	239108	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	330.600.000	330.600.000	-	-	-	-	330.600.000
04	239236	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.827.734.000	1.827.734.000	-	-	-	-	1.827.734.000
04	239312	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	690.940.000	690.940.000	-	-	-	-	690.940.000
04	240055	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	420.000.000	420.000.000	-	-	-	-	420.000.000
04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.998.927.000	1.998.927.000	-	-	-	-	1.998.927.000
04	249138	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	569.746.000	569.746.000	-	-	-	-	569.746.000
04	249141	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	406.803.000	406.803.000	-	-	-	-	406.803.000
04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	267.924.000	267.924.000	-	-	-	-	267.924.000
04	250048	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	825.426.000	825.426.000	-	-	-	-	825.426.000
04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	148.193.000	148.193.000	-	-	-	-	148.193.000
04	259245	DK	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROV. PAPUA	409.999.000	409.999.000	-	-	-	-	409.999.000
04	265165	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU	330.000.000	330.000.000	-	-	-	-	330.000.000
04	269093	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	1.804.312.000	1.804.312.000	-	-	-	-	1.804.312.000
04	289095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	153.136.000	153.136.000	-	-	-	-	153.136.000
04	289174	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1.693.555.000	1.693.555.000	-	-	-	-	1.693.555.000
04	289177	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI MALUKU UTARA	320.000.000	320.000.000	-	-	-	-	320.000.000
04	290033	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000
04	290100	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN	333.330.000	333.330.000	-	-	-	-	333.330.000
04	299348	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	1.608.468.000	1.608.468.000	-	-	-	-	1.608.468.000
04	309148	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	1.651.100.000	1.651.100.000	-	-	-	-	1.651.100.000
04	309220	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	330.000.000	330.000.000	-	-	-	-	330.000.000
04	310097	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO	350.000.000	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1.627.421.000	1.627.421.000	85.000.000	-	85.000.000	5,22	1.542.421.000
04	319137	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO	360.840.000	360.840.000	-	-	-	-	360.840.000
04	320098	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000
04	329116	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.637.070.000	1.637.070.000	-	-	-	-	1.637.070.000
04	330099	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PAPUA BARAT	459.856.000	459.856.000	-	-	-	-	459.856.000
04	339161	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	944.550.000	944.550.000	-	-	-	-	944.550.000
04	340166	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1.634.812.000	1.634.812.000	-	-	-	-	1.634.812.000
04	340175	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI BARAT	350.000.000	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	146.113.000	146.113.000	21.155.904	-	21.155.904	14,48	124.957.096
04	350062	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	527.847.000	527.847.000	-	-	-	-	527.847.000
04	359002	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	144.629.000	144.629.000	-	-	-	-	144.629.000
04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.601.249.000	1.601.249.000	-	-	-	-	1.601.249.000

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	433316	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	253.000.000	253.000.000	-	-	-	-	253.000.000
04	433317	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	239.745.000	239.745.000	-	-	-	-	239.745.000
04	433318	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	222.487.000	222.487.000	-	-	-	-	222.487.000
04	433341	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	238.077.000	238.077.000	-	-	-	-	238.077.000
04	433342	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	254.861.000	254.861.000	-	-	-	-	254.861.000
04	433343	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	145.584.000	145.584.000	-	-	-	-	145.584.000
04	433344	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	236.923.000	236.923.000	-	-	-	-	236.923.000
04	433345	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	150.727.000	150.727.000	-	-	-	-	150.727.000
04	433347	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	153.083.000	153.083.000	-	-	-	-	153.083.000
04	433348	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	165.549.000	165.549.000	-	-	-	-	165.549.000
04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	147.035.000	147.035.000	-	-	-	-	147.035.000
04	433350	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	163.405.000	163.405.000	8.900.000	-	8.900.000	5,45	154.505.000
04	433351	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	191.233.000	191.233.000	-	-	-	-	191.233.000
04	433352	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	156.799.000	156.799.000	-	-	-	-	156.799.000
04	433353	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	159.165.000	159.165.000	-	-	-	-	159.165.000
04	484101	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	269.330.000	269.330.000	-	-	-	-	269.330.000
04	484102	DK	BAPPEDA PROVINSI ACEH	428.387.000	428.387.000	-	-	-	-	428.387.000
04	484103	DK	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	289.116.000	289.116.000	-	-	-	-	289.116.000
04	484105	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	281.331.000	281.331.000	-	-	-	-	281.331.000
04	484106	DK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA)	491.278.000	491.278.000	-	-	-	-	491.278.000
04	484107	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	304.764.000	304.764.000	-	-	-	-	304.764.000
04	484109	DK	BAPPEDA PROVINSI RIAU	433.081.000	433.081.000	-	-	-	-	433.081.000
04	484110	DK	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	254.995.000	254.995.000	-	-	-	-	254.995.000
04	484113	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	127.384.000	127.384.000	-	-	-	-	127.384.000
04	484115	DK	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	409.877.000	409.877.000	-	-	-	-	409.877.000
04	484116	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	141.592.000	141.592.000	-	-	-	-	141.592.000
04	484118	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	459.092.000	459.092.000	-	-	-	-	459.092.000
04	484119	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	269.926.000	269.926.000	-	-	-	-	269.926.000
04	484121	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	434.541.000	434.541.000	-	-	-	-	434.541.000
04	484122	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	156.280.000	156.280.000	-	-	-	-	156.280.000
04	484124	DK	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	399.613.000	399.613.000	-	-	-	-	399.613.000
04	484125	DK	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	148.316.000	148.316.000	-	-	-	-	148.316.000
04	484127	DK	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	404.655.000	404.655.000	-	-	-	-	404.655.000
04	484128	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	136.955.000	136.955.000	-	-	-	-	136.955.000
04	484131	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	357.561.000	357.561.000	-	-	-	-	357.561.000
04	484132	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	130.710.000	130.710.000	-	-	-	-	130.710.000
04	484134	DK	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	394.578.000	394.578.000	-	-	-	-	394.578.000
04	484135	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	120.959.000	120.959.000	-	-	-	-	120.959.000
04	484137	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	276.487.000	276.487.000	-	-	-	-	276.487.000
04	484138	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	470.727.000	470.727.000	-	-	-	-	470.727.000
04	484139	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	198.469.000	198.469.000	-	-	-	-	198.469.000
04	484145	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	218.617.000	218.617.000	-	-	-	-	218.617.000
04	484146	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	452.663.000	452.663.000	-	-	-	-	452.663.000

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484147	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	193.541.000	193.541.000	-	-	-	-	193.541.000
04	484149	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	143.230.000	143.230.000	-	-	-	-	143.230.000
04	484150	DK	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	387.265.000	387.265.000	-	-	-	-	387.265.000
04	484151	DK	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	113.687.000	113.687.000	-	-	-	-	113.687.000
04	484153	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	216.994.000	216.994.000	-	-	-	-	216.994.000
04	484154	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	398.520.000	398.520.000	-	-	-	-	398.520.000
04	484155	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	135.374.000	135.374.000	-	-	-	-	135.374.000
04	484157	DK	BAPPEDA PROVINSI BALI	400.144.000	400.144.000	-	-	-	-	400.144.000
04	484158	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	126.741.000	126.741.000	-	-	-	-	126.741.000
04	484160	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	409.727.000	409.727.000	-	-	-	-	409.727.000
04	484161	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	131.764.000	131.764.000	-	-	-	-	131.764.000
04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	477.970.000	477.970.000	101.443.741	-	101.443.741	21,22	376.526.259
04	484164	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	286.267.000	286.267.000	-	-	-	-	286.267.000
04	484166	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	968.951.000	968.951.000	-	-	-	-	968.951.000
04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	134.770.000	134.770.000	-	-	-	-	134.770.000
04	484169	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	413.996.000	413.996.000	-	-	-	-	413.996.000
04	484170	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	135.557.000	135.557.000	-	-	-	-	135.557.000
04	484172	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	158.618.000	158.618.000	-	-	-	-	158.618.000
04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	414.296.000	414.296.000	-	-	-	-	414.296.000
04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	235.095.000	235.095.000	-	-	-	-	235.095.000
04	484177	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	306.388.000	306.388.000	-	-	-	-	306.388.000
04	484178	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	244.180.000	244.180.000	-	-	-	-	244.180.000
04	484180	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	395.311.000	395.311.000	-	-	-	-	395.311.000
04	484181	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	116.502.000	116.502.000	-	-	-	-	116.502.000
04	484183	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	456.173.000	456.173.000	-	-	-	-	456.173.000
04	484184	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	180.127.000	180.127.000	-	-	-	-	180.127.000
04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	391.480.000	391.480.000	-	-	-	-	391.480.000
04	484188	DK	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	119.545.000	119.545.000	-	-	-	-	119.545.000
04	484190	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	386.956.000	386.956.000	-	-	-	-	386.956.000
04	484191	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	116.669.000	116.669.000	-	-	-	-	116.669.000
04	484193	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	426.836.000	426.836.000	-	-	-	-	426.836.000
04	484194	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	162.663.000	162.663.000	-	-	-	-	162.663.000
04	484196	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	418.456.000	418.456.000	-	-	-	-	418.456.000
04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	117.052.000	117.052.000	-	-	-	-	117.052.000
04	484199	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	425.948.000	425.948.000	-	-	-	-	425.948.000
04	484200	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	146.069.000	146.069.000	-	-	-	-	146.069.000
04	484202	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	901.382.000	901.382.000	-	-	-	-	901.382.000
04	484203	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	132.756.000	132.756.000	-	-	-	-	132.756.000
04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	401.930.000	401.930.000	-	-	-	-	401.930.000
04	484206	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	123.322.000	123.322.000	-	-	-	-	123.322.000
04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	303.099.000	303.099.000	-	-	-	-	303.099.000
04	484209	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	123.645.000	123.645.000	-	-	-	-	123.645.000
04	484211	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	208.814.000	208.814.000	-	-	-	-	208.814.000
04	484212	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	296.527.000	296.527.000	-	-	-	-	296.527.000
04	484213	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	225.498.000	225.498.000	-	-	-	-	225.498.000
04	029142	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT	369.760.000	369.760.000	-	-	-	-	369.760.000
04	049073	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DI YOGYAKARTA	311.160.000	311.160.000	-	-	-	-	311.160.000
04	484174	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	125.722.000	125.722.000	-	-	-	-	125.722.000
04	484112	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	389.252.000	389.252.000	-	-	-	-	389.252.000
		KP :		120.972.179.000	121.658.679.000	39.661.042.646	38.026.473	39.623.016.173	32,60	82.035.662.827
		DK :		105.500.000.000	105.500.000.000	1.015.901.569	-	1.015.901.569	0,96	104.484.098.431
			Total Ditjen Bina Adwil :	226.472.179.000	227.158.679.000	40.676.944.215	38.026.473	40.638.917.742	17,91	186.519.761.258
05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	103.185.777.000	125.944.703.000	42.181.439.895	5.152.666	42.176.287.229	33,49	83.768.415.771
05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	17.807.583.000	17.807.583.000	5.545.169.085	1.273.050	5.543.896.035	31,14	12.263.686.965
05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	15.025.263.000	15.025.263.000	4.801.693.619	1.958.261	4.799.735.358	31,96	10.225.527.642
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	15.073.792.000	15.073.792.000	5.913.298.195	1.120.288	5.912.177.907	39,23	9.161.614.093
		KP :		103.185.777.000	125.944.703.000	42.181.439.895	5.152.666	42.176.287.229	33,49	83.768.415.771
		KD :		47.906.638.000	47.906.638.000	16.260.160.899	4.351.599	16.255.809.300	33,94	31.650.828.700
			Total Ditjen Bina Pemdes :	151.092.415.000	173.851.341.000	58.441.600.794	9.504.265	58.432.096.529	33,62	115.419.244.471
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	223.283.824.000	223.283.824.000	47.600.703.615	6.019.868	47.594.683.747	21,32	175.689.140.253

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
			KP : .....	223.283.824.000	223.283.824.000	47.600.703.615	6.019.868	47.594.683.747	21,32	175.689.140.253
			Total Ditjen Bina Bangsa : .....	223.283.824.000	223.283.824.000	47.600.703.615	6.019.868	47.594.683.747	21,32	175.689.140.253
07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	99.139.263.000	99.139.263.000	34.463.307.530	33.967.562	34.429.339.968	34,76	64.709.923.032
			KP : .....	99.139.263.000	99.139.263.000	34.463.307.530	33.967.562	34.429.339.968	34,76	64.709.923.032
			Total Ditjen Otda : .....	99.139.263.000	99.139.263.000	34.463.307.530	33.967.562	34.429.339.968	34,76	64.709.923.032
08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.223.059.937.000	2.199.614.511.000	234.553.984.868	4.573.548	234.549.411.320	10,66	1.965.065.099.680
			KP : .....	2.223.059.937.000	2.199.614.511.000	234.553.984.868	4.573.548	234.549.411.320	10,66	1.965.065.099.680
			Total Ditjen Dukcapil : .....	2.223.059.937.000	2.199.614.511.000	234.553.984.868	4.573.548	234.549.411.320	10,66	1.965.065.099.680
09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	110.291.004.000	110.291.004.000	35.760.540.641	5.640.752	35.754.899.889	32,42	74.536.104.111
			KP : .....	110.291.004.000	110.291.004.000	35.760.540.641	5.640.752	35.754.899.889	32,42	74.536.104.111
			Total Ditjen Bina Keuda : .....	110.291.004.000	110.291.004.000	35.760.540.641	5.640.752	35.754.899.889	32,42	74.536.104.111
11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	58.608.338.000	58.608.338.000	20.598.044.887	3.155.665	20.594.889.222	35,15	38.013.448.778
			KP : .....	58.608.338.000	58.608.338.000	20.598.044.887	3.155.665	20.594.889.222	35,15	38.013.448.778
			Total BSKDN : .....	58.608.338.000	58.608.338.000	20.598.044.887	3.155.665	20.594.889.222	35,15	38.013.448.778
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	118.584.140.000	118.584.140.000	55.084.503.308	1.409.856.632	53.674.646.676	46,45	64.909.493.324
12	027114	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	26.243.013.000	26.243.013.000	11.298.041.821	694.904	11.297.346.917	43,05	14.945.666.083
12	027177	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	21.718.866.000	21.718.866.000	8.377.736.623	1.350.049	8.376.386.574	38,57	13.342.479.426
12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	25.511.026.000	25.511.026.000	10.072.936.970	555.442	10.072.381.528	39,48	15.438.644.472
12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	17.370.812.000	17.370.812.000	5.548.135.340	7.355.790	5.540.779.550	31,94	11.830.032.450
12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.373.042.000	11.373.042.000	5.215.645.909	177.238	5.215.468.671	45,86	6.157.573.329
			KP : .....	118.584.140.000	118.584.140.000	55.084.503.308	1.409.856.632	53.674.646.676	46,45	64.909.493.324
			KD : .....	102.216.759.000	102.216.759.000	40.512.496.663	10.133.423	40.502.363.240	39,63	61.714.395.760
			Total BPSDM : .....	220.800.899.000	220.800.899.000	95.596.999.971	1.419.990.055	94.177.009.916	43,30	126.623.889.084
			KP : .....	4.356.946.533.000	4.356.946.533.000	1.125.385.130.421	1.603.986.045	1.123.781.144.376	25,83	3.233.165.388.624
			KD : .....	329.881.985.000	329.881.985.000	117.873.976.722	16.677.305	117.857.299.417	35,73	212.024.685.583
			DK : .....	105.500.000.000	105.500.000.000	1.015.901.569	-	1.015.901.569	0,96	104.484.098.431
			Total Kementerian : .....	4.792.328.518.000	4.792.328.518.000	1.244.275.008.712	1.620.663.350	1.242.654.345.362	25,96	3.549.674.172.638



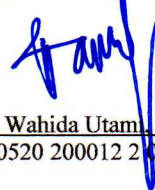
## LAMPIRAN III

# IKHTISAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI**  
**PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**  
**PER 30 JUNI 2025**

No		LK PLN I	Jumlah
1	Nama PLN	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	
2	Pemberi Pinjaman	The World Bank	
3	Nama Proyek	Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project (Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ Frontline Service Delivery)	
4	Loan ID	8941-ID	
5	No. Register	1CZ6CF2A	
6	Date Sign	30 Januari 2020	
7	Date Effective	19 Februari 2020	
8	Closing Date	31 Desember 2025	
9	Loan Amount	USD 6.000.000	USD 6.000.000
10	Disbursement s.d. 2020		-
11	Disbursement pada tahun 2021		-
12	Disbursement pada tahun 2022		-
13	Disbursement pada tahun 2023	13.069.878.000	13.069.878.000
14	Disbursement pada tahun 2024	41.905.977.000	41.905.977.000
15	Disbursement pada tahun 2025	686.500.000	686.500.000
16	<b>Belanja Tahun 2025 (Rupiah)</b>	-	-
	a. Belanja Pegawai	-	-
	b. Belanja Barang	-	-
	c. Belanja Modal	-	-
	d. Belanja Bansos	-	-
16	<b>Neraca (Rupiah)</b>	-	-
	a. Aset Lancar	-	-
	b. Aset Tetap	-	-
	c. Aset Lainnya	-	-
	d. Kewajiban	-	-
17	Executing Agency	Kementerian Dalam Negeri	
18	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)		

Kepala Bagian Keuangan,



Mey Rany Wahida Utami, S.STP, MM  
NIP. 19820520 200012 2 001

PARAF KOORDINASI	
1.	KASUBDIT
2.	KASUBAG TU
3.	KASI
4.	STAF

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
PER 30 JUNI 2025**

No		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah
1	Nama PLN	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Integrated Land Administration and Spatial Planning	
2	Pemberi Pinjaman	World Bank	World Bank	
3	Nama Proyek	Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project	Integrated Land Administration and Spatial Planning Project	
4	Loan ID	8941-ID	9732-ID	
5	No. Register	1CZ6CF2A	13868THA	
6	Date Sign	30 Januari 2020	05 Desember 2024	
7	Date Effective	19 Februari 2020	20 Juni 2025	
8	Closing Date	31 Desember 2024	30 November 2029	
9	Loan Amount	\$ 153,020,000	JPY 94,877,700,000	
10	Disbursement pada tahun 2020	Rp 850,976,500		Rp 850,976,500
11	Disbursement pada tahun 2021	Rp 34,048,360,462		Rp 34,048,360,462
12	Disbursement pada tahun 2022	Rp 37,982,101,946		Rp 37,982,101,946
13	Disbursement pada tahun 2023	Rp 856,874,791,500		Rp 856,874,791,500
14	Disbursement pada tahun 2024	Rp 965,588,981,752		Rp 965,588,981,752
15	Disbursement pada tahun 2025	Rp 7,449,581,000	15,309,345,000	Rp 22,758,926,000
	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	Rp -	-	
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang	Rp -		Rp -
	c. Belanja Modal	Rp -		Rp -
	d. Belanja Bansos			
16	Neraca (Rupiah)	-	-	-
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap	-		
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
16	Executing Agency	Kementerian Dalam Negeri	ATR/BPN	
17	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK	BPK	

Kepala Bagian Keuangan,

  
KMS Yose Rizal, S.P., M.Si  
NIP. 19720607 199311 1 001

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
PER 30 JUNI 2025**

NO.		LK PLN 1	LK PLN 2	LK PLN 3	Jumlah
1	Nama PHLN	<i>Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)</i>	<i>National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)</i>	<i>Flood Management in North Java Project (FMNJP)</i>	
2	Pemberi Pinjaman	IBRD	IBRD	ADB	
3	Nama Proyek	ISWMP	NUFReP	FMNJP	
4	Loan ID	IBRD No. 9021-ID	IBRD No. 9459-ID	4410-INO	
5	No. Register	1HFQ7GNA	1739NSEA	1NPBHBMA	
6	Data Sign	6 Januari 2020	11 Januari 2023	14 Desember 2023	
7	Data Effective	3 April 2020	27 Maret 2023	9 Februari 2024	
8	Closing Date	30 November 2025	31 Januari 2028	30 Juni 2029	
9	Loan Amount	12.125.000.000	USD 2.000.000	JPY36.055.200.000	
10	Disbursement s.d 2021	8.428.417.805	-	-	8.428.417.805
11	Disbursement s.d 2022	17.972.260.000	-	-	17.972.260.000
12	Disbursement s.d 2023	14.645.786.000	631.106.000	-	15.276.892.000
13	Disbursement s.d 2024	27.460.070.000	2.113.531.000	1.714.054.000	31.287.655.000
14	Disbursement s.d 2025	30.473.276.000	7.615.305.000	13.555.466.000	51.644.047.000
<b>15</b>	<b>Belanja Tahun 2024 (Rupiah)</b>	<b>379.510.940</b>	<b>125.570.578</b>	<b>1.006.968.850</b>	<b>1.512.050.368</b>
	a. Belanja Pegawai				-
	b. Belanja Barang	379.510.940	125.570.578	1.006.968.850	1.512.050.368
	c. Belanja Modal	-	-	-	-
	d. Belanja Bansos	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>Neraca (Rupiah)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	a. Aset Lancar				-
	b. Aset Tetap				-
	c. Aset Lainnya				-
	d. Kewajiban				-
17	Executing Agency	Ditjen Cipta Karya Dit. Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya air, Kementerian PUPR	
18	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK	BPK	BPK	

Kepala Bagian Keuangan



**Amaryadi, S.IP., M.AP**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197711122006041001



**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
ID FOR INCLUSIVE SERVICE DELIVERY AND DIGITAL TRANSFORMATION IN  
INDONESIA PROJECT IBRD LOAN NO. 9520-ID  
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
PER 30 JUNI 2025**

No.	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	<i>ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia Project</i>	
2	Pemberi Pinjaman	<i>International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) World Bank</i>	
3	Nama Proyek	Penguatan Adminstrasi Kependudukan Dan Pengenalan Identitas Digital Untuk Mendukung Pelayanan Yang Inklusif Dan Transformasi	
4	<i>Loan ID</i>	No. 9520-ID	
5	No. Register	1F2VZKKA	
6	<i>Date Sign</i>	30 Mei 2023	
7	<i>Date Effective</i>	3 Agustus 2023	
8	<i>Closing Date</i>	31 Desember 2027	
9	<i>Loan Amount</i>		USD250,000,000.00
10	<i>Disbursement s.d. 2023</i>		USD83,930.00
	<i>Disbursement s.d. 31 Des 2024</i>		USD16,000,000.00
	<i>Disbursement s.d. 30 Juni 2005</i>		USD2,697,067.35
11	Belanja 30 Juni 2025 (Rupiah)		Rp2.020.704.778,00
	a. Belanja Pegawai		
	b. Belanja Barang		Rp2.020.704.778,00
	c. Belanja Modal		
	d. Belanja Bansos		
12	Neraca (Rupiah)		
	a. Aset Lancar		
	b. Aset Tetap		
	c. Aset Lainnya		
	d. Kewajiban		
13	<i>Executing Agency</i>	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	
14	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	BPK	

Kepala Bagian Keuangan,

  
Ratnawati, SP., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19741113 200312 2 002



## LAMPIRAN IV

**RINCIAN PAGU ANGGARAN,  
REALISASI ANGGARAN,  
KEGIATAN, PROGRAM, OUTPUT  
DAN TARGET DARI MASING-  
MASING FUNGSI DAN SUB  
FUNGSI**

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01_403200_SEKRETARIAT JENDERAL										
	Program Dukungan Manajemen									
	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal									
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	335.439.000	122.034.180	36,38	15	Kesepakatan	15	100,00
			RO_Kerjasama Luar Negeri	691.825.000	354.319.354	51,22	20	Kesepakatan	12	60,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum	647.344.000	197.747.720	30,55	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Fasilitasi Kerja Sama	474.670.000	252.337.559	53,16	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Fasilitasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan	1.178.382.000	299.083.626	25,38	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Fasilitasi Telaahan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah	1.103.950.000	292.494.100	26,50	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Hukum	740.229.000	102.463.911	13,84	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Non Litigasi Hukum	489.628.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Rekomendasi Perjalanan Luar Negeri	231.975.000	109.757.000	47,31	1	layanan	-	0,00
			RO_Layanan Umum	466.210.000	184.512.869	39,58	1	Layanan	-	0,00
			RO_Penanganan Perkara Litigasi	1.234.717.000	493.904.971	40,00	80	Perkara	58	72,50
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal									
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Administrasi Pimpinan	1.153.025.000	315.614.800	27,37	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan BMN	606.077.000	389.947.235	64,34	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Keuangan dan Aset	306.583.000	145.261.143	47,38	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan	648.729.000	313.576.612	48,34	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Umum	185.953.000	64.257.291	34,56	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Ketatausahaan dan Koordinasi Tugas Pimpinan	13.392.938.000	8.493.486.748	63,42	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	929.742.000	503.481.753	54,15	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan Kementerian Dalam Negeri	177.893.000	89.439.200	50,28	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	94.240.000	50.109.800	53,17	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal	333.056.000	191.210.597	57,41	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	925.914.000	328.993.625	35,53	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Implementasi SAKIP, Manajamen Kinerja dan Penugasan Lainnya Bidang Monitoring dan Evaluasi lingkup Kemendagri	705.460.000	360.482.451	51,10	1	Dokumen	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko lingkup Kemendagri	107.180.000	17.575.000	16,40	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal	105.028.000	12.611.750	12,01	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Jenderal	256.545.000	91.207.087	35,55	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal	382.668.000	206.903.510	54,07	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen SPIP lingkup Kemendagri	82.070.000	63.571.600	77,46	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Belanja Kegiatan Kementerian Dalam Negeri	1.066.720.000	454.077.678	42,57	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Kegiatan Kemendagri	902.828.000	426.306.874	47,22	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) untuk Kementerian/Lembaga dengan Jumlah di atas 6 unit	111.050.000	110.598.095	99,59	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	230.452.000	73.479.656	31,89	3	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	255.979.191.000	145.783.620.723	56,95	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	10.396.710.000	182.961.300	1,76	5	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Protokoler	3.210.682.000	1.216.276.189	37,88	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	7.184.860.000	5.358.212.609	74,58	350	Unit	37	10,57
			RO_Layanan Umum	2.520.457.000	978.406.223	38,82	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal							
			RO_Layanan Data dan Informasi	2.519.140.000	305.947.200	12,14	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Data dan Sistem Informasi	1.746.886.000	730.777.000	41,83	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Penerangan	755.690.000	228.536.530	30,24	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	60.340.000	15.985.400	26,49	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Pengaduan	758.373.000	145.342.710	19,17	1	layanan	-	0,00
			RO_Layanan Publikasi	8.143.037.000	3.368.475.753	41,37	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Umum	880.183.000	308.183.655	35,01	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kemendagri	896.127.000	389.002.815	43,41	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pengadaan Data Center	95.755.026.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Pengadaan Jaringan	71.955.000	38.482.500	53,48	3	Unit	-	0,00
			RO_Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.646.501.000	2.292.503.549	49,34	3	Unit	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pengadaan Sistem Keamanan	615.273.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Pengelolaan Aplikasi Situs Web ULA	200.750.000	27.500.000	13,70	1	SistemInfor masi	-	0,00
			RO_Pengelolaan dan Implementasi SI Manajemen	373.045.000	68.950.000	18,48	1	SistemInfor masi	-	0,00
			RO_Pengelolaan Implementasi SIPD	13.644.955.000	462.819.330	3,39	10	SistemInfor masi	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal							
			RO_Asistensi dan Supervisi Kelembagaan Sekretariat Daerah	670.479.000	47.807.333	7,13	38	Provinsi	5	13,16
			RO_Asistensi dan Supervisi Ketatalaksanaan Pemda	266.576.000	-	0,00	38	Provinsi	-	0,00
			RO_Asistensi dan Supervisi Reformasi Birokrasi Pemda	502.361.000	176.760.400	35,19	38	Provinsi	13	34,21
			RO_Layanan Administrasi dan Konsultasi Pemda	332.100.000	134.350.000	40,45	38	Provinsi	15	39,47
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Kepegawaian	637.563.000	249.497.130	39,13	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Organisasi dan Tata Laksana	888.778.000	304.165.100	34,22	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	6.423.722.000	1.715.189.842	26,70	3.287	Orang	1.207	36,72
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.526.681.000	523.144.297	34,27	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	807.275.000	134.819.373	16,70	1	layanan	-	0,00
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri	17.340.000	-	0,00	120	Orang	-	0,00
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	78.605.000	7.340.835	9,34	360	Orang	-	0,00
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	337.020.000	-	0,00	180	Orang	-	0,00
			01_483005_DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU							
			Program Dukungan Manajemen							
			Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu							
			RO_Layanan Bantuan Hukum	9.640.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Data dan Informasi	160.300.000	29.220.000	18,23	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	521.728.000	98.595.660	18,90	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Hukum	228.560.000	29.740.000	13,01	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	46.798.479.000	15.345.445.195	32,79	1	layanan	-	0,00
			RO_Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	4.252.554.000	642.144.524	15,10	76	Lembaga	21	27,63
			RO_Layanan Perkantoran	23.580.438.000	11.163.073.088	47,34	1	Layanan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Protokoler	500.000.000	19.500.000	3,90	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.117.272.000	658.946.690	10,77	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Umum	7.102.841.000	916.745.847	12,91	1	Layanan	-	0,00
03_027210_DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum									
	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan									
			RO_Bantuan Keuangan ke Partai Politik	134.489.125.000	134.489.125.000	100,00	8	Lembaga	8	100,00
			RO_Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	2.000.000.000	231.431.476	11,57	2.000	Orang	100	5,00
			RO_Fasilitasi dan Evaluasi Kelengkapan Admnistrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	200.000.000	33.128.320	16,56	8	Laporan	2	25,00
			RO_Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	500.000.000	121.794.950	24,36	19	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	26,32
			RO_Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	650.000.000	61.790.000	9,51	19	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	26,32
			RO_Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	400.000.000	-	0,00	8	Lembaga	-	0,00
			RO_Forum Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bidang Politik Dalam Negeri	550.000.000	153.586.385	27,92	1	forum	-	0,00
			RO_Indeks Kinerja Ormas	200.000.000	-	0,00	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	800.000.000	215.987.941	27,00	2	RekomendasiKebijakan	1	50,00
			RO_Kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan ormas	1.150.000.000	360.618.944	31,36	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	8	21,05
			RO_Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang organisasi kemasyarakatan	1.950.000.000	445.712.377	22,86	5	forum	4	80,00
			RO_Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pilkada Serentak	300.000.000	65.775.880	21,93	3	Laporan	2	66,67
			RO_Pembinaan Kelompok Masyarakat	700.000.000	147.825.500	21,12	220	KelompokMasyarakat	50	22,73
			RO_Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	600.000.000	35.693.000	5,95	400	Orang	-	0,00
			RO_Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	900.000.000	145.760.655	16,20	6	forum	2	33,33
			RO_Penguatan Demokrasi Bagi Masyarakat	500.000.000	110.914.000	22,18	2	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	600.000.000	38.507.000	6,42	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya									
			RO_Fasilitasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	350.000.000	62.394.000	17,83	20	Daerah(Prov/Kab/Kota)	1	5,00
			RO_Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	1.000.000.000	210.218.356	21,02	5	Daerah(Prov/Kab/Kota)	2	40,00
			RO_Fasilitasi penanganan ketahanan ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi	350.000.000	116.117.761	33,18	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	19	50,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	1.000.000.000	110.473.787	11,05	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	10	26,32
			RO_Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	200.000.000	55.534.796	27,77	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600.000.000	98.400.500	16,40	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	3	7,89
			RO_Fasilitasi penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500.000.000	143.044.683	28,61	500	Orang	1	0,20
			RO_Fasilitasi Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Dalam Menumbuhkan semangat Nasionalisme Dalam Rangka Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300.000.000	34.959.529	11,65	20	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Fasilitasi Peningkatan Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	300.000.000	17.556.720	5,85	20	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	900.000.000	211.000.940	23,44	180	Orang	1	0,56
			RO_Fasilitasi Penguatan Seni dan Budaya Indonesia dalam rangka Ketahanan Identitas Bangsa	250.000.000	-	0,00	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Indeks Harmoni Indonesia	400.000.000	217.056.718	54,26	1	Kajian	-	0,00
			RO_Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	300.000.000	-	0,00	12	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Kampanye Gerakan Menghalau Isu Hoax dan Isu SARA dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri, Trantibunlinmas	200.000.000	26.413.824	13,21	5	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	800.000.000	261.768.627	32,72	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	8	21,05
			RO_Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan pembahasan isu strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	689.335.000	166.293.567	24,12	20	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah dalam Menjaga Persatuan dan Keutuhan Bangsa.	500.000.000	117.416.970	23,48	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	2	5,26
			RO_Penguatan Kinerja PPWK di daerah	200.000.000	45.451.900	22,73	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalui Kreatifitas Pemuda dalam menjaga Persatuan dan Keutuhan NKRI	450.000.000	7.045.000	1,57	15	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Tim terpadu PKS daerah yang efektif	1.200.000.000	75.370.880	6,28	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	30	78,95
			RO_Workshop dan seminar wawasan kebangsaan di daerah otonomi baru	987.293.000	143.354.737	14,52	4	Daerah(Prov /Kab/Kota)	-	0,00
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional							
			RO_Deteksi Dini	100.000.000	40.820.220	40,82	417	laporan	197	47,24
			RO_Fasilitasi kewaspadaan nasional	1.700.000.000	288.577.004	16,98	38	Daerah(Prov /Kab/Kota)	14	36,84
			RO_Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia	100.000.000	-	0,00	2	forum	-	0,00
			RO_Kapasitas aparaturnya pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	2.000.000.000	861.582.700	43,08	200	Orang	100	50,00
			RO_Kebijakan / Regulasi Bidang Kewaspadaan Nasional	100.000.000	18.704.800	18,70	1	RekomendasiKebijakan	-	0,00
			RO_Komunikasi Sosial Bidang Kewaspadaan Nasional	1.900.000.000	463.346.547	24,39	10	forum	4	40,00
			RO_Terlaksananya fasilitasi pelayanan dan perizinan penelitian orang asing dan lokal	100.000.000	38.413.700	38,41	300	Orang	130	43,33
07_621892_DITJEN OTONOMI DAERAH										

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
			RO_Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	251.992.000	-	0,00	234	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Permendagri Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 terkait Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	72.964.000	22.000.000	30,15	1	PerMen	-	0,00
			RO_Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	2.534.654.000	594.602.765	23,46	16	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	53.923.000	-	0,00	1	RekomendasiKebijakan	-	0,00
			RO_Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Provinsi Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	176.567.000	5.230.000	2,96	1	RekomendasiKebijakan	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	709.900.000	-	0,00	1	SistemInfor masi	-	0,00
	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa									
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	6.000.000.000	1.016.850.784	16,95	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian sengketa di DOB	3.000.000.000	521.846.724	17,39	4	RekomendasiKebijakan	-	0,00
	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa									
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	2.000.000.000	213.264.515	10,66	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	1.000.000.000	64.950.437	6,50	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	1.000.000.000	215.345.151	21,53	1	Data	-	0,00
			RO_Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	1.000.000.000	113.920.902	11,39	2	RekomendasiKebijakan	-	0,00
	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah									
			RO_Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang optimal	600.000.000	12.478.000	2,08	7	Lembaga	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi KDH dan DPRD	285.124.000	46.361.500	16,26	38	Provinsi	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun KDH serta PAW Anggota DPRD	600.000.000	28.688.200	4,78	200	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian hasil Pilkada serentak 2024	700.000.000	78.347.000	11,19	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah	750.000.000	236.374.600	31,52	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	1.081.700.000	55.077.625	5,09	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang Kepala Daerah dan DPRD-nya yang menyampaikan LKPJ dan rekomendasi LKPJ tepat waktu	564.876.000	55.970.000	9,91	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	1.200.000.000	124.586.565	10,38	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah	358.300.000	59.932.113	16,73	1	SuratKeputu san	-	0,00
			RO_Netralitas ASN di daerah pasca pilkada serentak	500.000.000	7.438.880	1,49	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	2.000.000.000	-	0,00	1	RekomendasiKebijakan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	800.000.000	54.892.934	6,86	1	Rekomendasi Kebijakan	-	0,00
			RO_Sistem E-mutasi	160.000.000	-	0,00	1	Sistem Informasi	-	0,00
09_662766_DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan dan Fasilitas Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah									
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	2.000.000.000	66.072.910	3,30	110	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	1.000.000.000	4.855.675	0,49	110	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	4,55
			RO_Daerah yang Optimal Dalam Memanfaatkan Dana Transfer	4.000.000.000	617.107.184	15,43	480	Daerah(Prov/Kab/Kota)	10	2,08
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	91.440.970	9,14	1	Data	-	0,00
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah									
			RO_Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.000.000.000	129.470.519	6,47	1	Data	-	0,00
			RO_Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkatkan Dalam APBD	3.400.000.000	149.152.724	4,39	300	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	1,67
			RO_Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkatkan	5.000.000.000	477.658.470	9,55	300	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan LKPD	1.000.000.000	46.711.245	4,67	500	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai	1.500.000.000	70.542.140	4,70	110	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	1.500.000.000	22.298.150	1,49	2	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	3.300.000.000	335.086.038	10,15	500	Daerah(Prov/Kab/Kota)	251	50,20
			RO_Daerah yang Menerapkan PPK BLUD	1.000.000.000	88.617.795	8,86	546	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah Yang Menerapkan SIPD Bidang Keuangan Daerah	4.200.000.000	639.348.212	15,22	546	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	750.000.000	219.799.320	29,31	1	Data	-	0,00
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	300.000.000	39.153.700	13,05	1	Data	-	0,00
			RO_Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	750.000.000	144.733.791	19,30	1	Data	-	0,00
			RO_Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah	3.500.000.000	110.454.460	3,16	16	Kegiatan	-	0,00
			RO_Modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1.500.000.000	32.540.500	2,17	2	Modul Aplikasi	-	0,00
			RO_Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			RO_Permendagri Bidang Pendapatan Daerah	200.000.000	4.867.195	2,43	1	PerMen	-	0,00
			RO_Permendagri Bidang Pengelolaan BLUD	200.000.000	1.258.000	0,63	1	PerMen	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Permendagri Bidang Pengelolaan BMD	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			RO_Permendagri Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	200.000.000	4.844.510	2,42	1	PerMen	-	0,00
			RO_Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	1.000.000.000	16.996.327	1,70	1	Data	-	0,00
			RO_Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Pencapaian Realisasi Belanja secara Optimal	1.000.000.000	30.440.000	3,04	38	Provinsi	-	0,00
			RO_Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan APBD	2.000.000.000	110.852.746	5,54	38	Provinsi	-	0,00
			RO_Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.000.000.000	3.191.700	0,32	38	Provinsi	-	0,00
			RO_Provinsi Yang Memenuhi Anggaran SPM	500.000.000	25.601.048	5,12	38	Provinsi	5	13,16
			RO_Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.000.000.000	25.070.912	2,51	19	Provinsi	2	10,53
<b>TOTAL SUB FUNGSI: LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI</b>				<b>778.983.766.000</b>	<b>356.734.611.225</b>	<b>45,79</b>	<b>14.152</b>		<b>2.408</b>	<b>17,02</b>

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01_448302_INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN								
			RO_ Keputusan Menteri Dalam Negeri Terkait IPDN	96.150.000	13.733.250	14,28	3	peraturan	1	33,33
			RO_ Peraturan Rektor IPDN	146.533.000	20.942.400	14,29	4	peraturan	-	0,00
			RO_Layanan Bantuan Hukum	32.820.000	7.008.000	21,35	2	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Hukum	386.639.000	168.457.139	43,57	1	Layanan	-	0,00
			RO_Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN	46.145.000	9.341.000	20,24	1	PerMen	-	0,00
			RO_Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta IPDN	43.805.000	19.542.500	44,61	1	PerMen	-	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	1.015.159.000	373.924.900	36,83	10	kegiatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.118.252.000	162.229.841	14,51	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	434.398.000	36.026.000	8,29	3	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	341.432.651.000	175.455.748.040	51,39	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	315.818.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.820.539.000	443.067.000	24,34	1.913	Unit	1.704	89,07
			RO_Layanan Umum	5.296.736.000	1.611.157.109	30,42	1	Layanan	-	0,00
			RO_Penyusunan Grand Design Pengembangan Smart Campus IPDN	650.000.000	-	0,00	1	Kajian	-	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	192.135.000	14.766.490	7,69	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Kehumasan dan Informasi	371.969.000	159.753.261	42,95	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Keprotokolan	269.090.000	101.889.693	37,86	1	Layanan	-	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Akreditasi Institusi dan Prodi	1.538.955.000	499.869.800	32,48	8	produk	7	87,50

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	404.472.000	91.274.945	22,57	2	Dokumen	-	0,00
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	344.077.000	86.918.938	25,26	8	Kesepakatan	5	62,50
			RO_Kerjasama Luar Negeri	583.816.000	136.650.800	23,41	1	Kesepakatan	-	0,00
			RO_Layanan Audit Internal	1.856.530.000	217.398.245	11,71	2	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	2.906.870.000	330.779.521	11,38	1.298	Orang	502	38,67
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	951.077.000	198.820.870	20,90	3	Laporan	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	390.761.000	81.460.574	20,85	5	Layanan	-	0,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	37.612.367.000	9.248.995.300	24,59	2.724	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana	8.640.878.000	3.444.157.630	39,86	160	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan	2.034.150.000	854.619.267	42,01	100	Orang	-	0,00
			RO_Naskah Kebijakan Aktual Strategis	221.752.000	11.766.000	5,31	3	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Pengabdian Masyarakat	2.644.976.000	42.963.900	1,62	2	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi	4.362.195.000	385.400.208	8,84	16	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Seleksi Penerimaan Calon Praja	20.335.305.000	364.566.643	1,79	1.061	Orang	-	0,00
01_677010_IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	196.877.000	48.131.169	24,45	4	kegiatan	1	25,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	131.342.000	1.400.000	1,07	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	25.211.118.000	8.719.844.367	34,59	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	217.500.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	313.872.000	34.699.876	11,06	1	Layanan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	16.610.000	247.000	1,49	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	34.069.000	-	0,00	1	Kesepakatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	229.232.000	-	0,00	53	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	183.064.000	16.574.980	9,05	1	Laporan	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	28.487.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.770.066.000	24.410.500	1,38	72	Orang	-	0,00
01_677024_IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	361.294.000	130.430.500	36,10	4	kegiatan	3	75,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	103.900.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	29.119.725.000	11.036.464.318	37,90	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	229.754.000	229.754.000	100,00	7	Unit	7	100,00
			RO_Layanan Umum	412.929.000	6.030.000	1,46	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	61.072.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	32.144.000	-	0,00	1	Kesepakatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	135.346.000	-	0,00	94	Orang	23	24,47
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	110.340.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	26.145.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.357.613.000	55.241.450	4,07	144	Orang	-	0,00
01_677045_IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	231.882.000	95.336.110	41,11	4	kegiatan	1	25,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	234.294.000	67.703.723	28,90	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	22.034.780.000	8.594.345.107	39,00	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	290.000.000	38.905.500	13,42	3	Unit	1	33,33
			RO_Layanan Umum	359.213.000	31.504.000	8,77	1	Layanan	-	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_Layanan Data dan Informasi	68.920.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	33.418.000	-	0,00	1	Kesepakatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	166.207.000	-	0,00	73	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	116.610.000	1.550.000	1,33	1	Laporan	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	43.026.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.780.457.000	62.531.000	3,51	144	Orang	-	0,00
01_683070_IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	166.606.000	-	0,00	4	kegiatan	2	50,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	91.020.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	27.489.853.000	9.579.375.749	34,85	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	289.910.000	289.910.000	100,00	770	Unit	770	100,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Umum	170.838.000	15.572.800	9,12	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	65.870.000	4.701.900	7,14	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	8.350.000	50.000	0,60	1	Kesepakatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	118.200.000	43.000	0,04	60	Orang	30	50,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	93.960.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25.260.000	50.000	0,20	1	Layanan	-	0,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.479.317.000	225.646.111	15,25	144	Orang	-	0,00
01_683084_IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	444.834.000	77.476.990	17,42	4	kegiatan	2	50,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	84.772.000	14.000	0,02	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	27.443.163.000	10.437.304.654	38,03	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	233.500.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	492.701.000	40.335.466	8,19	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	39.238.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	16.927.000	-	0,00	1	Kesepakatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	101.976.000	-	0,00	89	Orang	23	25,84
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	180.348.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	29.334.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.394.393.000	35.055.000	2,51	145	Orang	108	74,48
01_683091_IPDN KAMPUS PAPUA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	160.628.000	6.600.000	4,11	4	kegiatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	78.581.000	1.265.000	1,61	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	29.799.046.000	10.940.981.040	36,72	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	400.000.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	111.670.000	78.135.000	69,97	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	16.940.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	19.300.000	-	0,00	1	Kesepakatan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	230.162.000	-	0,00	43	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	72.418.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	77.188.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	2.690.979.000	173.698.850	6,45	72	Orang	-	0,00
02_027203_INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_Peraturan Menteri terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	346.750.000	34.751.380	10,02	1	PerMen	-	0,00
			RO_Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	327.450.000	-	0,00	1	PP	-	0,00
			Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD							

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Penguatan Kapasitas PPUPD	395.481.000	117.538.699	29,72	35	Orang	13	37,14
			RO_STANDARISASI HASIL KERJA PPUPD INSPEKTORAT	794.769.000	151.765.268	19,10	350	Orang	91	26,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	752.865.000	186.976.110	24,84	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	162.297.000	35.447.700	21,84	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal (SBKU)	14.929.000	3.922.630	26,28	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	40.219.000	4.762.008	11,84	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	194.200.000	12.860.000	6,62	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	57.329.247.000	31.891.282.956	55,63	2	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	776.250.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	776.250.000	129.944.370	16,74	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	237.363.000	157.485.831	66,35	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_Layanan Data dan Informasi	315.588.000	29.850.000	9,46	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	51.750.000	6.850.000	13,24	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_LAYANAN FASILITASI KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN	186.322.000	97.658.113	52,41	3	Dokumen	2	66,67
			RO_Layanan Manajemen SDM	1.178.606.000	134.898.430	11,45	317	Orang	85	26,81
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	311.139.000	127.970.918	41,13	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus							
			RO_Audit Kinerja Audit Kinerja BPSDM	29.780.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja BNPP	28.050.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja BSKDN	26.779.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina ADWIL	35.027.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina BANGDA	30.599.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina KEUDA	33.248.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina PEMDES	34.889.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina POLPUM	27.163.000	1.380.000	5,08	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen DUKCAPIL	30.354.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen OTDA	27.450.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja DKPP	24.754.000	1.816.000	7,34	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Inspektorat Jenderal	1.017.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja IPDN	827.690.000	1.380.000	0,17	1	Laporan	-	0,00
			RO_Audit Kinerja Sekretariat Jenderal	32.730.000	-	0,00	1	Laporan	-	0,00
			RO_KOORDINASI PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.031.353.000	48.918.581	2,41	38	ah(Prov/Kab	1	2,63
			RO_Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	300.525.000	25.694.083	8,55	1	Laporan	-	0,00
			RO_Pembangunan Integritas Lingkup Kemendagri dan Pemda	337.607.000	34.355.900	10,18	1	Lembaga	-	0,00
			RO_PEMERIKSAAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	1.130.996.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_PENANGANAN PEMERIKSAAN KHUSUS KEMENDAGRI DAN BNPP	177.428.000	44.161.800	24,89	2	Dokumen	-	0,00
			RO_PENGAWASAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	3.055.565.000	496.984.800	16,26	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	859.183.000	389.339.427	45,32	38	ah(Prov/Kab	13	34,21
			RO_PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT JENDERAL	7.352.523.000	1.453.316.364	19,77	38	merintahDae	2	5,26
			RO_PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KHUSUS	1.617.702.000	261.817.349	16,18	8	merintahDae	1	12,50
			RO_Pengelolaan Bersama Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Kemendagri	1.412.078.000	11.560.000	0,82	38	merintahDae	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_PENINGKATAN KAPASITAS INSPEKTORAT DAERAH	744.772.000	2.459.600	0,33	38	Pemda	-	0,00
03_027210_DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Layanan Hukum	1.500.000.000	452.599.815	30,17	1	Layanan	-	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	17.300.000	1.000.000	5,78	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Dokumen RKA Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	51.700.000	17.102.100	33,08	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.500.000.000	571.598.230	38,11	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	34.655.569	14,44	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.541.733.000	698.771.576	27,49	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	50.239.815.000	28.906.579.812	57,54	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.500.000.000	1.090.306.001	72,69	178	Unit	123	69,10
			RO_Layanan Umum	4.150.000.000	1.449.218.310	34,92	3	Layanan	-	0,00
			RO_Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	4.400.000.000	1.386.086.294	31,50	38	ah(Prov/Kab	-	0,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Layanan Data dan Informasi	2.500.000.000	426.731.600	17,07	1	Layanan	-	0,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum								
			RO_Layanan Manajemen SDM	700.000.000	1.155.000	0,17	287	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.200.000.000	257.094.854	21,42	1	Layanan	-	0,00
04_027486_DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah								
			RO_Layanan Hukum	1.965.552.000	261.809.200	13,32	1	Layanan	-	0,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah								

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	17.300.000	16.196.700	93,62	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	51.700.000	42.450.000	82,11	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.800.000.000	1.037.139.568	57,62	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	508.800.000	109.133.436	21,45	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	631.200.000	232.390.100	36,82	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	54.841.224.000	28.604.169.688	52,16	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	2.900.000.000	550.637.700	18,99	72	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	5.158.116.000	2.329.970.806	45,17	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah							
			RO_Layanan Data dan Informasi	1.012.000.000	85.600.000	8,46	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	350.000.000	23.658.800	6,76	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	900.000.000	297.614.061	33,07	275	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.000.000.000	206.816.769	20,68	1	Layanan	-	0,00
05_027753_DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Hukum	1.000.000.000	186.237.300	18,62	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	416.820.000	202.433.000	48,57	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	2.500.000.000	665.751.474	26,63	2	Dokumen	1	50,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.351.093.000	323.016.250	13,74	2	Dokumen	1	50,00
			RO_Layanan Perkantoran	69.913.946.000	35.795.558.853	51,20	2	Layanan	1	50,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	1.004.320.000	-	0,00	5	Unit	2	40,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Protokoler	1.550.000.000	455.687.666	29,40	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.072.789.000	337.539.235	31,46	45	Unit	20	44,44
			RO_Layanan Umum	1.041.887.000	182.495.400	17,52	2	Layanan	1	50,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Data dan Informasi	1.500.000.000	207.439.800	13,83	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	210.000.000	9.344.500	4,45	1	Dokumen	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen SDM	644.922.000	160.266.136	24,85	60	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.200.000.000	117.761.500	9,81	2	Layanan	1	50,00
05_028449_BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	35.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	90.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	11.807.583.000	5.353.519.081	45,34	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	205.000.000	191.650.004	93,49	27	Unit	26	96,30
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	70.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen SDM	100.000.000	-	0,00	98	Orang	-	0,00
05_028830_BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	10.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	110.000.000	268.200	0,24	1	Dokumen	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Perkantoran	10.510.659.000	4.795.242.919	45,62	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	160.000.000	-	0,00	14	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	34.604.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen SDM	200.000.000	85.000	0,04	44	Orang	-	0,00
05_613629_BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	63.256.000	13.774.960	21,78	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	46.744.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	10.573.792.000	5.871.456.625	55,53	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	100.000.000	4.864.000	4,86	21	Unit	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	140.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen SDM	75.000.000	12.307.960	16,41	8	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	75.000.000	10.894.650	14,53	1	Layanan	-	0,00
06_039729_DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH										
			Program Dukungan Manajemen							
			Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2.000.000.000	145.574.280	7,28	38	ah(Prov/Kab)	-	0,00
			RO_Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.000.000.000	-	0,00	38	ah(Prov/Kab)	-	0,00
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan Hukum	1.700.000.000	110.260.000	6,49	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan BMN	139.000.000	45.070.000	32,42	1	Layanan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	2.500.000.000	434.432.482	17,38	7	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	200.000.000	63.710.053	31,86	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah	2.219.511.000	172.582.455	7,78	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	31.000.000	1.200.000	3,87	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	545.856.000	80.346.209	14,72	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	66.707.110.000	35.070.132.579	52,57	2	Layanan	1	50,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	1.500.000.000	1.488.456.350	99,23	1	Unit	1	100,00
			RO_Layanan Protokoler	750.000.000	239.436.357	31,92	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	189.000.000	119.350.000	63,15	14	Unit	7	50,00
			RO_Layanan Umum	2.442.000.000	650.038.101	26,62	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan Data dan Informasi	729.792.000	163.727.910	22,43	1	Layanan	-	0,00
			RO_Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.500.000.000	1.499.999.996	100,00	2	Unit	2	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	156.800.000	10.750.000	6,86	302	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.036.508.000	157.748.825	15,22	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	43.200.000	4.000.000	9,26	1	Dokumen	-	0,00
07_621892_DITJEN OTONOMI DAERAH										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan Hukum	1.180.891.000	277.056.200	23,46	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan BMN	139.000.000	21.354.000	15,36	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Data dan Informasi	503.121.000	230.921.000	45,90	1	Layanan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Koordinasi dan Konsolidasi Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Ditjen Otonomi Daerah	993.350.000	226.658.000	22,82	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	2.450.000.000	671.557.683	27,41	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	17.300.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	447.707.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	60.169.609.000	28.618.678.752	47,56	12	Layanan	6	50,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.032.285.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	2.770.000.000	729.948.900	26,35	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	256.000.000	76.684.300	29,95	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	716.115.000	-	0,00	270	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	823.885.000	82.290.000	9,99	1	Layanan	-	0,00
08_634082_DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			RO_Layanan Hukum	2.500.000.000	235.799.932	9,43	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			RO_Layanan BMN	139.000.000	16.647.160	11,98	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Koordinasi Isu Aktual lingkup Ditjen Dukcapil	9.499.200.000	823.467.375	8,67	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan koordinasi penyelesaian aset dukcapil di daerah	2.974.506.000	347.868.245	11,69	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	3.000.000.000	515.253.550	17,18	3	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	67.800.000	28,25	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	577.770.000	15.980.000	2,77	1	Dokumen	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	17.300.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	552.500.000	53.903.269	9,76	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	53.905.576.000	28.684.465.030	53,21	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	780.000.000	-	0,00	1	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	3.047.500.000	28.029.120	0,92	58	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	6.751.978.000	1.541.604.370	22,83	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pemeliharaan Perangkat KTP-el	2.114.600.000	92.947.200	4,40	1	stemInforma	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			RO_Layanan Data dan Informasi	2.000.000.000	373.864.401	18,69	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Protokoler	347.240.000	46.853.373	13,49	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			RO_Layanan Manajemen SDM	12.620.514.000	3.876.733.980	30,72	500	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.874.650.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Program Tata Kelola Kependudukan							
			Pembinaan Administrasi Kependudukan							
			RO_Akta Kelahiran yang diterbitkan	1.100.000.000	53.891.301	4,90	550.000	Akta	246.614	44,84
			RO_Akta Kematian yang diterbitkan	600.000.000	48.528.961	8,09	400.000	Akta	347.645	86,91
			RO_Akta Perceraian yang diterbitkan	832.000.000	66.917.184	8,04	4.500	Akta	2.213	49,18
			RO_Akta Perkawinan yang diterbitkan	832.000.000	97.154.769	11,68	35.000	Akta	31.555	90,16
			RO_Blangko KTP-el untuk daerah	224.709.850.000	157.202.906.872	69,96	22.000.000	Keping	15.400.000	70,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	1.000.000.000	-	0,00	1	mendasiKeb	-	0,00
			Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Integrasi data kependudukan Daerah	3.650.000.000	415.989.135	11,40	552	ah(Prov/Kab)	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1.500.000.000	364.496.849	24,30	70	ah(Prov/Kab	10	14,29
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.500.000.000	9.147.390	0,37	40	ah(Prov/Kab	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.503.000.000	327.111.332	5,94	552	ah(Prov/Kab	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	923.601.000	95.931.828	10,39	15	ah(Prov/Kab	5	33,33
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.444.473.000	484.423.575	4,23	552	ah(Prov/Kab	-	0,00
			RO_Peraturan Menteri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan							
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Layanan Jaringan Komunikasi Data secara Online	172.978.830.000	19.668.571.783	11,37	552	ah(Prov/Kab	256	46,38
			RO_Fasilitasi Data Balikan Nasional	2.201.612.000	52.955.297	2,41	1.000	Lembaga	20	2,00
			RO_Fasilitasi Data Kependudukan Daerah	650.000.000	108.968.538	16,76	300	Lembaga	33	11,00
			RO_Fasilitasi Data Kependudukan Nasional	2.600.464.000	525.180.608	20,20	1.000	Lembaga	150	15,00
			RO_Fasilitasi Data Balikan Daerah	400.000.000	110.931.278	27,73	300	Lembaga	100	33,33
			RO_Lembaga yang difasilitasi dalam Integrasi data kependudukan Nasional	1.109.815.000	65.735.097	5,92	100	Lembaga	-	0,00
			RO_Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	12.902.167.000	275.549.419	2,14	1.300	Lembaga	300	23,08
			RO_Sarpras SIAK serta DC dan DRC Kependudukan	11.408.706.000	-	0,00	3	Unit	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	190.367.991.000	15.312.533.164	8,04	1	stemInforma	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.000.000	-	0,00	1	stemInforma	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Integrasi Data dan Dokumen Kependudukan Nasional	5.104.094.000	525.138.705	10,29	1	stemInforma	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	250.000.000	-	0,00	1	stemInforma	-	0,00
			Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital							
			RO_Aplikasi ID digital	148.089.851.000	-	0,00	1	stemInforma	-	0,00
			RO_Command center, dan peningkatan keamanan informasi dan siber Dukcapil	30.810.860.000	-	0,00	2	stemInforma	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rekomendasi mekanisme Optimalisasi Sistem Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Secara Inklusif	8.521.650.000	-	0,00	552	ah(Prov/Kab	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pendaftaran Penduduk melalui layanan jemput bola di daerah 12 Provinsi dengan cakupan PRCR yang rendah	27.002.483.000	-	0,00	15	ah(Prov/Kab	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan dan monitoring program jemput bola nasional untuk daerah 3T, daerah dengan cakupan kinerja rendah dan kelompok penduduk rentan	65.460.000.000	-	0,00	546	ah(Prov/Kab	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	482.195.000	171.000.000	35,46	6	ah(Prov/Kab	-	0,00
			RO_Dukungan Manajemen PMU ID Digital	44.417.928.000	311.996.002	0,70	1	ayanan	-	0,00
			RO_Grand Desain Penyelenggaraan Adminduk	1.550.000.000	300.000.000	19,35	1	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Inisiatif Stratejis Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah	2.380.000.000	241.300.000	10,14	2	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Pedoman teknis pemanfaatan data untuk mendukung lembaga pengguna berintegrasi dengan layanan Dukcapil	6.329.025.000	-	0,00	1	NSPK	-	0,00
			RO_Penguatan Infrastruktur TIK Dukcapil	585.484.090.000	-	0,00	159	Unit	-	0,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam penyelenggaraan layanan adminduk	16.462.218.000	600.000	0,00	1.200	Orang	-	0,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil	67.939.381.000	195.336.144	0,29	652	Orang	-	0,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk Sertifikasi dan Pelatihan ISO	5.000.000.000	-	0,00	2.400	Orang	-	0,00
			RO_Perangkat dan Jaringan Layanan Adminduk di daerah perbatasan dan 3T (terluar, terisolasi, tertinggal)	9.230.820.000	-	0,00	43	Unit	-	0,00
			RO_Platform untuk berbagi dan pertukaran data Dukcapil	43.000.000.000	-	0,00	2	stemInforma	-	0,00
			RO_Promosi interoperabilitas dan pengakuan ID digital skala nasional maupun internasional	1.152.000.000	-	0,00	1	Kegiatan	-	0,00
			RO_Rebranding Dukcapil	35.754.000.000	280.800.000	0,79	1	ayanan	-	0,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk	13.198.880.000	-	0,00	4	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Rekomendasi Penegakan Hukum Penyelenggaraan Adminduk	750.000.000	210.000.000	28,00	1	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Rekomendasi Standarisasi peralatan pelayanan adminduk	711.197.000	1.470.000	0,21	1	mendasiKeb	-	0,00
			RO_Roadmap pengadaan infrastruktur TIK dan informasi serta keamanan siber	11.291.460.000	-	0,00	1	NSPK	-	0,00
			RO_Roadmap Pengembangan Aplikasi ID Digital dan e-KYC	9.770.000.000	-	0,00	2	NSPK	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Sarana dan Prasarana Digitalisasi Dokumen Kependudukan	3.850.000.000	-	0,00	40	Unit	-	0,00
			RO_Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk	16.807.158.000	-	0,00	180	Unit	-	0,00
			RO_Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk untuk Daerah	163.718.163.000	-	0,00	552	Unit	-	0,00
			RO_Sistem baru dan implementasi proses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, e-KYC dan ID digital, serta pengelolaan lembaga pengguna	30.359.675.000	86.052.632	0,28	3	stemInforma	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Notifikasi Otomatis antara Layanan Adminduk dan Layanan Eksternal	11.750.000.000	-	0,00	1	stemInforma	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan Daerah	6.000.000.000	-	0,00	1	stemInforma	-	0,00
			RO_Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM)	16.703.550.000	222.150.000	1,33	1	stemInforma	-	0,00
			RO_Standar autentikasi biometrik dan teknologi deduplikasi adminduk	2.929.990.000	-	0,00	1	NSPK	-	0,00
			RO_Tanda tangan elektronik dan standardisasi data alamat	54.800.000.000	-	0,00	2	stemInforma	-	0,00
09_662766_DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH										
	Program Dukungan Manajemen									
	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah									
			RO_Layanan Hukum	750.000.000	206.116.136	27,48	1	Layanan	-	0,00
	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah									
			RO_Layanan BMN	139.000.000	43.851.095	31,55	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	850.000.000	219.903.666	25,87	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	46.524.614	19,39	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	552.500.000	62.768.829	11,36	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	57.166.664.000	30.286.794.421	52,98	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.000.000.000	317.671.500	31,77	70	Unit	13	18,57
			RO_Layanan Umum	2.061.000.000	717.953.226	34,84	1	Layanan	-	0,00
	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah									
			RO_Layanan Data dan Informasi	473.840.000	106.047.669	22,38	1	Layanan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	458.000.000	119.935.049	26,19	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	700.000.000	52.763.367	7,54	300	Orang	5	1,67
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	700.000.000	72.044.828	10,29	1	Layanan	-	0,00
11_403222_BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	175.000.000	47.749.900	27,29	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Dokumen Lakin Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	27.550.000	19.151.514	69,52	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	280.000.000	45.457.400	16,23	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	565.976.000	100.887.919	17,83	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	900.000.000	315.509.020	35,06	2	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	79.732.400	33,22	5	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	82.875.000	22.670.000	27,35	5	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	41.339.437.000	18.378.469.877	44,46	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	450.000.000	-	0,00	16	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	512.500.000	-	0,00	25	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	1.825.000.000	464.551.841	25,45	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Layanan Data dan Informasi	20.000.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Layanan Manajemen SDM	200.000.000	100.588.000	50,29	25	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.050.000.000	139.401.062	13,28	2	Layanan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko BSKDN Kemendagri	100.000.000	7.836.700	7,84	1	Dokumen	-	0,00
12_027114_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA										
	Program Dukungan Manajemen									
	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia									
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	120.000.000	7.001.500	5,83	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	110.000.000	13.795.500	12,54	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	21.063.161.000	10.972.944.350	52,10	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	175.000.000	-	0,00	10	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	150.000.000	105.102.800	70,07	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pengelolaan keuangan	113.750.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia									
			RO_Layanan Manajemen SDM	140.000.000	5.399.400	3,86	98	Orang	1	1,02
12_027177_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR										
	Program Dukungan Manajemen									
	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia									
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	120.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	112.398.000	3.875.680	3,45	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	16.271.303.000	8.259.733.466	50,76	2	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.010.000.000	-	0,00	10	Unit	2	20,00
			RO_Layanan Umum	30.000.000	6.963.568	23,21	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pengelolaan keuangan	81.352.000	8.984.662	11,04	1	Dokumen	-	0,00
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia									
			RO_Layanan Manajemen SDM	220.000.000	81.029.247	36,83	65	Orang	-	0,00
12_403216_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG										
	Program Dukungan Manajemen									
	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia									

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	120.000.000	6.991.100	5,83	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	110.000.000	48.031.888	43,67	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	16.553.645.000	9.067.680.855	54,78	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.010.000.000	-	0,00	5	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	150.000.000	108.504.000	72,34	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pengelolaan keuangan	93.750.000	22.573.950	24,08	1	Dokumen	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	100.000.000	33.000.590	33,00	58	Orang	25	43,10
12_403231_BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Hukum	200.000.000	41.836.000	20,92	1	Layanan	-	0,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	1.084.530.000	282.360.163	26,04	3	kegiatan	-	0,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	520.000.000	96.980.750	18,65	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker 6	99.181.000	38.191.660	38,51	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	200.750.000	43.622.240	21,73	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	67.395.066.000	36.088.631.333	53,55	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	602.085.000	-	0,00	63	Unit	12	19,05
			RO_Layanan Umum	1.301.236.000	365.237.965	28,07	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pengelolaan keuangan	700.000.000	164.513.586	23,50	3	Dokumen	1	33,33
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Data dan Informasi	2.200.000.000	26.842.051	1,22	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Integrasi Sistem Informasi	400.000.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	193.285.000	79.912.300	41,34	206	Orang	-	0,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	250.000.000	82.141.985	32,86	5	Layanan	-	0,00
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi							
			RO_NSPK Standarisasi dan Sertifikasi	223.750.000	-	0,00	6	NSPK	-	0,00
			RO_Sertifikasi Jabatan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (RM)	430.875.000	214.521.500	49,79	450	Orang	95	21,11
			12_506137_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI							
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	75.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	110.000.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	14.603.673.000	5.458.654.340	37,38	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	175.000.000	-	0,00	3	Unit	-	0,00
			RO_Layanan Umum	60.000.000	-	0,00	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pengelolaan keuangan	123.750.000	-	0,00	1	Dokumen	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	255.000.000	11.200.000	4,39	51	Orang	10	19,61
			12_506138_BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	80.000.000	4.125.000	5,16	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	75.000.000	2.120.000	2,83	1	Dokumen	-	0,00
			RO_Layanan Perkantoran	8.730.282.000	4.364.014.109	49,99	1	Layanan	-	0,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.000.000.000	496.200.000	49,62	10	Unit	5	50,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Umum	75.000.000	3.842.000	5,12	1	Layanan	-	0,00
			RO_Pengelolaan keuangan	55.000.000	5.400.000	9,82	1	Dokumen	-	0,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	75.000.000	6.790.500	9,05	31	Orang	7	22,58
<b>TOTAL SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM</b>				<b>3.592.895.915.000</b>	<b>850.128.856.614</b>	<b>23,66</b>	<b>23.016.563</b>		<b>16.032.670</b>	<b>69,66</b>

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_019080_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	376.431.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_020103_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	818.750.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_027486_DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	1.500.000.000	121.430.957	8,10	80	Daerah(Prov/Kab/Kota)	3	3,75
			RO_Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPSTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	1.000.000.000	65.722.742	6,57	50	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	1.200.000.000	110.840.720	9,24	1	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPSTSP	1.000.000.000	-	0,00	76	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	1.000.000.000	44.104.000	4,41	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	7.000.000.000	1.315.441.976	18,79	17	Provinsi	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS	1.600.000.000	132.199.738	8,26	76	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Peraturan Menteri tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			RO_Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			RO_Piloting Penguatan Peran Kecamatan (Frontline Service) dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa	686.500.000	-	0,00	60	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	1.000.000.000	90.432.000	9,04	1	Rekomendasi Kebijakan	-	0,00
		Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
			RO_Bantuan sarpras Tibumtranmas	3.150.000.000	40.954.000	1,30	30	Unit	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	850.000.000	184.676.880	21,73	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	1.000.000.000	117.005.000	11,70	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	1.000.000.000	134.353.000	13,44	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	3.000.000.000	352.736.364	11,76	546	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	3.000.000.000	427.338.385	14,24	546	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	3.000.000.000	669.078.770	22,30	546	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	300.000.000	50.106.000	16,70	38	Provinsi	-	0,00
			RO_Fasilitasi Satpol PP Dalam mendukung Pemerintah Daerah Bidang Trantibumlinmas	1.600.000.000	146.527.080	9,16	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_NSPK Urusan Trantibumlinmas	600.000.000	173.978.080	29,00	2	NSPK	-	0,00
			RO_Peraturan Menteri tentang Pedoman Nomenklatur Satpol PP di Daerah	150.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			RO_Peraturan Menteri tentang Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP	150.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			RO_Permendagri mengenai pakaian dinas lapangan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	-	0,00
			RO_Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia	100.000.000	-	0,00	1	SistemInformasi	-	0,00
04_029134_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.919.869.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_029142_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	369.760.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_030031_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	470.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_039667_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									



## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	379.584.000	194.890.000	51,34	1	Provinsi	-	0,00
04_069084_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.970.899.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_079078_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	2.096.271.000	49.105.000	2,34	1	Provinsi	-	0,00
04_079108_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	750.597.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_089106_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.916.636.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_090058_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	369.384.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_099403_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	317.174.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_099438_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	2.118.909.000	88.318.940	4,17	1	Provinsi	-	0,00
04_100081_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. JAMBI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	689.631.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_109074_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI										

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.832.800.000	78.023.000	4,26	1	Provinsi	1	100,00
04_110018_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	340.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_119082_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.784.910.000	203.450.766	11,40	1	Provinsi	-	0,00
04_119113_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	728.618.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_129074_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.720.675.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_129097_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	369.040.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_129098_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	211.620.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_139078_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.747.589.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_139103_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	350.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_139110_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	362.400.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_149072_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.653.560.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_149099_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	736.356.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_149130_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	162.296.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_159071_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.711.070.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_159182_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	687.141.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_159260_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALIMANTAN SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	350.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_160035_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	699.528.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_169185_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	838.924.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_170041_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SULAWESI UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	400.404.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_179088_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	161.088.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_179223_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	2.035.232.000	53.000.000	2,60	1	Provinsi	-	0,00
04_179317_BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	569.747.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_189087_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.678.479.000	8.777.678	0,52	1	Provinsi	-	0,00
04_199080_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.833.518.000	57.947.500	3,16	1	Provinsi	-	0,00
04_199109_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	772.600.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_200100_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	350.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_209071_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.417.242.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_209093_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	368.190.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_209095_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	176.331.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_219062_SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.694.913.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_219162_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	777.590.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_220015_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	736.503.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_229068_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.670.692.000	33.889.040	2,03	1	Provinsi	-	0,00
04_229082_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	400.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_239108_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	330.600.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_239236_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT										

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.827.734.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_239312_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	690.940.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_240055_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	420.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_249136_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.998.927.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_249138_BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	569.746.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_249141_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	406.803.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_249174_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	267.924.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_250048_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	825.426.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_259084_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	148.193.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_259245_BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROV. PAPUA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	409.999.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_265165_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	330.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_269093_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.804.312.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_289095_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	153.136.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_289174_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.693.555.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_289177_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI MALUKU UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	320.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_290033_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	300.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_290100_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	333.330.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_299348_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.608.468.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_309148_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.651.100.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_309220_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	330.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_310097_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	350.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_319061_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.627.421.000	85.000.000	5,22	1	Provinsi	-	0,00
04_319137_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	360.840.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_320098_BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	400.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_329116_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.637.070.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_330099_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PAPUA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	459.856.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_339161_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	944.550.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_340166_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.634.812.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_340175_BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	350.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_349011_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	146.113.000	21.155.904	14,48	1	Provinsi	-	0,00
04_350062_BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	527.847.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_359002_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	144.629.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_417697_SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	1.601.249.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433316_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	253.000.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433317_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	239.745.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433318_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU										

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	222.487.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433341_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	238.077.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433342_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	254.861.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433343_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	145.584.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433344_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	236.923.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433345_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	150.727.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433347_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	153.083.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433348_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	165.549.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433349_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	147.035.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_433350_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	163.405.000	8.900.000	5,45	1	Provinsi	-	0,00
04_433351_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	191.233.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433352_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	156.799.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_433353_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	159.165.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484101_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	269.330.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484102_BAPPEDA PROVINSI ACEH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	428.387.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484103_INSPEKTORAT PROVINSI ACEH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	289.116.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484105_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	281.331.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484106_BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA)										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	491.278.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484107_INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	304.764.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484109_BAPPEDA PROVINSI RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	433.081.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484110_INSPEKTORAT PROVINSI RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	254.995.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484112_BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	389.252.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484113_INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	127.384.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484115_BAPPEDA PROVINSI JAMBI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	409.877.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484116_INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	141.592.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484118_BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	459.092.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484119_INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	269.926.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484121_BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	434.541.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484122_INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	156.280.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484124_BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	399.613.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484125_INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	148.316.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484127_BAPPEDA PROVINSI BENGKULU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	404.655.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484128_INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	136.955.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484131_BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	357.561.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484132_INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	130.710.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484134_BAPPEDA PROVINSI BANTEN										

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	394.578.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484135_INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	120.959.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484137_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	276.487.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484138_BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	470.727.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484139_INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	198.469.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484145_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	218.617.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484146_BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	452.663.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484147_INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	193.541.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484149_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	143.230.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_484150_BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DIY										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	387.265.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484151_INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	113.687.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484153_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	216.994.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484154_BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	398.520.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484155_INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	135.374.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484157_BAPPEDA PROVINSI BALI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	400.144.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484158_INSPEKTORAT PROVINSI BALI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	126.741.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484160_BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	409.727.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484161_INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									



## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	125.722.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484176_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	235.095.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484177_BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	306.388.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484178_INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	244.180.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484180_BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	395.311.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484181_INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	116.502.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484183_BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	456.173.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484184_INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	180.127.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484187_BAPPEDA PROVINSI GORONTALO										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	391.480.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484188_INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO										

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	119.545.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484190_BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	386.956.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484191_INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	116.669.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484193_BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	426.836.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484194_INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	162.663.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484196_BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	418.456.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484197_INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	117.052.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484199_BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	425.948.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484200_INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah								
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	146.069.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_484202_BAPPEDA PROVINSI MALUKU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	901.382.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484203_INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	132.756.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484205_BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	401.930.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484206_INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	123.322.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484208_BAPPEDA PROVINSI PAPUA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	303.099.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484209_INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	123.645.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484211_DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	208.814.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484212_BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	296.527.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
04_484213_INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	225.498.000	-	0,00	1	Provinsi	-	0,00
05_027753_DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa								
			RO_Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti pelatihan PTPD melalui online dan tatap muka	565.993.000	266.825.000	47,14	100	Orang	15	15,00
			RO_Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa	88.292.000	-	0,00	1	NSPK	-	0,00
		Penataan kelembagaan Desa								
			RO_BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif	150.000.000	2.970.000	1,98	15	Lembaga	-	0,00
			RO_Fasilitasi pembentukan dan penataan Lembaga Linmas	225.000.000	82.500.000	36,67	1	NSPK	1	100,00
			RO_Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa	517.557.000	-	0,00	10	Lembaga	-	0,00
			RO_Lembaga PKK yang tertata	5.000.000.000	579.389.292	11,59	4.500	Lembaga	1.368	30,40
			RO_Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Implementasi 6 SPM	2.500.000.000	151.143.000	6,05	1.500	Lembaga	699	46,60
			RO_LKAD dan MHA yang tertata dan berdaya	225.000.000	40.588.900	18,04	50	Lembaga	26	52,00
		Penataan sistem pelayanan administrasi desa								
			RO_Daerah yang Melaporkan Kerja Sama Desa	150.000.000	32.263.060	21,51	15	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	2	13,33
			RO_Desa dan Kelurahan yang melakukan pemutakhiran data Prodeskel	488.560.000	137.825.000	28,21	10.000	Desa/Kelurahan	5.131	51,31
			RO_Desa dengan status kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang"	1.357.155.000	880.571.943	64,88	10.000	Desa	6.000	60,00
			RO_Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	850.000.000	149.812.000	17,62	90	Desa	8	8,89
			RO_Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	850.000.000	301.028.745	35,42	50	Desa	8	16,00
			RO_Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	1.000.000.000	100.136.500	10,01	100	Desa	5	5,00
			RO_Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan yang diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	500.000.000	148.691.090	29,74	40	Desa	5	12,50
			RO_Desa yang menerapkan pelayanan administrasi pemerintahan desa dan Standar pelayanan Minimal Desa	477.328.000	141.681.027	29,68	40	Desa	10	25,00
			RO_Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	850.000.000	107.934.474	12,70	100	Desa	8	8,00
			RO_Desa yang telah diasistensi usulan penataan desanya	145.115.000	14.580.400	10,05	45	Desa	10	22,22
			RO_Desa yang Telah Difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa	260.000.000	83.399.000	32,08	35	Desa	10	28,57
			RO_Desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi nama dan kode desanya	80.000.000	33.078.000	41,35	15	Desa	5	33,33
			RO_Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	300.000.000	137.893.300	45,96	30	Desa	5	16,67
			RO_Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	15.309.345.000	-	0,00	457	Desa	-	0,00
			RO_Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	1.000.000.000	145.598.050	14,56	125	Desa	35	28,00
			RO_Dukungan Delegasi RI pada Sidang Internasional	400.000.000	-	0,00	1	Kegiatan	-	0,00
			RO_Penguatan Teknis Pemerintahan Desa	100.000.000	-	0,00	10	Desa	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasi dengan SIPD	700.000.000	-	0,00	1	SistemInformasi	-	0,00
			Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa							
			RO_Dukungan Manajemen P3PD	7.449.581.000	-	0,00	11	layanan	-	0,00
05_028449_BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	5.500.000.000	-	0,00	1.440	Orang	-	0,00
05_028830_BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	4.000.000.000	6.097.500	0,15	720	Orang	-	0,00
05_613629_BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	4.000.000.000	-	0,00	900	Orang	-	0,00
06_039729_DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah							
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penyelarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	150.000.000	17.480.000	11,65	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	24.000.000.000	1.280.979.420	5,34	1	SistemInformasi	-	0,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	200.000.000	42.335.000	21,17	1	PerMen	-	0,00
			Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah							
			RO_Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	1.000.000.000	32.878.407	3,29	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	2	5,26
			RO_Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	1.000.000.000	180.542.749	18,05	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	13,16
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial	200.000.000	17.851.998	8,93	24	Daerah(Prov/Kab/Kota)	3	12,50
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	600.000.000	27.542.948	4,59	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Ketenagakerjaan	650.000.000	2.061.143	0,32	20	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah	200.000.000	-	0,00	15	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi	200.000.000	-	0,00	4	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	1.000.000.000	62.298.166	6,23	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	2	5,26
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	2.500.000.000	194.901.811	7,80	546	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	489	89,56
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	2.500.000.000	232.477.707	9,30	546	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	397	72,71
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	2.500.000.000	191.845.957	7,67	546	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	438	80,22
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	2.500.000.000	427.072.805	17,08	546	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	386	70,70
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	2.500.000.000	114.403.745	4,58	546	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	456	83,52
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	2.500.000.000	142.230.932	5,69	546	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	456	83,52
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Pengembangan Potensi dan Kerjasama di Bidang Kelautan dan Perikanan	200.000.000	23.600.000	11,80	2	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	1	50,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	500.000.000	40.035.500	8,01	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	19	50,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	2.000.000.000	153.601.161	7,68	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	800.000.000	48.805.000	6,10	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	719.922.000	59.702.113	8,29	514	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	257	50,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	200.000.000	1.845.000	0,92	15	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	1.000.000.000	117.397.218	11,74	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	3	7,89
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam rangka Penurunan AKI di Daerah	175.000.000	-	0,00	10	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Daerah yang melaksanakan pengembangan UMKM, Seni dan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)	580.078.000	-	0,00	15	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	2.000.000.000	226.577.247	11,33	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang melaksanakan program kelapa sawit berkelanjutan	500.000.000	1.870.000	0,37	26	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	1.000.000.000	75.069.471	7,51	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	21	55,26
			RO_Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	1.500.000.000	155.810.553	10,39	546	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	1.000.000.000	-	0,00	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	1.250.000.000	-	0,00	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)	650.000.000	52.057.500	8,01	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	1.000.000.000	35.498.996	3,55	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	1.000.000.000	126.614.567	12,66	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	11	28,95
			RO_Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	1.000.000.000	22.013.409	2,20	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	1.000.000.000	22.052.000	2,21	11	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.000.000.000	151.953.873	15,20	10	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	2	20,00
			RO_Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	30.473.276.000	379.510.940	1,25	15	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	3	20,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	1.500.000.000	153.820.368	10,25	33	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFR&P)	7.615.305.000	125.570.578	1,65	6	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	1	16,67
			RO_Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Risiko Bencana di Kawasan Pertanian	13.555.466.000	1.006.968.850	7,43	16	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	700.000.000	52.952.500	7,56	2	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	5.600.000.000	351.029.880	6,27	8	Rekomendasi Kebijakan	1	12,50
			RO_Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	8.000.000.000	516.584.379	6,46	18	Rekomendasi Kebijakan	3	16,67
			RO_Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6.000.000.000	276.044.127	4,60	6	Rekomendasi Kebijakan	-	0,00
			RO_Rekomendasi untuk penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah	175.000.000	-	0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	-	0,00
11_403222_BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan inovasi daerah								
			RO_Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	1.500.000.000	15.217.200	1,01	2	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	1.690.000.000	71.031.000	4,20	546	Daerah(Prov/Kab/Kota)	135	24,73
			RO_Optimalisasi Difusi Inovasi Dalam Pengendalian Inflasi pada Pemerintah Daerah	500.000.000	-	0,00	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
		Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah								
			RO_Fasilitasi dan Pembinaan Strategi Kebijakan di daerah	1.200.000.000	-	0,00	25	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
		Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Forum Diskusi Aktual/ Diskusi Publik	1.050.000.000	60.018.000	5,72	7	Rekomendasi Kebijakan	1	14,29
			RO_Pengembangan/Pembangunan Layanan Digital IPKD	100.000.000	-	0,00	1	Sistem Informasi	-	0,00
			RO_Penguatan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah	1.160.000.000	278.090.858	23,97	12	Rekomendasi Kebijakan	2	16,67
			RO_Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah	500.000.000	17.632.800	3,53	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			RO_Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah	500.000.000	35.227.945	7,05	546	Daerah(Prov/Kab/Kota)	2	0,37
			RO_Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah	540.000.000	-	0,00	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah"	150.000.000	35.304.000	23,54	1	PerMen	-	0,00
			RO_Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik .	450.000.000	46.143.600	10,25	3	Rekomendasi Kebijakan	1	33,33
			RO_Rekomendasi Strategi Kebijakan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Desa.	300.000.000	46.885.424	15,63	2	Rekomendasi Kebijakan	-	0,00
			RO_Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri	150.000.000	24.416.628	16,28	1	Rekomendasi Kebijakan	-	0,00
			RO_Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri.	750.000.000	126.229.300	16,83	5	Rekomendasi Kebijakan	1	20,00
			RO_Revisi Permendagri 17 Tahun 2016 "Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah"	150.000.000	91.400.699	60,93	1	PerMen	-	0,00
			RO_Revisi Permendagri 19 Tahun 2020 "Tentang Pedoman IPKD"	150.000.000	28.441.800	18,96	1	PerMen	-	0,00
12_027114_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	86.768.000	77.379.500	89,18	60	Orang	60	100,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	4.284.334.000	116.418.771	2,72	1.145	Orang	90	7,86
12_027177_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	86.768.000	-	0,00	60	Orang	-	0,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	3.787.045.000	17.150.000	0,45	588	Orang	80	13,61
12_403216_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	86.768.000	33.392.600	38,48	60	Orang	60	100,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	7.286.863.000	752.761.987	10,33	1.039	Orang	794	76,42
12_403231_BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	173.536.000	147.137.750	84,79	120	Orang	120	100,00
			RO_Aparatur Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	5.353.879.000	357.526.125	6,68	1.741	Orang	99	5,69
			RO_Aparatur mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	6.489.829.000	279.234.500	4,30	2.790	Orang	-	0,00

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	290.630.000	204.097.000	70,23	60	Orang	60	100,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Manajemen Kepemimpinan	153.840.000	24.000.000	15,60	60	Orang	-	0,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	153.840.000	4.290.000	2,79	60	Orang	-	0,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	153.840.000	109.226.400	71,00	60	Orang	60	100,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	4.225.000	3.100.000	73,37	30	Orang	30	100,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan	18.648.773.000	5.126.932.280	27,49	2.669	Orang	292	10,94
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	172.000.000	149.870.000	87,13	120	Orang	100	83,33
			RO_Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	43.900.000	40.454.000	92,15	150	Orang	30	20,00
			RO_KDH dan WKDH yang mengikuti Orientasi	10.350.000.000	11.009.514.020	106,37	1.092	Orang	1.035	94,78
			RO_Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	143.070.000	99.329.700	69,43	360	Orang	60	16,67
			RO_Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	652.020.000	5.000.000	0,77	240	Orang	-	0,00
<b>12_506137_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	86.768.000	78.281.000	90,22	60	Orang	60	100,00
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	1.881.621.000	-	0,00	370	Orang	200	54,05
<b>12_506138_BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri								
			RO_Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	1.282.760.000	333.154.300	25,97	120	Orang	120	100,00
<b>TOTAL SUB FUNGSI: PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>404.412.550.000</b>	<b>35.725.010.747</b>	<b>8,83</b>	<b>52.382</b>		<b>19.841</b>	<b>37,88</b>

## LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Pelayanan Umum lainnya

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_027486_DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi										
			RO_Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	1.000.000.000	248.291.640	24,83	10	RekomendasiKebijakan	0	0,00
			RO_Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	1.500.000.000	60.291.160	4,02	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	1.000.000.000	77.030.000	7,70	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	1.000.000.000	130.921.209	13,09	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi Daerah Mitra Dengan Otorita IKN	700.000.000	3.240.000	0,46	4	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	2.400.000.000	196.240.774	8,18	12	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Kelembagaan Sekeriat Pengelolaan Forum Pelaksana Kerjasama/ Perundingan Bilateral Wilayah Perbatasan Negara	500.000.000	44.104.000	8,82	5	Lembaga	0	0,00
			RO_NSPK di Bidang Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi	400.000.000	36.119.000	9,03	2	NSPK	0	0,00
			RO_Penanganan Konflik Pertanahan	1.500.000.000	84.696.009	5,65	25	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan kawasan khusus di daerah	1.136.287.000	199.849.120	17,59	8	Provinsi	0	0,00
			RO_Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	2.000.000.000	296.348.050	14,82	3	Kesepakatan	1	33,33
			RO_Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara	1.500.000.000	191.534.524	12,77	2	Kesepakatan	0	0,00
			RO_Peraturan Menteri Bidang Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas	200.000.000	32.351.000	16,18	1	PerMen	0	0,00
			RO_Peraturan Menteri Bidang Perkotaan	200.000.000	50.259.000	25,13	1	PerMen	0	0,00
			RO_Peraturan Pemerintah Bidang Kawasan Khusus	260.000.000	-	-	1	PP	0	0,00
			RO_Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia	740.000.000	35.254.640	4,76	2	SistemInformasi	0	0,00
<b>TOTAL SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM LAINNYA</b>				<b>16.036.287.000</b>	<b>1.686.530.126</b>	<b>10,52</b>	<b>106</b>		<b>1</b>	<b>0,94</b>
<b>TOTAL FUNGSI: PELAYANAN UMUM</b>				<b>4.792.328.518.000</b>	<b>1.244.275.008.712</b>	<b>25,96</b>	<b>23.083.203</b>		<b>16.054.920</b>	<b>69,55</b>

624.947.667.000 164.836.102.008



## LAMPIRAN V

**RINCIAN PAGU ANGGARAN,  
REALISASI ANGGARAN,  
KEGIATAN, PROGRAM, OUTPUT  
DAN TARGET DARI MASING-  
MASING YANG MENJADI  
PRIORITAS NASIONAL**

## Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I

## Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	Kementerian Dalam Negeri	01	03	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	CR	1233	QDC	001	Fasilitasi penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	500.000.000	143.044.683	28,61	500	1	0,20
2	010	Kementerian Dalam Negeri	01	03	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	CR	6145	QDC	002	Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	Orang	2.000.000.000	231.431.476	11,57	2.000	100	5,00
3	010	Kementerian Dalam Negeri	01	03	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	CR	1233	UAC	001	Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	Orang	900.000.000	211.000.940	23,44	180	1	0,56
4	010	Kementerian Dalam Negeri	01	03	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	CR	6145	UBA	001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	500.000.000	121.794.950	24,36	19	5	26,32
5	010	Kementerian Dalam Negeri	01	03	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	CR	6145	UBA	002	Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	650.000.000	61.790.000	9,51	19	5	26,32
6	010	Kementerian Dalam Negeri	01	03	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	CR	1233	UBA	003	Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	600.000.000	98.400.500	16,40	38	3	7,89
7	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	CM	1241	PEC	001	Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	Kesepakatan	2.000.000.000	296.348.050	14,82	3	1	33,33
8	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	CM	1241	PEC	002	Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara	Kesepakatan	1.500.000.000	191.534.524	12,77	2	0	0,00
9	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	CM	6139	UBA	003	Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	126.614.567	12,66	38	11	28,95
10	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	CM	6139	UBA	200	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.500.000.000	232.477.707	9,30	546	397	72,71
11	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	CM	6139	UBA	202	Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	151.953.873	15,20	10	2	20,00
12	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	CM	6139	UBA	303	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	700.000.000	52.952.500	7,56	2	0	0,00
13	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	300	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.500.000.000	194.901.811	7,80	546	489	89,56
14	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	305	Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.500.000.000	155.810.553	10,39	546	0	0,00
15	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	400	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.500.000.000	191.845.957	7,67	546	438	80,22
16	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	401	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	22.052.000	2,21	11	0	0,00

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	403	Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	32.878.407	3,29	38	2	5,26
18	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	404	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	35.498.996	3,55	38	0	0,00
19	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	405	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	-	0,00	38	0	0,00
20	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	406	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	62.298.166	6,23	38	2	5,26
21	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	407	Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	22.013.409	2,20	38	0	0,00
22	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	CM	6139	UBA	408	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	800.000.000	48.805.000	6,10	38	0	0,00
23	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	CM	6139	UBA	203	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.500.000.000	153.820.368	10,25	33	0	0,00
24	010	Kementerian Dalam Negeri	06	04	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1241	UBA	001	Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	130.921.209	13,09	10	0	0,00
25	010	Kementerian Dalam Negeri	06	04	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1241	UBA	002	Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.500.000.000	60.291.160	4,02	10	0	0,00
26	010	Kementerian Dalam Negeri	06	04	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1241	UBA	003	Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	77.030.000	7,70	10	0	0,00
27	010	Kementerian Dalam Negeri	06	04	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1237	UBA	004	Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.200.000.000	110.840.720	9,24	1	0	0,00
28	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	6138	QDB	001	Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Implementasi 6 SPM	Lembaga	2.500.000.000	151.143.000	6,05	1.500	699	46,60
29	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1244	UAB	001	Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdskel yang Terintegrasi dengan SIPD	SistemInformasi	700.000.000	-	0,00	1	0	0,00
30	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1244	UBB	001	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa	1.000.000.000	145.598.050	14,56	125	35	28,00
31	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1244	UBB	002	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	Desa	850.000.000	149.812.000	17,62	90	8	8,89
32	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1244	UBB	003	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	850.000.000	301.028.745	35,42	50	8	16,00
33	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1244	UBB	004	Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	Desa	1.000.000.000	100.136.500	10,01	100	5	5,00
34	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1244	UBB	005	Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	850.000.000	107.934.474	12,70	100	8	8,00
35	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1244	UBB	007	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	Desa	15.309.345.000	-	0,00	457	0	0,00

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	010	Kementerian Dalam Negeri	06	05	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	13.500.000.000	6.097.500	0,05	3.060	0	0,00
37	010	Kementerian Dalam Negeri	06	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	6139	UBA	201	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.500.000.000	427.072.805	17,08	546	386	70,70
38	010	Kementerian Dalam Negeri	06	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	6139	UBA	204	Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	75.069.471	7,51	38	21	55,26
39	010	Kementerian Dalam Negeri	06	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	6139	UBA	301	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.500.000.000	114.403.745	4,58	546	456	83,52
40	010	Kementerian Dalam Negeri	06	08	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CP	1269	QAA	002	Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta	832.000.000	97.154.769	11,68	35.000	31.555	90,16
41	010	Kementerian Dalam Negeri	06	08	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CP	1269	QAA	003	Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta	832.000.000	66.917.184	8,04	4.500	2.213	49,18
42	010	Kementerian Dalam Negeri	06	08	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CP	1269	QAA	004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta	1.100.000.000	53.891.301	4,90	550.000	246.614	44,84
43	010	Kementerian Dalam Negeri	06	08	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CP	1271	UBA	001	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	923.601.000	95.931.828	10,39	15	5	33,33
44	010	Kementerian Dalam Negeri	06	08	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CP	1271	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.500.000.000	9.147.390	0,37	40	0	0,00
45	010	Kementerian Dalam Negeri	06	11	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	CM	1283	UBA	001	Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.500.000.000	15.217.200	1,01	2	0	0,00
46	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CR	6145	PBC	001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	RekomendasiKe bijakan	800.000.000	215.987.941	27,00	2	1	50,00
47	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CR	6145	PEB	001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	forum	900.000.000	145.760.655	16,20	6	2	33,33
48	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CR	6145	QDB	001	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	Lembaga	400.000.000	-	0,00	8	0	0,00
49	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CR	6145	QDC	001	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang	600.000.000	35.693.000	5,95	400	0	0,00
50	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CR	6145	QEI	001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga	134.489.125.000	134.489.125.000	100,00	8	8	100,00
51	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CR	1234	UAC	001	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	Orang	2.000.000.000	861.582.700	43,08	200	100	50,00
52	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CR	1233	UBA	001	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	110.473.787	11,05	38	10	26,32
53	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	112.500.000.000	2.331.343.545	2,07	17	1	5,88
54	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1241	PBL	001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	RekomendasiKe bijakan	1.000.000.000	248.291.640	24,83	10	0	0,00
55	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1237	PBL	001	Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	RekomendasiKe bijakan	1.000.000.000	90.432.000	9,04	1	0	0,00

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1237	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.500.000.000	121.430.957	8,10	80	3	3,75
57	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1237	UBA	003	Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	44.104.000	4,41	10	0	0,00
58	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6136	UBA	003	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	3.000.000.000	669.078.770	22,30	546	0	0,00
59	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1237	UBA	005	Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.600.000.000	132.199.738	8,26	76	0	0,00
60	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1237	UBA	006	Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPSTP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	65.722.742	6,57	50	0	0,00
61	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1237	UBA	007	Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPSTP	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	-	0,00	76	0	0,00
62	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6139	PBL	001	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	RekomendasiKe bijakan	6.000.000.000	276.044.127	4,60	6	0	0,00
63	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6139	PBL	002	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	RekomendasiKe bijakan	8.000.000.000	516.584.379	6,46	18	3	16,67
64	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6139	PBL	003	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	RekomendasiKe bijakan	5.600.000.000	351.029.880	6,27	8	1	12,50
65	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1254	UAB	001	Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	SistemInformasi	24.000.000.000	1.280.979.420	5,34	1	0	0,00
66	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6139	UBA	001	Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.000.000.000	226.577.247	11,33	38	0	0,00
67	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6139	UBA	002	Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.250.000.000	-	0,00	38	0	0,00
68	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6139	UBA	100	Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	180.542.749	18,05	38	5	13,16
69	010	Kementerian Dalam Negeri	07	06	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6139	UBA	304	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.000.000.000	153.601.161	7,68	38	0	0,00
70	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	3991	PBL	001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	RekomendasiKe bijakan	1.000.000.000	113.920.902	11,39	2	0	0,00
71	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6140	PBL	001	Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	RekomendasiKe bijakan	800.000.000	54.892.934	6,86	1	0	0,00
72	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1259	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian sengketa di DOB	RekomendasiKe bijakan	3.000.000.000	521.846.724	17,39	4	0	0,00
73	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6140	PBL	002	Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	RekomendasiKe bijakan	2.000.000.000	-	0,00	1	0	0,00

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	3991	QMA	001	Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	Data	1.000.000.000	215.345.151	21,53	1	0	0,00
75	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	3991	UBA	001	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.000.000.000	213.264.515	10,66	38	0	0,00
76	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6140	UBA	001	Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.200.000.000	124.586.565	10,38	38	0	0,00
77	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1259	UBA	001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	6.000.000.000	1.016.850.784	16,95	10	0	0,00
78	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	3991	UBA	002	Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	64.950.437	6,50	15	0	0,00
79	010	Kementerian Dalam Negeri	07	08	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CP	1269	PBM	001	Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	RekomendasiKe bijakan	1.000.000.000	-	0,00	1	0	0,00
80	010	Kementerian Dalam Negeri	07	08	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CP	1269	QAA	001	Akta Kematian yang diterbitkan	Akta	600.000.000	48.528.961	8,09	400.000	347.645	86,91
81	010	Kementerian Dalam Negeri	07	08	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CP	1268	QAB	001	Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	Lembaga	12.902.167.000	275.549.419	2,14	1.300	300	23,08
82	010	Kementerian Dalam Negeri	07	08	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CP	6997	UAB	001	Aplikasi ID digital	SistemInformasi	148.089.851.000	-	0,00	1	0	0,00
83	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	QMA	001	Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	Data	1.000.000.000	16.996.327	1,70	1	0	0,00
84	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	QMA	002	Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Data	2.000.000.000	129.470.519	6,47	1	0	0,00
85	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1276	UBA	001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	4.855.675	0,49	110	5	4,55
86	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1276	UBA	002	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.000.000.000	66.072.910	3,30	110	0	0,00
87	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	UBA	011	Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Provinsi	1.000.000.000	25.070.912	2,51	19	2	10,53
88	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	UBA	012	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	5.000.000.000	477.658.470	9,55	300	0	0,00
89	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	UBA	013	Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.500.000.000	22.298.150	1,49	2	0	0,00
90	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	UBA	014	Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	3.400.000.000	149.152.724	4,39	300	5	1,67
91	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	UBA	015	Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	3.300.000.000	335.086.038	10,15	500	251	50,20

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92	010	Kementerian Dalam Negeri	07	09	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6141	UBA	016	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.500.000.000	70.542.140	4,70	110	0	0,00
93	010	Kementerian Dalam Negeri	07	11	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	1283	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.690.000.000	71.031.000	4,20	546	135	24,73
94	010	Kementerian Dalam Negeri	07	12	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	520.608.000	336.190.850	64,58	360	300	83,33
95	010	Kementerian Dalam Negeri	07	12	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6144	UAC	001	KDH dan WKDH yang mengikuti Orientasi	Orang	10.350.000.000	11.009.514.020	106,37	1.092	1.035	94,78
96	010	Kementerian Dalam Negeri	07	12	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6144	UAC	004	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	Orang	172.000.000	149.870.000	87,13	120	100	83,33
97	010	Kementerian Dalam Negeri	07	12	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6144	UAC	005	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	Orang	43.900.000	40.454.000	92,15	150	30	20,00
98	010	Kementerian Dalam Negeri	07	12	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	CM	6144	UAC	007	Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	143.070.000	99.329.700	69,43	360	60	16,67
99	010	Kementerian Dalam Negeri	08	03	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	CR	1233	UBA	002	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	210.218.356	21,02	5	2	40,00
100	010	Kementerian Dalam Negeri	08	04	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	CM	6136	UBA	001	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	3.000.000.000	352.736.364	11,76	546	0	0,00
101	010	Kementerian Dalam Negeri	08	04	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	CM	6136	UBA	002	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	3.000.000.000	427.338.385	14,24	546	0	0,00
102	010	Kementerian Dalam Negeri	08	04	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	CM	6136	UBA	004	Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	134.353.000	13,44	38	0	0,00
103	010	Kementerian Dalam Negeri	08	04	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	CM	6136	UBA	005	Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	117.005.000	11,70	38	0	0,00
104	010	Kementerian Dalam Negeri	08	06	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	CM	6139	UBA	004	Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	1.000.000.000	117.397.218	11,74	38	3	7,89
105	010	Kementerian Dalam Negeri	08	06	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	CM	6139	UBA	302	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibulinmas berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah(Prov/Ka b/Kota)	2.500.000.000	142.230.932	5,69	546	456	83,52
												<b>624.947.667.000</b>	<b>164.836.102.008</b>	<b>26,38</b>	<b>1.010.431</b>	<b>633.933</b>	<b>62,74</b>



## LAMPIRAN VI

**RINCIAN KAS DI BENDAHARA  
PENGELUARAN, KAS DI  
BENDAHARA PENERIMAAN,  
SERTA KAS LAINNYA DAN  
SETARA KAS PER SATKER PER  
30 JUNI 2025**

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER  
PER 30 JUNI 2024

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2025	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 30 JUNI 2025	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 30 JUNI 2025	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 30 JUNI 2024	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 30 JUNI 2024	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	2.100.000.000	-	2.100.000.000	-	109.599.303	(109.599.303)	-	-	-	231.257.225	75.767.076	155.490.149	-	-	-
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	700.000.000	-	700.000.000	2.130.851.747	-	2.130.851.747	-	-	-	48.290.149	19.421.573	28.868.576	-	-	-
4	01	483005	KD	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	954.093.849	-	954.093.849	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	11.640.151	-	11.640.151	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51.097.959	-	51.097.959	-	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	297.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.501.240	(37.501.240)	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	600.000.000	-	-	2.012.012.952	-	2.012.012.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.080.000.000	-	1.080.000.000	-	-	-	-	-	-	200.959.690	2.341.253.194	(2.140.293.504)	-	-	-
14	04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.213.384	(8.213.384)	-	-	-
19	04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000	(170.000)	-	-	-
21	04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.984	(25.984)	-	-	-
22	04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.909	(836.909)	-	-	-
23	04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.700	32.700	-	-	-	-
26	04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-
27	04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
28	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	11.628.000	7.192.991	4.435.009	-	-	-
29	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	19.500.000	-	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	750.000.000	-	750.000.000	-	-	-	-	-	-	24.893.675	-	24.893.675	-	-	-
33	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	420.000.000	-	420.000.000	-	-	-	-	-	-	592.757.200	213.747.401	379.009.799	62.230.201.976	62.230.201.976	-
34	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	95.406.540	19.478.954	75.927.586	-	-	-
35	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	71.393.000	-	71.393.000	-	-	-
36	11	403222	BD	BADAN STRATEGI KEBUJUKAN DALAM NEGERI	210.000.000	-	210.000.000	-	-	-	-	-	-	106.695.553	2.260.705	104.434.848	-	-	-
37	12	027114	PUSAT	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	140.000.000	-	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	12	027177	PUSAT	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	48.000.000	-	48.000.000	-	-	-	5.260.000	-	5.260.000	-	-	-	-	-	-
39	12	403216	PUSAT	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	440.000.000	-	440.000.000	-	-	-	14.375.000	-	14.375.000	35.150.000	524.688	34.625.312	-	-	-
41	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	175.000.000	-	175.000.000	-	-	-	-	-	-	1.505.474	-	1.505.474	-	-	-
42	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	74.758.785	-	74.758.785	-	-	-	-	-	-	7.631.625	-	7.631.625	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>9.449.258.785</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.344.258.785</b>	<b>4.142.864.699</b>	<b>109.599.303</b>	<b>4.033.265.396</b>	<b>19.635.000</b>	<b>-</b>	<b>19.635.000</b>	<b>2.444.442.850</b>	<b>2.726.436.859</b>	<b>(281.994.009)</b>	<b>62.230.201.976</b>	<b>62.230.201.976</b>	<b>-</b>



## LAMPIRAN VII

# NERACA REKAP PERSEDIAAN

**REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN  
PER 30 JUNI 2024**

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	AKUN PERSEDIAAN										SALDO PERSEDIAAN PER 30 JUNI 2025		
					0	117113	117114	117122	117124	117125	117126	117127	117128	117129		117199	
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	523.281.257	207.032.588	167.751.860	-	-	-	-	-	636.480.000	-	-	683.664.975	2.218.210.680
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	782.562.831	295.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.368.180	1.248.650.511
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA	245.074.366	4.465.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.539.906
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	36.989.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.599.500	95.588.734
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	26.497.646	426.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.837.977	65.761.623
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	193.894.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.568.644	282.462.766
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	30.124.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.178.524	64.303.187
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NIJSA TENGGARA BARAT	7.732.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.644.894	41.377.682
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	87.162.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.031.240	101.193.295
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	74.939.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.939.290
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN	4.159.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.159.170
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI	24.060.915	-	-	15.374.241.313	572.923.224	3.177.105.294	-	-	-	-	-	-	19.148.330.746
14	04	240270	DK	BADAN PENGELOAL PERBATASAN DAERAH KAB	-	-	-	865.762.700	-	-	-	-	-	-	-	-	865.762.700
15	04	356000	DK	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	-	-	-	1.570.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570.910.000
16	04	417936	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	-	-	-	1.879.281.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.879.281.000
17	04	433344	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	04	690639	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANIMBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.981.630	-	-	857.981.630
19	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN	84.630.052	-	-	-	-	-	-	14.060.914.995	-	-	-	4.052.388	14.149.597.435
20	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	15.618.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.865	15.732.607
21	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	17.148.585	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.448.585
22	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	1.000.680	151.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.151.930
23	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	300.478.340	26.495.350	6.846.000	1.700.989.900	31.406.432.384	25.408.511.400	71.066.062.000	113.192.760.072	-	35.393.595.470	60.279.175	278.562.450.091	
24	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	418.553.421	9.530.233	-	-	5.502.668	274.817.795	-	1.088.228.700	-	-	-	-	1.796.632.817
25	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	611.266.492	35.403.300	-	-	-	-	-	5.796.669.000	112.060.648.320	-	-	-	118.503.987.112
26	09	662766	KP	DITJEN KEUANGAN DAERAH	39.757.150	4.524.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.281.665
27	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.915.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.611.461	112.526.883
28	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	7.914.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.914.090
29	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	17.056.316	1.518.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.574.816
30	12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	1.333.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923.760	2.257.460
31	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	155.422.946	3.931.560	1.509.767	-	-	-	-	-	-	-	-	39.219.210	200.083.483
32	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	23.586.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.586.575
33	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	64.705.329	84.588.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.400	150.604.389
<b>TOTAL</b>					<b>3.802.866.177</b>	<b>675.086.996</b>	<b>176.107.627</b>	<b>21.391.184.913</b>	<b>31.984.858.276</b>	<b>28.860.434.489</b>	<b>71.066.062.000</b>	<b>134.138.572.767</b>	<b>112.697.128.320</b>	<b>36.251.577.100</b>	<b>1.332.404.193</b>	<b>442.376.282.858</b>	



## LAMPIRAN VIII

# NERACA RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

## RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Setjen	Itjen	Ditjen Polpum	Ditjen BAK	Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Bangda	Ditjen Otda	Ditjen Dukcapil	Ditjen Bina Keuda	BSKDN	BPSDM	TOTAL
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>		<b>4.003.439.661</b>	<b>249.276.380</b>	<b>-</b>	<b>25.671.175.183</b>	<b>14.230.579.154</b>	<b>278.372.114.776</b>	<b>1.678.218.300</b>	<b>14.228.224.513</b>	<b>35.357.450</b>	<b>124.821.163</b>	<b>277.050.396</b>	<b>338.870.256.976</b>
Koreksi Saldo Awal	M01	2.968.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.968.660
Pembelian	M02	4.789.707.968	9.435.000	581.316.700	445.963.590	191.879.742	670.258.999	802.295.355	217.463.789.492	205.585.165	69.297.500	807.835.917	226.037.365.428
Reklasifikasi Masuk	M10	25.385.996	-	-	-	188.000	512.000	-	-	-	150.000	33.399.900	59.635.896
Reklasifikasi dari Aset	M11	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	45.000.000
Hasil Opname Fisik Kurang	P01	8.179.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.179.181
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>4.826.241.805</b>	<b>9.435.000</b>	<b>581.316.700</b>	<b>445.963.590</b>	<b>237.067.742</b>	<b>670.770.999</b>	<b>802.295.355</b>	<b>217.463.789.492</b>	<b>205.585.165</b>	<b>69.447.500</b>	<b>841.235.817</b>	<b>226.153.149.165</b>
Habis Pakai	K01	(2.884.782.328)	(183.772.090)	(577.157.530)	(1.794.872.697)	(282.528.339)	(479.409.704)	(683.880.838)	(113.188.026.893)	(196.660.950)	(81.591.780)	(681.865.500)	(121.034.548.649)
Barang Usang	K04	(4.418.749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.418.749)
Keluar Lainnya	K06	(2.968.660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.968.660)
Reklasifikasi Keluar	K10	(25.385.996)	-	-	-	(188.000)	(512.000)	-	-	-	(150.000)	(33.399.900)	(59.635.896)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(1.545.037.349)	-	-	-	-	(513.980)	-	-	-	-	-	(1.545.551.329)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(4.462.593.082)</b>	<b>(183.772.090)</b>	<b>(577.157.530)</b>	<b>(1.794.872.697)</b>	<b>(282.716.339)</b>	<b>(480.435.684)</b>	<b>(683.880.838)</b>	<b>(113.188.026.893)</b>	<b>(196.660.950)</b>	<b>(81.741.780)</b>	<b>(715.265.400)</b>	<b>(122.647.123.283)</b>
<b>Saldo 30 Juni 2025</b>		<b>4.367.088.384</b>	<b>74.939.290</b>	<b>4.159.170</b>	<b>24.322.266.076</b>	<b>14.184.930.557</b>	<b>278.562.450.091</b>	<b>1.796.632.817</b>	<b>118.503.987.112</b>	<b>44.281.665</b>	<b>112.526.883</b>	<b>403.020.813</b>	<b>442.376.282.858</b>



## LAMPIRAN IX

# RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

## RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Barang Konsumsi (117111)	Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	Suku Cadang (117114)	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (117126)	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (117128)	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)	Bahan Baku (117131)	Persediaan Lainnya (117199)	TOTAL
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>		<b>3.616.888.027</b>	<b>625.989.968</b>	<b>83.808.068</b>	<b>21.391.184.913</b>	<b>33.349.858.276</b>	<b>28.860.434.489</b>	<b>71.066.062.000</b>	<b>139.951.231.767</b>	<b>2.521.084.896</b>	<b>36.251.577.100</b>	-	<b>1.152.137.472</b>	<b>338.870.256.976</b>
Koreksi Saldo Awal	M01	2.968.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.968.660
Pembelian	M02	6.241.543.665	1.290.632.926	235.882.549	-	-	-	-	-	216.978.420.000	-	66.961.700	1.223.924.588	226.037.365.428
Reklasifikasi Masuk	M10	24.780.000	33.587.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.267.996	59.635.896
Reklasifikasi dari Aset	M11	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000
Hasil Opname Fisik Kurang	P01	7.534.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.201	8.179.181
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>6.276.827.305</b>	<b>1.324.220.826</b>	<b>235.882.549</b>	-	<b>45.000.000</b>	-	-	-	<b>216.978.420.000</b>	-	<b>66.961.700</b>	<b>1.225.836.785</b>	<b>226.153.149.165</b>
Habis Pakai	K01	(4.960.984.323)	(1.002.014.098)	(143.432.990)	-	(1.410.000.000)	-	-	(5.812.659.000)	(106.802.376.576)	-	(7.706.800)	(895.374.862)	(121.034.548.649)
Barang Usang	K04	(1.593.134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.825.615)	(4.418.749)
Keluar Lainnya	K06	(2.968.660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.968.660)
Reklasifikasi Keluar	K10	(192.846)	-	(150.000)	-	-	-	-	-	-	-	(58.579.900)	(713.150)	(59.635.896)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(1.125.110.192)	(273.109.700)	-	-	-	-	-	-	-	-	(675.000)	(146.656.437)	(1.545.551.329)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(6.090.849.155)</b>	<b>(1.275.123.798)</b>	<b>(143.582.990)</b>	-	<b>(1.410.000.000)</b>	-	-	<b>(5.812.659.000)</b>	<b>(106.802.376.576)</b>	-	<b>(66.961.700)</b>	<b>(1.045.570.064)</b>	<b>(122.647.123.283)</b>
<b>Saldo 30 Juni 2025</b>		<b>3.802.866.177</b>	<b>675.086.996</b>	<b>176.107.627</b>	<b>21.391.184.913</b>	<b>31.984.858.276</b>	<b>28.860.434.489</b>	<b>71.066.062.000</b>	<b>134.138.572.767</b>	<b>112.697.128.320</b>	<b>36.251.577.100</b>	-	<b>1.332.404.193</b>	<b>442.376.282.858</b>



## LAMPIRAN X

# DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI

## DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI PER 30 JUNI 2025

NO	KODE	URAIAN ESELON I	KODE	URAIAN SATKER EKS-TP	KODE	URAIAN AKUN	URAIAN BARANG	NILAI
1	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN 179317	1.132.438.140
			251525	KANTOR PERBATASAN DAN KERJASAMA DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	MESS WISMA BUNGALOW TEMPAT PERISTIRAHATAN SEMI PERMANEN BARAK PEGAWAI DISTRIK TP 2012 251525	1.551.519.000
			170010	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (TP)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	RUMAH DINAS CAMAT MIANGAS	702.568.212
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	KANTOR CAMAT PERBATASAN	692.439.632
			250300	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA	345.658.565
			259396	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG MENARA PENUNJAU PERMANEN	463.816.260
			<b><i>SUBTOTAL</i></b>					
2	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	119281	BPMD KAB. BANYUASIN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	83.000.000
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	174.258.500
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	162.000.000
			<b><i>SUBTOTAL</i></b>					
3	07	DITJEN OTDA	120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS)	7.728.000
								<b><i>SUBTOTAL</i></b>
<b>TOTAL PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI</b>								<b>5.315.426.309</b>



## LAMPIRAN XI

# REKAPITULASI ASET TETAP PER SATKER PER 31 JUNI 2025

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2024

NO	KODE EST	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI	JARINGAN	ASET TETAP RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	AKUMULASI PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
<b>ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL</b>																			
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	2.443.605.071.000	582.701.614.848	552.970.960.837	1.487.045.700	-	26.763.748.222	857.387.694	994.524.140	-	(440.112.645.126)	(102.785.913.506)	(1.187.004.620)	-	(14.111.644.556)	(206.406.424)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	7.311.653.653.121	155.105.564.862	592.980.152.507	13.033.392.800	6.123.611.040	9.857.862.736	-	11.278.041.796	-	(133.886.482.822)	(152.143.613.867)	(9.510.937.048)	(3.352.340.075)	(7.940.740.879)	(1.291.167.642)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELANGGARA PEMILU	-	25.888.679.249	-	-	-	-	5.597.607.638	-	-	(15.522.844.317)	-	-	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29.609.419.000	17.377.825.283	100.675.887.944	4.792.195.000	202.033.000	15.439.902.461	-	2.314.510.500	-	(16.542.227.400)	(17.669.585.249)	(4.259.728.889)	(44.896.224)	(6.044.038.740)	(1.385.202.000)
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	11.736.360.000	31.776.904.545	184.489.012.496	3.691.287.000	201.896.000	14.647.395.453	-	2.230.891.200	-	(31.345.161.988)	(2.953.039.600)	(47.504.944)	(6.193.980.742)	(6.193.980.742)	(1.072.079.750)
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	67.384.464.000	30.628.905.979	136.524.156.355	7.971.784.000	388.102.000	14.895.342.304	-	2.517.594.110	-	(30.298.022.086)	(24.025.674.820)	(7.971.764.000)	(199.712.102)	(6.654.522.156)	(1.186.642.240)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	120.548.358.000	15.520.514.653	194.099.781.564	19.588.249.120	3.984.743.385	8.266.001.130	-	2.139.039.090	24.948.370.899	(14.120.363.463)	(23.272.625.219)	(9.511.389.973)	(1.341.375.710)	(1.568.584.251)	(1.025.898.500)
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	231.199.726.000	36.079.680.039	134.922.899.320	8.086.188.000	29.786.903.000	28.159.224.989	-	2.226.788.565	-	(35.941.109.003)	(22.663.491.610)	(6.379.152.125)	(24.586.004.845)	(12.595.513.825)	(1.088.932.146)
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	84.455.622.000	49.868.855.559	197.508.321.388	4.101.699.325	49.942.712	25.705.464.617	-	1.161.876.215	-	(49.795.674.037)	(31.515.657.185)	(3.134.373.355)	(6.991.978)	(7.724.663.027)	(377.293.000)
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					<b>10.300.192.673.121</b>	<b>944.948.545.017</b>	<b>2.084.171.172.411</b>	<b>62.751.820.945</b>	<b>40.737.231.137</b>	<b>143.734.941.912</b>	<b>6.454.995.332</b>	<b>24.863.265.616</b>	<b>24.948.370.899</b>	<b>(767.564.530.242)</b>	<b>(407.045.422.288)</b>	<b>(44.907.379.610)</b>	<b>(29.578.825.878)</b>	<b>(62.833.688.176)</b>	<b>(7.633.621.702)</b>
<b>ESELON I INSPEKTORAT JENDERAL</b>																			
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	142.267.725.000	26.972.071.344	45.925.502.780	-	-	-	-	-	-	(18.390.789.282)	(8.600.497.510)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					<b>142.267.725.000</b>	<b>26.972.071.344</b>	<b>45.925.502.780</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(18.390.789.282)</b>	<b>(8.600.497.510)</b>	-	-	-	-
<b>ESELON I DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																			
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	-	18.685.318.478	-	-	-	-	642.024.528	-	-	(15.352.110.388)	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					-	<b>18.685.318.478</b>	-	-	-	-	<b>642.024.528</b>	-	-	<b>(15.352.110.388)</b>	-	-	-	-	-
<b>ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b>																			
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	134.767.781.173	1.576.390.000	-	-	11.245.442.670	-	17.686.224.808	-	(128.214.259.582)	(287.197.436)	-	-	(4.217.036.922)	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					-	<b>134.767.781.173</b>	<b>1.576.390.000</b>	-	-	<b>11.245.442.670</b>	-	<b>17.686.224.808</b>	-	<b>(128.214.259.582)</b>	<b>(287.197.436)</b>	-	-	<b>(4.217.036.922)</b>	-
<b>ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA</b>																			
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	483.090.835.000	83.904.082.496	116.786.690.252	637.667.000	17.967.000	1.369.558.074	-	13.439.617.108	24.997.200	(80.582.130.170)	(36.040.357.252)	(637.667.000)	(5.528.304)	(879.400.280)	(273.461.320)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	34.042.849.000	10.566.591.130	39.822.425.497	-	-	526.026.800	-	13.230.000	-	(9.796.958.081)	(7.334.339.987)	-	-	(275.324.790)	(7.375.000)
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	62.457.627.000	5.839.029.411	23.039.415.000	-	-	-	-	54.108.000	-	(5.494.989.735)	(6.172.253.315)	-	-	-	-
17	05	613629	KP	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	33.642.823.493	3.238.881.630	1.970.797.000	308.907.000	-	198.734.000	-	73.365.000	-	(3.120.194.354)	(1.784.966.745)	(308.907.000)	-	(77.009.425)	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					<b>613.234.134.493</b>	<b>103.548.584.667</b>	<b>188.819.327.749</b>	<b>946.574.000</b>	<b>17.967.000</b>	<b>2.094.318.874</b>	-	<b>13.580.320.108</b>	<b>24.997.200</b>	<b>(98.994.272.340)</b>	<b>(151.331.917.299)</b>	<b>(946.574.000)</b>	<b>(5.528.304)</b>	<b>(1.231.734.495)</b>	<b>(280.836.320)</b>
<b>ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>																			
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	479.054.657.019	67.424.783.914	105.369.424.652	2.057.890.800	1.572.044.000	807.674.890	-	4.951.568.889	-	(65.556.386.175)	(21.040.741.912)	(2.057.890.800)	(330.956.630)	(512.503.698)	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					<b>479.054.657.019</b>	<b>67.424.783.914</b>	<b>105.369.424.652</b>	<b>2.057.890.800</b>	<b>1.572.044.000</b>	<b>807.674.890</b>	-	<b>4.951.568.889</b>	-	<b>(65.556.386.175)</b>	<b>(21.040.741.912)</b>	<b>(2.057.890.800)</b>	<b>(330.956.630)</b>	<b>(512.503.698)</b>	-
<b>ESELON I DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH</b>																			
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	23.278.106.047	-	-	-	-	14.521.363.182	-	-	(21.905.079.702)	-	-	-	-	(14.521.363.182)
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					-	<b>23.278.106.047</b>	-	-	-	-	<b>14.521.363.182</b>	-	-	<b>(21.905.079.702)</b>	-	-	-	-	<b>(14.521.363.182)</b>
<b>ESELON I DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																			
20	08	643082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35.098.225.956	2.643.491.330.396	36.482.740.783	-	2.084.000	2.861.849.000	7.150.493.861	46.194.500	-	(2.293.838.497.537)	(6.286.582.519)	-	(1.111.463)	(735.204.450)	(419.899.750)
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					<b>35.098.225.956</b>	<b>2.643.491.330.396</b>	<b>36.482.740.783</b>	-	<b>2.084.000</b>	<b>2.861.849.000</b>	<b>7.150.493.861</b>	<b>46.194.500</b>	-	<b>(2.293.838.497.537)</b>	<b>(6.286.582.519)</b>	-	<b>(1.111.463)</b>	<b>(735.204.450)</b>	<b>(419.899.750)</b>
<b>ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH</b>																			
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	20.762.917.557	-	-	-	-	1.693.832.075	219.886.683	-	(18.405.172.721)	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					-	<b>20.762.917.557</b>	-	-	-	-	<b>1.693.832.075</b>	<b>219.886.683</b>	-	<b>(18.405.172.721)</b>	-	-	-	-	-
<b>ESELON I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																			
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	224.894.826.500	25.825.828.789	32.772.037.871	121.615.000	336.689.400	47.428.700	-	519.862.436	-	(23.742.780.583)	(10.144.482.841)	(97.292.000)	(67.337.880)	(19.564.338)	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					<b>224.894.826.500</b>	<b>25.825.828.789</b>	<b>32.772.037.871</b>	<b>121.615.000</b>	<b>336.689.400</b>	<b>47.428.700</b>	-	<b>519.862.436</b>	-	<b>(23.742.780.583)</b>	<b>(10.144.482.841)</b>	<b>(97.292.000)</b>	<b>(67.337.880)</b>	<b>(19.564.338)</b>	-
<b>ESELON I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																			
23	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	347.284.531.000	16.214.877.512	28.832.018.000	981.978.400	123.391.000	623.374.000	-	206.819.000	-	(15.203.052.524)	(11.958.026.055)	(981.978.400)	(32.073.136)	(209.191.892)	-
24	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	40.926.454.000	9.458.313.968	34.616.293.260	2.653.448.000	573.132.000	862.362.170	-	348.650.229	-	(8.064.267.114)	(6.697.553.658)	(2.268.686.100)	(447.192.491)	(268.998.929)	-
25	12	352588	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	-	6.129.686.896	98.366.965.000	3.053.191.000	2.714.597.000	1.811.782.159	-	-	-	(6.050.900.496)	(17.091.738.746)	(3.053.191.000)	(448.912.485)	(656.528.847)	-
26	12	403216	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BANDUNG	119.023.192.923	17.206.154.540	43.200.297.186	2.661.751.000	193.060.000	1.657.662.471	-	587.930.500	74.514.000	(16.175.527.357)	(9.586.056.591)	(2.525.441.223)	(58.913.550)	(715.573.108)	-
27	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	706.789.350.510	65.467.254.330	146.274.011.694	-	33.753.000	4.085.237.140	-	1.385.222.775	318.987.650	(63.435.946.260)	(37.421.877.203)	-	(12.457.424)	(2.160.688.412)	(7.150.000)
28	12	506137	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BUKIT TINGGI	44.475.536.000	14.364.227.773	47.086.325.000	2.219.407.537	587.061.000	1.921.508.468	-	289.207.750	-	(12.114.675.224)	(9.317.661.025)	(2.219.407.537)	(587.061.000)	(593.328.962)	(15.400.000)
29	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	198.386.414.000	19.802.100.505	30.748.487.497	1.910.925.134	1.231.749.000	546.531.335	-	148.395.500	-	(17.201.043.133)	(8.733.517.450)	(1.825.213.987)	(547.444.000)	(161.290.482)	-
<b>SUBTOTAL PER ESELON I</b>					<b>1.456.885.478.433</b>	<b>148.642.615.524</b>	<b>429.124.408.044</b>	<b>13.480.701.071</b>	<b>5.456.743.000</b>	<b>11.508.457.743</b>	-	<b>2.966.225.754</b>	<b>393.501.650</b>	<b>(138.245.412.108)</b>	<b>(100.806.430.728)</b>	<b>(12.873.918.247)</b>	<b>(2.134.054.086)</b>	<b>(4.765.600.632)</b>	<b>(22.550.000)</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>13.251.627.720.522</b>	<b>4.158.347.882.906</b>	<b>2.924.241.004.290</b>	<b>79.358.601.816</b>	<b>48.122.758.537</b>	<b>172.300.113.789</b>	<b>30.462.708.978</b>	<b>64.833.548.794</b>	<b>25.366.869.749</b>	<b>(3.590.209.290.660)</b>	<b>(605.543.272.533)</b>	<b>(60.883.054.657)</b>	<b>(32.117.814.241)</b>	<b>(74.315.332.711)</b>	<b>(22.878.270.954)</b>



## LAMPIRAN XII

# RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	PEMDES	BANGDA	DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>10.335.290.899.077</b>	<b>142.267.725.000</b>	<b>613.234.134.493</b>	<b>479.054.657.019</b>	-	<b>224.894.826.500</b>	<b>1.456.885.478.433</b>	<b>13.251.627.720.522</b>
Saldo Awal	100	35.098.225.956						-	<b>35.098.225.956</b>
Transfer Masuk	102	84.455.622.000				35.098.225.956		-	<b>119.553.847.956</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>119.553.847.956</b>	-	-	-		-	-	<b>154.652.073.912</b>
Koreksi Susulan	214	(35.098.225.956)						-	<b>(35.098.225.956)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(119.553.847.956)						-	<b>(119.553.847.956)</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(154.652.073.912)</b>	-	-	-		-	-	<b>(154.652.073.912)</b>
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>		<b>10.300.192.673.121</b>	<b>142.267.725.000</b>	<b>613.234.134.493</b>	<b>479.054.657.019</b>	-	<b>224.894.826.500</b>	<b>1.456.885.478.433</b>	<b>13.251.627.720.522</b>



## LAMPIRAN XIII

# RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN POLPUM	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>945.568.072.283</b>	<b>27.007.975.396</b>	<b>17.595.012.477</b>	<b>134.217.143.473</b>	<b>103.099.088.506</b>	<b>67.403.183.914</b>	<b>23.268.106.047</b>	<b>2.643.463.301.276</b>	<b>20.384.999.557</b>	<b>25.825.828.789</b>	<b>148.927.484.054</b>	<b>4.156.760.195.772</b>
Saldo Awal	100	110.724.000											110.724.000
Pembelian	101	7.363.470.150	129.944.370	1.090.306.001	550.637.700	534.053.239	21.600.000	-	28.029.120	377.918.000	-	496.200.000	10.592.158.580
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	143.475.259											143.475.259
Transfer Masuk	102	-	-					10.000.000	-			-	10.000.000
Hibah Masuk	103	22.644.000							-				22.644.000
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>7.640.313.409</b>	<b>129.944.370</b>	<b>1.090.306.001</b>	<b>550.637.700</b>	<b>534.053.239</b>	<b>21.600.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>28.029.120</b>	<b>377.918.000</b>	<b>-</b>	<b>496.200.000</b>	<b>10.879.001.839</b>
Koreksi Susulan	214	(539.429.370)											(539.429.370)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(7.700.000)		-	-	(2.612.578)			-			-	(10.312.578)
Transfer Keluar	302	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.000.000)
Hibah Keluar	303	-	-	-	-	(70.067.500)	-	-	-	-	-	-	(70.067.500)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	369	-	-	-	-	(11.877.000)	-	-	-	-	-	-	(11.877.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	401	(7.702.711.305)	(165.848.422)									(781.068.530)	(8.649.628.257)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(8.259.840.675)</b>	<b>(165.848.422)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(84.557.078)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(781.068.530)</b>	<b>(9.291.314.705)</b>
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>		<b>944.948.545.017</b>	<b>26.972.071.344</b>	<b>18.685.318.478</b>	<b>134.767.781.173</b>	<b>103.548.584.667</b>	<b>67.424.783.914</b>	<b>23.278.106.047</b>	<b>2.643.491.330.396</b>	<b>20.762.917.557</b>	<b>25.825.828.789</b>	<b>148.642.615.524</b>	<b>4.158.347.882.906</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025</b>		<b>(767.564.530.242)</b>	<b>(18.390.789.282)</b>	<b>(15.352.110.388)</b>	<b>(128.214.259.582)</b>	<b>(98.994.272.340)</b>	<b>(65.556.386.175)</b>	<b>(21.905.079.702)</b>	<b>(2.293.838.497.537)</b>	<b>(18.405.172.721)</b>	<b>(23.742.780.583)</b>	<b>(138.245.412.108)</b>	<b>(3.590.209.290.660)</b>
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>		<b>177.384.014.775</b>	<b>8.581.282.062</b>	<b>3.333.208.090</b>	<b>6.553.521.591</b>	<b>4.554.312.327</b>	<b>1.868.397.739</b>	<b>1.373.026.345</b>	<b>349.652.832.859</b>	<b>2.357.744.836</b>	<b>2.083.048.206</b>	<b>10.397.203.416</b>	<b>568.138.592.246</b>



## LAMPIRAN XIV

# RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

## RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

Es I	Kode	Nama Satker	Nilai
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	914.473.160
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	5.321.390.800
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	229.754.000
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	38.905.500
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	200.000.000
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	658.946.690
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	129.944.370
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.090.306.001
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	550.637.700
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	4.864.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	337.539.235
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	191.650.004
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	21.600.000
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28.029.120
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	377.918.000
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	496.200.000
<b>TOTAL</b>			<b>10.592.158.580</b>



## LAMPIRAN XV

# RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>2.084.074.148.806</b>	<b>45.925.502.780</b>	<b>1.576.390.000</b>	<b>188.820.033.099</b>	<b>103.940.869.452</b>	<b>36.357.571.783</b>	<b>32.772.037.871</b>	<b>429.126.364.858</b>	<b>2.922.592.918.649</b>
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	182.961.300				1.428.555.200				1.611.516.500
Transfer Masuk	102	-					125.169.000			125.169.000
Hibah Masuk	103	127.356.000								127.356.000
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>310.317.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.428.555.200</b>	<b>125.169.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.864.041.500</b>
Koreksi Susulan	214	(5.968.088)	-	-					-	(5.968.088)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(82.156.607)	-	-	(705.350)	-		-	(1.956.814)	(84.818.771)
Transfer Keluar	302	(125.169.000)	-	-					-	(125.169.000)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(213.293.695)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(705.350)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.956.814)</b>	<b>(215.955.859)</b>
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>		<b>2.084.171.172.411</b>	<b>45.925.502.780</b>	<b>1.576.390.000</b>	<b>188.819.327.749</b>	<b>105.369.424.652</b>	<b>36.482.740.783</b>	<b>32.772.037.871</b>	<b>429.124.408.044</b>	<b>2.924.241.004.290</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025</b>		<b>(407.045.422.288)</b>	<b>(8.600.497.510)</b>	<b>(287.197.436)</b>	<b>(51.331.917.299)</b>	<b>(21.040.741.912)</b>	<b>(6.286.582.519)</b>	<b>(10.144.482.841)</b>	<b>(100.806.430.728)</b>	<b>(605.543.272.533)</b>
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>		<b>1.677.125.750.123</b>	<b>37.325.005.270</b>	<b>1.289.192.564</b>	<b>137.487.410.450</b>	<b>84.328.682.740</b>	<b>30.196.158.264</b>	<b>22.627.555.030</b>	<b>328.317.977.316</b>	<b>2.318.697.731.757</b>



## LAMPIRAN XVI

# RINCIAN MUTASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI JALAN IRRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo per 31 Desember 2024		247.236.106.832	11.245.442.670	3.058.859.874	4.437.609.690	2.863.933.000	505.733.100	30.445.901.814	299.793.586.980
Transfer Masuk	102	-	-	-	-	-	-	546.531.335	546.531.335
Mutasi Tambah		-	-	-	-	-	-	546.531.335	546.531.335
Koreksi Susulan	214	(12.112.838)	-	-	-	-	-	-	(12.112.838)
Transfer Keluar	302	-	-	-	-	-	-	(546.531.335)	(546.531.335)
Mutasi Kurang		(12.112.838)	-	-	-	-	-	(546.531.335)	(558.644.173)
Saldo per 30 Juni 2025		247.223.993.994	11.245.442.670	3.058.859.874	4.437.609.690	2.863.933.000	505.733.100	30.445.901.814	299.781.474.142
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025		(137.319.893.664)	(4.217.036.922)	(2.183.836.799)	(2.901.351.128)	(736.315.913)	(184.194.218)	(19.773.572.965)	(167.316.201.609)
Nilai Buku per 30 Juni 2025		109.904.100.330	7.028.405.748	875.023.075	1.536.258.562	2.127.617.087	321.538.882	10.672.328.849	132.465.272.533



## LAMPIRAN XVII

# RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2024	31.037.584.948	642.024.528	17.686.224.808	13.580.320.108	4.951.568.889	14.521.363.182	7.196.688.361	1.913.718.758	519.862.436	2.966.225.754	95.015.581.772
Pembelian	101	283.012.000										283.012.000
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>283.012.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>283.012.000</b>
Penghentian Aset Dari Penggunaan	401	(2.336.000)										(2.336.000)
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(2.336.000)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(2.336.000)</b>
Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 30 Juni 2025	31.318.260.948	642.024.528	17.686.224.808	13.580.320.108	4.951.568.889	14.521.363.182	7.196.688.361	1.913.718.758	519.862.436	2.966.225.754	95.296.257.772
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(7.633.621.702)	-	-	(280.836.320)	-	(14.521.363.182)	(419.899.750)	-	-	(22.550.000)	(22.878.270.954)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Nilai Buku per 30 Juni 2025	23.684.639.246	-	17.686.224.808	13.299.483.788	4.951.568.889	-	6.776.788.611	1.913.718.758	519.862.436	2.943.675.754	72.417.986.818



## LAMPIRAN XVIII

# RINCIAN MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER SATKER

## RINCIAN KDP PER SATKER

No	Kode ES.I	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP posisi 31 Desember 2024	Keterangan	Penjelasan Belum Selesai	Apakah akan dilanjutkan atau tidak?
2	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/020/SPK.MK/IPDN.28.2	10 Maret sd 3 April 2020	195.450.000	100%	195.450.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
3	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/023/SPK.KP/IPDN.28.2	10 Maret sd 30 April 2020	231.200.000	100%	231.200.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
4	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR				100%	202.098.311	Honor Pengelola Kegiatan TA 2020 untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
5	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	011/2711/PAKPA Tanggal 9 September			20%	5.429.180.237	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
6	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.488.726.913	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
7	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.400.755.659	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
8	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	5.600.040.676	Gedung Pos Jaga Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
9	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR		1 Januari s/d 31 Desember 2022			400.919.103	Lanjutan Pembangunan Gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat TA 2022 (Biaya Pengelola Kegiatan Gedung Perpustakaan dan Gedung Pos Jaga Permanen)	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
<b>JUMLAH SETJEN</b>						<b>426.650.000</b>		<b>24.948.370.899</b>			
1	05	027753	DITJEN BINA PEMDES	6973/SPK/BPD/X/2023	1 TAHUN	24.997.200	100%	24.997.200	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor dan Selasar Gedung Ditjen Bina Pemdes	Tidak mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Tidak Dilanjutkan
<b>JUMLAH DITJEN BINA PEMDES</b>						<b>24.997.200</b>		<b>24.997.200</b>			
1	12	403231	BPSDM	027/1273/KONT/IX/2015 dan 027/577/KONT/III/2017	6 Bulan	318.987.650	100%	318.987.650	KDP berupa Realisasi konsultan perencana Pembangunan Gedung Alat Bantu Damkar pada Satker Balai Pol PP dan Damkar Rokan Hilir tidak direklas ke Aset Tetap Definitif	Telah terbit persetujuan penghapusan BMN Nomor S-123/MK/KNL.0704/2025 oleh KPKNL per 20 Juni 2025. Akan dilakukan penghapusan KDP pada periode selanjutnya setelah terbit SK Penghapusan.	Tidak Dilanjutkan
2	12	403216	PPSDM REGIONAL BANDUNG	SPK 000.4.2/1502/SPK/PL.03/PPSDM		74.514.000		74.514.000	Jasa Konsultan atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana yang akan digunakan untuk Pekerjaan Fisik Renovasi Sarana Penunjang Pelatihan PPSDM	Pekerjaan masih berupa rancangan sehingga belum memenuhi kriteria untuk diakui sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan	Dilanjutkan
<b>JUMLAH BPSDM</b>						<b>393.501.650</b>		<b>393.501.650</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>501.164.000</b>		<b>25.366.869.749</b>			



## LAMPIRAN XIX

# REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2025

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2024

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	SOFTWARE	LISENSI	HASIL KAJIAN/ PENELITIAN	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	AKUMULASI AMORTISASI LISENSI	AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	38.711.018.520	26.570.727.448	1.676.759.600	53.300.000	3.490.500.335	447.523.125	(1.189.767.543)	(31.923.446.244)	(5.387.564.656)	(447.523.125)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	3.102.687.500	-	197.795.000	1.590.421.750	11.328.731.873	18.898.000	(11.041.214.103)	(2.360.906.250)	-	(18.898.000)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	2.877.912.555	-	-	-	234.819.113	-	(234.819.113)	(2.377.912.555)	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	1.135.019.343	-	(1.135.019.343)	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	24.717.000	-	-	-	-	-	-	(21.627.375)	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	70.120.000	-	-	-	2.559.667.160	23.000.000	(2.559.667.160)	(70.120.000)	-	(23.000.000)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19.472.000	-	-	-	644.146.669	-	(631.117.321)	(19.472.000)	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	939.806.871	-	(939.806.871)	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	367.096.000	349.100.000	(367.096.000)	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.145.474.320	-	-	-	165.848.422	143.915.000	(165.848.422)	(770.643.070)	-	(143.915.000)
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	8.313.499.230	-	-	-	-	-	-	(8.313.499.230)	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.560.846.610	198.090.600	-	-	2.832.484.380	-	(2.832.484.380)	(3.428.908.310)	(59.427.180)	-
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	16.862.160.880	-	397.210.000	299.605.000	255.073.247	200.343.000	(252.964.668)	(9.981.392.606)	-	(200.343.000)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	25.000.000	-	-	-	-	-	-	(25.000.000)	-	-
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	-	-	-	-	84.724.500	-	(78.542.587)	-	-	-
17	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-	-	-	-	210.270.000	-	(210.187.334)	-	-	-
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	708.280.140	-	-	-	28.828.730.789	19.957.152.092	(28.212.038.652)	(708.280.140)	-	(19.957.152.092)
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	2.487.407.950	-	-	-	53.187.732.159	30.417.098.931	(53.079.386.999)	(2.063.938.550)	-	(30.417.098.931)
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	642.041.175.764	42.571.041.782	-	219.764.000	120.195.909	1.897.622.000	(120.195.909)	(611.785.049.244)	(6.113.097.827)	(1.897.622.000)
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.353.050.103	-	-	-	5.764.113.530	34.279.060.332	(5.519.127.817)	(1.353.050.103)	-	(34.279.060.332)
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	3.647.508.931	2.255.000	-	-	9.377.500	3.129.285.850	(9.377.500)	(3.495.897.056)	(2.255.000)	(4.620.000)
23	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	2.698.000	-	(2.148.000)	-	-	-
24	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	54.500.000	-	-	20.750.000	1.484.057.110	-	(1.438.493.368)	(54.500.000)	-	-
25	12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	-	-	-	-	43.350.000	49.885.000	(43.350.000)	-	-	-
26	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.516.059.443	-	-	99.678.000	6.664.760.539	-	(6.547.284.429)	(428.559.443)	-	-
27	12	506138	KD	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	-	-	-	-	218.948.400	-	(218.948.400)	-	-	-
28	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	-	-	-	-	1.782.000	-	(1.782.000)	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>726.520.890.946</b>	<b>69.342.114.830</b>	<b>2.271.764.600</b>	<b>2.283.518.750</b>	<b>120.573.933.849</b>	<b>90.912.883.330</b>	<b>(116.830.667.919)</b>	<b>(679.182.202.176)</b>	<b>(11.562.344.663)</b>	<b>(87.389.232.480)</b>



## LAMPIRAN XX

# RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023	73.437.842.168	1.289.389.320	8.313.499.230	1.034.120.800	17.583.975.880	708.280.140	2.487.407.950	684.831.981.546	35.482.587.935	3.600.424.431	1.740.872.443	830.510.381.843
Transfer Masuk	102	1.877.912.555			2.724.816.410								4.602.728.965
Pengembangan Nilai Aset	202	225.659.650			-						49.339.500		274.999.150
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>2.103.572.205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.724.816.410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.339.500</b>	<b>-</b>	<b>4.877.728.115</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(395.633.000)											(395.633.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	401	(250.850.000)	(143.915.000)	-						(34.129.537.832)	-	(49.885.000)	(34.574.187.832)
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(646.483.000)</b>	<b>(143.915.000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(34.129.537.832)</b>	<b>-</b>	<b>(49.885.000)</b>	<b>(34.969.820.832)</b>
Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Desember 2024	74.894.931.373	1.145.474.320	8.313.499.230	3.758.937.210	17.583.975.880	708.280.140	2.487.407.950	684.831.981.546	1.353.050.103	3.649.763.931	1.690.987.443	800.418.289.126
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2025	Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2024	(42.161.049.080)	(770.643.070)	(8.313.499.230)	(3.488.335.490)	(10.006.392.606)	(708.280.140)	(2.063.938.550)	(617.898.147.071)	(1.353.050.103)	(3.498.152.056)	(483.059.443)	(690.744.546.839)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2024	32.733.882.293	374.831.250	-	270.601.720	7.577.583.274	-	423.469.400	66.933.834.475	-	151.611.875	1.207.928.000	109.673.742.287



## LAMPIRAN XXI

# RINCIAN MUTASI ASET LAIN- LAIN PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXI

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2024	23.278.604.600	-	-	2.832.484.380	750.410.747	48.785.882.881	87.992.566.356	2.017.817.909	5.913.636.030	3.138.663.350	8.153.998.247	182.864.064.500
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	401	7.955.897.305	309.763.422							34.129.537.832	-	830.953.530	43.226.152.089
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>7.955.897.305</b>	<b>309.763.422</b>	-	-	-	-	-	-	<b>34.129.537.832</b>	-	<b>830.953.530</b>	<b>43.226.152.089</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	911	(9.696.193.416)						(4.387.735.266)				(519.470.728)	(14.603.399.410)
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(9.696.193.416)</b>	-	-	-	-	-	<b>(4.387.735.266)</b>	-	-	-	<b>(519.470.728)</b>	<b>(14.603.399.410)</b>
Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 30 Juni 2025	21.538.308.489	309.763.422	-	2.832.484.380	750.410.747	48.785.882.881	83.604.831.090	2.017.817.909	40.043.173.862	3.138.663.350	8.465.481.049	211.486.817.179
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(18.587.928.579)	(309.763.422)	-	(2.832.484.380)	(742.037.589)	(48.169.190.744)	(83.496.485.930)	(2.017.817.909)	(39.798.188.149)	(13.997.500)	(8.252.006.197)	(204.219.900.399)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Nilai Buku per 30 Juni 2025	2.950.379.910	-	-	-	8.373.158	616.692.137	108.345.160	-	244.985.713	3.124.665.850	213.474.852	7.266.916.780



## LAMPIRAN XXII

# REKAPITULASI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

## Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	30 Juni 2025					31 Desember 2024			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	BELANJA MODAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212113)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	3.510.873.405	7.987.489.129	193.128.000	231.167.000	11.922.657.534	5.042.551.780	-	98.020.945.752	103.063.497.532
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	5.758.605.055	2.898.298.630	350.149.500	47.075.002	9.054.128.187	3.092.871.018	-	905.824.766	3.998.695.784
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	377.152.208	460.742.000	-	954.093.849	1.791.988.057	291.258.561	52.264.679	258.080.276	601.603.516
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	236.850.625	408.455.372	-	11.640.151	656.946.148	227.642.248	-	162.214.497	389.856.745
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	376.269.150	167.355.000	-	-	543.624.150	191.875.866	-	267.117.303	458.993.169
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	261.639.934	124.353.000	-	-	385.992.934	70.251.804	-	55.508.996	125.760.800
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	155.074.048	171.155.000	-	-	326.229.048	57.759.305	36.657.061	-	94.416.366
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	352.553.239	112.961.000	-	-	465.514.239	-	24.420.000	162.937.471	187.357.471
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	241.070.006	422.081.950	-	-	663.151.956	-	-	-	-
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.393.244.438	157.444.180	-	-	1.550.688.618	1.425.437.942	-	-	1.425.437.942
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.135.598.778	188.416.660	-	-	1.324.015.438	1.319.042.470	903.984	-	1.319.946.454
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.293.328.813	717.108.380	-	-	2.010.437.193	151.923.864	90.249.000	2.165.794.976	2.407.967.840
04	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	8.213.384	8.213.384
04	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-	-	32.700	32.700	-	-	32.700	32.700
04	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000
04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	-	60	60	-	-	60	60
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1.293.138.882	3.985.401.444	-	11.628.000	5.290.168.326	1.652.914.106	292.836.172	29.456.067.958	31.401.818.236
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	254.421.807	86.345.000	-	-	340.766.807	279.228.395	37.070.435	-	316.298.830
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	206.015.845	117.167.000	-	-	323.182.845	231.125.056	18.240.298	-	249.365.354
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	220.406.339	76.924.750	-	24.893.675	322.224.764	233.451.134	22.557.097	-	256.008.231
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.416.990.331	15.966.593.604	-	592.757.200	17.976.341.135	1.199.567.500	15.282.891.834	4.135.673.016	20.618.132.350
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.270.314.988	310.407.540	-	95.406.540	1.676.129.068	1.027.236.045	-	-	1.027.236.045
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.130.153.128	33.904.444.053	-	71.393.000	35.105.990.181	81.127.000	-	229.372.442.230	229.453.569.230
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.363.687.428	582.084.594	-	106.695.553	2.052.467.575	990.015.346	-	-	990.015.346
11	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	677.947.240	618.869.920	-	-	1.296.817.160	157.167.582	-	-	157.167.582
12	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	486.117.815	130.770.000	-	-	616.887.815	638.293.219	-	-	638.293.219
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	328.762.867	73.143.000	-	-	401.905.867	452.320.573	-	-	452.320.573
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	300.886.032	230.710.000	-	-	531.596.032	452.771.606	-	-	452.771.606
12	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI	244.975.652	97.367.000	-	-	342.342.652	-	-	20.400.000	20.400.000
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.128.719.408	779.469.000	-	35.150.000	1.943.338.408	762.009.272	183.939.037	517.800.000	1.463.748.309
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	95.223.747	278.255.596	-	412.400	373.891.743	107.228.968	35.385.250	94.718.152	237.332.370
<b>JUMLAH</b>			<b>25.510.021.208</b>	<b>71.053.812.802</b>	<b>543.277.500</b>	<b>2.182.355.130</b>	<b>99.289.466.640</b>	<b>20.135.070.660</b>	<b>16.077.414.847</b>	<b>365.603.781.537</b>	<b>401.816.267.044</b>



## LAMPIRAN XXIII

# RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

## RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

ESELON I	SATKER	URAIAN	SALDO PER 30 JUNI 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
Setjen	Kantor Pusat (403200)	Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank Mandiri	-	39.762.000,00
		Penempatan Kantor Kas Bank BRI	-	363.817.500,00
		Penempatan 2 (dua) unit mesin ATM Bank BRI	-	
		BNI Gedung B Lantai I (Bank)	-	416.527.767,00
		Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank BSI	-	19.643.000,00
		Koperasi P (Kantin Gedung C)	-	154.098.300,00
		Koperasi Prajamukti	-	189.242.300,00
		DPP PP PAUD	-	62.133.000,00
		Dharma Wanita	-	7.077.500,00
		PT. DTN	-	27.272.727,00
		PT. TBS	-	74.402.987,00
		IPDN Jatinangor (448302)	Koperasi BBP (Kantin Kampus Jakarta)	-
	Koperasi BBP (Koperasi Kampus Jakarta)		-	12.788.646,00
	Bank BJB Jatinangor		-	83.179.250,00
	Bank BJB		-	62.150.000,00
	PT. STU		-	20.718.750,00
	PT. STU		-	22.383.333,00
	PT. STU		-	23.701.056,00
	BNI Cabang PTB		-	17.820.000,00
	Dharma Wanita Persatuan IPDN		-	30.000.000,00
	CV. KMR		-	163.503.167,00
	Koperasi KDKS		-	10.259.167,00
	Koperasi BBP		-	13.012.292,00
	Koperasi BBP		-	9.011.333,00
	Koperasi BBP (Fitness Center)		-	14.901.333,00
	Koperasi BBP (Kantin samping menza)		-	6.444.556,00
	AYI cs		-	1.101.875,00
	Rizalul Fauzi		-	5.208.333,00
	CV. BBS		-	62.601.583,00
	KAMPUS PASCASARJANA		-	5.759.249.872,00
	IPDN Kampus Sulsel (677024)		PT. BNI (PERSERO) Tbk.	-
	IPDN Kampus NTB (683084)	Koperasi Konsumen AP Mandalika	-	10.363.667,00
	<b>Total Setjen</b>			-
Itjen	Itjen (027203)	PT Bank Negara Indonesia	-	2.652.944,00
<b>Total Itjen</b>			-	<b>2.652.944,00</b>
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	PT Bank Negara Indonesia	-	11.602.000,00
		PT Bank Mandiri	-	4.741.083,00
		PT. Bank BRI	-	6.321.445,00
	Balai Besar PMD Malang (028830)	Koperasi RAS	-	6.153.000,00
<b>Total Ditjen Bina Pemdes</b>			-	<b>28.817.528,00</b>
Ditjen Bina Bangda	Ditjen Bina Bangda (039729)	PT. Bank Mandiri	-	25.000.000,00
		PT. Bank BRI	-	26.250.000,00
		Sewa Gedung Serbaguna	-	241.080.000,00
<b>Total Ditjen Bina Bangda</b>			-	<b>292.330.000,00</b>
Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil (634082)	Voucher Jasa Layanan Kependudukan	-	151.974.364.000,00
<b>Total Ditjen Dukcapil</b>			-	<b>151.974.364.000,00</b>
BPSDM	Kantor Pusat (403231)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	-	1.256.278,00
		PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk.	-	126.525.000,00
		PT. MSD	-	95.365.000,00
	PPSDM Regional Yogyakarta (027114)	BPD DIY	-	37.917.483,00
		KPN MELATI	-	6.065.078,00
Balai PK Satpol PP dan Damkar (506138)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	-	24.832.000,00	
<b>Total BPSDM</b>			-	<b>291.960.839,00</b>
<b>Total Keseluruhan</b>			-	<b>160.307.263.241,00</b>



## LAMPIRAN XXIV

# RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	30-Jun-25	ADJ202506001			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	678.973.296	678.973.296
2	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01251	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.407.577	(51.407.577)
3	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01251	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55.362.000	55.362.000
4	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01252	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.407.577	(51.407.577)
5	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01252	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55.362.000	55.362.000
6	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14251	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134113	Jaringan	12.112.838	(12.112.838)
7	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142510	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	15.979.729	(15.979.729)
8	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142511	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	6.779.279	(6.779.279)
9	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142512	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	6.779.279	(6.779.279)
10	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142513	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	7.572.072	(7.572.072)
11	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142514	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	12.229.729	(12.229.729)
12	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142515	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	6.911.261	(6.911.261)
13	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142516	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	20.030.990	(20.030.990)
14	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142517	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	20.030.990	(20.030.990)
15	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142518	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	20.030.990	(20.030.990)
16	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142519	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	20.030.990	(20.030.990)
17	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14252	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	5.968.088	(5.968.088)
18	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142520	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
19	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142521	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
20	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142522	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
21	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142523	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
22	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142524	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
23	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142525	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
24	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142526	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
25	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142527	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
26	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B142528	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	26.905.405	(26.905.405)
27	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14253	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	51.243.258	(51.243.258)
28	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14254	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	24.864.864	(24.864.864)
29	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14255	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	24.864.864	(24.864.864)
30	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14256	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	7.195.945	(7.195.945)
31	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14257	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	18.378.378	(18.378.378)
32	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14258	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	18.378.378	(18.378.378)
33	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-MAY-25	B14259	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	15.979.729	(15.979.729)
41	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.268	8.268
42	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	188.676	188.676
43	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21253	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.011.139	1.011.139
44	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21254	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39.652	39.652
45	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21255	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	770.000	770.000
46	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21256	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	154.221	154.221
49	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	10-Jan-00			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.017.928	14.017.928

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
50	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.262.000	(1.262.000)
51	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	252.400	252.400
52	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	578	(578)
53	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	116	116
54	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21253	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.497.500	(2.497.500)
55	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21253	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	312.188	312.188
56	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21254	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.350.000	(1.350.000)
57	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21254	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	135.000	135.000
58	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21255	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.692.750	(1.692.750)
59	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21255	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	423.188	423.188
60	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21256	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.692.750	(1.692.750)
61	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21256	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	423.188	423.188
62	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21257	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	5.994.000	(5.994.000)
63	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21257	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.198.800	1.198.800
64	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21258	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	705.350	(705.350)
65	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21258	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.405	9.405
69	1012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	KD	30-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	170.653	170.653
70	1012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	KD	30-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	159.523	159.523
<b>TOTAL</b>														<b>133.451.263</b>



## LAMPIRAN XXV

# RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

## RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Selisih Absolut	Selisih Neto
1	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	131111	Tanah	84.455.622.000	01001	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	84.455.622.000	-	-	-
2	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	10.000.000	-	-	-
3	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(10.000.000)	-	-	-
4	01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	35.098.225.956	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35.098.225.956	-	-	-
5	01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	125.169.000	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	125.169.000	-	-	-
6	01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(44.932.463)	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(44.932.463)	-	-	-
7	01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	134113	Jaringan	546.531.335	01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	546.531.335	-	-	-
8	01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(154.415.594)	01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(154.415.594)	-	-	-
9	05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	162151	Software	1.877.912.555	01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	1.877.912.555	-	-	1.877.912.555
10	05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1.578.735.442)	01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	(1.578.735.442)	-	-	(1.578.735.442)
11	05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	162151	Software	2.724.816.410	01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	2.724.816.410	-	-	2.724.816.410
12	05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2.384.214.360)	01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(2.384.214.360)	-	-	(2.384.214.360)
<b>TOTAL</b>						<b>120.665.979.397</b>	<b>TOTAL</b>			<b>120.665.979.397</b>	-	-	<b>639.779.163</b>



## LAMPIRAN XXVI

# REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
<b>ADWIL</b>											
1	01004	065129	DK	BAPPEDA PROPINSI NAD	-	17.500.000	(17.500.000)	-	-	-	P.C UNIT
2	01004	080054	TP	DINAS PRASJAL DAN TARUKIM PROPINSI SUMATERA BARAT	1.809.502.117	-	-	-	-	1.809.502.117	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
3	01004	130017	TP	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	1.575.601.236	1.629.744.712	(1.629.744.712)	-	-	1.575.601.236	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL RAK KAYU TELEVISI PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
4	01004	160080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	14.500.000	(14.500.000)	-	-	-	P.C UNIT
5	01004	170090	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
6	01004	170420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	-	795.460.000	(795.460.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR PERAHU PENUMPANG UNIT TRANCIEVER SSB PORTABLE P.C UNIT PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
7	01004	170520	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	-	18.000.000	(18.000.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
8	01004	240084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
9	01004	240149	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	2.837.269.543	248.875.000	(248.875.000)	-	-	2.837.269.543	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG POS JAGA PERMANEN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A SEMI PERMANEN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN BANGUNAN DERMAGA SEPEDA MOTOR UNIT TRANCEIVER SsB PORTABLE P.C UNIT PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
10	01004	240260	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	291.825.605	174.900.000	(174.900.000)	-	-	291.825.605	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
11	01004	240342	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	762.374.061	175.000.000	(175.000.000)	-	-	762.374.061	GEDUNG POS JAGA PERMANEN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
12	01004	240351	TP	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	367.994.675	-	-	-	-	367.994.675	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
13	01004	250026	TP	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	567.007.449	1.074.129.737	(1.074.129.737)	-	-	567.007.449	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) LAINNYA TELEVISI HANDY TALKY (HT) ALAT KOMUNIKASI RASIO SsB LAINNYA STELATH DIGITAL REPEATER RADIO LINK PORTABLE REPORTER LINK PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA SWITCHER/MENARA ANTENA LAINNYA PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF STATIONARY UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS)
14	01004	250084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
15	01004	251418	TP	BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. ASMAT	5.436.558.750	-	-	-	-	5.436.558.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN
16	01004	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	197.937.405	-	-	-	-	197.937.405	GEDUNG POS JAGA PERMANEN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA LAINNYA
17	01004	251907	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	3.917.569.440	-	-	-	-	3.917.569.440	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
18	01004	255161	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KOTA JAYAPURA	797.747.050	-	-	-	-	797.747.050	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
19	01004	280067	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
20	01004	320052	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	-	26.895.000	(26.895.000)	-	-	-	STABILIZER/UPS P.C UNIT
<b>PEMDES</b>											
21	01005	239250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	144.164.028	-	-	-	-	144.164.028	P.C UNIT
22	01005	029367	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	166.000.000	-	-	-	-	166.000.000	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
23	01005	029367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	-	9.775.000	(9.775.000)	-	-	-	P.C UNIT
24	01005	029376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	499.000	9.800.000	(9.800.000)	-	-	499.000	P.C UNIT PENJEPIT KERTAS ORDNER DAN MAP KERTAS HVS
25	01005	029436	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
26	01005	029472	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
27	01005	029472	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	-	10.120.000	(10.120.000)	-	-	-	P.C UNIT
28	01005	039438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	170.461.250	-	-	-	-	170.461.250	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
29	01005	039438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
30	01005	039443	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
31	01005	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
32	01005	039465	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
33	01005	039470	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
34	01005	039480	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
35	01005	039490	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	161.028.000	-	-	-	-	161.028.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
36	01005	039490	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	-	10.125.000	(10.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
37	01005	039500	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
38	01005	039504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	-	10.145.000	(10.145.000)	-	-	-	P.C UNIT
39	01005	039514	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	164.716.820	-	-	-	-	164.716.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
40	01005	039514	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	-	10.147.500	(10.147.500)	-	-	-	P.C UNIT
41	01005	039519	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
42	01005	039530	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	37.850	9.900.000	(9.900.000)	-	-	37.850	P.C UNIT KERTAS HVS

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
43	01005	039538	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	79.444.800	-	-	-	-	79.444.800	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
44	01005	039538	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
45	01005	039546	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	82.910.360	-	-	-	-	82.910.360	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
46	01005	039546	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
47	01005	039554	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
48	01005	039562	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	-	9.320.000	(9.320.000)	-	-	-	P.C UNIT
49	01005	039568	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	-	9.665.000	(9.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
50	01005	039579	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	-	9.923.500	(9.923.500)	-	-	-	P.C UNIT
51	01005	039599	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
52	01005	039605	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	74.629.350	-	-	-	-	74.629.350	PASAR DESA
53	01005	039605	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
54	01005	039612	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
55	01005	039621	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SRAGEN	302.500	-	-	-	-	302.500	BUKU TULIS ORDNER DAN MAP ALAT TULIS KANTOR LAINNYA KERTAS HVS
56	01005	039639	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	134.000	10.065.000	(10.065.000)	-	-	134.000	P.C UNIT KERTAS HVS
57	01005	049147	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	417.809.252	-	-	-	-	417.809.252	KANTOR DESA/PASAR DESA
58	01005	049147	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
59	01005	049173	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
60	01005	059456	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
61	01005	059464	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	82.641.440	-	-	-	-	82.641.440	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
62	01005	059464	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	-	10.162.900	(10.162.900)	-	-	-	P.C UNIT
63	01005	059478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	-	10.105.000	(10.105.000)	-	-	-	P.C UNIT
64	01005	059491	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	160.704.000	-	-	-	-	160.704.000	KANTOR DESA
65	01005	059498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
66	01005	059527	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
67	01005	059556	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PROBOLINGGO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
68	01005	059560	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LUMAJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
69	01005	059586	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
70	01005	059613	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MADIUN	165.438.090	-	-	-	-	165.438.090	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
71	01005	059620	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	81.331.700	-	-	-	-	81.331.700	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
72	01005	059620	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	-	9.915.000	(9.915.000)	-	-	-	P.C UNIT
77	01005	059623	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	829.360.823	-	-	-	-	829.360.823	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
											GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
78	01005	059623	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
79	01005	059630	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. PONOROGO	172.474.830	-	-	-	-	172.474.830	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
80	01005	059652	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	-	9.780.000	(9.780.000)	-	-	-	P.C UNIT
81	01005	059661	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
82	01005	069280	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	80.776.430	-	-	-	-	80.776.430	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
83	01005	069280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
84	01005	069284	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
85	01005	069290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
86	01005	069303	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
87	01005	069309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
88	01005	069321	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	-	10.100.000	(10.100.000)	-	-	-	P.C UNIT
89	01005	069328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
90	01005	069334	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
91	01005	069345	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
92	01005	069352	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
93	01005	069356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
94	01005	069358	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
95	01005	069362	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
96	01005	069367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	75.000	10.000.000	(10.000.000)	-	-	75.000	P.C UNIT
											KERTAS HVS
97	01005	069371	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
98	01005	079353	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
99	01005	079359	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	82.165.850	-	-	-	-	82.165.850	PASAR DESA
100	01005	079359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	079369	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
102	01005	079369	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	-	10.160.000	(10.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	079376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
104	01005	079383	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
105	01005	079390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
106	01005	079393	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	079395	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	079413	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
109	01005	079425	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
110	01005	079438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	165.751.000	-	-	-	-	165.751.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
111	01005	079438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	079444	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
113	01005	079447	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	079450	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
115	01005	079457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	079459	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
117	01005	079463	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
118	01005	079471	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	-	9.436.000	(9.436.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	079473	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	494.680.000	-	-	-	-	494.680.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
120	01005	079473	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	089289	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	-	9.949.995	(9.949.995)	-	-	-	P.C UNIT
122	01005	089298	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	089305	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	162.530.600	-	-	-	-	162.530.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
102	01005	089305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	089313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMERDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	-	10.155.000	(10.155.000)	-	-	-	P.C UNIT
104	01005	089319	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
105	01005	089338	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	82.116.050	-	-	-	-	82.116.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
106	01005	089338	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	089345	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	089356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
109	01005	099452	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	161.747.080	-	-	-	-	161.747.080	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
110	01005	099452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	-	10.157.960	(10.157.960)	-	-	-	P.C UNIT
111	01005	099457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	099476	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	157.805.820	-	-	-	-	157.805.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
113	01005	099476	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	-	9.845.000	(9.845.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	099484	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	164.489.400	-	-	-	-	164.489.400	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
115	01005	099484	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	099498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	-	10.163.000	(10.163.000)	-	-	-	P.C UNIT
117	01005	099504	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	159.489.000	-	-	-	-	159.489.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
118	01005	099504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	099510	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	78.282.280	-	-	-	-	78.282.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
120	01005	099510	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	109222	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	152.031.100	-	-	-	-	152.031.100	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS/PIH
122	01005	109222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
123	01005	109234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
124	01005	109238	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
125	01005	109247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
126	01005	109254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
127	01005	109269	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
128	01005	109272	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	173.071.600	-	-	-	-	173.071.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
129	01005	109272	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
130	01005	109280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
132	01005	119245	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
133	01005	119252	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	72.658.200	-	-	-	-	72.658.200	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
134	01005	119252	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
135	01005	119265	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	170.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	170.000	P.C UNIT
136	01005	119274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
138	01005	119288	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
139	01005	119294	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	171.565.320	-	-	-	-	171.565.320	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
140	01005	119294	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
141	01005	119299	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
142	01005	129235	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG	71.678.000	-	-	-	-	71.678.000	ALAT TULIS ORDNER DAN MAP PENGGARIS ISI STAPLES BARANG CETAKAN KERTAS HV5 BERBAGAI KERTAS

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
											CD/DVD
143	01005	129247	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	245.032.600	-	-	-	-	245.032.600	BAHAN KOMPUTER LAINNYA GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
144	01005	129247	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
146	01005	129266	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
147	01005	129270	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	82.087.000	-	-	-	-	82.087.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
148	01005	129270	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
149	01005	129288	UB	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
150	01005	129292	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
151	01005	129296	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	233.945.280	-	-	-	-	233.945.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA
152	01005	129296	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
153	01005	139250	DK	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	-	59.975.000	(59.975.000)	-	-	-	UPS (UNIT POWER SUPPLY) P.C UNIT LAPTOP PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
154	01005	139267	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	82.917.000	-	-	-	-	82.917.000	BANGUNAN INDUSTRI LAINNYA
155	01005	139267	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	754.500	10.165.000	(10.165.000)	-	-	754.500	P.C UNIT KERTAS HVS
156	01005	139274	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	159.870.510	-	-	-	-	159.870.510	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
157	01005	139274	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
158	01005	139285	TP	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	75.558.620	-	-	-	-	75.558.620	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
159	01005	139285	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
160	01005	139295	UB	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
161	01005	139313	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	163.443.600	-	-	-	-	163.443.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
162	01005	139313	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
163	01005	139325	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
164	01005	139328	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
165	01005	139330	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
166	01005	139335	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	602.913.780	-	-	-	-	602.913.780	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
168	01005	149235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
169	01005	149242	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
170	01005	149257	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	80.750.451	-	-	-	-	80.750.451	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
171	01005	149257	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	-	9.880.000	(9.880.000)	-	-	-	P.C UNIT
172	01005	149267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
173	01005	149270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA . PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
174	01005	149278	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
175	01005	149285	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG BISAU	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
177	01005	159202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	225.500	9.790.000	(9.790.000)	-	-	225.500	P.C UNIT KERTAS HVS
178	01005	159214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	1.470.850	10.165.000	(10.165.000)	-	-	1.470.850	P.C UNIT KERTAS HVS
179	01005	159219	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
180	01005	159224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
181	01005	159240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
182	01005	159245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
183	01005	159250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANAH BUMBU	82.709.500	-	-	-	-	82.709.500	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
184	01005	159255	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
185	01005	169192	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	-	9.999.900	(9.999.900)	-	-	-	P.C UNIT
186	01005	169196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
187	01005	169202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
188	01005	169206	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	140.722.920	-	-	-	-	140.722.920	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
189	01005	169206	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
190	01005	169211	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	-	9.125.000	(9.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
191	01005	169218	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
192	01005	169223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA	87.547.620	-	-	-	-	87.547.620	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA SALURAN DRAINASE
193	01005	169226	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
194	01005	179275	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
195	01005	179280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
196	01005	179283	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
197	01005	179296	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	468.985.950	-	-	-	-	468.985.950	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
198	01005	179296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
199	01005	189223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
200	01005	189223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
201	01005	189229	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	242.270.570	-	-	-	-	242.270.570	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
202	01005	189229	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
203	01005	189234	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
204	01005	189240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
205	01005	189243	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
206	01005	189249	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	162.000.000	-	-	-	-	162.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
207	01005	189249	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
208	01005	189254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
209	01005	189260	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	995.592.470	-	-	-	-	995.592.470	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
210	01005	189260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
211	01005	189271	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIGI	82.680.450	-	-	-	-	82.680.450	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
212	01005	199398	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	178.750	9.750.000	(9.750.000)	-	-	178.750	P.C UNIT
213	01005	199407	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
214	01005	199415	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	162.893.000	-	-	-	-	162.893.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
215	01005	199415	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
216	01005	199421	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
217	01005	199421	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
218	01005	199430	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
219	01005	199442	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	149.400.000	-	-	-	-	149.400.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
220	01005	199442	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
221	01005	199452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	55.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	55.000	P.C UNIT
222	01005	199488	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
223	01005	199499	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	265.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	265.000	P.C UNIT
224	01005	199508	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
225	01005	199515	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
226	01005	199522	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
227	01005	199530	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	82.253.000	-	-	-	-	82.253.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
228	01005	199530	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
229	01005	199542	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
230	01005	199560	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
231	01005	199570	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	840.500	10.115.000	(10.115.000)	-	-	840.500	P.C UNIT KERTAS HVS
232	01005	199574	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
233	01005	199578	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
234	01005	209209	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
235	01005	209212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
236	01005	209219	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA	157.950.000	-	-	-	-	157.950.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
237	01005	209219	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
238	01005	209227	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWA SELATAN	82.975.930	-	-	-	-	82.975.930	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
239	01005	209227	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWA SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
240	01005	209234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBİ	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
241	01005	209239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
242	01005	209244	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWA	327.489.230	-	-	-	-	327.489.230	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
243	01005	209244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
244	01005	209245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWA UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
245	01005	209250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUTON UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
246	01005	219188	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
247	01005	219194	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
248	01005	219208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
249	01005	219214	UB	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
250	01005	219217	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	173.238.430	-	-	-	-	173.238.430	BANGUN GEDUNG KANTOR PERMANEN
251	01005	219217	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
252	01005	219222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
253	01005	229177	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
254	01005	229189	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
255	01005	229193	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR	-	7.160.000	(7.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
256	01005	229223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	418.821.685	-	-	-	-	418.821.685	PAS
257	01005	229223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	-	9.800.000	(9.800.000)	-	-	-	P.C UNIT
258	01005	239244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
259	01005	239250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
						-	-	-	-	-	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
261	01005	239281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
262	01005	239290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
263	01005	239291	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
264	01005	249309	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	86.670.000	-	-	-	-	86.670.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
265	01005	249309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
266	01005	249318	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
267	01005	249325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
268	01005	249335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
269	01005	249344	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
270	01005	249350	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
271	01005	249357	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
272	01005	249361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
273	01005	249367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	-	8.665.000	(8.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
274	01005	249377	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
275	01005	249384	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
276	01005	249390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
277	01005	249395	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	165.422.652	-	-	-	-	165.422.652	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
278	01005	249399	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
279	01005	249401	UB	BPMD, BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
280	01005	249405	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
281	01005	249409	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
282	01005	249414	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
283	01005	259277	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
284	01005	259291	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
285	01005	259305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
286	01005	259312	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
287	01005	259331	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN KAB. ASMAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
288	01005	259335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
289	01005	259339	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
290	01005	259345	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. KEEROM	82.834.000	-	-	-	-	82.834.000	PASAR DESA
291	01005	259354	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
292	01005	259359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
293	01005	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
294	01005	259369	UB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
295	01005	269204	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
296	01005	269204	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
297	01005	269214	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	78.112.130	-	-	-	-	78.112.130	P.C UNIT
298	01005	269214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	-	9.970.000	(9.970.000)	-	-	-	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
299	01005	269224	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	169.009.580	-	-	-	-	169.009.580	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
300	01005	269224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
301	01005	269227	UB	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB.	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
302	01005	269230	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
303	01005	269235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	-	10.010.000	(10.010.000)	-	-	-	P.C UNIT
304	01005	269240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
305	01005	269245	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHANG	165.677.960	-	-	-	-	165.677.960	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
306	01005	269245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
308	01005	289187	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
309	01005	289187	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	749.000	-	-	-	-	749.000	KERTAS HVS
310	01005	289190	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
311	01005	289196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
312	01005	289207	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
313	01005	289212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
314	01005	290451	UB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. PANDEGLANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
315	01005	299452	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
316	01005	299468	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	638.050.190	-	-	-	-	638.050.190	KANTOR DESA/PASAR DESA

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
317	01005	299468	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
318	01005	299477	TP	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	79.792.050	-	-	-	-	79.792.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
319	01005	299477	UB	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
320	01005	299483	TP	BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TANGERANG	74.700.000	-	-	-	-	74.700.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
321	01005	299501	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	-	9.090.910	(9.090.910)	-	-	-	P.C UNIT
322	01005	309247	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	162.597.000	-	-	-	-	162.597.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
323	01005	309247	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
324	01005	319176	UB	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
325	01005	329122	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
326	01005	329128	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KAB. KARIMUN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
327	01005	329137	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	161.616.770	-	-	-	-	161.616.770	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
328	01005	329137	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
329	01005	329144	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
330	01005	329146	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
331	01005	339176	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
332	01005	339185	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
333	01005	339194	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
334	01005	339200	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
335	01005	339202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
336	01005	339210	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
337	01005	340170	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	-	78.930.200	(78.930.200)	-	-	-	P.C UNIT LAPTOP PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA
338	01005	340244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
339	01005	340448	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
340	01005	340536	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	165.869.690	-	-	-	-	165.869.690	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
341	01005	340536	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
<b>BANGDA</b>											
342	01006	052151	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. BLITAR	1.877.956.850	-	-	-	-	1.877.956.850	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
343	01006	071519	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	1.595.071.168	-	-	249.500.000	(249.500.000)	1.595.071.168	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
346	1006	081021	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	1.229.483.605	-	-	193.634.400	(193.634.400)	1.229.483.605	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
347	01006	081219	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	2.473.039.371	-	-	370.670.000	(370.670.000)	2.473.039.371	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
348	01006	090256	TP	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB BENGKALIS	67.670.350	-	-	-	-	67.670.350	KONSSTRUKSI DALAM PENERJAAN (KONTRAK PERENCANAAN)
350	01006	100729	TP	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	1.222.663.310	-	-	239.766.400	(239.766.400)	1.222.663.310	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
351	01006	100930	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	2.213.241.257	-	-	349.459.800	(349.459.800)	2.213.241.257	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
354	01006	140645	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN (06)	3.171.799.345	-	-	335.790.000	(335.790.000)	3.171.799.345	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
355	01006	140727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	2.260.972.450	-	-	267.560.000	(267.560.000)	2.260.972.450	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
357	01006	140920	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	1.869.300.944	-	-	298.000.000	(298.000.000)	1.869.300.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
358	01006	141019	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	4.990.853.839	-	-	329.095.000	(329.095.000)	4.990.853.839	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
359	01006	141338	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	2.851.322.966	-	-	448.853.000	(448.853.000)	2.851.322.966	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
360	01006	151126	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	1.246.208.645	-	-	153.659.600	(153.659.600)	1.246.208.645	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
361	01006	160626	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	3.192.334.944	-	-	496.630.000	(496.630.000)	3.192.334.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
362	01006	160927	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	428.239.499	-	-	322.278.000	(322.278.000)	428.239.499	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
363	01006	180734	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	1.849.065.910	-	-	53.642.150	(53.642.150)	1.849.065.910	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
364	01006	180924	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA	1.095.340.500	-	-	-	-	1.095.340.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
365	01006	180925	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	1.419.376.840	-	-	172.341.800	(172.341.800)	1.419.376.840	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
366	01006	191426	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	947.211.500	-	-	149.850.000	(149.850.000)	947.211.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
367	01006	191429	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	2.538.006.797	-	-	75.000.000	(75.000.000)	2.538.006.797	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
369	01006	192274	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	2.981.170.039	-	-	429.232.000	(429.232.000)	2.981.170.039	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
370	01006	200623	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA (06)	2.814.142.510	-	-	-	-	2.814.142.510	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
371	01006	200715	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBİ (06)	1.888.382.030	-	-	239.551.500	(239.551.500)	1.888.382.030	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
372	01006	200816	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	2.241.171.436	-	-	324.751.850	(324.751.850)	2.241.171.436	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
373	01006	210156	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALUKU TENGAH (06)	907.769.600	-	-	-	-	907.769.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
374	01006	210428	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PULAU BURU (06)	1.425.853.520	-	-	-	-	1.425.853.520	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
375	01006	210726	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	403.454.789	-	-	-	-	403.454.789	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
376	01006	210727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (06)	1.404.555.405	-	-	-	-	1.404.555.405	RUMAH NEGARA GOL.II TIPE A PERMANEN
377	01006	215128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA AMBON	446.822.000	-	-	-	-	446.822.000	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI
378	01006	240553	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. A L O R	233.085.375	-	-	-	-	233.085.375	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
380	01006	250936	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	1.638.600.005	-	-	234.500.000	(234.500.000)	1.638.600.005	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
381	01006	251128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	1.609.527.750	-	-	249.306.000	(249.306.000)	1.609.527.750	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
382	01006	251129	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	2.474.045.920	-	-	378.641.000	(378.641.000)	2.474.045.920	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
383	01006	251413	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ASMAT	1.781.455.000	-	-	-	-	1.781.455.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
384	01006	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	213.186.750	-	-	-	-	213.186.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
385	01006	251516	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	3.791.009.500	-	-	538.600.000	(538.600.000)	3.791.009.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
386	01006	251607	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	3.573.969.688	-	-	469.761.000	(469.761.000)	3.573.969.688	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
387	01006	251717	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	2.636.985.383	-	-	405.882.950	(405.882.950)	2.636.985.383	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
388	01006	251721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEEROM	264.262.500	-	-	-	-	264.262.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
389	01006	251812	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	2.280.065.006	-	-	224.100.000	(224.100.000)	2.280.065.006	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
390	01006	251918	TP	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	5.357.304.290	-	-	703.999.885	(703.999.885)	5.357.304.290	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
391	01006	252318	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAROPEN	1.700.989.900	-	-	-	-	1.700.989.900	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN
392	01006	260830	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHANG	2.530.783.703	-	-	398.350.000	(398.350.000)	2.530.783.703	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
393	01006	265156	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	533.109.500	-	-	49.925.000	(49.925.000)	533.109.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
394	01006	280076	TP	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (06)	5.774.912.835	-	-	-	-	5.774.912.835	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
395	01006	280253	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	1.039.440.340	-	-	-	-	1.039.440.340	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
396	01006	280322	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	1.051.489.810	-	-	-	-	1.051.489.810	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
397	01006	280417	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	3.241.547.215	-	-	698.997.544	(698.997.544)	3.241.547.215	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
398	01006	280424	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	1.061.420.000	-	-	-	-	1.061.420.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
400	01006	280525	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	1.062.666.110	-	-	-	-	1.062.666.110	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
401	01006	280621	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	1.626.293.274	-	-	-	-	1.626.293.274	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
402	01006	280723	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1.398.942.800	-	-	-	-	1.398.942.800	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
403	01006	285125	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE	331.568.877	-	-	-	-	331.568.877	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
404	01006	310224	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	2.523.955.206	-	-	396.261.000	(396.261.000)	2.523.955.206	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
405	01006	310321	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	2.541.268.140	-	-	399.585.000	(399.585.000)	2.541.268.140	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
406	01006	330620	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	2.170.532.366	-	-	348.786.000	(348.786.000)	2.170.532.366	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
407	01006	330721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	2.256.803.760	-	-	329.500.000	(329.500.000)	2.256.803.760	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
408	01006	436044	TP	KPU KABUPATEN TANAH LAUT / POLEWALI MANDAR	2.757.039.900	-	-	-	-	2.757.039.900	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
409	01006	436096	TP	KAB SERAM BAGIAN TIMUR	1.519.500.000	-	-	-	-	1.519.500.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
410	01006	436122	TP	KAB HALMAHERA TENGAH	1.380.000.000	-	-	-	-	1.380.000.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
<b>OTDA</b>											
411	01007	060082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.088.228.700	10.000.000	(10.000.000)	-	-	1.088.228.700	HARD DISK HASIL KAJIAN/PENELITIAN
412	01007	070244	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	-	-	-	2.076.889.018	(2.076.889.018)	-	SOFTWARE KOMPUTER
413	01007	075133	TP	BAPPEDA KOTA MEDAN	-	-	-	2.825.836.000	(2.825.836.000)	-	RAK-RAK PENYIMPANAN FILING CABINET BESI LCD PROJECTOR/INFOCUS KURSI DORONG MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA) P.C UNIT NOTE BOOK HARD DISK PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SOFTWARE KOMPUTER
414	01007	080435	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOLOK	274.817.795	4.541.238.182	(4.541.238.182)	-	-	274.817.795	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN LOKAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
415	01007	080444	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK	-	9.980.125.000	(9.980.125.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
416	01007	110097	DK	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN	-	-	-	624.800.000	(624.800.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
417	01007	110805	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	5.502.668	334.516.696	(334.516.696)	1.577.738.504	(1.577.738.504)	5.502.668	PERALATAN DAN MESIN SCANNER (UNIVERSAL TESTER) LEMARI PENYIMPANAN FILING CABINET BESI LCD PROJECTOR/INFOCUS KURSI BESI/METAL MEJA RAPAT A.C. SPLIT TELEVISI MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA) UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS) LOCAL AREA NETWORK (LAN) P.C UNIT LAPTOP NOTE BOOK PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SERVER HUB MODEM PERALATAN DAN MESIN SOFTWARE KOMPUTER
418	01007	119267	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	-	-	502.946.000	(502.946.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
419	01007	120730	TP	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	-	-	1.438.332.000	(1.438.332.000)	-	LEMARI PENYIMPANAN RAK BESI FILING CABINET BESI LCD PROJECTOR/INFOCUS MEJA KERJA BESI/METAL KURSI BESI/METAL KURSI KAYU WIRELESS P.C UNIT HARD DISK PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SERVER PERALATAN JARINGAN LAINNYA SOFTWARE KOMPUTER
420	01007	190223	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA	-	1.480.000.000	(1.480.000.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
421	01007	205205	TP	SEKDA KOTA BAU-BAU	-	-	-	2.494.545.455	(2.494.545.455)	-	SOFTWARE KOMPUTER
422	01007	234007	DK	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	1.652.400.000	(1.652.400.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
423	01007	290355	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK	-	16.742.666.277	(16.742.666.277)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
<b>TOTAL</b>					148.791.990.357	40.006.972.469	(40.006.972.469)	24.518.947.856	(24.518.947.856)	148.791.990.357	



## LAMPIRAN XXVII

**KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN  
VS KODE BMN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI UNTUK  
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI  
DENGAN 30 JUNI 2025**

**KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
1	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST NONKONTRAKTUAL	'110/BAST/600/SD T-II/FLPKK	16-04-2025	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah dalam rangka Dukungan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	3050205023	50	450.000	22.500.000	'251331303003636	Kesalahan pencatatan di Modul Komitmen yang seharusnya dicatat sebagai persediaan dengan kode barang (1010501004)
2	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST NONKONTRAKTUAL	'110/BAST/601/SD T-II/FLPKK	10-04-2025	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah dalam rangka Dukungan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	3190106999	100	225.000	22.500.000	'251331303003635	Kesalahan pencatatan di Modul Komitmen yang seharusnya dicatat sebagai persediaan dengan kode barang (1010501004)



## LAMPIRAN XXVIII

**RINCIAN PAGU MINUS (BASIS  
SP2D) AKUN 51XXXX  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI  
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

**RINCIAN PAGU MINUS (BASIS SP2D) AKUN 51XXXX KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Program	Kegiatan	Output	Akun	Pagu	Revisi Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Keterangan
1	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	WA	4255	EBA	511125	8.694.000	8.694.000	20.624.112	(11.930.112)	Terdapat Pagu Minus SP2D pada akun 511125 dan akun 511151 yang merupakan akun Tunjangan PPH 21 dan Tunjangan Umum PNS, dikarenakan adanya penambahan 6 pegawai alumni IPDN yang menduduki jabatan pelaksana, serta penarikan tunjangan PPH 21 untuk THR dan Gaji 13 Tahun 2025 yang cukup signifikan dari penarikan bulanan. Untuk pagu minus tersebut selanjutnya akan dilakukan revisi oleh bagian Perencanaan.
2	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	WA	4255	EBA	511151	28.560.000	28.560.000	33.300.000	(4.740.000)	
3	'01001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	WA	6089	EBA	511125	8.049.000	23.049.000	36.746.196	(13.697.196)	Terdapat Pagu Minus sebesar Rp13.697.196,00 pada Belanja Pegawai untuk Akun 511125 disebabkan adanya penambahan pegawai sebanyak 3 orang dan telah diajukan usulan revisi anggaran nomor 900.1.3/1241/IPDN.24.1 Tanggal 14 Juli 2025.
4	'01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	WA	6089	EBA	511622	896.000	896.000	1.035.121	(139.121)	Terdapat Pagu Minus sebesar Rp139.121 pada akun Belanja Tunjangan Anak PPPK (511622). Adapun transaksi pagu minus tersebut telah diajukan usulan revisi anggaran Nomor 900/123/IPDN.22 Tanggal 15 Juli 2025
5	'01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	WA	6089	EBA	511125	4.458.000	4.458.000	24.647.199	(20.189.199)	Terdapat Pagu Minus sebesar Rp20.189.199 pada akun Tunjangan PPH PNS (511125). Adapun transaksi pagu minus tersebut telah diajukan usulan revisi anggaran Nomor 900/123/IPDN.22 Tanggal 15 Juli 2025
6	'01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	WA	6089	EBA	511123	15.590.000	15.590.000	18.720.000	(3.130.000)	Terdapat Pagu Minus sebesar Rp3.130.000 pada akun Tunjangan Struktural PNS (511123). Adapun transaksi pagu minus tersebut telah diajukan usulan revisi anggaran Nomor 900/123/IPDN.22 Tanggal 15 Juli 2025
7	'01001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	WA	6089	EBA	511125	13.307.000	13.307.000	15.096.993	(1.789.993)	Adanya ketidaksesuaian perhitungan otomatis di Aplikasi SAKTI Penganggaran (database pegawai) saat perencanaan anggaran dengan pembayaran rill pada aplikasi GPP.

8	'01001	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	WA	6089	EBA	511125	14.480.000	14.480.000	24.151.515	(9.671.515)	Terjadinya Pagu Minus disebabkan oleh adanya penambahan CPNS dengan TMT 1 Maret dan SPMT pada bulan Juni sebanyak 5 orang, yang mengakibatkan kebutuhan pembayaran belanja pegawai melebihi pagu yang tersedia.
9	'01003	'027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	WA	6100	EBA	511125	55.080.000	84.692.000	118.511.736	(33.819.736)	Terdapat pagu minus pada akun Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) sebesar Rp(102.214.950,00) dan akun Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) sebesar Rp(33.819.736,00) dikarenakan proses revisi penambahan pagu anggaran akan dilakukan pada periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025.
10	'01003	'027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	WA	6100	EBA	511123	210.870.000	250.870.000	353.084.950	(102.214.950)	
11	'01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	WA	6104	EBA	511125	68.241.000	68.241.000	138.492.642	(70.251.642)	Realisasi yang melebihi pagu anggaran akan ditindaklanjuti melalui revisi anggaran.
12	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	WA	6108	EBA	511125	122.724.000	122.724.000	152.141.634	(29.417.634)	Hal ini terjadi karena pagu anggaran tidak mencukupi dan revisi anggaran belum dilakukan.
13	'01005	'028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	WA	6108	EBA	511125	23.300.000	23.300.000	24.078.410	(778.410)	
14	'01011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	WA	6129	EBA	511625	1.035.000	1.035.000	1.122.510	(87.510)	Terdapat Pagu Minus pada belanja pegawai, hal ini disebabkan karena pada TA.2025 terdapat kenaikan pangkat, gaji berkala, dan tunjangan pada Pegawai BSKDN (sudah dilakukan pengajuan revisi ke bagian perencanaan dan akan diproses di bulan Juli Tahun 2025).
15	'01011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	WA	6129	EBA	511125	24.308.000	24.308.000	82.761.901	(58.453.901)	
16	'01012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	WA	6133	EBA	511125	18.797.000	18.797.000	42.284.379	(23.487.379)	Pagu Minus pada akun akun Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) sebesar Rp(23.487.379) saat ini sedang dalam proses revisi dan telah diajukan ke Kanwil untuk dilakukan perubahan anggaran.
17	'01012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	WA	6133	EBA	511125	9.070.000	20.403.000	28.046.063	(7.643.063)	Terdapat pagu minus pada akun Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) sebesar Rp(7.643.063,00) dikarenakan minus belanja pegawai gaji-13.



## LAMPIRAN XXIX

**SALDO AKUN UTANG YANG  
BELUM DITERIMA TAGIHANNYA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI  
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

**SALDO AKUN UTANG YANG BELUM DITERIMA TAGIHANNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Periode	Akun	Nilai	Keterangan
1	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	25-06	218111	(3.910.184.185)	Pencatatan BAST, SPP, SPM yang sampai tanggal 30 Juni belum SP2D atau belum dihapus
2	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	25-06	218111	(2.529.429.167)	Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2025 dan masih tercatat sebagai SPBY pada Bendahara Pengeluaran
3	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	25-06	218111	(56.207.401)	Tagihan pembayaran bulan juni yang smp nya di bayarkan bulan juli
4	'01001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	25-06	218111	(455.250.000)	BAST terbit di Juni tapi SP2D belum terbit sehingga menyebabkan selisih dan membentuk saldo Utang yang Belum Diterima Tagihannya
5	'01001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	25-06	218111	(65.449.404)	SP2D terbit di bulan Juli atas transaksi yang tercatat pada bulan Juni.
6	'01001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	25-06	218111	(43.281.089)	SPJ belanja yang telah terbit SPBY/BAST masih proses SPP di bulan Juni dan belum di SP2Dkan dengan SP2D di bulan Juli
7	'01001	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	25-06	218111	(191.744.273)	Adanya pembayaran Belanja Barang dengan pengajuan tanggal 30 Juni 2025 dan tanggal SP2D nya di Bulan Juli 2025
8	'01002	'027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	25-06	218111	(24.297.985)	Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2025 merupakan transaksi yang telah terbit BAST/SPBy namun belum SPP hingga tanggal pelaporan
9	'01003	'027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	25-06	218111	(69.757.926)	Adanya BAST dari pihak ketiga dan/atau rincian BAST/SPBy yang belum menjadi SPP pada bulan Juni 2025
10	'01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	25-06	218111	(284.182.080)	Belanja Barang dan Jasa yang s.d. periode 30 Juni 2025 belum terbit SPP s.d. SP2D
11	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	25-06	218111	(3.953.229.643)	Nilai kontrak yang sudah BAST di bulan juni namun belum dibuat tagihannya (SPP)

**SALDO AKUN UTANG YANG BELUM DITERIMA TAGIHANNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Periode	Akun	Nilai	Keterangan
12	'01005	'028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	25-06	218111	(10.600.000)	Adanya kuitansi UP yang belum di-SPM-kan oleh Bendahara Pengeluaran berupa pembayaran langganan internet pada bulan Juni 2025 sesuai dengan dokumen SPBy Nomor 00092/PB/2025 tanggal 4 Juni 2025 senilai Rp10.000.000 dan pembelian BBM Genset sebanyak 2 unit pada bulan Juni 2025 sesuai dengan dokumen SPBy Nomor 00106/PB/028449/2025 tanggal 24 Juni 2025 senilai Rp600.000.
13	'01005	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	25-06	218111	(40.146.673)	BAST terbit di Juni tapi SP2D belum terbit sehingga menyebabkan selisih dan membentuk saldo Utang yang Belum Diterima Tagihannya
14	'01006	'039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	25-06	218111	(660.522.335)	Utang/BAST yang masih dalam proses pembuatan SPP
15	'01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	25-06	218111	(145.924.929)	Utang yang belum diterima tagihannya sebesar Rp145.924.929,00 merupakan belanja barang persediaan yang belum terbit SP2D sampai dengan tanggal pelaporan.
16	'01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25-06	218111	(60.070.990.412)	Tagihan pembayaran bulan juni yang smp nya di bayarkan bulan juli
17	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	25-06	218111	(60.246.500)	BAST/SPBy sampai 30 Juni 2025 yang belum terbit SPPnya
18	'01011	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	25-06	218111	(239.900)	Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.239.900 dan Rp.0, yaitu berupa kwitansi yg sudah proses validasi pada Aplikasi SAKTI tapi masih belum dibuat SPP dan SPM (akan di proses di bulan juli).
19	'01012	'027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	25-06	218111	(13.950.459)	Kwitansi yang belum di SPJkan Oleh Bendahara
20	'01012	'027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	25-06	218111	(107.642.399)	Saldo akun utang yang belum diterima (tahunan) berupa penyediaan jasa kebersihan senilai Rp 96.645.000. Terdapat selisih sebesar Rp 10.997.399 pada akun perjalanan dinas biasa yang merupakan transaksi gantung BAST/SPBy belum SPP GUP KKP.

**SALDO AKUN UTANG YANG BELUM DITERIMA TAGIHANNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

No	BAES1	Kode	Nama Satker	Periode	Akun	Nilai	Keterangan
21	'01012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	25-06	218111	(68.308.990)	Tagihan pembayaran bulan juni yang smp nya di bayarkan bulan juli
22	'01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25-06	218111	(160.815.800)	Uang muka untuk BPP yang SPM Belanja Barang nya baru akan diproses dibulan Juli
23	'01012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	25-06	218111	(50.239.226)	Tagihan pembayaran bulan juni yang smp nya di bayarkan bulan juli
24	'01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	25-06	218111	(8.788.500)	Kwitansi UP yang belum di SPJ kan (SPBy yang belum menjadi SPP/SPM hingga SP2D sampai 30 Juni 2025)
<b>TOTAL</b>						<b>(72.981.429.276)</b>	



## LAMPIRAN XXX

# REKAPITULASI TRANSAKSI RESIPROKAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

**REKAPITULASI TRANSAKSI RESIPROKAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025**

No	Periode	BAES1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BAES1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan	Selisih	Keterangan
1	'06	'01006	'039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	'08701	418934	PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.790.000	- 6.790.000	Terdapat selisih transaksi resiprokal pada akun Belanja-PNBP sebesar Rp6.790.000 yang tercatat pada Satker Ditjen Bina Bangda. Selisih tersebut disebabkan oleh transaksi pembayaran kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Diklat Arsiparis, yang mekanisme belanjanya melalui Uang Persediaan (UP), dimana SP2D baru diterbitkan pada bulan Juli, sehingga pencatatan belanja dan eliminasi transaksi resiprokal antar satker baru dapat dilakukan pada bulan Juli tersebut. Akibatnya, hingga akhir Juni, masih terdapat selisih transaksi resiprokal yang tersaji dalam laporan keuangan.



# LAMPIRAN XXXI

# DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No Izin	Tgl Izin
1	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	8887988875	RPL 133 PS SETJEN KEMENDAGRI UTK DOM	BNI	30	S-1714/MK.5/2015	04/03/2015
2	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1174197874	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-514/WPB.12/KP.04/2021	10/02/2021
3	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	032901004322309	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1403/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
4	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001000	BPG 133 SETJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
5	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001001	BPP 133 BIRO HUKUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
6	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001002	BPP 133 BIRO KEPEGAWAIAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
7	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001003	BPP 133 BIRO ORTALA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
8	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001005	BPP 133 BIRO UMUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
9	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001006	BPP 133 PUSAT FASKERJASAMA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
10	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001007	BPP 133 BIRO KEUANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
11	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001008	BPP 133 PUSDATIN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
12	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001009	BPP 133 BIRO ADMINISTRASI	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
13	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001010	BPP 133 PUSAT PENERANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
14	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	650364830051000	BPG 133 DKPP	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
15	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650714032001004	BPP 133 BIRO PERENCANAAN	BRI	51	S-4800/WPB.12/KP.0404/2021	19/11/2021
16	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	9891484483021000	BPG 087 IPDN	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
17	Manado	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	9891486770101000	BPG 049 IPDN KAMPUS SULUT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
18	Makassar I	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	00000001067702427	BNP 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	10	001980/050	13/01/2021
19	Makassar I	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	9891486770241000	BPG 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
20	Bukittinggi	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	9891486770451000	BPG 011 IPDN KAMPUS BUKITTINGGI	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
21	Pontianak	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	9891486830701000	BPG 042 IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
22	Mataram	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	9891486830841000	BPG 038 IPDN KAMPUS NTB	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
23	Jayapura	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	9891486830911000	BPG 063 IPDN KAMPUS PAPUA	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
24	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	32901004326303	RKK ITJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1163/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
25	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031000	BPG 133 ITJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
26	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031001	BPP 133 INSPEKTORAT I	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
27	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031002	BPP 133 Inspektora II	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
28	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031003	BPP 133 Inspektora III	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
29	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031004	BPP 133 Inspektora IV	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
30	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031005	BPP 133 INSPEKTORAT KHUSUS	BRI	21	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
31	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031006	BPP 133 SETITJEN KEMENDAGRI	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
32	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	32901004346303	RKK DITJEN POLPUM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
33	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101000	BPG 133 DITJEN POLPUM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
34	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101001	BPP 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
35	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101002	BPP 133 DIREKTORAT WASBANG	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
36	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101003	BPP 133 DIREKTORAT POLDAGRI	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
37	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101004	BPP 133 DIREKTORAT EKOSOSBUD	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
38	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101005	BPP 133 DIREKTORAT ORMAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
39	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650870272101006	BPP 133 DIREKTORAT WASNAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
40	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	9890240190801000	BPG 133 SETDA PROV DKI JAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
41	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	00000000967302571	RKK DITJEN BAK KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-1050/WPB.12/KP.04/2021/133	17/03/2021
42	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	8808000009	RKK DITJEN BINA ADWIL OPS	BNI	Rekening Induk	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
43	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861000	BPG 133 DITJEN BINA ADM. KEWILAYAHAN	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020

44	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861001	BPP 133 SEKRETARIAT DITJEN ADWIL	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
45	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861002	BPP 133 DIR. DEKONSENTRASI TP	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
46	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861003	BPP 133 DIREKTORAT WASKOBAN	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
47	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861004	BPP 133 DIR. POLPP DAN LINMAS	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
48	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861005	BPP 133 DIREKTORAT TOPOBAD	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
49	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861006	BPP 133 DIREKTORAT MPBK	BNI	51	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
50	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	9890240291341000	BPG 022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
51	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	9890240396671000	BPG 026 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
52	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890240490611000	BPG 030 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
53	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	8100710690841000	BPG 001 SEKDA PROVINSI ACEH 04	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
54	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	9890240790781000	BPG 123 SETDAPROVSU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
55	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	9890240891061000	BPG 010 SETDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
56	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	9890240994381000	BPG 008 SETDA PROV RIAU 04 DK	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
57	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	9890241090741000	BPG 012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
58	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890241190821000	BPG 014 SEKRETARIAT DAERAH PROV SUMSEL 2	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
59	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	9890241290741000	BPG 017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
60	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	9890241290981000	BPG 017 DPMPPTSP LAMPUNG PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
61	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890241390781000	BPG 042 SETDA PROV. KALBAR 139078	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
62	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241490721000	BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
63	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241491301000	BPG 043 DPMPPTSP PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
64	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890241590711000	BPG 045 SEKDA PROV KAL SEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
65	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	160552	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	9890241605521000	BPG 152 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
66	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890241691851000	BPG 046 SETDA PROV KALTIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
67	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241790881000	BPG 049 DINAS PENANAMAN MODAL PTSPD PROV SULUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
68	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241792231000	BPG 049 SEKDA PROV SULUT BIRO PEMERINTAHAN HUMAS	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
69	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890241890871000	BPG 051 SETDA PROV SULTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
70	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890241990801000	BPG 054 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
71	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090711000	BPG 060 SETDA PROV. SULTRA DK 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
72	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090951000	BPG 060 DPMPPTSP PROV SULTRA 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
73	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	219062	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	9890242190621000	BPG 061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU 219062	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
74	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	9890242290681000	BPG 037 SEKDA PROVINSI BALI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
75	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890242392361000	BPG 038 SETDA PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
76	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491361000	BPG 039 SEKDA PROV NTT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	4 Juni 2021
77	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491741000	BPG 039 DPMPPTSP PROV NTT 249174	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
78	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	9890242590841000	BPG 063 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. PAPUA	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
79	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	9890242690931000	BPG 016 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021

80	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	9890242890951000	BPG 062 DINAS PMPTSP PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
81	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	9890242891741000	BPG 062 SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUKU UTARA 04 DK	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
82	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	9890242993481000	BPG 020 SETDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
83	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890243091481000	BPG 015 SETDA PROV.BABEL-04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
84	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	9890243190611000	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
85	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890243291161000	BPG 009 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAUES04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
86	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	9890243391611000	BPG 065 SETDA PROV PAPUA BARAT	BNI	50	S-2115WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
87	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243401661000	BPG 178 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
88	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243490111000	BPG 178 DINAS PMPTSP SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
89	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	9890243560001000	BPG 185 DPUPRKP KAB MALINAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
90	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890243590021000	BPG 185 DPMDPTSP PROV KALTARA 359002	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
91	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244176971000	BPG 185 SEKDA KALTARA 04 417697	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
92	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244333161000	BPG 010 DPMDPTSP PROV SUMBAR	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
93	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	9890244333171000	BPG 008 DINAS PMPTSP PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
94	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244333181000	BPG 009 DPMDPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
95	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	9890244333411000	BPG 012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
96	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244333421000	BPG 014 DINAS PMPTSP SUMSEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
97	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433343	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890244333431000	BPG 015 DPMDPTSP BABEL	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
98	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	9890244333441000	BPG 016 DINAS PMPTSP PROV BENGKULU	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
99	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	9890244333451000	BPG 020 DINAS PMPTSP PROV BANTEN	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
100	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	9890244333471000	BPG 037 DINAS PMPTSP PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
101	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244333481000	BPG 042 DINAS PMPTSP PROV KALBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
102	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	9890244333491000	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
103	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244333501000	BPG 051 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROV SULTENG 433350	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
104	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244333511000	BPG 054 DPMDPTSP SULSEL	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
105	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244333521000	BPG 038 DPMDPT SATU PINTU PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
106	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	9890244333531000	BPG 061 DINAS PMPTSP PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
107	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	8100714841011000	BPG 001 DPM DAN PTSP PROV	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
108	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	8100714841021000	BPG 001 BAPPEDA PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021

109	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	8100714841031000	BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
110	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841051000	BPG 004 DPMPTSP SUMUT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
111	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841071000	BPG 123 INSPEKTORAT PROVINSI SUMUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
112	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	9890244841091000	BPG 008 BAPPEDA RIAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
113	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	9890244841101000	BPG 008 INSPEKTORAT PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
114	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841121000	BPG 009 BAPPEDA PROV KEPRI	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
115	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841131000	BPG 009 INSPEKTORAT PROV KEPRI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
116	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	9890244841151000	BPG 012 BAPPEDA PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
117	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	9890244841161000	BPG 012 INSPEKTORAT PROV JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
118	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841181000	BPG 010 BAPPEDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
119	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841191000	BPG 010 INSPEKTORAT PROV SUMBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
120	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841211000	BPG 014 BAPPEDA PROV SUMSEL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
121	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841221000	BPG 014 INSPEKTORAT SUMSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
122	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	9890244841241000	BPG 017 BAPPEDA PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
123	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	9890244841251000	BPG 017 INSPEKTORAT LAMPUNG	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
124	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	9890244841271000	BPG 016 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
125	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	9890244841281000	BPG 016 INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
126	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841311000	BPG 015 BAPPEDABABEL 484131	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
127	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841321000	BPG 015 INSPEKTORAT PROV. BABEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
128	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	9890244841341000	BPG 020 BAPPEDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
129	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	9890244841351000	BPG 001 INSPEKTORAT BANTEN	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
130	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	9890244841371000	BPG 022 DINAS PMPTSP JABAR	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
131	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	9890244841381000	BPG 022 BAPPEDA PROV JABAR	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
132	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	9890244841391000	BPG 022 INSPEKTORAT DAERAH PROV JABAR	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
133	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841451000	BPG 026 DINAS PMPTSP PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
134	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841461000	BPG 026 BAPPEDA PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
135	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841471000	BPG 026 INSPEKTORAT PROVINSI JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
136	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	9890244841491000	BPG 030 DPMPTSP PROVINSI DI YOGYAKARTA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
137	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484150	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890244841501000	BPG 030 BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
138	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890244841511000	BPG 030 INSPEKTORAT PROV DIY	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
139	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841531000	BPG 135 DINAS PMPTSP JATIM	BNI	50	S-2115//WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
140	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841541000	BPG 135 BAPPEDA PROV JATIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
141	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	9890244841571000	BPG 037 BAPPEDA PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
142	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	9890244841581000	BPG 037 INSPEKTORAT BALI	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
143	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244841601000	BPG 038 BAPPEDA PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
144	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244841611000	BPG 038 INSPEKTORAT PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
145	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890244841631000	BPG 039 DEKON BAPPSELITBANGDA	BNI	50	S-3391/WPB.12/KP.04/2021	24 Agustus 2021

146	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890244841641000	BPG 039 INSPEKTORAT PROV NTT	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
147	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841661000	BPG 042 BAPPEDA PROVINSI KALBAR 484166	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
148	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841671000	BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
149	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841691000	BPG 043 BAPPEDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
150	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841701000	BPG 043 INSPEKTORAT PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
151	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841721000	BPG 045 PMPTSP PROV KALSEL	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
152	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841731000	BPG 045 BAPPEDA PROV KALSEL 484173	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
153	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841741000	BPG 015 INSPEKTORAT KALSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
154	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841761000	BPG 046 DINAS PMPTSP PROV KALTIM	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
155	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841771000	BPG 046 BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
156	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841781000	BPG 046 INSPEKTORAT KALTIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
157	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841801000	BPG 185 BAPPEDA PROV KALUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
158	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841811000	BPG 185 INSPEKTORAT PROV KALIMANTAN UTARA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31/03/2021
159	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841831000	BPG 049 BAPPEDA PROV SULUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
160	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841841000	BPG 049 INSPEKTORAT PROV SULUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
161	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	9890244841871000	BPG 050 BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	BSI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
162	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	9890244841881000	BPG 050 INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
163	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841901000	BPG 178 BAPPEDA PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
164	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841911000	BPG 178 INSPEKTORAT PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
165	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841931000	BPG 054 BAPPEDA SULSEL	BSI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
166	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841941000	BPG 054 INSPEKTORAT PROV SULSUL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
167	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841961000	BPG 051 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
168	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841971000	BPG 051 ITDA PROV SULTENG	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
169	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244841991000	BPG 060 BAPPEDA PROV SULTRA	BRI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
170	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244842001000	BPG 060 INSPEKTORAT DAERAH PROV SULTRA (04)	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
171	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	9890244842021000	BPG 061 BAPPEDA PROVINSI MALUKU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
172	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	9890244842031000	BPG 061 INSPEKTORAT PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
173	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842051000	BPG 062 BAPPEDA PROV MALUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
174	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842061000	BPG 062 INSPEKTORAT PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31/03/2021
175	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	9890244842081000	BPG 063 BAPPEDA PROV PAPUA	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	18/08/2022
176	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	9890244842091000	BPG 063 INSPEKTORAT PROV PAPUA	BNI	50	S-1247/KPN.1204/2022	08/04/2022
177	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842111000	BPG 065 DPMTSP PABAR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
178	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842121000	BPG 065 BAPPEDA PROV PABAR	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	18/08/2022
179	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842131000	BPG 065 INSPEKTORAT PABAR	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19/07/2021
180	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	9890242402701000	BPG 172 BPPD KAB BELU	BNI	50	S-1469/KPN.1204/2024	09/08/2024
181	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	966535960	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
182	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	032901004381303	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1344/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
183	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	7187439398	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022

184	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531000	BPG 133 Ditjen Bina Pemdes Kemendagri	BSI	50	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
185	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531001	BPP 133 Direktorat PAPP	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
186	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531002	BPP 133 Direktorat FPKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
187	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531003	BPP 133 Direktorat FKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
188	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531004	BPP 133 Direktorat KKD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
189	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531005	BPP 133 Direktorat EPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
190	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531006	BPP 133 Sekretariat	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
191	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	9890280284491000	BPG 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	50	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
192	Yogyakarta	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	1889064884	BNP 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	10	000078/030	23/09/2024
193	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	651560288301000	BPG 032 BBPMD MALANG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
194	Malang	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	5101004792303	BNP 032 BBPMD MALANG	BRI	10	S-431/KPN.1604/2025	08/04/2025
195	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	651566136291000	BPG 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
196	Bandar Lampung	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	1140028362815	BNP 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	MANDIRI	10	S-758/KPN.0801/2024	16/05/2024
197	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	967410258	RKK DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1559/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
198	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291000	BPG: 133 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI	BNI	50	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
199	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291001	BPP: 133 SEKRETARIAT	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
200	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291002	BPP: 133 DIREKTORAT PEIPD	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
201	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291003	BPP: 133 Direktorat SUPD I	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
202	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291004	BPP: 133 Direktorat SUPD II	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
203	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291005	BPP 133: Direktorat SUPD III	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
204	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291006	BPP: 133 Direktorat SUPD IV	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
205	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240002324250	RPL 140 PDHL DITJEN BANGDA untuk 2TK92FA	MANDIRI	30	000105/140	16/03/2021
206	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240011070373	RPL 133 PDHL DITBINABANGDA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005344/WPB.12/KP.04/2021	16/12/2021
207	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240012217528	RPL 140 PDHL BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00035608/2023	17/05/2023
208	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1380077714777	RPL 140 PDH BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00040708/2023	30/10/2023
209	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	7187436437	RPL 133 PDH BAPPEDA ACEH UTK 2C7EJQHA	BSI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
210	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1350018299303	RPL 133 PDH BAPPEDA JTG UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
211	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1810013300133	RPL 133 PDH BAPPEDA NTT UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
212	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1610009727434	RPL 133 PDH BAPPEDA NTB UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
213	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1520031369222	RPL 133 PDH BAPPEDA SULSEL UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
214	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1860002829840	RPL 133 PDH BAPPEDA MALUKU UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
215	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1540017450739	RPL 133 PDH BAPPEDA PAPUA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
216	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1600004285322	RPL 133 PDH BAPPEDA PABAR UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
217	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	32901004310302	RKK DITJEN OTDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1234/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
218	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921000	BPG: 133 DITJEN OTDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
219	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921001	BPP: 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
220	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921002	BPP: 133 DIR.PENATAAN DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
221	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650406218921003	BPP 133 DIR.KEPALA DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
222	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921004	BPP: 133 DIR.KELEMBAGAAN	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020

223	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921005	BPP : 133 DIR.PRODUK HUKUM	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
224	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921006	BPP : 133 DIR.EVALUASI KINERJA	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
225	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1448029944	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2FWTYN9A	BNI	30	S-002342/KPN.1204/2022	08 Agustus 2023
226	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	917164447	RKK DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1181/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
227	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	BPG 133 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	BNI	50	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
228	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821001	BPP 133 SEKRETARIAT PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
229	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821002	BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DAERAH	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
230	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821003	BPP 133 PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	BNI	51	S-1316/KON.1206/2023	12 Juni 2023
231	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821004	BPP 133 INFORMASI	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
232	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821005	BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
233	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821006	BPP 133 BINA APARATUR PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
234	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821008	BPP 133 DUKCAPIL PHLN	BNI	51	S-2841/KPN.1204/2023	04 Desember 2023
235	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821009	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 2	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
236	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821010	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 3	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
237	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821011	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 4	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	26 Juni 2024
238	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	32901004307309	RKK DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1251/WPB.12/KP.04/2020	10-03-2020
239	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661000	BPG 133 DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
240	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661001	BPP 133 SEKRETARIAT KEUDA	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
241	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661002	BPP 133 DIREKTORAT PAD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
242	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661003	BPP 133 DIREKTORAT PPKD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
243	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661004	BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
244	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661005	BPP 133 DIREKTORAT FDPPD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
245	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661006	BPP 133 DIT BUMD BLUD BMD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
246	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	32901004321303	RKK BALITBANG KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1305/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
247	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221000	BPG 133 BALITBANG KEMENDAGRI	BRI	50	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
248	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221001	BPP 133 PUSLITBANG OTDAPOLPUM	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
249	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221002	BPP 133 PUSLITBANG ADWIL	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
250	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221003	BPP 133 PUSLITBANG KEUDA	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
251	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221004	BPP 133 PUSLITBANG INOVASI	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
252	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	042601001412305	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1114/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
253	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	913758491	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1116/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
254	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311000	BPG 133 BADAN PENGEMB. SDM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
255	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311001	BPP 133 Sekretariat	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
256	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311002	BPP 133 Pusat I	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
257	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311003	BPP 133 Pusat II	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
258	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311004	BPP 133 Pusat III	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
259	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311005	BPP 133 Pusat IV	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
260	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1240009999484	BNP 133 BPSDM	MANDIRI	10	S-7197/WPB.12/KP.0404/2018	18/12/2018
261	Yogyakarta	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	650060271141000	BPG 030 PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
262	Yogyakarta	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	1370007202589	BNP 030 PUSDIKLAT REGIONAL YOGYAKARTA	MANDIRI	10	S-1156/WPB.15/KP/01/2015	26/02/2015

263	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7145711667	BPN 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BSI	40	001960/054	20/10/2020
264	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	989007021771000	BPG 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BNI	50	001117/054	04/03/2020
265	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	1320010408616	BPN 022 PUSDIKLAT REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	10	S-414/WPB.13/KP.022/2015	02/03/2015
266	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161000	BPG 022 PPSDM REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	50	S-1119/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
267	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161001	BPP 022 PPSDM BANDUNG TATA USAHA	MANDIRI	51	S-312/KPN.1204/2025	30/01/2025
268	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161002	BPP 022 PPSDM BANDUNG KEGIATAN	MANDIRI	51	S-312/KPN.1204/2025	30/01/2025
269	Bukittinggi	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	650065061371000	BPG 011 PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
270	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	650065061381000	BPG023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	50	S-2782/WPB.12/KP.04/2021	13/07/2021
271	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	038701002020309	BPN 023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	10	000415	20/09/2024

## II. DATA REKENING YANG AKAN DITUTUP

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	00000000188380452	BPG 022 SEKDA PROV JABAR	BNI	50	S-1711/WPB.13/KP.022/2015	14 Juli 2020
2	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	11204619	BPG 135 SETDA JATIM 04	BNI	20	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
3	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	00000000290873641	BPG 020 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	BNI	20	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
4	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	1049158897	BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI	20	S-701/WPB.01/KP.01/2020	12 Mei 2020

## III. DATA REKENING YANG SUDAH DITUTUP

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	249395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	1401050001542	BPG 039 BPMPD KAB ROTE NDAO	BRI	50		
2	Malang	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	005101003361303	BPN 032 BBPD MALANG	BRI	10	Surat Penutupan : 900/0212/BBPD	17 Maret 2025
3	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881149814	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2BBWST8A	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
4	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881154405	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2RETP9NA	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
5	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881136768	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2BZSGF5A	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
6	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881151696	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2ZS74K4A	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
7	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881153309	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 21Q5D7VA	BNI	30	S-1516/KPN.1204/2024	16/8/2024
8	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1895925236	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2WS1S93A	BNI	30	S-1737/KPN.1204/2024	24/9/2024
9	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1895928260	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2B4DHS9A	BNI	30	S-1737/KPN.1204/2024	24/9/2024
10	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1902295243	RPL133 PDHL DUKCAPIL UTK 2PTESHUA	BNI	30	S-2061/KPN.1204/2024	11/11/2024
11	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1902295094	RPL133 PDHL DUKCAPIL UTK 2ZEWFBWA	BNI	30	S-2061/KPN.1204/2024	11/11/2024
12	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821007	BPP 133 SEKRETARIAT 2	BNI	51	S-159/KPN.1204/2023	17 Januari 2023
13	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825299039	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 236HGSXA	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
14	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825300272	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2JFEPG9A	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
15	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825303579	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2YQ7F4XA	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
16	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825304801	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2RRL6N4A	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
17		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	695698626	BPG 037 DINAS PMPT SATU PINTU PROVINSI BALI	BNI	20	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
18		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	418159	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO	025201001095304	BPG 056 BBPD KABUPATEN JENEPONTO	BRI	50		

IV. DATA REKENING YANG MASIH DITELUSURI

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank		No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	2500481000	BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	MANDIRI	20	WPB.12/KP00035608/2023	17 Mei 2023
2	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	202301000043307	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BNI	20	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
3		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419638	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE	0000008888676762	BPG 060 BPBD KAB KONAWE	BNI	50		
4		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209093	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	00101055001318	BPG 060 SAT.POL.PP PROV. SULTRA	BPD SULTRA	50		
5		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199389	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	00000002013072013	BPG 054 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SULSEL	BNI	50		
6	Tobelo	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419064	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	522301001363309	BPG 112 BP PERBATASAN MOROTAI	BRI	50	S-276/WPB.30/KP.0230/2017	10/04/2017
7	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	0001701300004816	BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	BTN	50	S-1508/KPN.1204/2023	11 Juli 2023
8	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0000000950679851	BPG 009 DPMPSTP PROV KEPRI	BNI	20	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
9	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	4000106002128	BPG 068 BPMK KAB MERAUKE		50		

V. DATA REKENING YANG SUDAH DITUTUP NAMUN MASIH TERDAPAT DI SPRINT

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank		No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	024301000879308	BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021 Surat Penutupan Rekening: B.1379/KC-X/OPS/05/2021	17 Maret 2021 Tanggal Surat Penutupan: 05/05/2021
2	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	1500013456239	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS Gorontalo	MANDIRI	20	S-1100/WPB.12/KP.04/2021 Surat Penutupan Rekening: 560/DPMESDMTRANS/229/1/2019	17 Maret 2021 Tanggal Surat Penutupan: 29/01/2019
3	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	0000000810101009	BPG 001 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH (04)	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021 Surat Penutupan Rekening: KFBDA/0023	17 Maret 2021 Tanggal Surat Penutupan: 04/03/2024
4	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	650363525931000	BPG 133 IPDN KAMPUS JAKARTA	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020 Surat Penutupan Rekening: S-839/KPN.1204/2024	18/03/2020 Tanggal Surat Penutupan: 13/05/2024



# LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN



# **NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)**

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

*Tgl. Cetak 25/07/2025*  
*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_kl\_poc*

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	109,599,303	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,726,436,859	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	62,230,201,976	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	299,007,100	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	94,651,450	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,640,675,594	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	300,680,096	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	11,043,686,930
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,503,401
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,616,888,027	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	625,989,968	0
0.0	117114	Suku Cadang	83,808,068	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21,391,184,913	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	33,349,858,276	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28,860,434,489	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71,066,062,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	139,951,231,767	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2,521,084,896	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	36,251,577,100	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,152,137,472	0
0.0	131111	Tanah	13,251,627,720,522	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,156,760,195,772	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,922,592,918,649	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	79,358,601,816	0
0.0	134112	Irigasi	48,122,758,537	0
0.0	134113	Jaringan	172,312,226,627	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	30,462,708,978	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	64,552,872,794	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	25,366,869,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,460,735,603,007
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	565,839,009,912
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	58,539,429,759
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	31,555,216,171
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	71,913,355,442
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22,849,730,650
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17,950,315,934	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	17,850,590,368

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 25/07/2025

lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		
0.0	162151	Software	756,371,780,413	0
0.0	162161	Lisensi	69,533,433,080	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,333,403,750	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	384,325,357,961	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	120,974,236,236	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	61,889,828,264	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	116,962,354,763
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	692,217,866,817
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	8,209,555,741
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	58,337,879,914
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	20,135,070,660
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	16,077,414,847
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	365,603,781,537
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,573,649,369
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	157,733,613,872
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	112,599,303
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	7,719,409
0.0	391111	Ekuitas	0	16,905,781,871,164
<b>JUMLAH</b>			<b>22,584,081,503,036</b>	<b>22,584,081,503,036</b>



# NERACA PERCOBAAN AKRUAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:18 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	9,449,258,785	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	4,142,864,699	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	19,635,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,444,442,850	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	62,230,201,976	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	2,556,839,500	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	91,951,450	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,516,575,594	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,621,139	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	11,001,494,430
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,802,866,177	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	675,086,996	0
0.0	117114	Suku Cadang	176,107,627	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	21,391,184,913	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	31,984,858,276	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	28,860,434,489	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71,066,062,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	134,138,572,767	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	112,697,128,320	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat –	36,251,577,100	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,332,404,193	0
0.0	131111	Tanah	13,251,627,720,522	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,158,347,882,906	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,924,241,004,290	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	79,358,601,816	0
0.0	134112	Irigasi	48,122,758,537	0
0.0	134113	Jaringan	172,300,113,789	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	30,462,708,978	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	64,833,548,794	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	25,366,869,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,590,209,290,660
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	605,543,272,533
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	60,883,054,657
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	32,117,814,241
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	74,315,332,711
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22,878,270,954
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	18,240,996,030	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	17,852,043,769

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:18 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	726,520,890,946	0
0.0	162161	Lisensi	69,342,114,830	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,283,518,750	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	120,573,933,849	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	90,912,883,330	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	116,830,667,919
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	679,182,202,176
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	11,562,344,663
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	87,389,232,480
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	25,510,021,208
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	71,053,812,802
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	543,277,500
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	2,182,355,130
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	72,981,429,276
0.0	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	0	2,556,839,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	13,592,123,484
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	262,087,720
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,242,654,345,362
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	557,149,961,952	0
0.0	313211	Transfer Keluar	120,026,200,234	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	120,665,979,397
0.0	391111	Ekuitas	0	16,905,781,871,164
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	133,451,263
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	34,271,250
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	21,133,821,296
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,441,217,250
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	650,322,034
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,206,092
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,885,559,494
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	52,543,205
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	24,475,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	134,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	14,543,338,872
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	268,650,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	8,200,312,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	807,975,000

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:18 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	649,365,817,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	392,685,455
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	67,271,374
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	15,055,425,803
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	150,428,279
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,014,605
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	170,119,072,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,289,363	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10,081,608,973	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,678,078,486	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,814,298,950	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,031,352,671	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,850,267,539	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	7,372,935,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	14,016,505,150	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	38,650,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	141,405,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4,241,789,654	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,978,242,800	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1,419,975,800	0
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	46,400,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,568,453,404	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,299,330,700	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	40,275	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	118,367,066	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	30,915,058	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	40,625,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	330,970,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	113,391,615	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	261,608,400	0
3.0	511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	875,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	2,975,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	3,632,249,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	26,997,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	213,442,455,680	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,717,281,544	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	93,861,667,486	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	18,381,017,068	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:18 AM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	569,899,203	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	125,761,195	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,646,059,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	22,477,057,935	0
3.0	521211	Beban Bahan	28,213,703,417	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,002,850,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	139,628,343,593	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	514,934,581	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	17,760,817,518	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	164,169,126	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,051,222,219	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	539,742,995	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	7,149,181,858	0
3.0	522141	Beban Sewa	86,887,687,015	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,867,346,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	144,081,875,629	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28,259,763,114	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,318,056,282	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,181,841,680	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,039,605,896	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	693,942,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	67,578,152,813	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	252,477,638	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,232,900,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,634,594,150	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,449,629,301	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	764,860,602	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	268,353,348	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	250,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	137,944,757,763	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39,706,004,158	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,343,624,898	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	562,598,070	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,401,977,269	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	28,540,304	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	17,458,572,639	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	3,519,926,422	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	269,465,188	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:18 AM

Halaman : 5

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,079,234,535	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,278,820,098	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	143,432,990	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	1,410,000,000	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	5,812,659,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	106,802,376,576	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	3,052,500	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,042,345,098	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	42,192,500
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	0	50,000
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	284,706,728	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	4,418,749	0
JUMLAH			<b>24,488,177,580,108</b>	<b>24,488,177,580,108</b>

Keterangan :

FINAL



# NERACA PERCOBAAN KAS

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:19 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,242,654,345,362
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	557,149,961,952	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	650,322,034
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,206,092
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,314,610,125
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	51,802,470
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	24,475,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	135,250,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	8,902,439,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	273,650,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	8,180,677,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	807,975,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	497,391,453,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	10,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	606,431,857
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	114,596,326
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	36,232,740,936
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,209,402,924
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,041,588
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	151,673,643,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	18,998,500
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	19,540
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,069,519	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,230,620
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8,986,267,887	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,388,925,199	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	292,152
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	9,315,050
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,207,594,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	11,943,329
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	13,413,968,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,789,022,325	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,568,312,950	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	434,520
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	15,609,057,000	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	32,575,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	119,615,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:19 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	32,817,846
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	3,815,695,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,230,205,900	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1,216,002,200	0
3.0	511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	40,200,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,390,363,404	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,040,424,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	35,668	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	105,226,846	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	27,319,280	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	39,500,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	293,762,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	100,500,855	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	271,366,000	0
3.0	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	750,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	2,550,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	3,661,782,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	26,997,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	1,957,975
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	231,141,279,135	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,927,456,024	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	79,873,406,111	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	18,180,797,068	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	549,918,203	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	124,262,720	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,579,797,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,415,641,894	0
3.0	521211	Belanja Bahan	26,734,505,497	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	6,615,500
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,785,635,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	139,531,793,104	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,365,000
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	452,206,781	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,461,541,271	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	396,718,884	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	18,607,685,959	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	163,834,809	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,052,559,097	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 11:19 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	527,340,915	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	5,959,190,258	0
3.0	522141	Belanja Sewa	81,442,254,467	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	17,090,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,675,936,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	80,195,750,983	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26,567,489,607	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,208,313,060	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,318,056,282	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	53,200,636
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,181,641,811	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	626,078,094	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2,036,443,396	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	693,942,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,060,577,130	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,461,293,570
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	239,036,599	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,031,710,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,320,324,150	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	2,089,112
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,297,515,541	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	764,860,602	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	268,353,348	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	156,847,800,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,768,403,920	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	135,821,809	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,611,516,500	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	463,883,150	0
JUMLAH			<b>1,801,424,970,664</b>	<b>1,801,424,970,664</b>

Keterangan :

FINAL



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	263,403,712,000	259,957,223,000	151,673,643,000	18,998,500	151,654,644,500	58.35	108,302,578,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,736,000	4,560,000	2,069,519	19,540	2,049,979	45.38	2,510,021
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,987,736,000	15,895,639,000	8,986,267,887	2,230,620	8,984,037,267	56.53	6,911,601,733
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,520,435,000	4,507,265,000	2,388,925,199	292,152	2,388,633,047	53	2,118,631,953
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,330,337,000	9,126,755,000	5,207,594,000	9,315,050	5,198,278,950	57.06	3,928,476,050
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	23,120,714,000	22,437,822,000	13,413,968,000	11,943,329	13,402,024,671	59.78	9,035,797,329
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,120,121,000	2,952,523,000	2,789,022,325	0	2,789,022,325	94.46	163,500,675
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,719,390,000	11,642,341,000	6,568,312,950	434,520	6,567,878,430	56.42	5,074,462,570
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,396,924,000	37,525,465,000	15,609,057,000	0	15,609,057,000	41.6	21,916,408,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,891,000	57,891,000	32,575,000	0	32,575,000	56.27	25,316,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	205,800,000	205,800,000	119,615,000	0	119,615,000	58.12	86,185,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	18,078,000	0	0	0	0	18,078,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,923,333,000	6,906,548,000	3,815,695,000	32,817,846	3,782,877,154	55.25	3,123,670,846
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9,370,468,000	9,370,468,000	4,230,205,900	0	4,230,205,900	45.14	5,140,262,100
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,019,696,000	2,019,696,000	1,216,002,200	0	1,216,002,200	60.21	803,693,800
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	75,600,000	75,600,000	40,200,000	0	40,200,000	53.17	35,400,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>385,256,893,000</b>	<b>382,703,674,000</b>	<b>216,093,152,980</b>	<b>76,051,557</b>	<b>216,017,101,423</b>	<b>56.46</b>	<b>166,686,572,577</b>
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,125,620,000	2,493,260,000	1,390,363,404	0	1,390,363,404	55.76	1,102,896,596
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113</b>	<b>2,125,620,000</b>	<b>2,493,260,000</b>	<b>1,390,363,404</b>	<b>0</b>	<b>1,390,363,404</b>	<b>55.76</b>	<b>1,102,896,596</b>
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,391,761,000	4,459,572,000	2,040,424,500	0	2,040,424,500	45.75	2,419,147,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,062,000	1,088,000	35,668	0	35,668	3.28	1,052,332
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	126,716,000	240,492,000	105,226,846	0	105,226,846	43.75	135,265,154
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	33,583,000	75,161,000	27,319,280	0	27,319,280	36.35	47,841,720
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	110,750,000	39,500,000	0	39,500,000	35.67	71,250,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	339,672,000	717,530,000	293,762,000	0	293,762,000	40.94	423,768,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	108,757,000	235,565,000	100,500,855	0	100,500,855	42.66	135,064,145
511628	Belanja Uang Makan PPPK	526,309,000	969,056,000	271,366,000	0	271,366,000	28	697,690,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	1,750,000	1,750,000	750,000	0	750,000	42.86	1,000,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,950,000	5,950,000	2,550,000	0	2,550,000	42.86	3,400,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116</b>	<b>3,596,813,000</b>	<b>6,816,917,000</b>	<b>2,881,435,149</b>	<b>0</b>	<b>2,881,435,149</b>	<b>42.27</b>	<b>3,935,481,851</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	18,181,784,000	18,033,803,000	3,661,782,000	0	3,661,782,000	20.31	14,372,021,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	58,100,000	256,030,000	26,997,000	0	26,997,000	10.54	229,033,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>18,239,884,000</b>	<b>18,289,833,000</b>	<b>3,688,779,000</b>	<b>0</b>	<b>3,688,779,000</b>	<b>20.17</b>	<b>14,601,054,000</b>
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	432,808,467,000	429,101,697,000	231,141,279,135	1,957,975	231,139,321,160	53.87	197,962,375,840
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,937,160,000	6,927,096,000	2,927,456,024	0	2,927,456,024	42.26	3,999,639,976
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124</b>	<b>436,745,627,000</b>	<b>436,028,793,000</b>	<b>234,068,735,159</b>	<b>1,957,975</b>	<b>234,066,777,184</b>	<b>53.68</b>	<b>201,962,015,816</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>845,964,837,000</b>	<b>846,332,477,000</b>	<b>458,122,465,692</b>	<b>78,009,532</b>	<b>458,044,456,160</b>	<b>54.13</b>	<b>388,288,020,840</b>
52	<b>BELANJA BARANG</b>							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	173,854,890,000	184,841,432,000	79,873,406,111	0	79,873,406,111	43.21	104,968,025,889
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	47,222,316,000	42,663,610,000	18,180,797,068	0	18,180,797,068	42.61	24,482,812,932
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,650,596,000	2,162,300,000	549,918,203	0	549,918,203	25.43	1,612,381,797
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	975,137,000	731,886,000	124,262,720	0	124,262,720	16.98	607,623,280
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17,509,361,000	17,326,256,000	3,579,797,000	0	3,579,797,000	20.66	13,746,459,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	61,770,257,000	60,092,111,000	21,415,641,894	0	21,415,641,894	35.64	38,676,469,106
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>303,982,557,000</b>	<b>307,817,595,000</b>	<b>123,723,822,996</b>	<b>0</b>	<b>123,723,822,996</b>	<b>40.19</b>	<b>184,093,772,004</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	143,332,566,000	135,019,654,000	26,734,505,497	6,615,500	26,727,889,997	19.8	108,291,764,003
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,281,658,000	57,400,701,000	2,785,635,000	0	2,785,635,000	4.85	54,615,066,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	162,806,570,000	161,045,597,000	139,531,793,104	2,365,000	139,529,428,104	86.64	21,516,168,896
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	474,020,000	781,304,000	452,206,781	0	452,206,781	57.88	329,097,219
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,000,000	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>326,928,814,000</b>	<b>354,302,256,000</b>	<b>169,504,140,382</b>	<b>8,980,500</b>	<b>169,495,159,882</b>	<b>47.84</b>	<b>184,807,096,118</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,279,496,000	19,783,084,000	6,461,541,271	0	6,461,541,271	32.66	13,321,542,729
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	600,260,000	399,542,000	396,718,884	0	396,718,884	99.29	2,823,116
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>33,881,256,000</b>	<b>20,183,626,000</b>	<b>6,858,260,155</b>	<b>0</b>	<b>6,858,260,155</b>	<b>33.98</b>	<b>13,325,365,845</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	43,965,213,000	35,416,876,000	18,607,685,959	0	18,607,685,959	52.54	16,809,190,041
522112	Belanja Langganan Telepon	1,027,486,000	1,023,320,000	163,834,809	0	163,834,809	16.01	859,485,191

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522113	Belanja Langganan Air	5,865,038,000	5,848,660,000	2,052,559,097	0	2,052,559,097	35.09	3,796,100,903
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,177,434,000	1,063,569,000	527,340,915	0	527,340,915	49.58	536,228,085
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,750,000	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	313,499,227,000	200,211,009,000	5,959,190,258	0	5,959,190,258	2.98	194,251,818,742
522141	Belanja Sewa	125,155,592,000	123,651,143,000	81,442,254,467	0	81,442,254,467	65.86	42,208,888,533
522151	Belanja Jasa Profesi	60,521,460,000	48,001,024,000	4,675,936,000	17,090,000	4,658,846,000	9.74	43,342,178,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	675,724,898,000	861,056,127,000	80,195,750,983	0	80,195,750,983	9.31	780,860,376,017
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>1,226,939,098,000</b>	<b>1,276,274,478,000</b>	<b>193,624,552,488</b>	<b>17,090,000</b>	<b>193,607,462,488</b>	<b>15.17</b>	<b>1,082,667,015,512</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79,618,201,000	79,390,041,000	26,567,489,607	0	26,567,489,607	33.46	52,822,551,393
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,474,672,000	2,299,524,000	1,208,313,060	0	1,208,313,060	52.55	1,091,210,940
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,479,676,000	4,566,735,000	2,318,056,282	0	2,318,056,282	50.76	2,248,678,718
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,416,192,000	37,238,655,000	13,181,641,811	53,200,636	13,128,441,175	35.4	24,110,213,825
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,877,745,000	918,743,000	626,078,094	0	626,078,094	68.15	292,664,906
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,450,760,000	4,447,069,000	2,036,443,396	0	2,036,443,396	45.79	2,410,625,604
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,166,696,000	2,177,110,000	693,942,000	0	693,942,000	31.87	1,483,168,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>136,497,942,000</b>	<b>131,051,877,000</b>	<b>46,631,964,250</b>	<b>53,200,636</b>	<b>46,578,763,614</b>	<b>35.58</b>	<b>84,473,113,386</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	359,732,885,000	356,314,894,000	67,060,577,130	1,461,293,570	65,599,283,560	18.82	290,715,610,440
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4,671,477,000	4,881,477,000	239,036,599	0	239,036,599	4.9	4,642,440,401
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,630,530,000	11,973,442,000	2,031,710,000	0	2,031,710,000	16.97	9,941,732,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	185,305,429,000	158,944,659,000	2,320,324,150	0	2,320,324,150	1.46	156,624,334,850
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	83,731,692,000	77,604,088,000	4,297,515,541	2,089,112	4,295,426,429	5.54	73,308,661,571
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>646,072,013,000</b>	<b>609,718,560,000</b>	<b>75,949,163,420</b>	<b>1,463,382,682</b>	<b>74,485,780,738</b>	<b>12.46</b>	<b>535,232,779,262</b>
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	28,152,388,000	21,174,630,000	764,860,602	0	764,860,602	3.61	20,409,769,398
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	11,218,984,000	11,518,069,000	268,353,348	0	268,353,348	2.33	11,249,715,652
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242</b>	<b>39,371,372,000</b>	<b>32,692,699,000</b>	<b>1,033,213,950</b>	<b>0</b>	<b>1,033,213,950</b>	<b>3.16</b>	<b>31,659,485,050</b>
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000,000</b>
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas							
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000,000</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	291,295,284,000	389,041,686,000	156,847,800,000	0	156,847,800,000	40.32	232,193,886,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	291,295,284,000	389,041,686,000	156,847,800,000	0	156,847,800,000	40.32	232,193,886,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,006,468,336,000	3,122,582,777,000	774,172,917,641	1,542,653,818	772,630,263,823	24.79	2,349,952,513,177
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	877,765,549,000	773,072,949,000	9,768,403,920	0	9,768,403,920	1.26	763,304,545,080
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	3,700,000,000	2,602,120,000	135,821,809	0	135,821,809	5.22	2,466,298,191
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	881,465,549,000	775,675,069,000	9,904,225,729	0	9,904,225,729	1.28	765,770,843,271
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	0	0	0	0		0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10,022,340,000	15,914,868,000	1,611,516,500	0	1,611,516,500	10.13	14,303,351,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	11,022,340,000	15,914,868,000	1,611,516,500	0	1,611,516,500	10.13	14,303,351,500
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	400,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	400,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	46,152,456,000	30,698,427,000	463,883,150	0	463,883,150	1.51	30,234,543,850
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	855,000,000	1,074,900,000	0	0	0	0	1,074,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	47,007,456,000	31,773,327,000	463,883,150	0	463,883,150	1.46	31,309,443,850
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	939,895,345,000	823,413,264,000	11,979,625,379	0	11,979,625,379	1.45	811,433,638,621
	JUMLAH BELANJA	4,792,328,518,000	4,792,328,518,000	1,244,275,008,712	1,620,663,350	1,242,654,345,362	25.96	3,549,674,172,638



# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATKER**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
010010100KP 403200	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA SEKRETARIAT JENDERAL	453,146,201,000	453,146,201,000	180,305,905,591	72,398,467	180,233,507,124	39.77	272,912,693,876
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	453,146,201,000	453,146,201,000	180,305,905,591	72,398,467	180,233,507,124	39.79	272,912,693,876
010010200KP 448302	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	438,497,020,000	438,497,020,000	194,593,229,264	15,738,704	194,577,490,560	44.37	243,919,529,440
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	438,497,020,000	438,497,020,000	194,593,229,264	15,738,704	194,577,490,560	44.38	243,919,529,440
010010800KD 677045	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	25,358,807,000	25,358,807,000	8,891,875,440	0	8,891,875,440	35.06	16,466,931,560
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	25,358,807,000	25,358,807,000	8,891,875,440	0	8,891,875,440	35.06	16,466,931,560
010011300KD 683070	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	29,999,184,000	29,999,184,000	10,115,349,560	0	10,115,349,560	33.72	19,883,834,440
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	29,999,184,000	29,999,184,000	10,115,349,560	0	10,115,349,560	33.72	19,883,834,440
010011700KD 677010	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28,332,237,000	28,332,237,000	8,845,307,892	298	8,845,307,594	31.22	19,486,929,406
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	28,332,237,000	28,332,237,000	8,845,307,892	298	8,845,307,594	31.22	19,486,929,406
010011900KD 677024	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	31,950,262,000	31,950,262,000	11,457,920,268	1,080,095	11,456,840,173	35.86	20,493,421,827
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	31,950,262,000	31,950,262,000	11,457,920,268	1,080,095	11,456,840,173	35.86	20,493,421,827
010012300KD 683084	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	30,461,186,000	30,461,186,000	10,590,186,110	1,111,890	10,589,074,220	34.76	19,872,111,780
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	30,461,186,000	30,461,186,000	10,590,186,110	1,111,890	10,589,074,220	34.77	19,872,111,780
010012500KD 683091	BA(010) ES1(01) PAPUA IPDN KAMPUS PAPUA	33,656,912,000	33,656,912,000	11,200,679,890	0	11,200,679,890	33.28	22,456,232,110
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) PAPUA	33,656,912,000	33,656,912,000	11,200,679,890	0	11,200,679,890	33.28	22,456,232,110
null 483005	Kode UAPPAW Tidak Ada DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	89,271,812,000	89,271,812,000	28,903,411,004	4,199,762	28,899,211,242	32.37	60,372,600,758
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	89,271,812,000	89,271,812,000	28,903,411,004	4,199,762	28,899,211,242	32.38	60,372,600,758
	JUMLAH BELANJA 01	1,160,673,621,000	1,160,673,621,000	464,903,865,019	94,529,216	464,809,335,803	40.05	695864285197
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
010020100KP 027203	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	84,400,737,000	84,400,737,000	35,897,148,317	4,885,580	35,892,262,737	42.53	48,508,474,263
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	84,400,737,000	84,400,737,000	35,897,148,317	4,885,580	35,892,262,737	42.53	48,508,474,263
	JUMLAH BELANJA 02	84,400,737,000	84,400,737,000	35,897,148,317	4,885,580	35,892,262,737	42.53	48508474263

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA							
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	234,506,301,000	234,506,301,000	175,781,868,855	370,366	175,781,498,489	74.96	58,724,802,511
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	234,506,301,000	234,506,301,000	175,781,868,855	370,366	175,781,498,489	74.96	58,724,802,511
	JUMLAH BELANJA 03	234,506,301,000	234,506,301,000	175,781,868,855	370,366	175,781,498,489	74.96	58724802511
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1,627,421,000	1,627,421,000	85,000,000	0	85,000,000	5.22	1,542,421,000
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,627,421,000	1,627,421,000	85,000,000	0	85,000,000	5.22	1,542,421,000
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA							
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	120,972,179,000	121,658,679,000	39,661,042,646	38,026,473	39,623,016,173	32.57	82,035,662,827
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	120,972,179,000	121,658,679,000	39,661,042,646	38,026,473	39,623,016,173	32.6	82,035,662,827
010040400	BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA							
049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1,670,624,000	1,670,624,000	0	0	0	0	1,670,624,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA	1,670,624,000	1,670,624,000	0	0	0	0	1,670,624,000
010040700	BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA							
079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	2,096,271,000	2,096,271,000	49,105,000	0	49,105,000	2.34	2,047,166,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA	2,096,271,000	2,096,271,000	49,105,000	0	49,105,000	2.34	2,047,166,000
010040800	BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT							
089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1,916,636,000	1,916,636,000	0	0	0	0	1,916,636,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT	1,916,636,000	1,916,636,000	0	0	0	0	1,916,636,000
010040900DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU							
099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	2,118,909,000	2,118,909,000	88,318,940	0	88,318,940	4.17	2,030,590,060
433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	239,745,000	239,745,000	0	0	0	0	239,745,000
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	2,358,654,000	2,358,654,000	88,318,940	0	88,318,940	3.74	2,270,335,060
010041400DK	BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi							
149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,653,560,000	1,653,560,000	0	0	0	0	1,653,560,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi	1,653,560,000	1,653,560,000	0	0	0	0	1,653,560,000
010041900	BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN							
199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,833,518,000	1,833,518,000	57,947,500	0	57,947,500	3.16	1,775,570,500
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN	1,833,518,000	1,833,518,000	57,947,500	0	57,947,500	3.16	1,775,570,500
010042000	BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							
209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1,417,242,000	1,417,242,000	0	0	0	0	1,417,242,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	1,417,242,000	1,417,242,000	0	0	0	0	1,417,242,000
010042100 219062	BA(010) ES1(04) MALUKU SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1,694,913,000	1,694,913,000	0	0	0	0	1,694,913,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) MALUKU	1,694,913,000	1,694,913,000	0	0	0	0	1,694,913,000
010042600 269093 433344	BA(010) ES1(04) BENGKULU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	1,804,312,000 236,923,000	1,804,312,000 236,923,000	0 0	0 0	0 0	0 0	1,804,312,000 236,923,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BENGKULU	2,041,235,000	2,041,235,000	0	0	0	0	2,041,235,000
010042900 299348	BA(010) ES1(04) BANTEN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	1,608,468,000	1,608,468,000	0	0	0	0	1,608,468,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANTEN	1,608,468,000	1,608,468,000	0	0	0	0	1,608,468,000
010043000 309148 433343	BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	1,651,100,000 145,584,000	1,651,100,000 145,584,000	0 0	0 0	0 0	0 0	1,651,100,000 145,584,000
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG	1,796,684,000	1,796,684,000	0	0	0	0	1,796,684,000
010043400DK 340166	BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1,634,812,000	1,634,812,000	0	0	0	0	1,634,812,000
	JUMLAH BELANJA BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT	1,634,812,000	1,634,812,000	0	0	0	0	1,634,812,000
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	376,431,000	376,431,000	0	0	0	0	376,431,000
020103	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	818,750,000	818,750,000	0	0	0	0	818,750,000
029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	1,919,869,000	1,919,869,000	0	0	0	0	1,919,869,000
029142	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT	369,760,000	369,760,000	0	0	0	0	369,760,000
030031	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	470,000,000	470,000,000	0	0	0	0	470,000,000
039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2,012,403,000	2,012,403,000	32,000,000	0	32,000,000	1.59	1,980,403,000
039902	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH	392,845,000	392,845,000	0	0	0	0	392,845,000
045160	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DI YOGYAKARTA	588,325,000	588,325,000	0	0	0	0	588,325,000
049073	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DI YOGYAKARTA	311,160,000	311,160,000	0	0	0	0	311,160,000
050037	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	884,129,000	884,129,000	0	0	0	0	884,129,000
059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1,031,295,000	1,031,295,000	0	0	0	0	1,031,295,000
059667	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	470,000,000	470,000,000	0	0	0	0	470,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
060016	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI ACEH	777,922,000	777,922,000	0	0	0	0	777,922,000
060017	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ACEH	379,584,000	379,584,000	194,890,000	0	194,890,000	51.34	184,694,000
069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	1,970,899,000	1,970,899,000	0	0	0	0	1,970,899,000
079108	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA	750,597,000	750,597,000	0	0	0	0	750,597,000
090058	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RIAU	369,384,000	369,384,000	0	0	0	0	369,384,000
099403	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. RIAU	317,174,000	317,174,000	0	0	0	0	317,174,000
100081	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. JAMBI	689,631,000	689,631,000	0	0	0	0	689,631,000
109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1,832,800,000	1,832,800,000	78,023,000	0	78,023,000	4.26	1,754,777,000
110018	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	340,000,000	340,000,000	0	0	0	0	340,000,000
119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,784,910,000	1,784,910,000	203,450,766	0	203,450,766	11.4	1,581,459,234
119113	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN	728,618,000	728,618,000	0	0	0	0	728,618,000
129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1,720,675,000	1,720,675,000	0	0	0	0	1,720,675,000
129097	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	369,040,000	369,040,000	0	0	0	0	369,040,000
129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	211,620,000	211,620,000	0	0	0	0	211,620,000
139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,747,589,000	1,747,589,000	0	0	0	0	1,747,589,000
139103	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
139110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN BARAT	362,400,000	362,400,000	0	0	0	0	362,400,000
149099	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	736,356,000	736,356,000	0	0	0	0	736,356,000
149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	162,296,000	162,296,000	0	0	0	0	162,296,000
159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1,711,070,000	1,711,070,000	0	0	0	0	1,711,070,000
159182	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	687,141,000	687,141,000	0	0	0	0	687,141,000
159260	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALIMANTAN SELATAN	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
160035	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN TIMUR	699,528,000	699,528,000	0	0	0	0	699,528,000
169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	838,924,000	838,924,000	0	0	0	0	838,924,000
170041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SULAWESI UTARA	400,404,000	400,404,000	0	0	0	0	400,404,000
179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	161,088,000	161,088,000	0	0	0	0	161,088,000
179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2,035,232,000	2,035,232,000	53,000,000	0	53,000,000	2.6	1,982,232,000
179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	569,747,000	569,747,000	0	0	0	0	569,747,000
189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,678,479,000	1,678,479,000	8,777,678	0	8,777,678	0.52	1,669,701,322
199109	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN	772,600,000	772,600,000	0	0	0	0	772,600,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 5  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
200100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
209093	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	368,190,000	368,190,000	0	0	0	0	368,190,000
209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	176,331,000	176,331,000	0	0	0	0	176,331,000
219162	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU	777,590,000	777,590,000	0	0	0	0	777,590,000
220015	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALI	736,503,000	736,503,000	0	0	0	0	736,503,000
229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1,670,692,000	1,670,692,000	33,889,040	0	33,889,040	2.03	1,636,802,960
229082	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000
239108	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	330,600,000	330,600,000	0	0	0	0	330,600,000
239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,827,734,000	1,827,734,000	0	0	0	0	1,827,734,000
239312	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	690,940,000	690,940,000	0	0	0	0	690,940,000
240055	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	420,000,000
249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1,998,927,000	1,998,927,000	0	0	0	0	1,998,927,000
249138	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	569,746,000	569,746,000	0	0	0	0	569,746,000
249141	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	406,803,000	406,803,000	0	0	0	0	406,803,000
249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	267,924,000	267,924,000	0	0	0	0	267,924,000
250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	825,426,000	825,426,000	0	0	0	0	825,426,000
259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	148,193,000	148,193,000	0	0	0	0	148,193,000
259245	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROV. PAPUA	409,999,000	409,999,000	0	0	0	0	409,999,000
265165	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU	330,000,000	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000
289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	153,136,000	153,136,000	0	0	0	0	153,136,000
289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1,693,555,000	1,693,555,000	0	0	0	0	1,693,555,000
289177	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI MALUKU UTARA	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000
290033	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
290100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN	333,330,000	333,330,000	0	0	0	0	333,330,000
309220	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	330,000,000	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000
310097	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
319137	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO	360,840,000	360,840,000	0	0	0	0	360,840,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 6  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
320098	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000
329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,637,070,000	1,637,070,000	0	0	0	0	1,637,070,000
330099	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PAPUA BARAT	459,856,000	459,856,000	0	0	0	0	459,856,000
339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	944,550,000	944,550,000	0	0	0	0	944,550,000
340175	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI BARAT	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	146,113,000	146,113,000	21,155,904	0	21,155,904	14.48	124,957,096
350062	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	527,847,000	527,847,000	0	0	0	0	527,847,000
359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	144,629,000	144,629,000	0	0	0	0	144,629,000
417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,601,249,000	1,601,249,000	0	0	0	0	1,601,249,000
433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	253,000,000	253,000,000	0	0	0	0	253,000,000
433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	222,487,000	222,487,000	0	0	0	0	222,487,000
433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	238,077,000	238,077,000	0	0	0	0	238,077,000
433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	254,861,000	254,861,000	0	0	0	0	254,861,000
433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	150,727,000	150,727,000	0	0	0	0	150,727,000
433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	153,083,000	153,083,000	0	0	0	0	153,083,000
433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	165,549,000	165,549,000	0	0	0	0	165,549,000
433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	147,035,000	147,035,000	0	0	0	0	147,035,000
433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	163,405,000	163,405,000	8,900,000	0	8,900,000	5.45	154,505,000
433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	191,233,000	191,233,000	0	0	0	0	191,233,000
433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	156,799,000	156,799,000	0	0	0	0	156,799,000
433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	159,165,000	159,165,000	0	0	0	0	159,165,000
484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	269,330,000	269,330,000	0	0	0	0	269,330,000
484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	428,387,000	428,387,000	0	0	0	0	428,387,000
484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	289,116,000	289,116,000	0	0	0	0	289,116,000
484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	281,331,000	281,331,000	0	0	0	0	281,331,000
484106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG	491,278,000	491,278,000	0	0	0	0	491,278,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 7  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	PROVINSI SUMATERA UTARA)							
484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	304,764,000	304,764,000	0	0	0	0	304,764,000
484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	433,081,000	433,081,000	0	0	0	0	433,081,000
484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	254,995,000	254,995,000	0	0	0	0	254,995,000
484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	389,252,000	389,252,000	0	0	0	0	389,252,000
484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	127,384,000	127,384,000	0	0	0	0	127,384,000
484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	409,877,000	409,877,000	0	0	0	0	409,877,000
484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	141,592,000	141,592,000	0	0	0	0	141,592,000
484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	459,092,000	459,092,000	0	0	0	0	459,092,000
484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	269,926,000	269,926,000	0	0	0	0	269,926,000
484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	434,541,000	434,541,000	0	0	0	0	434,541,000
484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	156,280,000	156,280,000	0	0	0	0	156,280,000
484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	399,613,000	399,613,000	0	0	0	0	399,613,000
484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	148,316,000	148,316,000	0	0	0	0	148,316,000
484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	404,655,000	404,655,000	0	0	0	0	404,655,000
484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	136,955,000	136,955,000	0	0	0	0	136,955,000
484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	357,561,000	357,561,000	0	0	0	0	357,561,000
484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	130,710,000	130,710,000	0	0	0	0	130,710,000
484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	394,578,000	394,578,000	0	0	0	0	394,578,000
484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	120,959,000	120,959,000	0	0	0	0	120,959,000
484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	276,487,000	276,487,000	0	0	0	0	276,487,000
484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	470,727,000	470,727,000	0	0	0	0	470,727,000
484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	198,469,000	198,469,000	0	0	0	0	198,469,000
484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	218,617,000	218,617,000	0	0	0	0	218,617,000
484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	452,663,000	452,663,000	0	0	0	0	452,663,000
484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	193,541,000	193,541,000	0	0	0	0	193,541,000
484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	143,230,000	143,230,000	0	0	0	0	143,230,000
484150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DIY	387,265,000	387,265,000	0	0	0	0	387,265,000
484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	113,687,000	113,687,000	0	0	0	0	113,687,000
484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	216,994,000	216,994,000	0	0	0	0	216,994,000
484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	398,520,000	398,520,000	0	0	0	0	398,520,000
484155	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	135,374,000	135,374,000	0	0	0	0	135,374,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 8  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	400,144,000	400,144,000	0	0	0	0	400,144,000
484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	126,741,000	126,741,000	0	0	0	0	126,741,000
484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	409,727,000	409,727,000	0	0	0	0	409,727,000
484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	131,764,000	131,764,000	0	0	0	0	131,764,000
484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	477,970,000	477,970,000	101,443,741	0	101,443,741	21.22	376,526,259
484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	286,267,000	286,267,000	0	0	0	0	286,267,000
484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	968,951,000	968,951,000	0	0	0	0	968,951,000
484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	134,770,000	134,770,000	0	0	0	0	134,770,000
484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	413,996,000	413,996,000	0	0	0	0	413,996,000
484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	135,557,000	135,557,000	0	0	0	0	135,557,000
484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	158,618,000	158,618,000	0	0	0	0	158,618,000
484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	414,296,000	414,296,000	0	0	0	0	414,296,000
484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	125,722,000	125,722,000	0	0	0	0	125,722,000
484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	235,095,000	235,095,000	0	0	0	0	235,095,000
484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	306,388,000	306,388,000	0	0	0	0	306,388,000
484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	244,180,000	244,180,000	0	0	0	0	244,180,000
484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	395,311,000	395,311,000	0	0	0	0	395,311,000
484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	116,502,000	116,502,000	0	0	0	0	116,502,000
484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	456,173,000	456,173,000	0	0	0	0	456,173,000
484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	180,127,000	180,127,000	0	0	0	0	180,127,000
484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	391,480,000	391,480,000	0	0	0	0	391,480,000
484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	119,545,000	119,545,000	0	0	0	0	119,545,000
484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	386,956,000	386,956,000	0	0	0	0	386,956,000
484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	116,669,000	116,669,000	0	0	0	0	116,669,000
484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	426,836,000	426,836,000	0	0	0	0	426,836,000
484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	162,663,000	162,663,000	0	0	0	0	162,663,000
484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	418,456,000	418,456,000	0	0	0	0	418,456,000
484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	117,052,000	117,052,000	0	0	0	0	117,052,000
484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	425,948,000	425,948,000	0	0	0	0	425,948,000
484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	146,069,000	146,069,000	0	0	0	0	146,069,000
484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	901,382,000	901,382,000	0	0	0	0	901,382,000
484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	132,756,000	132,756,000	0	0	0	0	132,756,000
484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	401,930,000	401,930,000	0	0	0	0	401,930,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 9  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	123,322,000	123,322,000	0	0	0	0	123,322,000
484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	303,099,000	303,099,000	0	0	0	0	303,099,000
484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	123,645,000	123,645,000	0	0	0	0	123,645,000
484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	208,814,000	208,814,000	0	0	0	0	208,814,000
484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	296,527,000	296,527,000	0	0	0	0	296,527,000
484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	225,498,000	225,498,000	0	0	0	0	225,498,000
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	82,149,962,000	82,149,962,000	735,530,129	0	735,530,129	0.9	81,414,431,871
	JUMLAH BELANJA 04	226,472,179,000	227,158,679,000	40,676,944,215	38,026,473	40,638,917,742	17.91	186519761258
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA							
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	103,185,777,000	125,944,703,000	42,181,439,895	5,152,666	42,176,287,229	33.49	83,768,415,771
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	103,185,777,000	125,944,703,000	42,181,439,895	5,152,666	42,176,287,229	33.49	83,768,415,771
010050400KD	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA							
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	17,807,583,000	17,807,583,000	5,545,169,085	1,273,050	5,543,896,035	31.13	12,263,686,965
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	17,807,583,000	17,807,583,000	5,545,169,085	1,273,050	5,543,896,035	31.14	12,263,686,965
010050500KD	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR							
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	15,025,263,000	15,025,263,000	4,801,693,619	1,958,261	4,799,735,358	31.94	10,225,527,642
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	15,025,263,000	15,025,263,000	4,801,693,619	1,958,261	4,799,735,358	31.96	10,225,527,642
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG							
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	15,073,792,000	15,073,792,000	5,913,298,195	1,120,288	5,912,177,907	39.22	9,161,614,093
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) LAMPUNG	15,073,792,000	15,073,792,000	5,913,298,195	1,120,288	5,912,177,907	39.23	9,161,614,093
	JUMLAH BELANJA 05	151,092,415,000	173,851,341,000	58,441,600,794	9,504,265	58,432,096,529	33.62	115419244471
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	223,283,824,000	223,283,824,000	47,600,703,615	6,019,868	47,594,683,747	21.32	175,689,140,253
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	223,283,824,000	223,283,824,000	47,600,703,615	6,019,868	47,594,683,747	21.32	175,689,140,253
	JUMLAH BELANJA 06	223,283,824,000	223,283,824,000	47,600,703,615	6,019,868	47,594,683,747	21.32	175689140253
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
010070100KP	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA							
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	99,139,263,000	99,139,263,000	34,463,307,530	33,967,562	34,429,339,968	34.73	64,709,923,032
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	99,139,263,000	99,139,263,000	34,463,307,530	33,967,562	34,429,339,968	34.76	64,709,923,032
	JUMLAH BELANJA 07	99,139,263,000	99,139,263,000	34,463,307,530	33,967,562	34,429,339,968	34.76	64709923032
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 10  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,223,059,937,000	2,199,614,511,000	234,553,984,868	4,573,548	234,549,411,320	10.66	1,965,065,099,680
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	2,223,059,937,000	2,199,614,511,000	234,553,984,868	4,573,548	234,549,411,320	10.66	1,965,065,099,680
	JUMLAH BELANJA 08	2,223,059,937,000	2,199,614,511,000	234,553,984,868	4,573,548	234,549,411,320	10.66	1965065099680
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
010090100KP 662766	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	110,291,004,000	110,291,004,000	35,760,540,641	5,640,752	35,754,899,889	32.42	74,536,104,111
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	110,291,004,000	110,291,004,000	35,760,540,641	5,640,752	35,754,899,889	32.42	74,536,104,111
	JUMLAH BELANJA 09	110,291,004,000	110,291,004,000	35,760,540,641	5,640,752	35,754,899,889	32.42	74536104111
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
010110100KP 403222	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	58,608,338,000	58,608,338,000	20,598,044,887	3,155,665	20,594,889,222	35.14	38,013,448,778
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	58,608,338,000	58,608,338,000	20,598,044,887	3,155,665	20,594,889,222	35.15	38,013,448,778
	JUMLAH BELANJA 11	58,608,338,000	58,608,338,000	20,598,044,887	3,155,665	20,594,889,222	35.15	38013448778
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
010120100KP 403231	Kode UAPPAW Tidak Ada BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	118,584,140,000	118,584,140,000	55,084,503,308	1,409,856,632	53,674,646,676	45.26	64,909,493,324
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	118,584,140,000	118,584,140,000	55,084,503,308	1,409,856,632	53,674,646,676	46.45	64,909,493,324
010120200KD 403216	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	25,511,026,000	25,511,026,000	10,072,936,970	555,442	10,072,381,528	39.48	15,438,644,472
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	25,511,026,000	25,511,026,000	10,072,936,970	555,442	10,072,381,528	39.48	15,438,644,472
010120400KD 027114	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	26,243,013,000	26,243,013,000	11,298,041,821	694,904	11,297,346,917	43.05	14,945,666,083
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	26,243,013,000	26,243,013,000	11,298,041,821	694,904	11,297,346,917	43.05	14,945,666,083
010120800KD 506137	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	17,370,812,000	17,370,812,000	5,548,135,340	7,355,790	5,540,779,550	31.9	11,830,032,450
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	17,370,812,000	17,370,812,000	5,548,135,340	7,355,790	5,540,779,550	31.94	11,830,032,450
010121900KD 027177	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	21,718,866,000	21,718,866,000	8,377,736,623	1,350,049	8,376,386,574	38.57	13,342,479,426
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	21,718,866,000	21,718,866,000	8,377,736,623	1,350,049	8,376,386,574	38.57	13,342,479,426
null 506138	Kode UAPPAW Tidak Ada BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11,373,042,000	11,373,042,000	5,215,645,909	177,238	5,215,468,671	45.86	6,157,573,329

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
 Halaman : 11  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	11,373,042,000	11,373,042,000	5,215,645,909	177,238	5,215,468,671	45.86	6,157,573,329
	JUMLAH BELANJA 12	220,800,899,000	220,800,899,000	95,596,999,971	1,419,990,055	94,177,009,916	43.3	126623889084
	JUMLAH BELANJA	4,792,328,518,000	4,792,328,518,000	1,244,275,008,712	1,620,663,350	1,242,654,345,362	25.96	3,549,674,172,638



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	367,687,066,000	368,054,706,000	197,343,046,723	30,153,172	197,312,893,551	53.61	170,741,812,449
52	BELANJA BARANG	710,546,015,000	656,904,715,000	260,227,529,547	64,376,044	260,163,153,503	39.6	396,741,561,497
53	BELANJA MODAL	82,440,540,000	135,714,200,000	7,333,288,749	0	7,333,288,749	5.4	128,380,911,251
	<b>JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL</b>	<b>1,160,673,621,000</b>	<b>1,160,673,621,000</b>	<b>464,903,865,019</b>	<b>94,529,216</b>	<b>464,809,335,803</b>	<b>40.05</b>	<b>695,864,285,197</b>
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	44,963,728,000	44,963,728,000	25,913,028,985	2,520,580	25,910,508,405	57.63	19,053,219,595
52	BELANJA BARANG	37,884,509,000	37,884,509,000	9,854,174,962	2,365,000	9,851,809,962	26	28,032,699,038
53	BELANJA MODAL	1,552,500,000	1,552,500,000	129,944,370	0	129,944,370	8.37	1,422,555,630
	<b>JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL</b>	<b>84,400,737,000</b>	<b>84,400,737,000</b>	<b>35,897,148,317</b>	<b>4,885,580</b>	<b>35,892,262,737</b>	<b>42.53</b>	<b>48,508,474,263</b>
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	37,819,994,000	37,819,994,000	21,916,409,104	370,366	21,916,038,738	57.95	15,903,955,262
52	BELANJA BARANG	195,186,307,000	195,186,307,000	152,775,153,750	0	152,775,153,750	78.27	42,411,153,250
53	BELANJA MODAL	1,500,000,000	1,500,000,000	1,090,306,001	0	1,090,306,001	72.69	409,693,999
	<b>JUMLAH BELANJA (03) DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>234,506,301,000</b>	<b>234,506,301,000</b>	<b>175,781,868,855</b>	<b>370,366</b>	<b>175,781,498,489</b>	<b>74.96</b>	<b>58,724,802,511</b>
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
51	BELANJA PEGAWAI	43,367,177,000	43,367,177,000	21,782,147,947	6,631,782	21,775,516,165	50.21	21,591,660,835
52	BELANJA BARANG	180,205,002,000	180,891,502,000	18,344,158,568	31,394,691	18,312,763,877	10.12	162,578,738,123
53	BELANJA MODAL	2,900,000,000	2,900,000,000	550,637,700	0	550,637,700	18.99	2,349,362,300
	<b>JUMLAH BELANJA (04) DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b>	<b>226,472,179,000</b>	<b>227,158,679,000</b>	<b>40,676,944,215</b>	<b>38,026,473</b>	<b>40,638,917,742</b>	<b>17.91</b>	<b>186,519,761,258</b>
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
51	BELANJA PEGAWAI	61,731,784,000	61,731,784,000	35,862,364,588	7,864,728	35,854,499,860	58.08	25,877,284,140
52	BELANJA BARANG	86,818,522,000	109,577,448,000	22,045,182,967	1,639,537	22,043,543,430	20.12	87,533,904,570
53	BELANJA MODAL	2,542,109,000	2,542,109,000	534,053,239	0	534,053,239	21.01	2,008,055,761
	<b>JUMLAH BELANJA (05) DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>151,092,415,000</b>	<b>173,851,341,000</b>	<b>58,441,600,794</b>	<b>9,504,265</b>	<b>58,432,096,529</b>	<b>33.62</b>	<b>115,419,244,471</b>
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	47,541,791,000	47,541,791,000	26,407,090,196	4,056,068	26,403,034,128	55.54	21,138,756,872
52	BELANJA BARANG	174,173,033,000	174,213,033,000	19,743,458,219	1,963,800	19,741,494,419	11.33	154,471,538,581
53	BELANJA MODAL	1,569,000,000	1,529,000,000	1,450,155,200	0	1,450,155,200	94.84	78,844,800
	<b>JUMLAH BELANJA (06) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>223,283,824,000</b>	<b>223,283,824,000</b>	<b>47,600,703,615</b>	<b>6,019,868</b>	<b>47,594,683,747</b>	<b>21.32</b>	<b>175,689,140,253</b>
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	48,080,941,000	48,080,941,000	23,383,768,389	9,320,810	23,374,447,579	48.61	24,706,493,421
52	BELANJA BARANG	49,196,287,000	49,196,287,000	11,079,539,141	24,646,752	11,054,892,389	22.47	38,141,394,611
53	BELANJA MODAL	1,862,035,000	1,862,035,000	0	0	0	0	1,862,035,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN OTONOMI DAERAH	99,139,263,000	99,139,263,000	34,463,307,530	33,967,562	34,429,339,968	34.76	64,709,923,032
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
51	BELANJA PEGAWAI	37,432,550,000	37,432,550,000	19,987,617,487	4,573,548	19,983,043,939	53.38	17,449,506,061
52	BELANJA BARANG	1,346,307,811,000	1,492,578,126,000	214,538,338,261	0	214,538,338,261	14.37	1,278,039,787,739
53	BELANJA MODAL	839,319,576,000	669,603,835,000	28,029,120	0	28,029,120	0	669,575,805,880
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	2,223,059,937,000	2,199,614,511,000	234,553,984,868	4,573,548	234,549,411,320	10.66	1,965,065,099,680
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	45,991,664,000	45,991,664,000	25,396,458,187	5,640,752	25,390,817,435	55.21	20,600,846,565
52	BELANJA BARANG	63,299,340,000	63,299,340,000	10,046,410,954	0	10,046,410,954	15.87	53,252,929,046
53	BELANJA MODAL	1,000,000,000	1,000,000,000	317,671,500	0	317,671,500	31.77	682,328,500
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	110,291,004,000	110,291,004,000	35,760,540,641	5,640,752	35,754,899,889	32.42	74,536,104,111
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
51	BELANJA PEGAWAI	25,211,074,000	25,211,074,000	12,634,902,415	3,155,665	12,631,746,750	50.1	12,579,327,250
52	BELANJA BARANG	32,159,764,000	32,159,764,000	7,913,802,972	0	7,913,802,972	24.61	24,245,961,028
53	BELANJA MODAL	1,237,500,000	1,237,500,000	49,339,500	0	49,339,500	3.99	1,188,160,500
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	58,608,338,000	58,608,338,000	20,598,044,887	3,155,665	20,594,889,222	35.15	38,013,448,778
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	86,137,068,000	86,137,068,000	47,495,631,671	3,722,061	47,491,909,610	55.14	38,645,158,390
52	BELANJA BARANG	130,691,746,000	130,691,746,000	47,605,168,300	1,416,267,994	46,188,900,306	35.34	84,502,845,694
53	BELANJA MODAL	3,972,085,000	3,972,085,000	496,200,000	0	496,200,000	12.49	3,475,885,000
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	220,800,899,000	220,800,899,000	95,596,999,971	1,419,990,055	94,177,009,916	43.3	126,623,889,084
	JUMLAH BELANJA	4,792,328,518,000	4,792,328,518,000	1,244,275,008,712	1,620,663,350	1,242,654,345,362	25.96	3,549,674,172,638



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN BELANJA MENURUT  
SUMBER DANA / PROGRAM /  
KEGIATAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	121,200,000,000	121,200,000,000	2,896,073,702	4,280,000	2,891,793,702	141.73	118,308,206,298
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	16,036,287,000	16,036,287,000	1,686,530,126	373,860	1,686,156,266	10.51	14,350,130,734
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	9,362,443,000	9,508,158,000	2,414,492,589	0	2,414,492,589	25.39	7,093,665,411
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	14,300,000,000	14,154,285,000	272,922,500	0	272,922,500	40.93	13,881,362,500
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	24,350,000,000	24,350,000,000	1,340,794,420	48,000	1,340,746,420	5.51	23,009,253,580
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,000,000,000	9,000,000,000	1,538,697,508	5,373,525	1,533,323,983	17.04	7,466,676,017
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,800,000,000	3,800,000,000	621,832,765	0	621,832,765	16.36	3,178,167,235
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	8,000,000,000	8,000,000,000	779,476,739	0	779,476,739	9.74	7,220,523,261
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,690,000,000	3,690,000,000	86,248,200	0	86,248,200	2.34	3,603,751,800
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	1,914,184,000	229,000,000	5,250,000	0	5,250,000	2.29	223,750,000
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,000,000,000	5,000,000,000	607,481,005	0	607,481,005	12.15	4,392,518,995
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18,100,000,000	18,100,000,000	2,296,753,559	22,885,890	2,273,867,669	12.56	15,826,132,331
6138	Penataan kelembagaan Desa	8,617,557,000	8,617,557,000	856,591,192	621,400	855,969,792	9.93	7,761,587,208
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	60,900,000,000	60,900,000,000	4,291,043,230	1,915,800	4,289,127,430	7.04	56,610,872,570
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	9,600,000,000	9,600,000,000	760,147,417	2,821,700	757,325,717	7.89	8,842,674,283
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	37,200,000,000	37,200,000,000	2,728,689,502	0	2,728,689,502	7.34	34,471,310,498
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,950,000,000	5,950,000,000	789,791,054	0	789,791,054	13.27	5,160,208,946
6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,161,757,000	25,065,671,000	17,402,593,050	1,414,662,600	15,987,930,450	326.52	9,077,740,550
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>382,382,228,000</b>	<b>381,600,958,000</b>	<b>41,375,408,558</b>	<b>1,452,982,775</b>	<b>39,922,425,783</b>	<b>10.843</b>	<b>341,678,532,217</b>
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	400,170,679,000	400,170,679,000	36,645,563,889	0	36,645,563,889	9.16	363,525,115,111
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	229,073,850,000	229,073,850,000	157,469,399,087	0	157,469,399,087	68.74	71,604,450,913
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25,721,074,000	25,721,074,000	1,697,100,109	0	1,697,100,109	6.6	24,023,973,891
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CP</b>	<b>654,965,603,000</b>	<b>654,965,603,000</b>	<b>195,812,063,085</b>	<b>0</b>	<b>195,812,063,085</b>	<b>29.897</b>	<b>459,153,539,915</b>
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	11,476,628,000	11,476,628,000	2,119,873,295	0	2,119,873,295	18.47	9,356,754,705
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	6,000,000,000	6,000,000,000	1,711,444,971	0	1,711,444,971	28.52	4,288,555,029
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	146,489,125,000	146,489,125,000	136,657,651,428	0	136,657,651,428	93.29	9,831,473,572
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CR</b>	<b>163,965,753,000</b>	<b>163,965,753,000</b>	<b>140,488,969,694</b>	<b>0</b>	<b>140,488,969,694</b>	<b>85.682</b>	<b>23,476,783,306</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	89,271,812,000	89,271,812,000	28,903,411,004	4,199,762	28,899,211,242	32.37	60,372,600,758
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	15,800,000,000	7,594,369,000	2,408,655,290	2,700,667	2,405,954,623	31.68	5,188,414,377
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	325,368,201,000	301,996,051,000	166,221,669,549	69,408,388	166,152,261,161	55.02	135,843,789,839
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	90,478,000,000	131,067,281,000	8,382,506,442	289,412	8,382,217,030	6.4	122,685,063,970
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	21,500,000,000	12,488,500,000	3,293,074,310	0	3,293,074,310	26.37	9,195,425,690
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	752,092,000	752,092,000	239,024,289	0	239,024,289	31.78	513,067,711
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	518,989,155,000	518,989,155,000	238,583,672,259	17,930,987	238,565,741,272	268.1	280,423,413,728

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,108,436,000	1,101,844,000	281,358,344	0	281,358,344	41.8	820,485,656
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	10,956,739,000	10,963,331,000	1,660,796,873	0	1,660,796,873	22.54	9,302,534,127
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	75,478,644,000	75,478,644,000	10,629,934,962	0	10,629,934,962	48.64	64,848,709,038
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	660,000,000	674,200,000	34,751,380	0	34,751,380	5.15	639,448,620
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	60,814,741,000	60,283,620,000	32,422,681,605	2,520,580	32,420,161,025	53.78	27,863,458,975
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	372,738,000	367,338,000	36,700,000	0	36,700,000	9.99	330,638,000
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,675,617,000	1,676,067,000	360,527,461	2,365,000	358,162,461	21.37	1,317,904,539
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	1,190,250,000	1,190,250,000	269,303,967	0	269,303,967	22.63	920,946,033
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	19,687,391,000	20,209,262,000	2,773,183,904	0	2,773,183,904	13.72	17,436,078,096
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,500,000,000	1,500,000,000	452,599,815	0	452,599,815	30.17	1,047,400,185
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,640,548,000	64,640,548,000	34,155,317,892	370,366	34,154,947,526	52.84	30,485,600,474
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,500,000,000	2,500,000,000	426,731,600	0	426,731,600	17.07	2,073,268,400
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,900,000,000	1,900,000,000	258,249,854	0	258,249,854	13.59	1,641,750,146
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,965,552,000	1,965,552,000	261,809,200	0	261,809,200	13.32	1,703,742,800
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	65,908,340,000	65,908,340,000	32,922,087,998	10,486,723	32,911,601,275	49.94	32,996,738,725
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	1,362,000,000	1,362,000,000	109,258,800	0	109,258,800	8.02	1,252,741,200
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	1,900,000,000	1,900,000,000	504,430,830	0	504,430,830	26.55	1,395,569,170
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	1,000,000,000	1,000,000,000	186,237,300	0	186,237,300	18.62	813,762,700
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	113,582,889,000	113,582,889,000	54,193,257,667	8,882,865	54,184,374,802	192.17	59,398,514,198
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,920,000,000	1,920,000,000	216,784,300	0	216,784,300	12.68	1,703,215,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,294,922,000	2,294,922,000	301,315,246	0	301,315,246	30.58	1,993,606,754
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,000,000,000	4,000,000,000	145,574,280	0	145,574,280	3.64	3,854,425,720
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,700,000,000	1,700,000,000	110,260,000	0	110,260,000	6.49	1,589,740,000
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	77,189,777,000	77,223,477,000	38,364,754,586	4,056,068	38,360,698,518	49.67	38,862,778,482
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,300,000,000	2,229,792,000	1,663,727,906	0	1,663,727,906	74.61	566,064,094
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,200,000,000	1,236,508,000	172,498,825	0	172,498,825	13.95	1,064,009,175
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	1,200,000,000	1,180,891,000	277,056,200	6,358,347	270,697,853	22.92	910,193,147
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	68,750,548,000	68,762,372,000	30,499,118,335	16,924,710	30,482,193,625	44.33	38,280,178,375
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	256,000,000	256,000,000	76,684,300	0	76,684,300	29.95	179,315,700
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,532,715,000	1,540,000,000	82,290,000	2,489,280	79,800,720	5.18	1,460,199,280
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,500,000,000	2,500,000,000	235,799,932	0	235,799,932	9.43	2,264,200,068
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,599,930,000	83,599,930,000	32,187,965,319	4,573,548	32,183,391,771	38.5	51,416,538,229
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,347,240,000	2,347,240,000	420,717,774	0	420,717,774	17.92	1,926,522,226
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,495,164,000	14,495,164,000	3,876,733,980	0	3,876,733,980	26.75	10,618,430,020
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	750,000,000	750,000,000	206,116,136	0	206,116,136	27.48	543,883,864
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	62,009,164,000	62,009,164,000	31,695,467,351	5,640,752	31,689,826,599	51.11	30,319,337,401
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	931,840,000	931,840,000	225,982,718	0	225,982,718	24.25	705,857,282
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,400,000,000	1,400,000,000	124,808,195	0	124,808,195	8.91	1,275,191,805
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	175,000,000	175,000,000	47,749,900	0	47,749,900	27.29	127,250,100
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	46,223,338,000	46,223,338,000	19,426,429,971	3,155,665	19,423,274,306	42.02	26,800,063,694

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,350,000,000	1,350,000,000	247,825,762	0	247,825,762	18.36	1,102,174,238
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	200,000,000	200,000,000	41,836,000	75,620	41,760,380	20.88	158,239,620
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	154,671,927,000	154,109,912,000	76,046,076,465	4,539,586	76,041,536,879	286.43	78,068,375,121
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,200,000,000	2,600,000,000	26,842,051	7,137	26,834,914	1.03	2,573,165,086
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,285,000,000	1,228,285,000	299,474,022	705,112	298,768,910	124.39	929,516,090
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>2,025,865,710,000</b>	<b>2,026,646,980,000</b>	<b>856,991,122,149</b>	<b>167,680,575</b>	<b>856,823,441,574</b>	<b>42.286</b>	<b>1,169,823,538,426</b>
	<b>JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI</b>	<b>3,227,179,294,000</b>	<b>3,227,179,294,000</b>	<b>1,234,667,563,486</b>	<b>1,620,663,350</b>	<b>1,233,046,900,136</b>	<b>38.258</b>	<b>1,994,132,393,864</b>
<b>02</b>	<b>PINJAMAN LUAR NEGERI</b>							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	0	686,500,000	0	0	0	0	686,500,000
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	0	15,309,345,000	0	0	0	0	15,309,345,000
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	51,644,047,000	51,644,047,000	1,512,050,368	0	1,512,050,368	2.93	50,131,996,632
6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	0	7,449,581,000	0	0	0	0	7,449,581,000
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>51,644,047,000</b>	<b>75,089,473,000</b>	<b>1,512,050,368</b>	<b>0</b>	<b>1,512,050,368</b>	<b>2.014</b>	<b>73,577,422,632</b>
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	1,465,152,000,000	1,441,706,574,000	2,020,704,778	0	2,020,704,778	0.14	1,439,685,869,222
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CP</b>	<b>1,465,152,000,000</b>	<b>1,441,706,574,000</b>	<b>2,020,704,778</b>	<b>0</b>	<b>2,020,704,778</b>	<b>0.14</b>	<b>1,439,685,869,222</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI</b>	<b>1,516,796,047,000</b>	<b>1,516,796,047,000</b>	<b>3,532,755,146</b>	<b>0</b>	<b>3,532,755,146</b>	<b>0.233</b>	<b>1,513,263,291,854</b>
<b>04</b>	<b>PNBP</b>							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 6

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	425,625,000	425,625,000	209,271,500	0	209,271,500	49.17	216,353,500
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	36,587,406,000	36,587,406,000	1,565,656,883	0	1,565,656,883	20.71	35,021,749,117
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>37,013,031,000</b>	<b>37,013,031,000</b>	<b>1,774,928,383</b>	<b>0</b>	<b>1,774,928,383</b>	<b>4.795</b>	<b>35,238,102,617</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	124,738,000	124,738,000	644,800	0	644,800	0.52	124,093,200
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	10,845,804,000	10,845,804,000	4,299,116,897	0	4,299,116,897	39.64	6,546,687,103
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	14,604,000	14,604,000	0	0	0	0	14,604,000
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>11,340,146,000</b>	<b>11,340,146,000</b>	<b>4,299,761,697</b>	<b>0</b>	<b>4,299,761,697</b>	<b>37.916</b>	<b>7,040,384,303</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PNPB</b>	<b>48,353,177,000</b>	<b>48,353,177,000</b>	<b>6,074,690,080</b>	<b>0</b>	<b>6,074,690,080</b>	<b>12.563</b>	<b>42,278,486,920</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,792,328,518,000</b>	<b>4,792,328,518,000</b>	<b>1,244,275,008,712</b>	<b>1,620,663,350</b>	<b>1,242,654,345,362</b>	<b>25.96</b>	<b>3,549,674,172,638</b>



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN BELANJA MENURUT  
SUMBER DANA / JENIS  
BELANJA / AKUN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN JUNI 2025**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
<b>51</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	263,403,712,000	259,957,223,000	151,673,643,000	18,998,500	151,654,644,500	58.35	108,302,578,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,736,000	4,560,000	2,069,519	19,540	2,049,979	45.38	2,510,021
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,987,736,000	15,895,639,000	8,986,267,887	2,230,620	8,984,037,267	56.53	6,911,601,733
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,520,435,000	4,507,265,000	2,388,925,199	292,152	2,388,633,047	53	2,118,631,953
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,330,337,000	9,126,755,000	5,207,594,000	9,315,050	5,198,278,950	57.06	3,928,476,050
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	23,120,714,000	22,437,822,000	13,413,968,000	11,943,329	13,402,024,671	59.78	9,035,797,329
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,120,121,000	2,952,523,000	2,789,022,325	0	2,789,022,325	94.46	163,500,675
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,719,390,000	11,642,341,000	6,568,312,950	434,520	6,567,878,430	56.42	5,074,462,570
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,396,924,000	37,525,465,000	15,609,057,000	0	15,609,057,000	41.6	21,916,408,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,891,000	57,891,000	32,575,000	0	32,575,000	56.27	25,316,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	205,800,000	205,800,000	119,615,000	0	119,615,000	58.12	86,185,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	18,078,000	0	0	0	0	18,078,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,923,333,000	6,906,548,000	3,815,695,000	32,817,846	3,782,877,154	55.25	3,123,670,846
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9,370,468,000	9,370,468,000	4,230,205,900	0	4,230,205,900	45.14	5,140,262,100
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,019,696,000	2,019,696,000	1,216,002,200	0	1,216,002,200	60.21	803,693,800
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	75,600,000	75,600,000	40,200,000	0	40,200,000	53.17	35,400,000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,125,620,000	2,493,260,000	1,390,363,404	0	1,390,363,404	55.76	1,102,896,596
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,391,761,000	4,459,572,000	2,040,424,500	0	2,040,424,500	45.75	2,419,147,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,062,000	1,088,000	35,668	0	35,668	3.28	1,052,332
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	126,716,000	240,492,000	105,226,846	0	105,226,846	43.75	135,265,154
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	33,583,000	75,161,000	27,319,280	0	27,319,280	36.35	47,841,720
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	110,750,000	39,500,000	0	39,500,000	35.67	71,250,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	339,672,000	717,530,000	293,762,000	0	293,762,000	40.94	423,768,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	108,757,000	235,565,000	100,500,855	0	100,500,855	42.66	135,064,145
511628	Belanja Uang Makan PPPK	526,309,000	969,056,000	271,366,000	0	271,366,000	28	697,690,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	1,750,000	1,750,000	750,000	0	750,000	42.86	1,000,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,950,000	5,950,000	2,550,000	0	2,550,000	42.86	3,400,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
512211	Belanja Uang Lembur	18,181,784,000	18,033,803,000	3,661,782,000	0	3,661,782,000	20.31	14,372,021,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	58,100,000	256,030,000	26,997,000	0	26,997,000	10.54	229,033,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	432,808,467,000	429,101,697,000	231,141,279,135	1,957,975	231,139,321,160	53.87	197,962,375,840
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,937,160,000	6,927,096,000	2,927,456,024	0	2,927,456,024	42.26	3,999,639,976
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>845,964,837,000</b>	<b>846,332,477,000</b>	<b>458,122,465,692</b>	<b>78,009,532</b>	<b>458,044,456,160</b>	<b>54.13</b>	<b>388,288,020,840</b>
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	173,239,614,000	184,226,156,000	79,837,321,021	0	79,837,321,021	43.34	104,388,834,979
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	47,222,316,000	42,663,610,000	18,180,797,068	0	18,180,797,068	42.61	24,482,812,932
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,650,596,000	2,162,300,000	549,918,203	0	549,918,203	25.43	1,612,381,797
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	904,237,000	660,146,000	124,262,720	0	124,262,720	18.82	535,883,280

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN JUNI 2025**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17,246,261,000	17,063,156,000	3,470,172,000	0	3,470,172,000	20.34	13,592,984,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	61,770,257,000	60,092,111,000	21,415,641,894	0	21,415,641,894	35.64	38,676,469,106
521211	Belanja Bahan	121,742,569,000	112,996,223,000	25,127,903,502	6,615,500	25,121,288,002	22.24	87,874,934,998
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,456,552,000	54,083,695,000	1,637,570,000	0	1,637,570,000	3.03	52,446,125,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	159,252,569,000	157,715,778,000	139,193,801,473	2,365,000	139,191,436,473	88.26	18,524,341,527
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	474,020,000	781,304,000	452,206,781	0	452,206,781	57.88	329,097,219
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,000,000	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17,366,724,000	16,336,956,000	6,460,215,371	0	6,460,215,371	39.54	9,876,740,629
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	600,260,000	399,542,000	396,718,884	0	396,718,884	99.29	2,823,116
522111	Belanja Langganan Listrik	43,965,213,000	35,416,876,000	18,607,685,959	0	18,607,685,959	52.54	16,809,190,041
522112	Belanja Langganan Telepon	1,027,486,000	1,023,320,000	163,834,809	0	163,834,809	16.01	859,485,191
522113	Belanja Langganan Air	5,865,038,000	5,848,660,000	2,052,559,097	0	2,052,559,097	35.09	3,796,100,903
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,177,434,000	1,063,569,000	527,340,915	0	527,340,915	49.58	536,228,085
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,750,000	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	49,949,773,000	47,794,603,000	4,000,677,988	0	4,000,677,988	8.37	43,793,925,012
522141	Belanja Sewa	101,137,144,000	106,979,566,000	80,509,735,467	0	80,509,735,467	75.26	26,469,830,533
522151	Belanja Jasa Profesi	45,932,727,000	33,183,519,000	3,865,050,000	17,090,000	3,847,960,000	11.65	29,335,559,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	473,092,058,000	449,180,245,000	79,307,371,374	0	79,307,371,374	17.66	369,872,873,626
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79,618,201,000	79,390,041,000	26,567,489,607	0	26,567,489,607	33.46	52,822,551,393
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,474,672,000	2,299,524,000	1,208,313,060	0	1,208,313,060	52.55	1,091,210,940
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,479,676,000	4,566,735,000	2,318,056,282	0	2,318,056,282	50.76	2,248,678,718
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,416,192,000	37,238,655,000	13,181,641,811	53,200,636	13,128,441,175	35.4	24,110,213,825
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,877,745,000	918,743,000	626,078,094	0	626,078,094	68.15	292,664,906
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,450,760,000	4,447,069,000	2,036,443,396	0	2,036,443,396	45.79	2,410,625,604
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,166,696,000	2,177,110,000	693,942,000	0	693,942,000	31.87	1,483,168,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300,078,839,000	292,844,729,000	66,001,025,483	1,461,293,570	64,539,731,913	22.54	228,304,997,087
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4,671,477,000	4,881,477,000	239,036,599	0	239,036,599	4.9	4,642,440,401
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,855,773,000	11,189,119,000	1,961,740,000	0	1,961,740,000	17.53	9,227,379,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	169,714,629,000	143,064,765,000	2,031,564,150	0	2,031,564,150	1.42	141,033,200,850
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54,603,657,000	48,516,843,000	4,297,515,541	2,089,112	4,295,426,429	8.86	44,221,416,571
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	7,123,395,000	4,934,805,000	405,688,518	0	405,688,518	8.22	4,529,116,482
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	299,085,000	268,353,348	0	268,353,348	89.72	30,731,652
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	226,745,800,000	226,502,904,000	156,847,800,000	0	156,847,800,000	69.25	69,655,104,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN JUNI 2025**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>2,254,902,610,000</b>	<b>2,194,515,689,000</b>	<b>764,565,472,415</b>	<b>1,542,653,818</b>	<b>763,022,818,597</b>	<b>34.84</b>	<b>1,431,492,870,403</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,322,301,000	139,131,063,000	9,768,403,920	0	9,768,403,920	7.02	129,362,659,080
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,200,000,000	1,102,120,000	135,821,809	0	135,821,809	12.32	966,298,191
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10,022,340,000	15,914,868,000	1,611,516,500	0	1,611,516,500	10.13	14,303,351,500
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	400,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
536111	Belanja Modal Lainnya	44,512,206,000	29,058,177,000	463,883,150	0	463,883,150	1.6	28,594,293,850
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	855,000,000	1,074,900,000	0	0	0	0	1,074,900,000
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>126,311,847,000</b>	<b>186,331,128,000</b>	<b>11,979,625,379</b>	<b>0</b>	<b>11,979,625,379</b>	<b>6.43</b>	<b>174,351,502,621</b>
	<b>JUMLAH RUPIAH MURNI</b>	<b>3,227,179,294,000</b>	<b>3,227,179,294,000</b>	<b>1,234,667,563,486</b>	<b>1,620,663,350</b>	<b>1,233,046,900,136</b>	<b>38.26</b>	<b>1,994,132,393,864</b>
<b>02</b>	<b>PINJAMAN LUAR NEGERI</b>							
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	615,276,000	615,276,000	36,085,090	0	36,085,090	5.86	579,190,910
521211	Belanja Bahan	7,923,636,000	8,389,861,000	52,200,605	0	52,200,605	0.62	8,337,660,395
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	26,830,000	26,830,000	0	0	0	0	26,830,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,169,200,000	60,234,000	0	0	0	0	60,234,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,882,372,000	3,414,828,000	0	0	0	0	3,414,828,000
522131	Belanja Jasa Konsultansi	263,549,454,000	152,416,406,000	1,958,512,270	0	1,958,512,270	1.28	150,457,893,730
522141	Belanja Sewa	22,610,020,000	15,233,364,000	304,588,000	0	304,588,000	2	14,928,776,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,196,000,000	4,412,672,000	22,500,000	0	22,500,000	0.51	4,390,172,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	201,935,628,000	411,339,554,000	666,159,609	0	666,159,609	0.16	410,673,394,391
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,769,698,000	54,862,647,000	83,053,428	0	83,053,428	0.15	54,779,593,572
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,600,000	113,060,000	1,020,000	0	1,020,000	0.9	112,040,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,978,770,000	12,273,686,000	213,300,000	0	213,300,000	1.74	12,060,386,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27,249,625,000	27,366,755,000	0	0	0	0	27,366,755,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	19,550,972,000	15,550,972,000	195,336,144	0	195,336,144	1.26	15,355,635,856
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	11,218,984,000	11,218,984,000	0	0	0	0	11,218,984,000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	64,549,484,000	162,538,782,000	0	0	0	0	162,538,782,000
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>703,332,549,000</b>	<b>879,833,911,000</b>	<b>3,532,755,146</b>	<b>0</b>	<b>3,532,755,146</b>	<b>0.4</b>	<b>876,301,155,854</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	810,323,248,000	633,821,886,000	0	0	0	0	633,821,886,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
536111	Belanja Modal Lainnya	1,640,250,000	1,640,250,000	0	0	0	0	1,640,250,000
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>813,463,498,000</b>	<b>636,962,136,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636,962,136,000</b>
	<b>JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI</b>	<b>1,516,796,047,000</b>	<b>1,516,796,047,000</b>	<b>3,532,755,146</b>	<b>0</b>	<b>3,532,755,146</b>	<b>0.23</b>	<b>1,513,263,291,854</b>
<b>04</b>	<b>PNBP</b>							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN JUNI 2025**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 25/07/25 11:22 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	70,900,000	71,740,000	0	0	0	0	71,740,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	263,100,000	263,100,000	109,625,000	0	109,625,000	41.67	153,475,000
521211	Belanja Bahan	13,666,361,000	13,633,570,000	1,554,401,390	0	1,554,401,390	11.4	12,079,168,610
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,798,276,000	3,290,176,000	1,148,065,000	0	1,148,065,000	34.89	2,142,111,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,384,801,000	3,269,585,000	337,991,631	0	337,991,631	10.34	2,931,593,369
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,400,000	31,300,000	1,325,900	0	1,325,900	4.24	29,974,100
522141	Belanja Sewa	1,408,428,000	1,438,213,000	627,931,000	0	627,931,000	43.66	810,282,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,392,733,000	10,404,833,000	788,386,000	0	788,386,000	7.58	9,616,447,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	697,212,000	536,328,000	222,220,000	0	222,220,000	41.43	314,108,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,884,348,000	8,607,518,000	976,498,219	0	976,498,219	11.34	7,631,019,781
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	668,157,000	671,263,000	68,950,000	0	68,950,000	10.27	602,313,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,612,030,000	3,606,208,000	75,460,000	0	75,460,000	2.09	3,530,748,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,878,410,000	1,720,490,000	0	0	0	0	1,720,490,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,478,021,000	688,853,000	163,835,940	0	163,835,940	23.78	525,017,060
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>48,233,177,000</b>	<b>48,233,177,000</b>	<b>6,074,690,080</b>	<b>0</b>	<b>6,074,690,080</b>	<b>12.59</b>	<b>42,158,486,920</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>
	<b>JUMLAH PNBP</b>	<b>48,353,177,000</b>	<b>48,353,177,000</b>	<b>6,074,690,080</b>	<b>0</b>	<b>6,074,690,080</b>	<b>12.56</b>	<b>42,278,486,920</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4,792,328,518,000</b>	<b>4,792,328,518,000</b>	<b>1,244,275,008,712</b>	<b>1,620,663,350</b>	<b>1,242,654,345,362</b>	<b>25.96</b>	<b>3,549,674,172,638</b>



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK  
PENDAPATAN / AKUN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600	0	888,600	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	250,750,000	650,322,034	0	650,322,034	259.35
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,206,092	0	222,206,092	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,049,796,000	2,314,610,125	0	2,314,610,125	220.48
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	117,025,000	51,802,470	0	51,802,470	44.27
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>	<b>1,417,571,000</b>	<b>3,239,829,321</b>	<b>0</b>	<b>3,239,829,321</b>	<b>228.55</b>
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	19,000,000	24,475,000	0	24,475,000	128.82
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253</b>	<b>19,000,000</b>	<b>24,475,000</b>	<b>0</b>	<b>24,475,000</b>	<b>128.82</b>
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	200,000,000	135,250,000	0	135,250,000	67.62
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16,033,260,000	8,902,439,000	0	8,902,439,000	55.52
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	291,846,000	273,650,000	0	273,650,000	93.77
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	42,193,657,000	8,180,677,000	0	8,180,677,000	19.39
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1,689,105,000	807,975,000	0	807,975,000	47.83
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254</b>	<b>60,407,868,000</b>	<b>18,299,991,000</b>	<b>0</b>	<b>18,299,991,000</b>	<b>30.29</b>
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	464,890,871,000	497,391,453,000	0	497,391,453,000	106.99
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256</b>	<b>464,890,871,000</b>	<b>497,391,453,000</b>	<b>0</b>	<b>497,391,453,000</b>	<b>106.99</b>
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	606,431,857	0	606,431,857	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	606,431,857	0	606,431,857	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	114,596,326	0	114,596,326	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,232,740,936	0	36,232,740,936	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,209,402,924	0	1,209,402,924	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,041,588	0	21,041,588	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	37,577,781,774	0	37,577,781,774	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	526,735,310,000	557,149,961,952	0	557,149,961,952	105.77
	JUMLAH PENDAPATAN	526,735,310,000	557,149,961,952	0	557,149,961,952	105.77



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT ESELON I / WILAYAH /  
SATUAN KERJA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
<b>01</b>	<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>					
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA					
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1,448,052,000	828,216,130	0	828,216,130	57.2
	JUMLAH PENDAPATAN 010010100KP BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	1,448,052,000	828,216,130	0	828,216,130	57.2
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT					
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	16,665,514,000	12,034,947,907	0	12,034,947,907	72.21
	JUMLAH PENDAPATAN 010010200KP BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	16,665,514,000	12,034,947,907	0	12,034,947,907	72.21
010010800KD	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT					
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	0	25,000,000	0	25,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010010800KD BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	0	25,000,000	0	25,000,000	
010011300KD	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	0	10,108,250	0	10,108,250	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011300KD BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	0	10,108,250	0	10,108,250	
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA					
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	0	257,970,010	0	257,970,010	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011700KD BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	257,970,010	0	257,970,010	
010011900KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	0	168,153,733	0	168,153,733	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011900KD BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	168,153,733	0	168,153,733	
010012300KD	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	0	424,564,180	0	424,564,180	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012300KD BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	0	424,564,180	0	424,564,180	
010012500KD	BA(010) ES1(01) PAPUA					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	0	187,434,040	0	187,434,040	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012500KD BA(010) ES1(01) PAPUA	0	187,434,040	0	187,434,040	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	22,907,500	0	22,907,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	22,907,500	0	22,907,500	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	18,113,566,000	13,959,301,750	0	13,959,301,750	77.07
<b>02</b>	<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>					
010020100KP	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA					
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	0	41,916,309	0	41,916,309	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010020100KP BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	0	41,916,309	0	41,916,309	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	41,916,309	0	41,916,309	
<b>03</b>	<b>DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA					
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	272,239,102	0	272,239,102	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010030100KP BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	0	272,239,102	0	272,239,102	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	272,239,102	0	272,239,102	
<b>04</b>	<b>DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b>					
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA					
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	232,852,020	0	232,852,020	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010040100KP BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	0	232,852,020	0	232,852,020	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	25,984	0	25,984	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	25,984	0	25,984	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	232,878,004	0	232,878,004	
<b>05</b>	<b>DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA</b>					
010050100KP 027753	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	198,786,000	21,927,434,469	0	21,927,434,469	11030.67
	JUMLAH PENDAPATAN 010050100KP BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	198,786,000	21,927,434,469	0	21,927,434,469	11,030.67
010050400KD 028449	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	172,630,000	29,117,000	0	29,117,000	16.87
	JUMLAH PENDAPATAN 010050400KD BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	172,630,000	29,117,000	0	29,117,000	16.87
010050500KD 028830	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	190,352,000	64,948,000	0	64,948,000	34.12
	JUMLAH PENDAPATAN 010050500KD BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	190,352,000	64,948,000	0	64,948,000	34.12
010051200KD 613629	BA(010) ES1(05) LAMPUNG BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	171,630,000	63,184,300	0	63,184,300	36.81
	JUMLAH PENDAPATAN 010051200KD BA(010) ES1(05) LAMPUNG	171,630,000	63,184,300	0	63,184,300	36.81
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	733,398,000	22,084,683,769	0	22,084,683,769	3,011.28
<b>06</b>	<b>DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
010060100KP 039729	Kode UAPPAW Tidak Ada DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	2,087,862,448	0	2,087,862,448	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010060100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	2,087,862,448	0	2,087,862,448	
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	2,087,862,448	0	2,087,862,448	
<b>07</b>	<b>DITJEN OTONOMI DAERAH</b>					
010070100KP 621892	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA DITJEN OTONOMI DAERAH	0	33,541,454	0	33,541,454	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 010070100KP BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	0	33,541,454	0	33,541,454	
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	33,541,454	0	33,541,454	
<b>08</b>	<b>DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA					
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	464,890,871,000	508,653,970,697	0	508,653,970,697	109.41
	JUMLAH PENDAPATAN 010080100KP BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	464,890,871,000	508,653,970,697	0	508,653,970,697	109.41
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	464,890,871,000	508,653,970,697	0	508,653,970,697	109.41
<b>09</b>	<b>DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH</b>					
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0	15,910,505	0	15,910,505	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010090100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	15,910,505	0	15,910,505	
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	15,910,505	0	15,910,505	
<b>11</b>	<b>BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI</b>					
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	34,583,062	0	34,583,062	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010110100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	34,583,062	0	34,583,062	
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	34,583,062	0	34,583,062	
<b>12</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21,476,520,000	2,882,344,661	0	2,882,344,661	13.42
	JUMLAH PENDAPATAN 010120100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	21,476,520,000	2,882,344,661	0	2,882,344,661	13.42
010120200KD	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT					
403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8,428,985,000	1,703,242,016	0	1,703,242,016	20.21

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 010120200KD BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	8,428,985,000	1,703,242,016	0	1,703,242,016	20.21
010120400KD	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA					
027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	5,169,260,000	486,888,438	0	486,888,438	9.42
	JUMLAH PENDAPATAN 010120400KD BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	5,169,260,000	486,888,438	0	486,888,438	9.42
010120800KD	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT					
506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	2,523,160,000	435,334,471	0	435,334,471	17.25
	JUMLAH PENDAPATAN 010120800KD BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	2,523,160,000	435,334,471	0	435,334,471	17.25
010121900KD	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN					
027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	4,522,050,000	3,817,777,672	0	3,817,777,672	84.43
	JUMLAH PENDAPATAN 010121900KD BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	4,522,050,000	3,817,777,672	0	3,817,777,672	84.43
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	877,500,000	407,487,594	0	407,487,594	46.44
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	877,500,000	407,487,594	0	407,487,594	46.44
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	42,997,475,000	9,733,074,852	0	9,733,074,852	22.64
	JUMLAH PENDAPATAN	526,735,310,000	557,149,961,952	0	557,149,961,952	105.77



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I / AKUN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	185,750,000	553,458,034	0	553,458,034	297.96
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	875,010,000	509,291,150	0	509,291,150	58.2
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	4,100,000	0	4,100,000	0
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	200,000,000	135,250,000	0	135,250,000	67.63
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16,033,260,000	8,902,439,000	0	8,902,439,000	55.52
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	291,846,000	273,650,000	0	273,650,000	93.77
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	527,700,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	10,000,000	0	10,000,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	85,531,165	0	85,531,165	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,441,582,498	0	2,441,582,498	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,043,999,903	0	1,043,999,903	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>	<b>18,113,566,000</b>	<b>13,959,301,750</b>	<b>0</b>	<b>13,959,301,750</b>	<b>77.07</b>
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600	0	888,600	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	40,988,000	0	40,988,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	787	0	787	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38,922	0	38,922	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>	<b>0</b>	<b>41,916,309</b>	<b>0</b>	<b>41,916,309</b>	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	222,206,092	0	222,206,092	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	48,242,672	0	48,242,672	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,790,338	0	1,790,338	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>0</b>	<b>272,239,102</b>	<b>0</b>	<b>272,239,102</b>	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,692,679	0	2,692,679	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,949,235	0	3,949,235	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	226,210,106	0	226,210,106	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	25,984	0	25,984	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI</b>	<b>0</b>	<b>232,878,004</b>	<b>0</b>	<b>232,878,004</b>	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	65,000,000	8,420,000	0	8,420,000	12.95
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	174,786,000	141,269,300	0	141,269,300	80.82
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	17,772,000	0	0	0	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	19,000,000	20,375,000	0	20,375,000	107.24
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	456,840,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000	0	185,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,900,416,541	0	21,900,416,541	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,017,928	0	14,017,928	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>733,398,000</b>	<b>22,084,683,769</b>	<b>0</b>	<b>22,084,683,769</b>	<b>3,011.28</b>
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	88,444,000	0	88,444,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,095,801,000	0	1,095,801,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	602,155,178	0	602,155,178	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	301,461,271	0	301,461,271	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	999	0	999	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>2,087,862,448</b>	<b>0</b>	<b>2,087,862,448</b>	
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	33,541,454	0	33,541,454	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	33,541,454	0	33,541,454	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	464,890,871,000	497,391,453,000	0	497,391,453,000	106.99
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,584,000	0	1,584,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,420,000	0	1,420,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,124,273,157	0	11,124,273,157	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	135,240,540	0	135,240,540	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN	464,890,871,000	508,653,970,697	0	508,653,970,697	109.41
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,445,705	0	2,445,705	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,067,400	0	1,067,400	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,397,400	0	12,397,400	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	15,910,505	0	15,910,505	
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,560,582	0	8,560,582	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26,022,480	0	26,022,480	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	0	34,583,062	0	34,583,062	
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	527,260,675	0	527,260,675	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	99,253,000	51,802,470	0	51,802,470	52.19
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	41,736,817,000	8,180,677,000	0	8,180,677,000	19.6
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1,161,405,000	807,975,000	0	807,975,000	69.57
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,503,852	0	12,503,852	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 25/07/25 11:23 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	129,884,435	0	129,884,435	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,956,815	0	1,956,815	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,014,605	0	21,014,605	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA</b>	<b>42,997,475,000</b>	<b>9,733,074,852</b>	<b>0</b>	<b>9,733,074,852</b>	<b>22.64</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>526,735,310,000</b>	<b>557,149,961,952</b>	<b>0</b>	<b>557,149,961,952</b>	<b>105.77</b>



**KERTAS KERJA TELAAH  
LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024 AUDITED**

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)**  
**SEMESTER I TA 2025**

Kode dan Nama K/L : (010) Kementerian Dalam Negeri

**KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada

**KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI**

Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama

*Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.*

**KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI**

Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama

**PENGECEKAN PADA MONSAKTI**

To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	v		Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (lika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	v		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak

*Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah*

<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNPB		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
<b>Rekon Internal</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	v		Tidak
<b>Daftar MONSAKTI</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	v		Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruwal		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiproskal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiproskal)		v	Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya

Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	639.779.163		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	v		Tidak
<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	v		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	v		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruai?	-	-	Ya
<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	-	-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	N/A	N/A	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		v	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	v		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak

	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Tidak
<b>TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	N/A		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya
<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	v		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	v		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak

## LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

- 1 Berdasarkan data pada Aplikasi MonSAKTI terdapat Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51XXXX untuk periode Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:
  - a. Terdapat Pagu Minus akun Belanja Tunjangan Struktural PNS (5111123) pada satker IPDN Kampus Sumatera Barat yang telah diajukan revisi anggaran dan Ditjen Polpum dikarenakan proses revisi penambahan pagu anggaran akan dilakukan pada periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025.
  - b. Terdapat Pagu Minus pada satker DKPP (483005), IPDN Kampus Sulawesi Selatan (677024), IPDN Kampus Sumatera Barat (677045), IPDN Kampus Kalimantan Barat (683070), IPDN Kampus Papua (683070), Ditjen Polpum (027210), Ditjen Bina Adwil (027486), Ditjen Bina Pemdes (027753), Balai Pemdes Yogyakarta (028449), BSKDN (403222), PPSDM Regional Bandung (403216), dan PPSDM Regional Bukittinggi (506137) pada akun Tunjangan PPH PNS (511125) disebabkan karena belum melakukan revisi .
  - c. Pada satker DKPP, terdapat Pagu Minus SP2D pada akun Tunjangan Umum PNS (511151), dikarenakan adanya penambahan 6 pegawai alumni IPDN yang menduduki jabatan pelaksana, serta penarikan tunjangan PPH 21 untuk THR dan Gaji 13 Tahun 2025 yang cukup signifikan dari penarikan bulanan. Untuk pagu minus tersebut selanjutnya akan dilakukan revisi oleh bagian Perencanaan.
  - d. Terdapat Pagu Minus sebesar Rp139.121 pada akun Belanja Tunjangan Anak PPPK (511622) pada satker IPDN Kampus Sumatera Barat. Adapun transaksi pagu minus tersebut telah diajukan usulan revisi anggaran Nomor 900/123/IPDN.22 Tanggal 15 Juli 2025.
  - e. Pagu Minus pada akun belanja pegawai (511625) hal ini disebabkan karena pada TA.2025 terdapat kenaikan pangkat, gaji berkala, dan tunjangan pada Pegawai BSKDN (sudah dilakukan pengajuan revisi ke bagian perencanaan dan akan diproses di bulan Juli Tahun 2025).
- 2 Terdapat Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB untuk periode pelaporan Semester I Tahun 2025 pada Satker Ditjen Bina Pemdes pada akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) sebesar 45.000.000. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB disebabkan oleh kesalahan pencatatan di Modul Komitmen yang seharusnya dicatat sebagai persediaan dengan kode barang (1010501004). Terhadap kesalahan tersebut sudah dilakukan perbaikan pada Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan.
- 3 Terdapat selisih rekonsiliasi internal sebesar Rp2.621.139 yang terdapat pada satker IPDN Jatinangor dan ditjen Dukcapil yang disebabkan adanya pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai dan BPSDM yang berasal dari pembayaran sewa rumah dinas melalui potongan SPM.
- 4 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp1.209.402.929 yang terdapat pada 8 satker telah dilakukan koreksi aset tetap, kecuali satker IPDN Kampus Sulut, Ditjen Polpum, Ditjen Dukcapil, Ditjen Bina Keuda, dan PPSDM Regional Bandung karena sudah dilakukan tuup buku modul Aset Tetap periode bulan Juni lebih awal.
- 5 Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp120.026.200.234,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp120.665.979.397,00 menyebabkan terdapat selisih secara neto sebesar Rp639.779.163,00. Transfer masuk berupa Software sebesar Rp1.877.912.555,00 dan Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp1.578.735.442,00) pada satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Transfer masuk berupa Software sebesar Rp2.724.816.410,00 dan Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp2.384.214.360,00) pada satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (027486) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
- 6 Terdapat selisih transaksi resiprokal pada akun Belanja-PNBP sebesar Rp6.790.000 yang tercatat pada Satker Ditjen Bina Bangda. Selisih tersebut disebabkan oleh transaksi pembayaran kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Diklat Arsiparis, yang mekanisme belanjanya melalui Uang Persediaan (UP), dimana SP2D baru diterbitkan pada bulan Juli, sehingga pencatatan belanja dan eliminasi transaksi resiprokal antar satker baru dapat dilakukan pada bulan Juli tersebut. Akibatnya, hingga akhir Juni, masih terdapat selisih transaksi resiprokal yang tersaji dalam laporan keuangan.

Diperiksa oleh:  
Kepala Subbagian Akuntansi dan  
Pelaporan II,



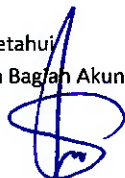
Ady Candra Try Laksana, S.STP  
NIP. 19900601 201010 1 005

Jakarta, 28 Juli 2025  
Penelaah,



Cicilia Eka Yunita, A.Md.Ak  
NIP. 20000609 202302 2 004

Mengetahui  
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan,



I Nengah Sandiyasa, M.Ak  
NIP. 19741008 200604 1 001



**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
SEMESTER I TAHUN 2025**